



RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020 - 2024



**RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020 - 2024**



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementerian Agama) disusun berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 dan berpedoman pada RPJPN tahun 2005-2025, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan serta aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Renstra Kementerian Agama menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 ini memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan strategi Kementerian Agama selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian RPJMN tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Agama ini telah mengacu pada 4 (empat) pilar RPJMN ke IV tahun 2020-2024, yang mana keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Prioritas Nasional mulai dari Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 agar menjadi rujukan utama dalam penyusunan Renstra serta acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja Kementerian Agama dalam periode lima tahun ke depan. Renstra Kementerian Agama ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan tahun 2024.

Jakarta, 30 Juni 2020
Menteri Agama

ttd.

Fachrul Razi





**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2020- 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian Agama yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melakukan perencanaan program atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Narasi Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Matriks Kerangka Regulasi, tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Matriks Kinerja dan Pendanaan, tercantum dalam Lampiran III;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 680 TANGGAL 30 JUNI 2020

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FACHRUL RAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kantor Pusat Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



M. Mudhofir, M.Si

NIP. 1962081019890310001

Daftar Isi

Kata Pengantar	2	1.1.3.3 Pelayanan Administrasi Keagamaan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan	30
Peraturan Menteri Agama	3	1.1.3.4 Bimbingan Perkawinan dan Keluarga	31
Daftar Isi	5	1.1.3.5 Layanan Produk Halal	32
Daftar Gambar	7	1.1.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan	35
Daftar Tabel	8	1.1.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	36
Daftar Singkatan	8	1.1.6 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama	40

BAB I PENDAHULUAN

10

1.1 Kondisi Umum	11	1.1.6.1 Opini Laporan Keuangan	40
1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	12	1.1.6.2 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	41
1.1.1.1 Peningkatan Kualitas Tenaga Penyuluh Agama	14	1.1.6.3 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	42
1.1.1.2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	15	1.1.7 Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan	42
1.1.1.3 Penguatan Penyebaran Pesan-Pesan Keagamaan	18	1.1.8 Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	45
1.1.1.4 Pemberdayaan Lembaga Keagamaan	19	1.2 Potensi dan Permasalahan	48
1.1.2 Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis	20	1.2.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	48
1.1.2.1 Optimalisasi dan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama	24	1.2.2 Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis	50
1.1.2.2 Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama	24	1.2.3 Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata	52
1.1.2.3 Pemberdayaan FKUB, Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media	25	1.2.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Perbaikan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan	54
1.1.2.4 Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama	25	1.2.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	54
1.1.2.5 Peningkatan Pemahaman Agama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan	27	1.2.6 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	57
1.1.3 Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata	28	1.2.7 Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan	58
1.1.3.1 Penyediaan Kitab Suci	28	1.2.8 Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	61
1.1.3.2 Pengembangan Rumah Ibadah	29		

Daftar Isi

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA

64

- 2.1 Visi Kementerian Agama 65
- 2.2 Misi Kementerian Agama 66
- 2.3 Tujuan Kementerian Agama 68
- 2.4 Sasaran Strategis Kementerian Agama 68
- 2.5 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis 70
- 2.6 Nilai-nilai Kementerian Agama 77

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

80

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 81
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama 89
- 3.3 Kerangka Regulasi 95
- 3.4 Kerangka Kelembagaan 97

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

100

- 4.1 Target Kinerja 101
- 4.2 Kerangka Pendanaan 119

BAB V PENUTUP

122

LAMPIRAN II KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN AGAMA

125

LAMPIRAN III Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

135

LAMPIRAN III Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

213

LAMPIRAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024

305



Daftar Gambar

No	Keterangan	Hal
Gambar 1.1	Grafik Indeks Kesalehan Sosial per Kelompok Umat Beragama Tahun 2019	13
Gambar 1.2	Jumlah Penduduk Indonesia, Jumlah Penyuluh Agama, dan Rasionya Menurut Agama	14
Gambar 1.3	Penampilan Peserta Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019	17
Gambar 1.4	Muatan Penguatan Pengarusutamaan Moderasi Beragama	18
Gambar 1.5	Pemberian Bantuan Lembaga Keagamaan Tahun 2015-2019	20
Gambar 1.6	Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015-2019	21
Gambar 1.7	Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019	22
Gambar 1.8	Kegiatan Dialog <i>Interfaith Scholarship</i> di Candi Mendut Tahun 2018	26
Gambar 1.9	Penyediaan Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tahun 2015-2019	28
Gambar 1.10	Pemberian Bantuan Rumah Ibadah Tahun 2015-2019	29
Gambar 1.11	Nilai Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA Tahun 2019	30
Gambar 1.12	Jumlah Dana Zakat dan Tanah Wakaf Bersertifikat yang Dikelola Tahun 2015-2019	35
Gambar 1.13	Kegiatan Kerja sama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	37
Gambar 1.14	Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi Tahun 2015-2019	38
Gambar 1.15	Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri Tahun 2017-2019	38
Gambar 1.16	Grafik Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2019	39
Gambar 1.17	Grafik Capaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015-2019	41
Gambar 1.18	Grafik Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019	42
Gambar 1.19	Grafik APK RA/Pratama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	44
Gambar 1.20	Grafik APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019	44
Gambar 1.21	Grafik APK MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	44
Gambar 1.22	Grafik APK MA/Ulya/SMTK/SMAC/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	44
Gambar 1.23	Grafik APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019	44
Gambar 1.24	Grafik APM MTs/Wustha/SMPTK Tahun 2015-2019	44
Gambar 1.25	Grafik APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	45
Gambar 1.26	Grafik APK PTK/Ma'had Aly Tahun 2015-2019	45
Gambar 1.27	Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MTs/SMPTK Tahun 2015-2019	46
Gambar 1.28	Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MA/SMTK/SMAC Tahun 2015-2019	46
Gambar 1.29	Capaian Indeks Integritas Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2017-2019	47
Gambar 1.30	Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019	56
Gambar 1.31	Siswa MI Merasugun Asso Walesi, Papua	60
Gambar 1.32	Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019	63
Gambar 2.1	Hubungan antara Misi Kementerian Agama dengan Misi Presiden-Wakil Presiden	67
Gambar 2.2	Pelaksanaan Upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Tahun 2015	78
Gambar 3.1	Visi-Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	82
Gambar 3.2	Program dan Kegiatan Prioritas yang menjadi tanggungjawab Kementerian Agama	83
Gambar 3.3	Program Prioritas Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024	88
Gambar 3.4	Arah Kerangka Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	99

Daftar Tabel

No	Keterangan	Hal
Tabel 1.1	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019	15
Tabel 1.2	Capaian Kinerja Bimbingan Perkawinan Tahun 2017-2019	31
Tabel 1.3	Capaian Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Tahun 2015-2019	32
Tabel 1.4	Kerja sama BPJPH dengan Kementerian/Lembaga	33
Tabel 1.5	Jumlah PPIU yang ditetapkan izin operasional	40
Tabel 1.6	Perkembangan Predikat Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2015-2019	41
Tabel 1.7	Jenis Pendidikan, Unit Eselon I, Jenis Lembaga, Jumlah Lembaga, dan Jumlah Peserta Didik Tahun 2019	43
Tabel 1.8	Hasil Tes Kemampuan Berpikir dan Literasi Siswa Madrasah	47
Tabel 2.1	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024	70
Tabel 4.1	Indikasi Kebutuhan Pendanaan 12 Program Kementerian Agama 2020-2024	120
Tabel 4.2	Indikasi Kebutuhan Pendanaan 5 Program Kementerian Agama 2020-2024	121

Daftar Singkatan

AC	<i>Air Conditioner</i>
AKSI	Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATS	Anak Tidak Sekolah
BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
BAN-SM	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional
BIDIKMISI	Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi
BIMAS	Bimbingan Masyarakat
BIMWIN	Bimbingan Perkawinan
BLU	Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
BWI	Badan Wakaf Indonesia
CIDA-SILE	<i>Canadian International Development Agency - Supporting Islamic Leadership in Indonesia</i>
COVID	<i>Corona Virus Disease</i>

DAPODIK	Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah
DITJEN	Direktorat Jenderal
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
GNHR	Gerakan Nasional Hidup Rukun
IAKN	Institut Agama Kristen Negeri
ICD	<i>Initiative for Community Development</i>
IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKSP	Indikator Kinerja Sasaran Program
IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
IPA	Ilmu Pengetahuan Alam
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
ISESCO	<i>Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
JPH	Jaminan Produk Halal
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KDP	Konstruksi Dalam Pekerjaan
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KKB	Kesepakatan Kerja Bersama
KPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
KUB	Kerukunan Umat Beragama
KUH	Kantor Urusan Haji
KWI	Konferensi Waligereja Indonesia
LAM	Lembaga Akreditasi Mandiri

LEMSAKTI	Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia
LIPIA	Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab
LKKA	Laporan Keuangan Kementerian Agama
LPH	Lembaga Pemeriksa Halal
LPPOM	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik
LPTK	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
MA	Madrasah Aliyah
MABIMS	Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura
MATAKIN	Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MoS	<i>Mora one Search</i>
MTQ	Musabaqah Tilawatil Qur'an
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MUI	Majelis Ulama Indonesia
MWL	<i>The Muslim World League</i>
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OKI	Organisasi Kerja sama Islam
Ortala	Organisasi dan Tata Laksana
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDF	Pendidikan Diniyah Formal
PERPRES	Peraturan Presiden
PESPARANI	Pesta Paduan Suara Gerejani
PESPARAWI	Pesta Paduan Suara Gerejawi
PGI	Persekutuan Gereja Indonesia
PHDI	Parisada Hindu Dharma Indonesia
PIHK	Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
Polhukhankam	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
PISA	<i>Program For International Student Assesment</i>
PKG	Penilaian Kinerja Guru
PMA	Peraturan Menteri Agama
PNBP	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPG	Pendidikan Profesi Guru
PPIU	Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PTK	Perguruan Tinggi Keagamaan
PTKS	Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
PTKB	Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha
PTKH	Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu
PTKIN	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
PTKIS	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta
PTN-BH	Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTU	Perguruan Tinggi Umum
RA	Raudhatul Athfal

RAN	Rencana Aksi Nasional
RB	Reformasi Birokrasi
RENJA	Rencana Kerja
RKA-K/L	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKMA	Rancangan Keputusan Menteri Agama
Rperpres	Rancangan Peraturan Presiden
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPMA	Rancangan Peraturan Menteri Agama
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RUU	Rancangan Undang-undang
S1	Strata-1
S3	Strata-3
SARA	Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
SBPAC	<i>Southern Border Provinces Administration Centre</i>
SD	Sekolah Dasar
SDTK	Sekolah Dasar Teologi Kristen
Setjen	Sekretariat Jenderal
SISKOHAT	Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu
SMAK	Sekolah Menengah Agama Kristen
SMAK	Sekolah Menengah Agama Katolik
SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
SMTK	Sekolah Menengah Teologi Kristen
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SOP	Standar Operasional Prosedur
SOM-MABIMS	<i>Senior Official Meeting (SOM)</i> Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal
SS	Sasaran Strategis
STAKN	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
STQ	Seleksi Tilawatil Qur'an
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TK	Taman Kanak-Kanak
TKB	Tes Kompetensi Bidang
TKD	Tes Kompetensi Dasar
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
TMP	Tidak Menyatakan Pendapat
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TV	Televisi
UASBN	Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional
UMBN	Ujian Madrasah Berstandar Nasional
UN	Ujian Nasional
WAJAR	Wajib Belajar Pendidikan Dasar
DIKDAS	
WALUBI	Perwakilan Umat Buddha Indonesia
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
WTP DPP	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
3T	Tertinggal, Terdepan, Terluar

BAB

1

PENDAHULUAN



Pada era **disruptif** saat ini dan dalam perkembangannya di masa yang akan datang, peran **Kementerian Agama** memiliki beberapa nilai strategis keagamaan bagi **pembangunan nasional** untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, pendidikan karakter, budaya menebar manfaat dan kedamaian.



Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementerian Agama) periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kementerian Agama terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama dalam lima tahun terakhir dan berbagai *FGD* yang diselenggarakan di pusat dan daerah. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kementerian Agama pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kementerian Agama periode 2020-2024.

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum dari Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kementerian Agama pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu: taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera.



Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kementerian Agama telah menyusun tujuh misi yang mendukungnya, yaitu:

1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. memantapkan kerukunan intra dan antarumat beragama;
3. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; dan
7. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk tujuan guna memudahkan realisasi dan pencapaiannya, yaitu:

1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

1.1.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Kebijakan tentang kesalehan sosial menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antarmanusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

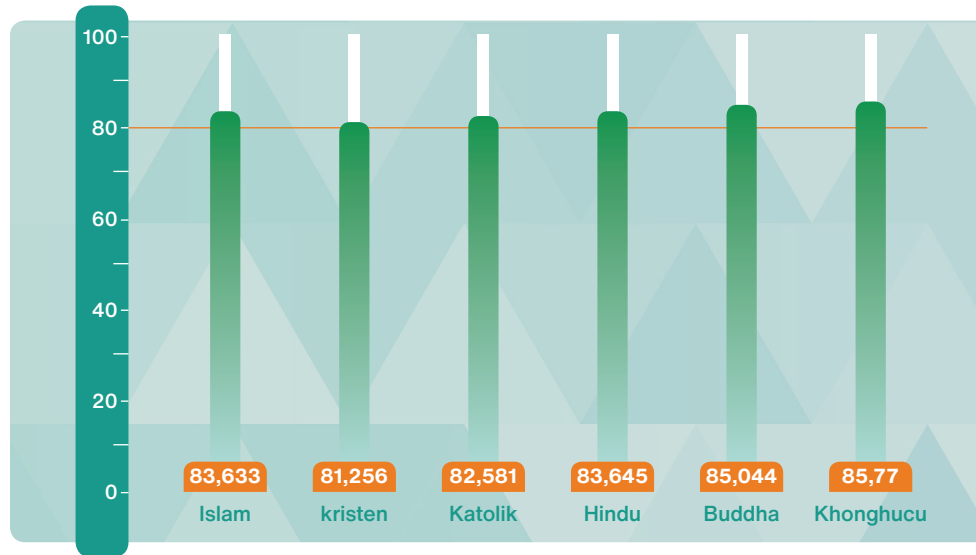
Penetapan sampel untuk mengukur IKS menggunakan *stratified clustered sampling* secara terbatas, yang kemudian digeneralisasikan bagi populasi umat beragama berdasarkan agama secara nasional. *Stratified sampling*-nya dilakukan dengan menetapkan lokasi pengambilan *sample* umat beragama di rumah ibadah, yang dianggap dapat menggambarkan tingkat tinggi rendahnya kualitas ibadah ritualnya. Hasil pengukuran IKS ini dianggap merupakan dampak dari pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama melalui Bimbingan Masyarakat Agama bagi semua agama yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap sosial keagamaannya, dengan tidak mengesampingkan kemungkinan adanya faktor eksternal dan variabel lain yang memengaruhinya.

IKS Tahun 2019 telah mencapai 83,58 dari skala 100, kenaikan sebesar 9,8 persen dari tahun sebelumnya (75,39). Nilai indikator yang paling tinggi adalah dimensi etika dan budi pekerti, sedangkan yang terendah adalah melestarikan lingkungan. Faktor-faktor yang signifikan terhadap nilai IKS Tahun 2019 adalah kesalehan ritual (saleh individual), habituasi



atau pembiasaan di lingkungan rumah, pengetahuan tentang kesalehan sosial, dan program dan kegiatan penyuluhan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Agama. Habituaasi memiliki skor dan korelasi yang cukup kuat, pembiasaan nilai kesalehan di lingkungan keluarga terbukti memberi nilai yang tinggi, sehingga perlu pelestarian kebiasaan tersebut.

Variasi IKS pada masing-masing kelompok pemeluk agama dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama 2019

Gambar 1.1
Grafik Indeks Kesalehan Sosial per Kelompok Umat Beragama
Tahun 2019

Tingginya perolehan IKS ini dipengaruhi oleh peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, penguatan penyebaran pesan-pesan keagamaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan, yang telah diprogramkan pada Renstra sebelumnya, didukung dengan berbagai kegiatan bimbingan dan fasilitasi keagamaan sebagai berikut:

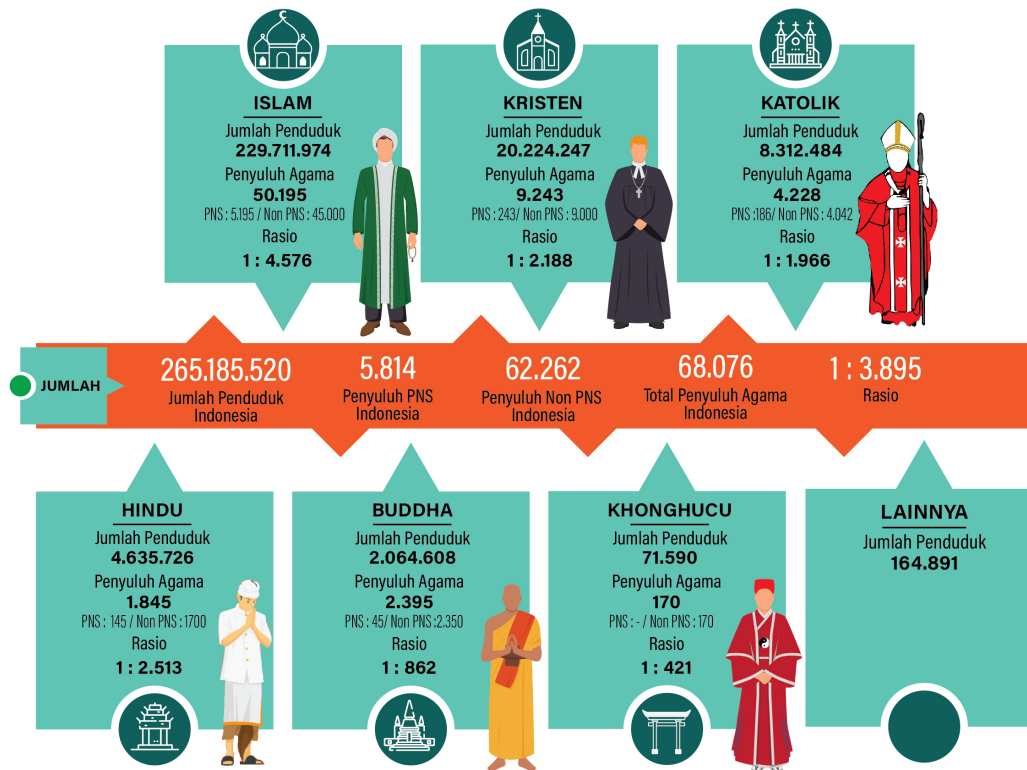
- silaturahmi antarpenyuluh agama dengan menyelenggarakan Sarapan Bersama Penyuluh (SAPA);
- silaturahmi antarlembaga yang dikenal dengan Silaturahmi Lembaga Keagamaan (SALAM);
- diversifikasi sasaran penyuluhan, diutamakan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar;
- pengembangan Sistem Informasi Keagamaan seperti Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS); dan
- pembinaan lembaga keagamaan termasuk majelis taklim.



1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Tenaga Penyuluh Agama

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kementerian Agama telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama

sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kementerian Agama berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui SAPA.



Sumber : 1. Jumlah Penduduk dari Kementerian Dalam Negeri, 2018
2. Jumlah Penyuluh Agama dari Biro Perencanaan, Kementerian Agama 2019

Gambar 1.2
Jumlah Penduduk Indonesia, Jumlah Penyuluh Agama, dan Rasionya Menurut Agama



Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada tabel di atas di mana 1 orang penyuluh agama harus melayani 3.895 umat beragama secara rata-rata nasional, sehingga Kementerian Agama terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

1.1.1.2. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan telah berhasil menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Dukungan Kementerian Agama berupa bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan hari besar keagamaan dan penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama, seperti MTQ, STQ, PESPARAWI, PESPARANI, Utsawa Dharma Gita, Swayamwara Tripitaka Gatha, Sippa Dhamma Samajja dan Mahaniti Loka Dhamma. Di samping itu, berbagai peringatan Hari Besar Keagamaan pada Tingkat Nasional dan Festival Seni Budaya telah diselenggarakan, bekerja sama dengan lembaga seni dan pemerintah provinsi/daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019

No.	Unit Organisasi	Kegiatan Keagamaan	Volume Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	Ditjen Bimas Islam	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	2 kali	2016 (Nusa Tenggara Barat) 2018 (Sumatera Utara)
		Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	3 kali	2015 (DKI Jakarta) 2017 (Kalimantan Utara) 2019 (Kalimantan Barat)
		Hari Besar Islam Tingkat Kenegaraan		
		• Isra Mi'raj	5 kali	2015 (Istana Jakarta) 2016 (Istana Jakarta) 2017 (PP. Hikamussalafiyah Purwakarta) 2018 (Istana Bogor) 2019 (Sukoharjo)
		• Maulid Nabi Muhammad SAW	5 kali	2015 (Istana Jakarta) 2016 (Istana Jakarta) 2017 (Istana Bogor) 2018 (Istana Bogor) 2019 (Istana Jakarta)
		• Nuzulul Quran	5 kali	2015 (Istana Jakarta) 2016 (Istana Jakarta) 2017 (Istana Jakarta) 2018 (Istana Jakarta) 2019 (Istana Jakarta)
		• Tahun Baru Hijriah	1 kali	2018 (Masjid Al Ikhlas) Kementerian Agama
		• Idul Adha dan Idul Fitri	10 kali	2015-2019 (Masjid Istiqlal)
		• Festival seni budaya Islam	1 kali	2019 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)



No.	Unit Organisasi	Kegiatan Keagamaan	Volume Kegiatan	Lokasi Kegiatan
2	Ditjen Bimas Kristen	Pesparawi	2 kali	2015 (Ambon) 2018 (Pontianak)
		Hari Besar Kristen		
		• Kematian Yesus Kristus (Jumat Agung)	-	-
		• Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)	-	-
		• Kenaikan Yesus Kristus	-	-
		• Kelahiran Yesus Kristus (Natal)	-	-
3	Ditjen Bimas Katolik	Hari Besar Kristen Tingkat Kenegaraan	-	-
		• Paskah Nasional	-	-
		• Natal Nasional	5 kali	2015 (Jayapura, Papua) 2016 (Kupang, Nusa Tenggara Timur) 2017 (Tondano Kab. Minahasa, Sulawesi Utara) 2018 (Pontianak, Kalimantan Barat) 2019 (Sentul, Jawa Barat)
		Pesparani	1 kali	2018 (Ambon)
		Hari Besar Katolik	-	-
		Hari Besar Katolik Tingkat Kenegaraan	5 Kali	2015 (Kupang, NTT) 2016 (Minahasa, Sulawesi Utara) 2017 (Pontianak, Kalimantan Barat) 2018 (Medan, Sumatera Utara) 2019 (Sentul, Jawa Barat)
4	Ditjen Bimas Hindu	Utsawa Dharma Gita	1 kali	2017 (Sumatera Selatan)
		Festival Seni Keagamaan Hindu	1 kali	2019 (Jawa Timur)
		Hari Besar Hindu	-	-
		Hari Besar Hindu Tingkat Kenegaraan/ Nasional (Hari Raya Nyepi(Tawur Agung))	5 kali	2015-2019 (Candi Prambanan Jawa Tengah)
5	Ditjen Bimas Buddha	Swayamwara Tripitaka Gatha (STG)	2 kali	2016 (Jakarta) 2018 (Jawa Tengah)
		Sippa Dhamma Samajja	2 kali	2015 (Jakarta) 2018 (Jakarta)
		Mahaniti Loka Dhamma	2 kali	2015 (Jakarta) 2018 (Jakarta)
		Hari Besar Buddha	-	-
		Hari Besar Buddha Tingkat Kenegaraan	-	-
6	Pusat Pendidikan dan keagamaan Khonghucu	Lomba Baca Kitab Suci	-	-
		Hari Besar Khonghucu	-	-
		Hari Besar Khonghucu Tingkat Kenegaraan	-	-

Sumber data : Biro Perencanaan, Kementerian Agama 2020



MTQ Nasional XXVII 2018 di Medan, Sumatera Utara



Pesparawi Nasional XII 2018 di Pontianak, Kalimantan Barat



Pesparani Nasional I Tahun 2018 di Ambon, Maluku



Festival Seni Keagamaan Hindu Tingkat Nasional ke-3 2019 di Surabaya



Utsawa Dharmagita VI Tahun 2017 di Palembang, Sumatera Selatan

Sumber : Biro HDI, Kementerian Agama, 2019

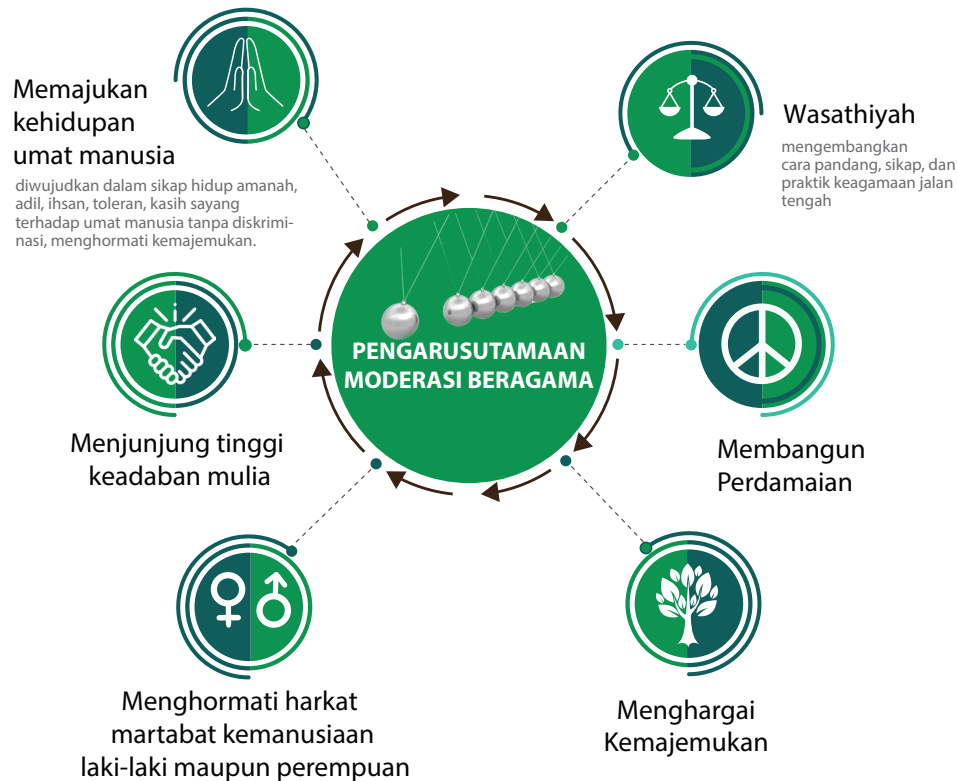
Gambar 1.3
Penampilan Peserta Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019



1.1.1.3. Penguatan Penyebaran Pesan-Pesan Keagamaan

Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dilakukan dengan menyebarluaskan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat. Peran Kementerian Agama adalah memberikan pembinaan keagamaan dengan menyiapkan materi dan mensosialisasikannya dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif. Dampaknya telah terjadi peningkatan pemahaman keagamaan pada majelis keagamaan dan kelompok sasaran.

Mulai tahun 2019, Kementerian Agama telah merintis program-program pengarusutamaan moderasi beragama yang mencerahkan dalam mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah (*wasathiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, serta menghormati kemajemukan.



Gambar 1.4
Muatan Penguatan Pengarusutamaan Moderasi Beragama



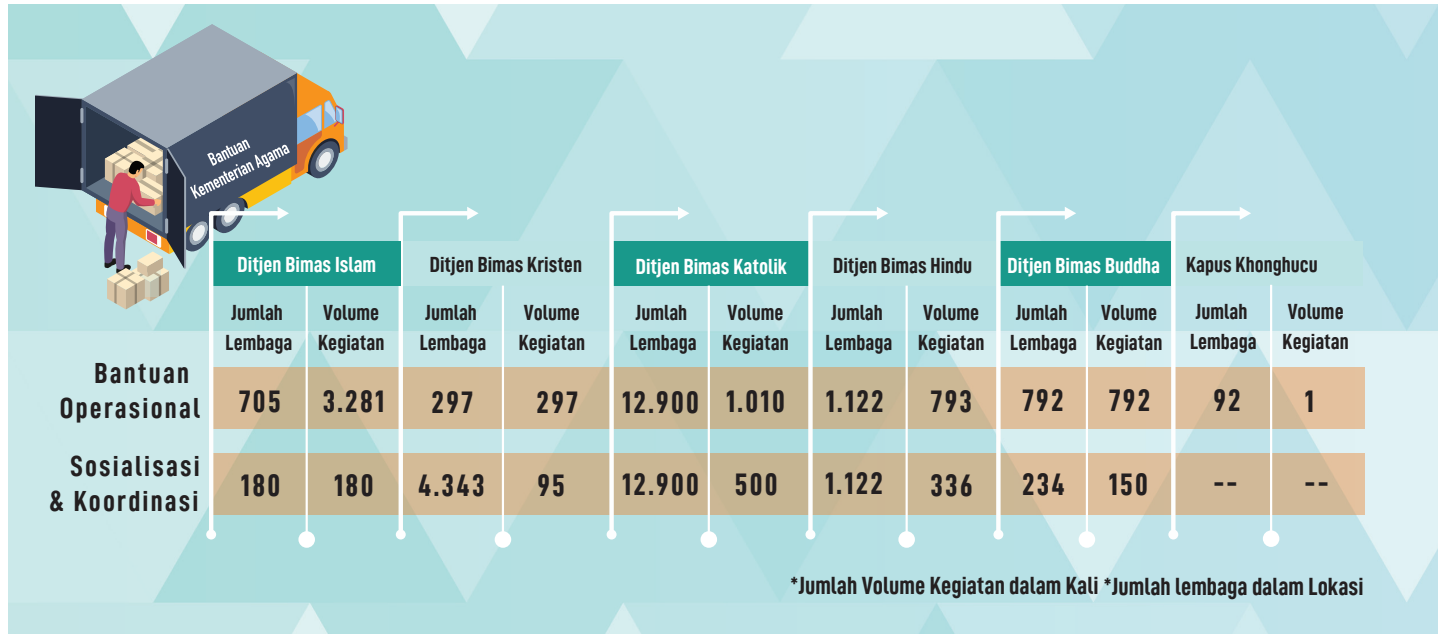
Kebijakan moderasi beragama ini tidak hanya bersifat nasional, melainkan juga internasional (bilateral, regional, dan multilateral). Kementerian Agama dengan mandatnya sebagai operator dan fasilitator pelayanan kehidupan beragama dan keagamaan yang merata dan berkualitas, berpandangan bahwa kontinuitas dan peningkatan peran strategis Indonesia serta posisi Indonesia dalam perspektif global terhadap isu-isu yang bersifat agama dan keagamaan, budaya, maupun sosial sangat penting dan perlu. Bahkan sejak era pra-kemerdekaan dan pascakemerdekaan, tokoh-tokoh *founding fathers* Indonesia sangat berperan krusial melalui pendekatan sosial keagamaan terhadap isu-isu perdamaian dan stabilitas keamanan internasional. Masukan dan kontribusi Indonesia sangat dinanti dan dihargai untuk kemajuan dan pengembangan organisasi, serta perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia.

Dalam forum-forum PBB, OKI, ISESCO, dan lain-lain, Indonesia sering mendapat prioritas pertimbangan utama untuk mengajukan usulan, pendapat, dan saran. Konsep moderasi beragama dan manajemen kerukunan umat beragama Indonesia sangat diapresiasi oleh negara-negara lain dan menjadikan Indonesia sebagai *leading sector* serta contoh riil dari profil kerukunan umat seagama dan kerukunan umat beragama di dunia. Langkah kebijakan keagamaan (*religious policy*) Kementerian Agama dalam level bilateral, regional, dan

multilateral yang sangat strategis seperti MABIMS dan SOM-MABIMS, kerja sama dengan negara-negara lain, kerja sama dengan NGO asing seperti MWL, ISESCO, Qatar Charity, ICD, SBPAC, LIPIA, CIDA-SILE, dll; sangat penting, terutama dalam rangka berkontribusi terhadap isu-isu moderasi beragama dan keyakinan, isu-isu sosial keagamaan, serta dialog keagamaan dan keyakinan, apalagi di tengah-tengah arus isu ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme. Mempertimbangkan pula bahwa salah satu fokus program Presiden RI saat ini adalah moderasi beragama dalam rangka menciptakan perdamaian dunia dan berkeadilan sosial. Keterlibatan peran strategis Indonesia melalui akselerasi kerja sama internasional dalam berbagai program strategis sosial keagamaan merupakan media *soft diplomacy* yang berkontribusi dalam peningkatan posisi tawar Indonesia di mata dunia.

1.1.1.4. Pemberdayaan Lembaga Keagamaan

Kementerian Agama telah menjalin kemitraan dengan ormas-ormas keagamaan, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, lembaga keagamaan dalam membantu penyelesaian konflik keagamaan. Kemitraan yang dilakukan mencakup orientasi, koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan. Data jumlah lembaga keagamaan yang memperoleh bantuan, jenis bantuan, dan volumenya disajikan dalam Gambar 1.5.



Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.5
Pemberian Bantuan Lembaga Keagamaan Tahun 2015-2019

Selain itu, lembaga keagamaan juga berperan dalam berbagai aktivitas keagamaan, termasuk mengembangkan inisiatif dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana umat menjadi lebih bermanfaat bagi umat dan anggota masyarakat sekitarnya. Lembaga keagamaan yang dimaksud meliputi 705 lembaga keagamaan Islam, 609 lembaga persekutuan gereja aras nasional/sinode/yayasan/perkumpulan (asosiasi keagamaan) Kristen, 13.027 lembaga keuskupan agung dan sufragan/paroki/stasi, 1.122 lembaga keagamaan Hindu, 875 lembaga keagamaan Buddha, dan 173 lembaga keagamaan Khonghucu.

Kontribusi lembaga keagamaan yang paling signifikan adalah sebagai pembina dalam bimbingan umat beragama untuk menumbuhkan kesadaran saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta

kerukunan umat beragama. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan mencakup penanganan masalah aliran keagamaan, pencegahan pornografi dan pornoaksi, pencegahan radikalisme, pembinaan organisasi keagamaan wanita, dan pengimplementasian pengarusutamaan gender.

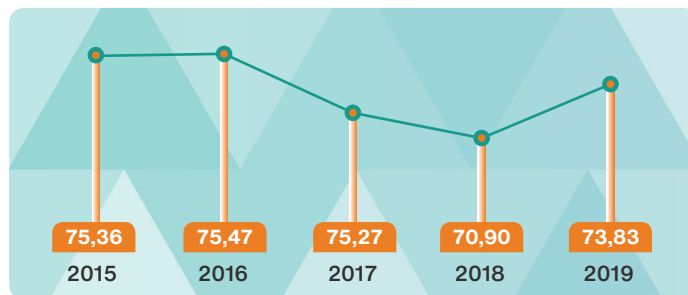
1.1.2. Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945. Sebagai simpul utama dan kata kunci terwujudnya bangunan sosial keberagaman masyarakat Indonesia, kerukunan umat beragama terus diperkuat oleh Kementerian Agama melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog, peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pembentukan desa sadar kerukunan, kerja sama nasional dan internasional.

Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB), yang mencakup tiga dimensi, yaitu: (1) toleransi; (2) kesetaraan, dan (3) kerja sama. Dalam pengukuran Indeks KUB juga diperhitungkan variabel-variabel pendidikan, pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap peraturan, rural-urban (wawasan kemajemukan) dan daerah mereka tinggal. Capaian Indeks KUB Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama, 2019

Gambar 1.6
Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama
Tahun 2015-2019

Capaian Indeks KUB cukup tinggi tetapi stagnan disekitar 73, fluktuatif selama lima tahun terakhir. Perbandingan antara capaian di tahun 2015 dengan tahun 2019 turun sebesar 1,43%. Indeks KUB ini memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia menurun walaupun masih di dalam kategori tinggi. Hal ini berarti kondisi kerukunan umat beragama berjalan

dinamis. Pada tahun 2017-2018 menjelang kontestasi Pemilu DKI Jakarta yang penuh dinamika dan aksi-aksi massa di Jakarta memengaruhi situasi politik masyarakat secara nasional. Hal ini menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kondisi kerukunan umat beragama. Fluktuasi nilai Indeks KUB pada tabel di atas lebih disebabkan oleh faktor nonkeagamaan seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik. Dalam kurun tahun-tahun tersebut merebak isu SARA, HOAX, ujaran kebencian, dan politisasi agama terjadi secara masif hampir di seluruh daerah, yang salah satunya dipicu oleh masifnya pemberitaan di media sosial yang tidak difilter atau dikontrol ulang.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara nasional capaiannya sudah tinggi, tetapi masih perlu diwujudkan program kerukunan umat beragama sampai pada tingkat daerah (pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota), bahkan jika memungkinkan dilaksanakan setingkat Kecamatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), yang memperhitungkan faktor-faktor nonkeagamaan. Oleh karena itu, untuk peningkatan kerukunan umat beragama, orientasinya tidak hanya pada aspek toleransi semata, karena sikap toleransi itu baru merupakan syarat awal. Agar kerukunan umat beragama tumbuh semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan adanya sikap kesetaraan. Selanjutnya, sikap kesetaraan harus diiringi tindakan nyata dalam bekerja sama di tengah masyarakat yang majemuk.

Kementerian Agama telah dan akan terus melakukan upaya penanganan konflik keagamaan, mengembangkan budaya damai dan toleransi, serta memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan. Kegiatan penguatan kerukunan berupa: (1) optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama; (3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama; dan (5) peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan.



2019

INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI



Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia. Untuk memperoleh Indeks tersebut, terdapat tiga dimensi yang diukur yaitu: toleransi, kesetaraan dan kerjasama diantara umat beragama. Survei oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini dilaksanakan pada 16 - 19 Mei dan 18 - 24 Juni tahun 2019.

- 36 Peneliti
- 1.360 Enumerator
- 13.600 Responden
- 136 Kabupaten/Kota
- 34 Provinsi

INDEKS KUB
2019
73,83
(Rukun Tinggi)

Metode Penarikan Sampel
pengambilan sampel secara acak berjenjang (multistage clustered random sampling)

Margin of error (MoE)
±4.8% dengan tingkat kepercayaan 95%

Quality Control
monitoring & pendampingan saat wawancara dan spot check pasca wawancara pada 20% dari total sampel

Teknik Analisis Data
data penelitian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial



SKOR INDEKS KUB DI ATAS RATA-RATA NASIONAL

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Papua Barat = 82.1 | 9. Kalimantan Barat = 76.7 |
| 2. Nusa Tenggara Timur = 81.1 | 10. Sumatera Utara = 76.3 |
| 3. Bali = 80.1 | 11. Sulawesi Selatan = 75.7 |
| 4. Sulawesi Utara = 79.9 | 12. Sulawesi Tengah = 75.0 |
| 5. Maluku = 79.4 | 13. Jawa Tengah = 74.6 |
| 6. Papua = 79.0 | 14. DI Yogyakarta = 74.2 |
| 7. Kalimantan Utara = 78.0 | 15. Sulawesi Barat = 74.1 |
| 8. Kalimantan Tengah = 77.8 | 16. Sulawesi Tenggara = 73.9 |

DIMENSI KUB 2019

- Kerjasama **75,40**
- Toleransi **72,37**
- Kesetaraan **73,72**

© Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama



SKOR INDEKS KUB DI BAWAH RATA-RATA NASIONAL

17. Jawa Timur = 73.7	23. Maluku Utara = 72.7	29. Nusa Tenggara Barat = 70.4
18. Kalimantan Timur = 73.6	24. Kalimantan Selatan = 72.5	30. Riau = 69.3
19. Gorontalo = 73.2	25. Sumatera Selatan = 72.4	31. Banten = 68.9
20. Kep. Bangka Belitung = 73.1	26. Bengkulu = 71.8	32. Jawa Barat = 68.5
21. Lampung = 73.1	27. DKI Jakarta = 71.3	33. Sumatera Barat = 64.4
22. Kepulauan Riau = 72.8	28. Jambi = 70.7	34. Aceh = 60.2

PROFIL RESPONDEN



ALUR PENARIKAN SAMPEL



FAKTOR PENENTU INDEKS

Terdapat hubungan antara pendidikan, pendapatan, dan peran Kementerian Agama terhadap sikap rukun di Indonesia pada tahun 2019.

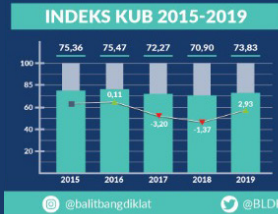
Pendidikan Keluarga Korelasi : 0,176 Skor : 81,12
Implementasi Kearifan Lokal Korelasi : 0,228 Skor : 46,99
Pendapatan Rumah Tangga Korelasi : 0,052 Skor : 2510337,76
Heterogenitas Agama Korelasi : -0,033 Skor : 86,45
Peran Kementerian Korelasi : 0,061 Skor : 7,93

SIMPULAN

1. Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada tahun 2019 ini menunjukkan angka rata-rata nasional pada poin 73,83 dari rentang 0-100.
2. Dengan melihat kategorisasi dan hasil indeks maka disimpulkan bahwa semua provinsi memiliki tingkat kerukunan umat beragama yang tinggi dan sangat tinggi.
3. Skor Indeks KUB tahun 2019 ini menunjukkan bahwa Indonesia secara rata-rata nasional berada pada kategori kerukunan tinggi (61-80 = Tinggi).

REKOMENDASI

1. Memaksimalkan usaha-usaha pemeliharaan kerukunan dan pengantisipasi konflik mulai dari tingkat keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat.
2. Memberikan pelatihan tentang cara menahan diri dari tindakan di luar hukum, dan memberikan advokasi hukum bagaimana menggunakan jalur yang tidak melanggar hukum dalam menangani potensi konflik yang dapat meningkat menjadi manifest.
3. Membantu usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah dan Pemda dalam pemeliharaan kerukunan dan pengantisipasi konflik dengan antara lain merujuk pada PBM 9-8/2006.



@balitbangdiklat @BLDK_KemenagRI Balitbangdiklat Kemenag balitbangdiklat.kemenag.go.id

Sumber: Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.7
Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019



1.1.2.1. Optimalisasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama

Dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan kerukunan antarumat beragama di Indonesia, diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat, di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, jurnalis, dan terutama adalah peran pemerintah. Kementerian Agama lewat PKUB telah membuat berbagai program dan strategi yang komprehensif untuk mewujudkan keharmonisan umat beragama di antaranya sosialisasi serta optimalisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan KKB, di samping penguatan regulasi dan melibatkan Pemerintah Daerah. Selain itu, Kementerian Agama sudah menyiapkan RUU tentang Pelindungan Umat Beragama, yang didukung dengan pengembangan kemitraan, penelitian, dan pendampingan. Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk mengatasi masalah pada pemeluk keyakinan di luar enam agama yang dilayani negara. Upaya lain yang sedang dilakukan Kementerian Agama adalah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam peningkatan status hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah menjadi Perpres.

Untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi telah dilakukan sosialisasi PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tersebut. Di samping itu, Kementerian Agama telah menyusun sejumlah materi publikasi sebagai media sosialisasi (seperti buku *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya* dan buku *Kompendium Regulasi Kerukunan Umat Beragama*). Sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan para tokoh agama, masyarakat, adat, pemuda, perempuan, jurnalis, dan aparat pemerintahan, yang sekaligus sebagai upaya menyambung tali silaturahmi antaraktor kerukunan.

1.1.2.2. Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama

Kementerian Agama telah berupaya mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh aktor-aktor kerukunan yang merupakan semua komponen masyarakat yang di antaranya terdiri atas pimpinan majelis-majelis agama, pimpinan ormas-ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, penyuluh agama, pengawas, dosen, guru agama, dan insan jurnalis. Disebut 'aktor', karena diharapkan tokoh-tokoh tersebut dapat memberikan pengaruhnya kepada masyarakat atas apa-apa yang telah disampaikan dalam kegiatan dialog, *workshop*, dan seminar terkait kerukunan.

Kompetensi aktor dalam kerukunan umat beragama ditingkatkan melalui berbagai kegiatan seperti: (1) pendalaman pemahaman terhadap regulasi moderasi dan kerukunan umat beragama, (2) peningkatan kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, (3) pelatihan promosi kerukunan umat beragama, dan (4) penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai. Pelibatan tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya dilakukan pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait kerukunan umat beragama. Penguatan kompetensi aktor-aktor kerukunan merupakan modal dalam membingkai kerukunan antarumat beragama guna mewujudkan masyarakat yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu. Kegiatan yang dilakukan berupa *workshop* dan dialog, yang telah diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) melalui 676 kegiatan pada sepanjang tahun 2015-2019.



1.1.2.3. Pemberdayaan FKUB, Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media

FKUB menjadi jembatan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama baik kerukunan antarumat beragama, kerukunan intern umat beragama, maupun kerukunan umat beragama dengan pemerintah (trilogi kerukunan). FKUB merupakan sebuah forum/wadah yang dibentuk untuk menampung seluruh aspirasi kepentingan umat beragama dan kerukunan umat beragama. Tugas FKUB adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah (khusus FKUB Kabupaten/Kota).

Sampai saat ini, telah dibentuk FKUB di 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota (yang belum terbentuk hingga Maret 2020 adalah 6 kabupaten/kota). FKUB sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, berperan sebagai pengembang toleransi beragama (promosi), pemberi advokasi, penasihat dan pembimbing toleransi (konsultasi), serta penengah yang adil dan bijaksana (arbitrasi) di tengah-tengah masyarakat yang agamis. Pemberdayaan FKUB telah dilakukan melalui penyelenggaraan 4 kegiatan penanganan pascakonflik dan 15 kali kegiatan pemberdayaan kepengurusan. Pemberdayaan juga dilakukan melalui koordinasi antara lembaga keagamaan, aparat pemerintah, instansi media, dan para tokoh, yang dilakukan secara periodik. Selanjutnya, sebagai upaya memberdayakan masyarakat telah dilakukan kerja sama kemitraan dengan institusi media baik media cetak, elektronik, maupun *online*. Yang dimaksud lembaga/majelis keagamaan di sini termasuk

MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, dan MATAKIN. Koordinasi dengan institusi media baik media elektronik, media sosial maupun media cetak dilakukan dalam kegiatan promosi kerukunan umat beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (*peace journalism*). Secara khusus, terkait dengan jurnalisme damai, PKUB pernah menerbitkan buku *Suara Wartawan Dalam Perhelatan Kerukunan Beragama* (2016).

1.1.2.4. Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama

PKUB telah melakukan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama melalui terbentuknya kawasan sadar kerukunan tahun 2012 dan 2013 di Kampung Sawah Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang menjadi cikal bakal pengembangan desa sadar kerukunan umat beragama. Selama tahun 2016 sampai dengan 2019 telah dibentuk 178 desa sadar kerukunan. Di samping itu, untuk mengingatkan pentingnya pemeliharaan kerukunan, telah disebar 50.000 lembar pamflet dan ditayangkan iklan layanan masyarakat pada saat pelaksanaan lomba kerukunan tahun 2015 melalui televisi, radio, *commuter-line*, dan bandara.

Selain itu, telah dilibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai penerus bangsa. Untuk mendorong terjadinya kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat telah diberikan Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tahun 2015, 2017, dan 2019. Pemberian Award ini diperluas sampai di daerah, berpedoman kepada buku *Petunjuk Teknis (Juknis) Harmony Award Pimpinan Daerah dan FKUB*. Juga telah diselenggarakan Perkemahan Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*) seperti *ASEAN Youth Interfaith Camp/AYIC* sebanyak 3 (tiga) kali dari tahun 2017 s.d tahun 2019, *Interfaith Scholarship*, *Interfaith Dialog*, Pameran Kerukunan, Gerak Jalan Kerukunan yang dilaksanakan di daerah-daerah, dan Karnaval Kerukunan (*Inter-Religious Harmony Carnival*).



Gambar 1.8
Kegiatan Dialog *Interfaith Scholarship* di Candi Mendut Tahun 2018

Di tingkat pusat, Kementerian Agama juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (*Inter-Religious Harmony Centre*), *Interfaith and Intercultural Dialogue* secara regional, bilateral, dan multilateral. Kementerian Agama bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri dan KBRI, secara rutin menyelenggarakan *Interfaith Dialogue* secara bilateral, regional, dan multilateral. Dalam kurun waktu lima tahun, telah diselenggarakan 32 (tiga puluh dua) kali kegiatan *Bilateral Interfaith Dialogue*, 5 (lima) kali kegiatan *Regional Interfaith Dialogue*, dan 4 (empat) kali kegiatan *Multilateral Interfaith Dialogue*. Secara khusus PKUB telah melaksanakan 4 (empat) kali program *Indonesian Interfaith Scholarship (IIS)* dengan KBRI Brussels yakni tahun 2015, 2017, 2018 dan



2019, yang melibatkan peserta dari parlemen Eropa. Selain itu PKUB bekerja sama dengan KBRI Brussels juga melaksanakan program yang mendatangkan 4 (empat) fotografer dari parlemen Eropa untuk memotret kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia yang selanjutnya dipamerkan di parlemen Eropa yang bertajuk “Bhinneka Tunggal Ika: *Harmony of Indonesia in Pictures*”. PKUB juga melakukan kerja sama dengan KBRI Wina Austria melalui program *The Vienna International Christian-Islamic Summer University/ VICISU* yang sudah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali yakni dengan mengirim peserta dari Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut. *Program Interfaith Dialogue* merupakan *soft power diplomacy* yang bertujuan untuk mempromosikan Indonesia sebagai kiblat moderasi dan kerukunan umat beragama di dunia.

1.1.2.5. Peningkatan Pemahaman Agama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan

Pembangunan agama, melalui PKUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi. Secara sosial dan politik, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama dalam konteks Indonesia, yang masyarakatnya plural, multikultural, serta memiliki prinsip dasar bernegara yang akomodatif terhadap keragaman dan keberagaman.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan

multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikultural dan pluralitas yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*.” Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antarumat beragama di Indonesia.

Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama pada tahun 2015 s.d 2019 dilakukan melalui pembinaan wawasan moderasi dan multikultural sebanyak 31 kali dengan jumlah peserta 3.600 orang, dialog moderasi beragama sebanyak 172 kali dengan peserta berjumlah 7.600 orang, dialog tokoh agama sebanyak 2.688 kali dengan jumlah peserta 110.760 orang, yang di dalamnya melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan dengan mempromosikan dakwah keagamaan yang moderat.

Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta memahami makna kemajemukan sosial, multikultur dan multireligi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Adapun terkait dengan tugas pembinaan aliran keagamaan (bukan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan dan dialog dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengoordinasikan penyelesaiannya, dan memproteksi hasil musyawarah dan mufakat.



1.1.3. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah, memiliki tugas dan fungsi merumuskan kebijakan dan memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang keagamaan bagi seluruh umat beragama, yaitu yang terdiri: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019, telah ditetapkan agenda pembangunan melalui 4 (empat) jenis kegiatan: (1) penyediaan kitab suci (2) pengembangan rumah ibadah (3) pelayanan administrasi keagamaan pada Kantor Urusan Agama (KUA), dan (4) layanan jaminan produk halal.

1.1.3.1. Penyediaan Kitab Suci

Selama tahun 2015-2019 telah diadakan 2.749.282 buah kitab suci dan buku keagamaan untuk seluruh agama yang rinciannya sebagaimana tabel berikut.



Sumber : Biro Perencanaan, 2020

Gambar 1.9

Penyediaan Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tahun 2015-2019

Keseluruhan kitab suci dan buku keagamaan tersebut telah didistribusikan kepada masing-masing umat beragama yang tersebar di 34 provinsi, maupun di wilayah di mana terdapat kantong-kantong umat beragama minoritas seperti Khonghucu. Hasil survei pelayanan kitab suci tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kitab suci Kementerian Agama masih belum memuaskan ditandai dengan nilai indeks kepuasan yang mencapai 69. Dari sisi kualitatif, kualitas penggunaan huruf pada kitab suci dianggap baik, tetapi dari sisi kualitas cetakan dan penggunaan huruf dianggap kurang baik. Dari sisi kuantitatif, kecukupan pengadaan kitab suci (termasuk bagi tuna netra), keterbukaan informasi, keterjangkauan penyebaran, dan efektifitas sosialisasi pelayanan kitab suci masih dianggap belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kitab suci masih perlu ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi standar pelayanan yang mencakup: penyediaan, penyebaran, dan pengawasan.

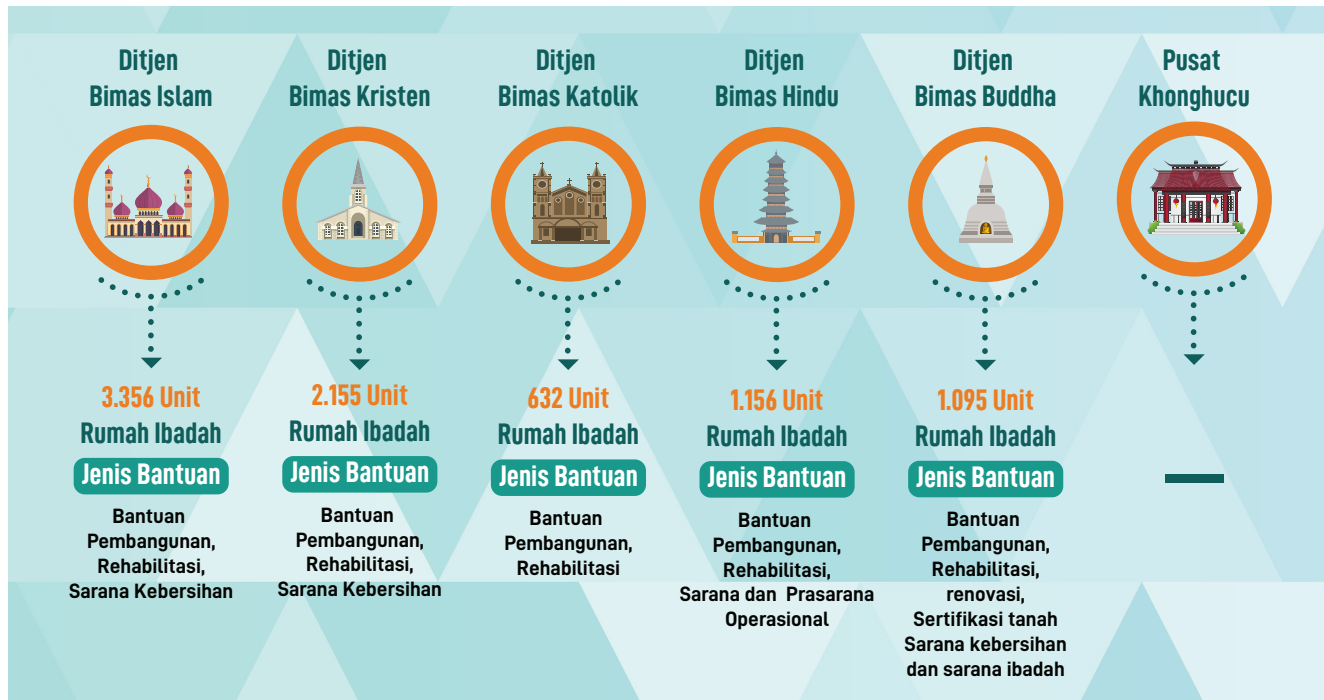
Sementara itu, dalam rangka upaya meningkatkan layanan publik dalam penyediaan kitab suci, Pemerintah telah merilis Al-Quran digital yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui gawai. Selain mempermudah masyarakat terhadap akses layanan kitab suci, upaya digitalisasi Al-Quran juga ditunjukkan untuk meningkatkan integritas layanan publik di bidang kitab suci. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingginya respon masyarakat terhadap permintaan perbaikan fitur tampilan dan konten dikaitkan dengan kapasitas aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama. Diperlukan pengembangan aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama baik versi *smartphone* maupun *website* yang memiliki fitur dan konten lebih lengkap tetapi tampilan sederhana, tidak terlalu membebani kapasitas memori dan bersifat pilihan (opsional).



1.1.3.2. Pengembangan Rumah Ibadah

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya, fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Saat ini telah tersedia 253.785 masjid, 287.597 mushola, 65.010 gereja Kristen, 13.751 gereja Katolik, 24.506 pura, 4.287 rumah ibadah Buddha (arama, maha vihara, vihara, cetiya, tempat ibadah tri dharma, kelenteng), serta 1.801 kelenteng dan 189 lintang.

Kementerian Agama telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimuli masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan rumah ibadah. Dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang, telah diberikan bantuan untuk peningkatan fasilitas rumah ibadah dengan rincian sebagai berikut:



Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.10
Pemberian Bantuan Rumah Ibadah Tahun 2015 - 2019



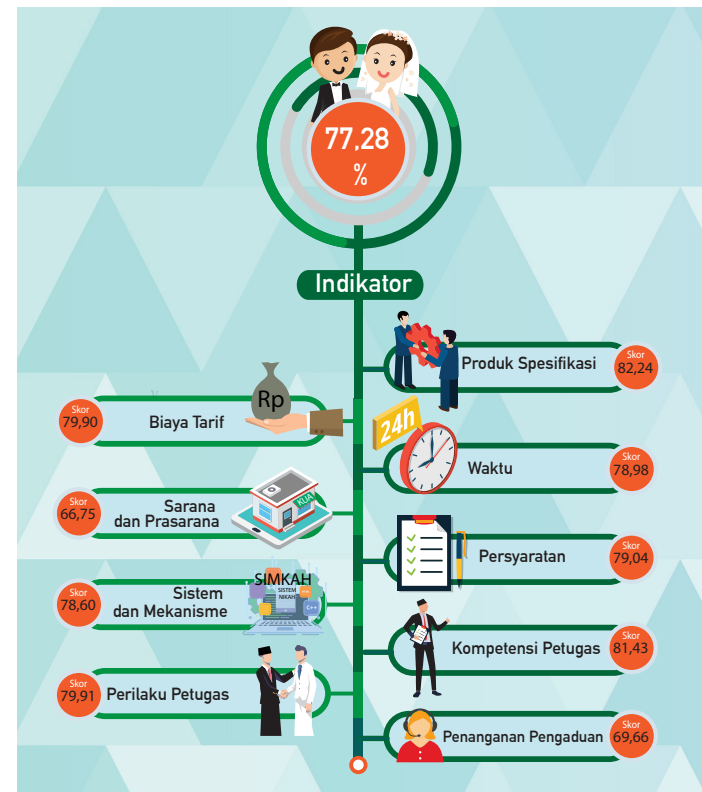
1.1.3.3. Pelayanan Administrasi Keagamaan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Berdasarkan PMA No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; (3) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; (4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah; (5) pelayanan bimbingan kemasjidan; (6) pelayanan bimbingan hisab ruyat; (7) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; (8) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan (9) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Dari 9 (Sembilan) fungsi tersebut, ada 6 (enam) yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan keagamaan kepada masyarakat yaitu: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah; (3) pelayanan bimbingan kemasjidan; (4) pelayanan bimbingan hisab ruyat; (5) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; dan (6) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

Survey Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA tahun 2019 menunjukkan angka kepuasan layanan sebesar 77,28. Indikator kepuasan layanan tersebut diukur dari 9 komponen, yaitu: produk spesifikasi, biaya tarif, waktu, sarana dan prasarana, persyaratan, sistem dan mekanisme, kompetensi petugas, perilaku petugas, dan penanganan pengaduan. Nilai 77,28 tersebut menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap layanan pencatatan nikah di KUA secara keseluruhan sudah baik. Namun demikian masih ada beberapa komponen yang dianggap belum sempurna, yaitu: penanganan pengaduan karena lambatnya respon yang dilakukan dan komponen fasilitas sarana dan prasarana, yang mencakup: luas area parkir, tersedianya kotak saran atau bentuk lainnya, kebersihan toilet, dan kenyamanan ruang tunggu.

Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, Kementerian Agama telah membangun 836 gedung balai nikah dan asrama haji melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu dikembangkan pelayanan KUA berbasis sistem informasi yang berupa data publik aktif dan pasif, untuk meningkatkan tingkat keterjangkauan informasi. Salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP) Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi data peristiwa nikah.



Sumber : Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama, 2019

Gambar 1.11
Nilai Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA
Tahun 2019



1.1.3.4. Bimbingan Perkawinan dan Keluarga

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga merupakan salah satu komponen utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*). Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga, sehingga pembangunan keluarga menjadi kebutuhan dasar negara. Hal ini selaras dengan misi Presiden dalam Nawacita Kedua, Nomor 1 yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Kementerian Agama sebagai salah satu *stakeholder* yang memiliki peran dalam membangun dan menguatkan ketahanan keluarga meluncurkan program Bimwin sejak tahun 2017. Sasaran program Bimwin meliputi calon pengantin (catin) yang sudah mendaftar nikah dan remaja usia nikah (19-25 tahun) yang belum mendaftar nikah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama menjalin kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta dukungan 1.928 fasilitator Bimwin yang telah mendapat bimbingan teknis dari unsur penghulu, penyuluh, dan ormas. Berikut capaian kinerja Bimwin yang dimulai sejak tahun 2017.

Tabel 1.2
Capaian Kinerja Bimbingan Perkawinan Tahun 2017-2019

TARGET/ CAPAIAN	TAHUN					CAPAIAN 2015-2019
	2015	2016	2017	2018	2019	
TARGET	-	-	149.646	7% dari rata-rata peristiwa 2.000.000 per tahun (149.646 pasang)	10% dari rata-rata peristiwa 2.000.000 per tahun (Bimwin reguler 151.470 pasang, Bimwin mandiri 57.787 pasang, Bimwin remaja usia nikah 58.920 orang)	10% dari rata-rata peristiwa 2.000.000 per tahun (Bimwin reguler 151.470 pasang, Bimwin mandiri 57.787 pasang, Bimwin remaja usia nikah 58.920 orang)
REALISASI	-	-	100.263	125.703 pasang (6,29)	Bimwin reguler 124.729 pasang, Bimwin mandiri 47.585 pasang, Bimwin remaja usia nikah 48.518 orang	Bimwin reguler 124.729 pasang, Bimwin mandiri 47.585 pasang, Bimwin remaja usia nikah 48.518 orang
DIMENSI	-	-	pasang	Persen	persen	persen
CAPAIAN (%)	-	-	67,00	84,00	82,35	82,35

Sumber : Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama, 2019



Pada tahun 2017 target catin terbimbing sebanyak 149.646 pasang dan terealisasi sebesar 67% atau sebanyak 100.263 pasang. Tahun 2018 target catin terbimbing 149.646 pasang dan terealisasi sebesar 84% atau sebanyak 125.703 pasang. Tahun 2019 Bimwin ditargetkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) Bimbingan Perkawinan Pranikah Reguler sebanyak 151.470 pasang; (2) Bimbingan Perkawinan Pranikah Mandiri sebanyak 57.787 pasang; dan (3) Bimbingan Pranikah Usia Remaja Usia Nikah (21 tahun) sebanyak 58.920 orang. Mempertimbangkan keterbatasan anggaran maka catin yang dapat dibimbing hanya dialokasikan sebanyak 10% dari rata-rata 2.000.000 peristiwa nikah per tahun. Dalam pelaksanaannya, peristiwa nikah yang terjadi sebanyak 1.968.978 peristiwa (sumber: ebi.kemenag.go.id diakses tanggal 18 Februari 2020) dan masing-masing program terealisasi sebagai berikut: (1) Bimbingan Perkawinan Pranikah Reguler sebanyak 124.729 pasang; (2) Bimbingan Perkawinan Pranikah Mandiri sebanyak 47.585 pasang; dan (3) Bimbingan Pranikah Usia Remaja Usia Nikah (21 tahun) sebanyak 48.518 orang, dengan capaian kinerja sebesar 82,35%.

Kementerian Agama juga telah melaksanakan bimbingan keluarga sebanyak 3.735 kegiatan selama lima tahun terakhir yang diterapkan baik kepada pengantin masa nikah maupun yang sudah berkeluarga. Prioritas utamanya, bagi keluarga muda di bawah lima tahun yang sangat beresiko tinggi terhadap konflik keluarga. Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain dan organisasi masyarakat untuk pencapaian ketahanan keluarga dan penguatan perspektif moderasi beragama berbasis keluarga, yang berimplikasi pada peran sinergitas lintas instansi secara optimal. Bimbingan keluarga pada masing-masing agama diimplementasikan pada kegiatan Keluarga Sakinah (Ditjen Bimas Islam), Keluarga Kristiani (Ditjen Bimas Kristen), Keluarga Bahagia (Ditjen Bimas Katolik), Keluarga Sukinah (Ditjen Bimas Hindu) dan Keluarga Hitta Sukhaya (Ditjen Bimas Buddha). Berikut capaian pelaksanaan kegiatan Bimbingan Keluarga selama lima tahun.

Tabel 1.3
Capaian Pelaksanaan Bimbingan Keluarga
Tahun 2015-2019

No.	Kegiatan	Capaian (Kegiatan)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Keluarga Sakinah					100	100
2	Keluarga Kristiani	-	-	15	3	54	72
3	Keluarga Bahagia	5	2	75	89	177	348
4	Keluarga Sukinah	-	32	42	1.249	1566	2.889
5	Keluarga Hitta Sukhaya	-	-	40	40	246	326
	Jumlah	5	34	172	1.381	2.143	3.735

Sumber : Biro Perencanaan, 2020

1.1.3.5. Layanan Produk Halal

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, kosmetik, peralatan rumah tangga berpengaruh terhadap pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku dari yang bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa genetik. Ini memungkinkan terjadinya percampuran antara yang halal dan haram baik disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, penjaminan produk halal yang selama ini telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadi penting. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk pada tahun 2017. Pembentukan BPJPH ditujukan untuk:



(1) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan (2) meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Undang-Undang tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal yang menugaskan BPJPH memberikan layanan registrasi dan sertifikasi.

Dalam menjalankan tugas memberikan jaminan produk halal, BPJPH bekerja sama dengan kementerian, lembaga, organisasi kemasyarakatan, dengan rincian sebagaimana Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Kerja sama BPJPH dengan Kementerian/Lembaga

No.	Kewenangan BPJPH	Kerja sama dengan	Tugas
1	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH 	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan, pembinaan dan pengawasan industri, terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal; Fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah; Pembentukan kawasan industri halal.
2	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal Melakukan pengawasan terhadap JPH 	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat; Pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar; Fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan; Perluasan akses pasar bagi Produk Halal;
3	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan terhadap JPH Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk 	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; Fasilitasi sertifikat halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; Rekomendasi dan pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
4	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal 	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; Penetapan persyaratan rumah potong hewan/ unggas dan unit potong hewan/ unggas; Penetapan pedoman pemotongan hewan/ unggas; Penanganan daging hewan dan hasil ikutannya; Fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/ unggas dan unit potong hewan/ unggas; Penetapan pedoman sertifikasi control veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian.



No.	Kewenangan BPJPH	Kerja sama dengan	Tugas
5	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal 	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan produk bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; Fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku usaha menengah; Pendataan Koperasi dan Pelaku Usaha Menengah; Koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku-usaha mikro dan kecil; Koordinasi dan pembinaan pendataan pelaku usaha mikro dan kecil;
6	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri 	Kementerian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi kerja sama Internasional; Promosi Produk Halal di Luar Negeri; Penyediaan Informasi mengenai lembaga halal luar negeri.
7	<ul style="list-style-type: none"> Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk Melakukan pengawasan terhadap JPH Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal 	Lembaga Terkait	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan; Pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar; Rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar; Sosialisasi, edukasi, dan publikasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.
8	Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Penyusunan Standard dan Skema Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 	Lembaga Nonstruktural	<ul style="list-style-type: none"> Akreditasi LPH; Penyusunan Skema Akreditasi; Penyusunan Dokumen Pendukung Skema Akreditasi.
10	Melakukan akreditasi terhadap LPH	LPH	Pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk, yang ditetapkan oleh BPJPH
11	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan registrasi Auditor Halal Melakukan pembinaan Auditor Halal 	MUI	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Auditor Halal; Penetapan Kehalalan Produk (Fatwa Halal); Akreditasi LPH

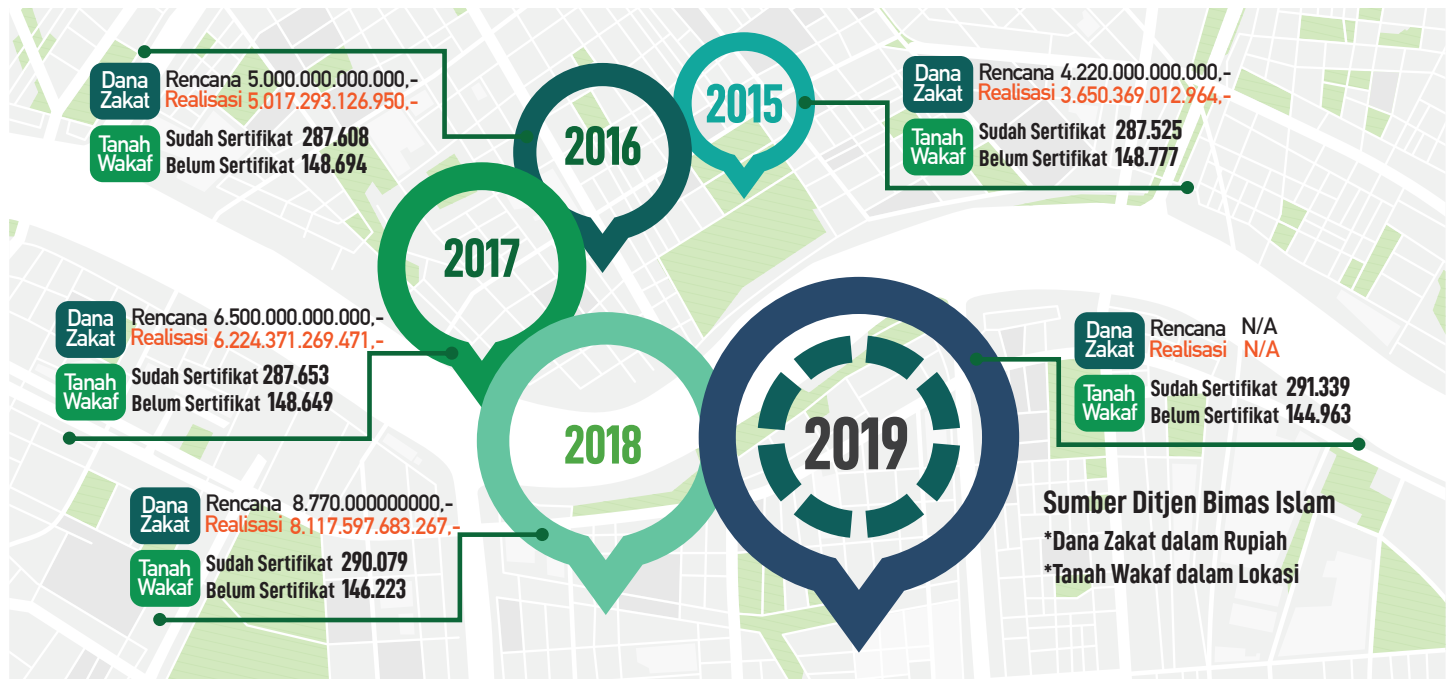
Sumber : BPJPH, Kementerian Agama, 2020

Sampai dengan tahun 2019, Kementerian Agama sudah berhasil melakukan penataan sistem kelembagaannya, tetapi dalam hal layanannya masih didalam proses berikutnya, sehingga untuk sementara layanan tersebut masih dilanjutkan oleh MUI.



1.1.4. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Lembaga keagamaan di Indonesia telah berperan besar dalam pembinaan keagamaan bagi penduduk Indonesia yang berjumlah 229,71 juta orang penganut berbagai agama. Selain itu, lembaga keagamaan telah berhasil menghimpun dana sosial keagamaan yang tidak hanya untuk mendukung pendidikan keagamaan tetapi juga berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi kerakyatan umat, yang hasilnya di beberapa lembaga sangat menggembirakan. Data salah satu jenis dana sosial keagamaan yang berupa zakat dan tanah wakaf menunjukkan bahwa potensi besaran dana sosial keagamaan tersebut ternyata cukup besar, hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.12 berikut:



Sumber : Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama, 2020

Keterangan:

Rencana dana zakat = Target pengumpulan BAZNAS dalam tahun berjalan.

Realisasi dana zakat = Realisasi pengumpulan BAZNAS pada tahun berjalan

Gambar 1.12
 Jumlah Dana Zakat dan Tanah Wakaf Bersertifikat yang Dikelola Tahun 2015-2019



Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan, Pertama, potensi dana zakat meningkat setiap tahun (yang ditunjukkan pada data rencana dan realisasi), sehingga dalam waktu 4 (empat) tahun meningkat lebih dari 2 (dua) kali lipat. Peningkatan seperti ini diperkirakan akan terjadi terus lima tahun ke depan. Data yang sama pada tahun 2019 belum disajikan dikarenakan masih dalam proses audit; Kedua, jumlah tanah yang diwakafkan oleh masyarakat meningkat terus sehingga pada tahun 2019 berjumlah 436.302 lokasi. Dari sejumlah itu 291.339 lokasi telah berhasil disertifikasi. Capaian target sertifikasi tanah wakaf belum sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai dengan rencana karena: (1) proses sertifikasi membutuhkan waktu yang lama; (2) anggaran pengelolaan pengurusan sertifikasi yang disediakan belum mencakup jenis dana yang diperlukan dalam proses sertifikasi; (3) wewenang Kementerian Agama terbatas hanya sampai pada penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di tingkat KUA, sementara penyelesaian sertifikat selanjutnya berada dalam kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, Direktorat Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam juga mendorong terjadinya peningkatan potensi dana keagamaan yang lainnya termasuk infaq dan sedekah sebagaimana yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an.

Melalui Ditjen Bimas Katolik, skema ekonomi keagamaan berasal dari Kolekte, Stipendium, dan lura Stole yang dilakukan oleh setiap gereja didorong untuk ditingkatkan, selain pengumpulan dana Badan Amal Kasih Katolik (BAKAT).

Sementara itu, Ditjen Bimas Kristen mendorong Lembaga yang mengelola dana ekonomi keagamaan Kristen yaitu Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI), dan Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa untuk ditingkatkan. Melalui Ditjen Bimas Hindu juga digali potensi ekonomi

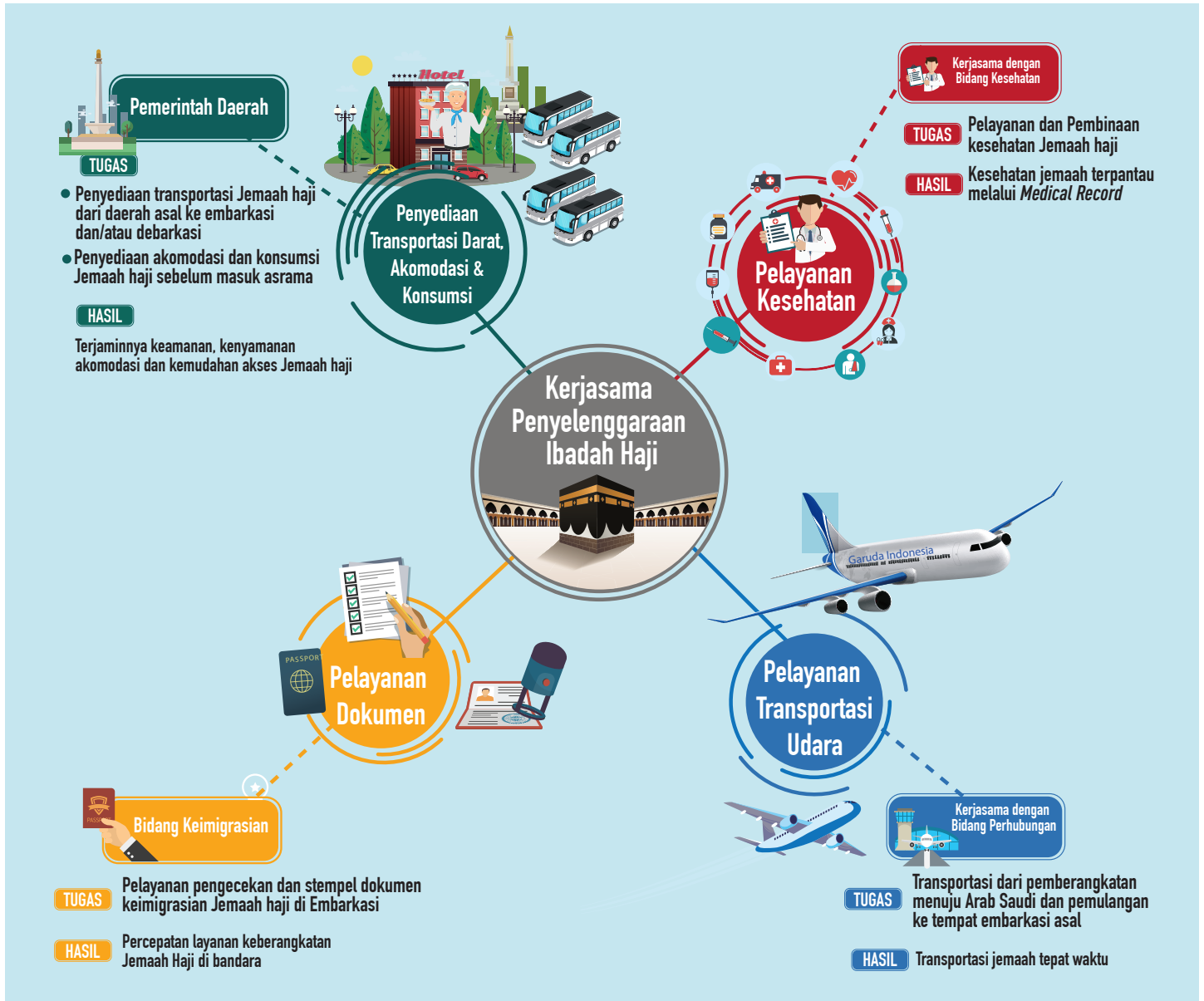
keagamaan yang berasal dari dana punia. Sementara pada agama Buddha, ekonomi keagamaan dapat bersumber dari Amisa Dana, Paricaya Dana, Abhaya Dana, dan Dhamma Dana. Untuk meningkatkan pendapatan dari potensi ekonomi keagamaan secara optimal, kebijakan pemberian insentif perlu dibuat.

1.1.5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Ibadah Umrah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Untuk meningkatkan kualitas layanan, pada tahun 2019 telah dilakukan 10 inovasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:

1. penyediaan jalur *fast track* di seluruh embarkasi;
2. sistem sewa hotel full musim di Madinah sebanyak 76%;
3. penomoran tenda Arafah dan Mina berisi Nomor Tenda, Nomor Kloter dan Kapasitas Tenda, yang bertujuan memberikan kemudahan bagi jemaah;
4. revitalisasi Satuan Tugas Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina);
5. penggunaan sistem laporan haji terpadu (Haji Pintar) dalam Laporan Petugas Kloter;
6. moderasi berhaji melalui penguatan manasik, dengan penambahan materi sejarah haji;
7. revitalisasi Kantor Daerah Kerja baru;
8. integrasi rekam kesehatan jemaah;
9. zonasi wilayah akomodasi di Makkah; dan
10. pemasangan AC di tenda Arafah.

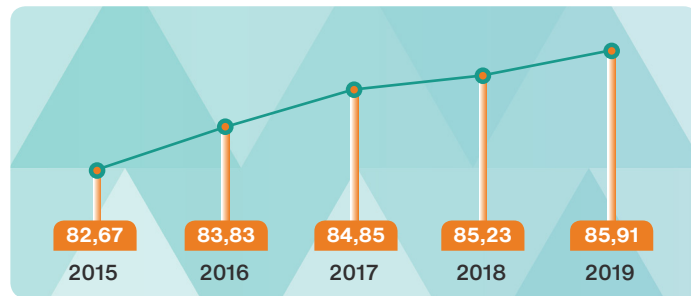
Inovasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait sebagai berikut:



Gambar 1.13
Kegiatan Kerja sama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji



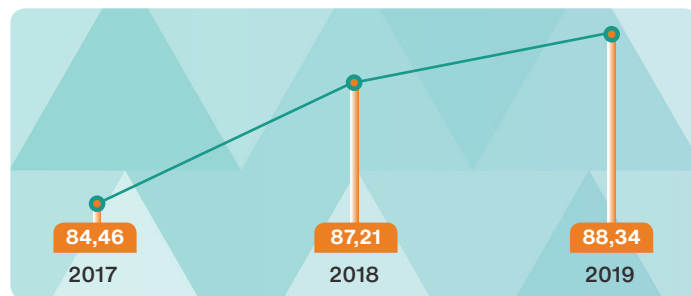
Berkat kerja sama tersebut, terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dengan indikasi: (1) meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji di Arab Saudi; dan (2) meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri. Perkembangan Indeks Kepuasan Layanan Haji di Arab Saudi dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri selama lima tahun disajikan dalam Gambar 1.14 dan 1.15 berikut.



Sumber : Ditjen PHU, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.14

Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi tahun 2015-2019



Sumber data : Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.15

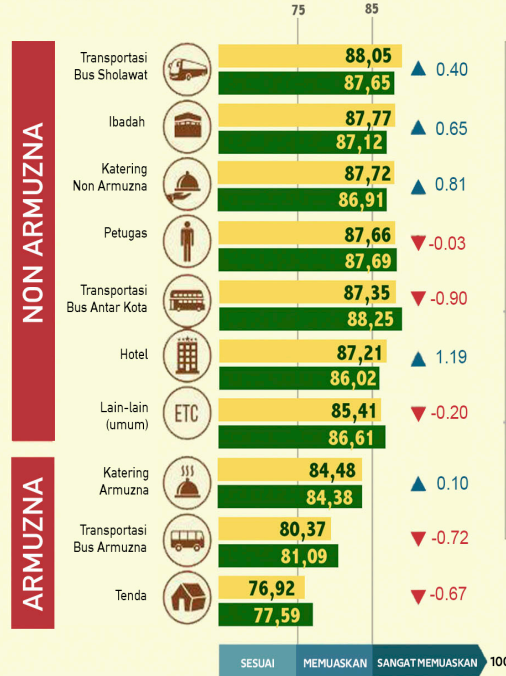
Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri Tahun 2017-2019

Secara umum, jemaah haji Indonesia merasa sangat puas terhadap semua pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Tingginya tingkat kepuasan ini diperoleh sebagai hasil dari revitalisasi asrama haji, pembangunan PLHUT di Kabupaten/Kota, pengembangan sistem pendaftaran haji, pengembangan pelayanan haji dalam penerapan sistem zonasi penempatan akomodasi, pengembangan sistem perizinan *online* bagi PPIU dan PIHK, serta optimalisasi dana haji. Di samping itu, Kementerian Agama telah melakukan pembenahan tata kelola industri umrah melalui penyiapan sistem elektronisasi yang terintegrasi dengan e-umrah Arab Saudi, untuk memberikan pelayanan dan tata kelola umrah yang lebih berkualitas.

Dari seluruh komponen yang diukur, peningkatan kualitas pelayanan tenda di Arafah dan Mina masih belum memadai, ditandai dengan kecilnya kenaikan Indeks Kepuasan Layanan Haji yang hanya sebesar 0,68 % dari tahun 2018 ke tahun 2019. Sedikit lebih besar kenaikan Indeks kepuasan Jemaah Haji Dalam Negeri yaitu sebesar 1,94% rata-rata per tahun dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019. Bila dirinci menurut jenis pelayanan, nilai kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan sementara itu pelayanan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi di Asrama Haji berada pada nilai yang paling rendah.



IKJHI MENURUT JENIS PELAYANAN TAHUN 2018-2019

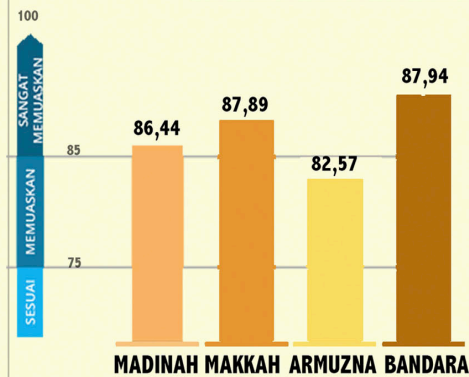


Kenaikan tertinggi adalah pelayanan hotel (1.19 point)

■ 2018 ■ 2019

IKJHI MENURUT DAERAH KERJA 2019

Indeks kepuasan Jemaah Haji terhadap pelayanan di Daker Madinah, Makkah dan Bandara masuk dalam kategori "Sangat Memuaskan". Sementara pada Daker Armuzna indeks kepuasan Jemaah Haji masuk dalam kategori "Memuaskan".



Indeks kepuasan Jemaah Haji di Armuzna masih relatif rendah dibandingkan dengan indeks kepuasan di daerah lainnya. Rendahnya indeks kepuasan Jemaah Haji di Armuzna antara lain karena beberapa pelayanan tidak di bawah kendali PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji).

*Sumber : Badan Pusat Statistik 2019



Gambar 1.16

Grafik Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2019



Di bidang umrah, Kementerian Agama telah melakukan pembinaan penyelenggaraan ibadah umrah melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, perizinan PPIU secara *online* dan akreditasi PPIU. Penyusunan 9 (sembilan) regulasi di antaranya peraturan tentang Pembinaan, Bank Garansi, Pengawasan, Rekomendasi, dan Verifikasi. Penguatan kelembagaan dengan meningkatkan koordinasi antarlembaga dan satuan kerja daerah, yaitu: (1) penyusunan nomenklatur seksi pembinaan dan pengawasan umrah dan haji khusus di tingkat kanwil, (2) penambahan staff teknis yang membidangi umrah pada KUH Jeddah, (3) pemberdayaan penyuluh KUA, dan (4) pembentukan satgas pencegahan, pengawasan dan dan penanganan permasalahan ibadah umrah bersama 9 (sembilan) kementerian/lembaga. Kegiatan Pelayanan Perizinan PPIU secara elektronik yang terdiri atas: (1) permohonan izin operasional sebagai PPIU; (2) perubahan data PPIU, dan (3) pengajuan permohonan akreditasi. Sejak tahun 2016-2019, Kementerian Agama telah menetapkan 3.788 izin operasional PPIU yang dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5
Jumlah PPIU yang ditetapkan izin operasional
Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Jumlah PPIU
1	2016	794
2	2017	982
3	2018	1.014
4	2019	988
	Jumlah	3.788

Sumber : Ditjen PHU, Kementerian Agama, 2020

Akreditasi PPIU dilakukan dengan *Memorandum of Undertanding (MoU)* dengan Komite Akreditasi Nasional tentang Akreditasi Lembaga Akreditasi PPIU. Kementerian Agama menetapkan 18 Lembaga Akreditasi PPIU yang telah melakukan akreditasi PPIU sebanyak 308 lembaga.

Di samping itu, Kementerian Agama juga terus berupaya melakukan perbaikan dalam pengawasan dan penanganan kasus umrah. Hal ini terbukti dengan adanya penyelesaian masalah di dalam dan luar negeri, penegakan disiplin/hukum, pengawasan bandara/tim terpadu pengawasan bandara, *MoU* Pengadaan Gate dan Terminal Khusus Umrah/Haji, dan penguatan peran Kanwil/KanKementerian Agama.

1.1.6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Pencapaian atas tujuan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) meningkatnya perolehan predikat dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam opini BPK terhadap Laporan Keuangan; (2) meningkatnya hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan (3) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi.

1.1.6.1. Opini Laporan Keuangan

Dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) mengalami kenaikan. Pada awal tahun 2015 mendapatkan opini WDP dari BPK RI dan pada empat tahun terakhir ini (2016-2019) berhasil meraih dan mempertahankan opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan Kementerian Agama sudah bagus yang antara lain didukung oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan dan oleh kualitas pelaporan keuangan yang sangat baik dari masing-masing satuan kerja Kementerian di Pusat dan Daerah. Pencapaian opini WTP ini berkontribusi besar dalam menaikkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.



Tabel 1.6
Perkembangan Predikat Laporan Keuangan
Kementerian Agama Tahun 2015-2019

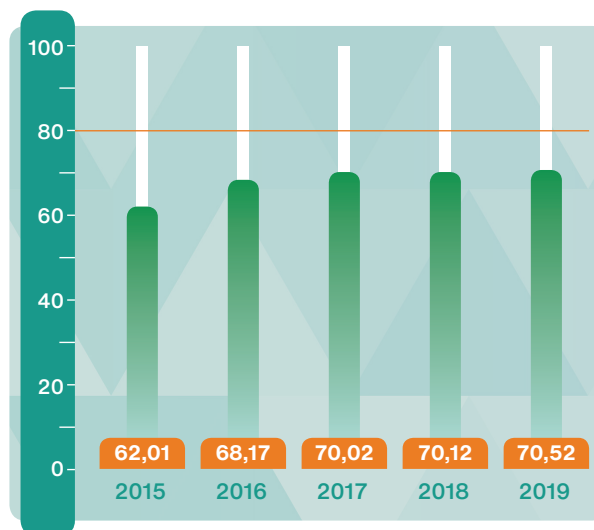
Jenis Opini	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
WTP		√	√	√	√
WTP DPP					
WDP	√				
TMP					

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Agama 2020

Keberhasilan perolehan WTP diperoleh melalui upaya sistematis dalam: (1) melakukan perhatian khusus terhadap penyelesaian pagu minus khususnya pada belanja pegawai; (2) menginventarisasi dan menertibkan proyek KDP yang mangkrak; (3) melakukan penuntasan proses revaluasi BMN; (4) melakukan penertiban terkait penggunaan langsung PNBP khususnya pada satker nonBLU; (5) mempercepat progress penyelesaian kerugian negara/penuntasan saldo TLHP; (6) mengoptimalkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dalam pelaksanaan APBN.

1.1.6.2. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 berhasil mencapai BB (70,52) yang menunjukkan bahwa dibandingkan dengan capaian kinerjanya, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Agama, sudah menunjukkan hasil yang baik. Perolehan akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh peningkatan nilai pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja.



Sumber: Biro Ortala, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.17
Grafik Capaian Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Agama Tahun 2015-2019

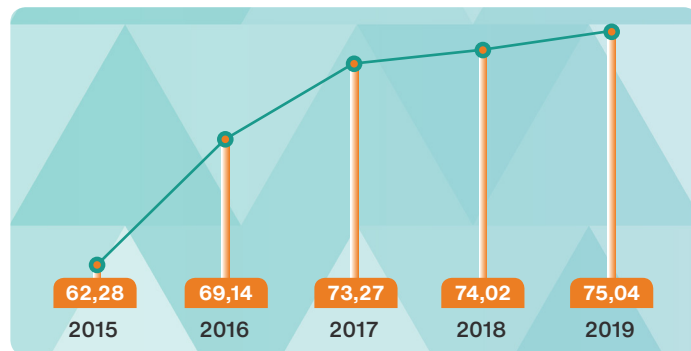
Kenaikan nilai akuntabilitas kinerja tersebut menggambarkan terjadinya peningkatan pada: (1) tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibanding dengan capaian kinerjanya; (2) kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil meningkat, dan (3) penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan manajemen kinerja sektor publik pada Kementerian Agama, baik Pusat maupun Daerah. Selain itu kelengkapan dokumen akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal dipenuhi secara lengkap.



1.1.6.3. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya melalui perwujudan 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan yaitu:

- terciptanya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (pola pikir dan budaya kerja aparatur);
- terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
- terlaksananya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
- dihasilkannya regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
- terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
- meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- meningkatnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
- meningkatnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.



Sumber : Biro Ortala, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.18
Grafik Capaian Reformasi Birokrasi
Kementerian Agama Tahun 2015-2019

Dengan 4.593 satuan kerja, peningkatan nilai tersebut di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama telah dilakukan secara masif. Hal ini dapat dilakukan karena pada tahun 2019, Kementerian Agama mulai mengelola *big data* dan integrasi sistem aplikasi, data, dan informasi menuju Satu Pintu Data Digital atau *MoS* berdasarkan hasil pemetaan ulang terhadap semua sistem aplikasi layanan, manajemen data dan informasi yang pernah dibuat oleh semua satuan kerja. Selain itu, juga dilakukan pengembangan sarana dan prasarana terdiri dari tampilan gedung, ruang kantor, dan tata ruang pelayanan publik, agar lebih memberi rasa nyaman, aman, dan ramah. Telah dibentuk 251 unit PTSP di Pusat maupun satuan kerja daerah. Ini didukung dengan pengembangan SDM melalui penguatan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta penempatannya berdasarkan sistem meritokrasi (kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar).

1.1.7. Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan

Kementerian Agama telah berkontribusi dalam meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana di amanatkan oleh RPJMN tahun 2015-2019, melalui pendidikan umum berciri khas agama, dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, dan pendidikan keagamaan, pada jalur formal dan non-formal. Rincian jenis dan jenjang layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama disajikan pada Tabel 1.7 berikut.



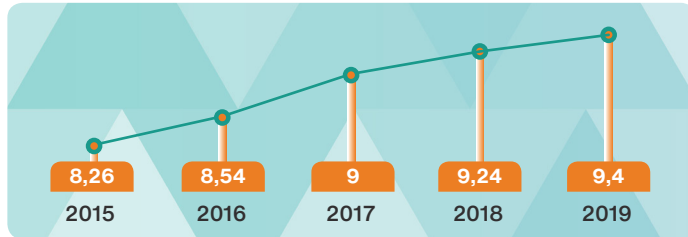
Tabel 1.7
Jenis Pendidikan, Unit Eselon I, Jenis Lembaga, Jumlah Lembaga,
dan Jumlah Peserta Didik Tahun 2019

No.	Jenis	Unit Eselon I	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik
1	Pendidikan umum berciri khas agama	Ditjen Pendidikan Islam	1. RA	29.792	1.313.022
			2. MI	25.556	3.793.550
			3. MTs	18.137	3.184.790
			4. MA	8.790	1.387.211
2	Pendidikan keagamaan	Ditjen Pendidikan Islam	1. Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Ula	718	32.986
			2. Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Wustha	1.214	106.468
			3. Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Salafiyah Ulya	866	60.948
			4. PTK Islam (PTKIN dan PTKIS)	793	987.553
			5. Ma'had Aly	46	1.572
		Ditjen Bimas Kristen	1. SDTK	59	609
			2. SMPTK	83	2.665
			3. SMTK/SMAK	184	8.095
			4. PTK Kristen (STAKN, IAKN)	7	13.627
		Ditjen Bimas Katolik	1. Taman Seminari	50	1.274
			2. SMAK	33	3.547
			3. PTK Katolik (STAKatN)	1	553
		Ditjen Bimas Hindu	1. Pratama Widya Pasraman	33	958
			2. Adhi Widya Pasraman	241	385.289
			3. Madyama Widya Pasraman	361	577.928
			4. Utama Widya Pasraman	612	195.662
			5. PTK Hindu	4	6.804
		Ditjen Bimas Buddha	1. Nava Dhammasekha	20	660
			2. PTK Buddha	2	216
		Total			

Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2020

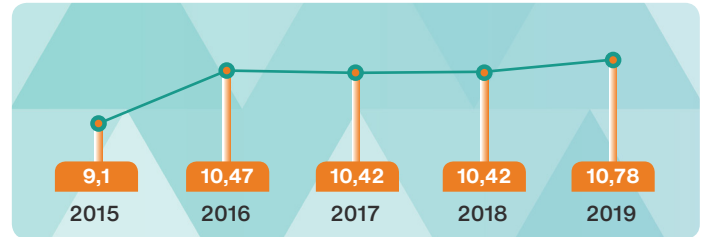


Sementara itu, perkembangan capaiannya per tahun dalam peningkatan akses selama lima tahun terkahir disajikan pada Gambar 1.19 s.d 1.26.



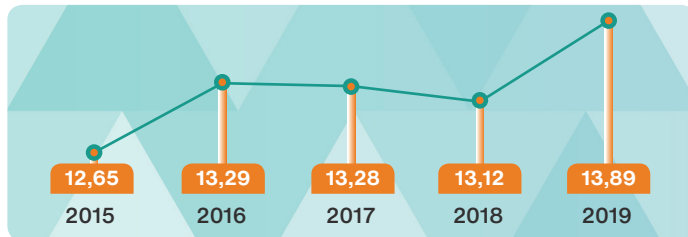
Gambar 1.19

Grafik APK RA/Pratama Widya Pasraman Tahun 2015-2019



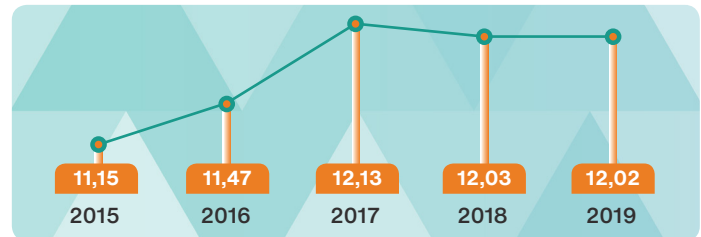
Gambar 1.22

Grafik APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019



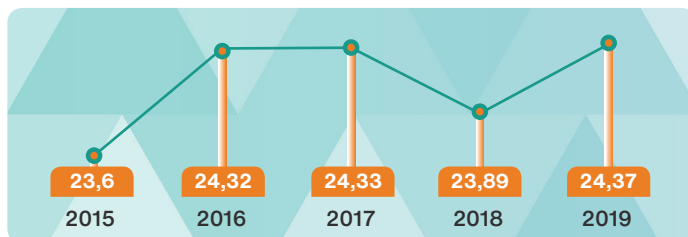
Gambar 1.20

Grafik APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019



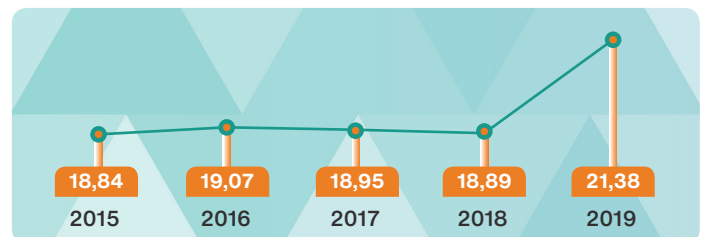
Gambar 1.23

Grafik APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019



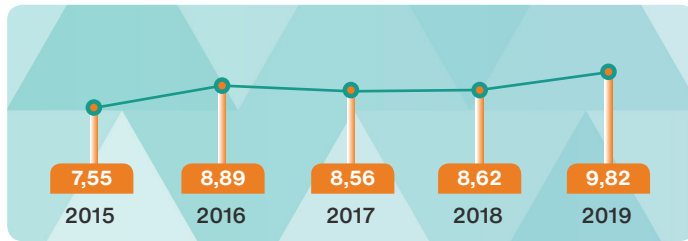
Gambar 1.21

Grafik APK MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman Tahun 2015-2019

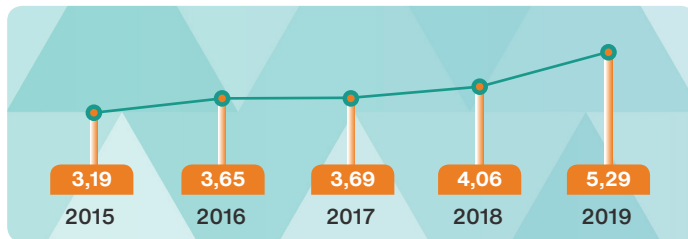


Gambar 1.24

Grafik APM MTs/Wustha/SMPTK Tahun 2015-2019



Gambar 1.25
Grafik APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman
Tahun 2015-2019



Gambar 1.26
Grafik APK PTK/Ma'had Aly Tahun 2015-2019

Keterangan Gambar
Satuan APK dan APM = Persentase
Sumber: Kemendikbud 2019

Gambar 1.19 s.d 1.26 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akses pendidikan pada tingkat dasar dan menengah, bahkan melebihi target Renstra sebelumnya. Peningkatan akses ini memberikan kontribusi dalam menyukseskan program Wajar Dikdas 12 Tahun yang berkualitas baik melalui madrasah maupun satuan pendidikan keagamaan. Kenaikan APK yang melebihi target berkaitan dengan kemampuan Pendidikan Islam menjaring dan memberikan santunan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang kemudian menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa kepada peserta

didik dari keluarga kurang mampu sebesar 64,49 persen - 73,63 persen (Sumber: Ditjen. Pendidikan Islam, 2019). Apabila dibandingkan kelompok yang sama di sekolah umum yang memperoleh KIP/PIP yang hanya 46,45 persen (Dihitung dari pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di <https://www.Kemdikbud.go.id/main/blog/2019/01/penyaluran-kartu-indonesia-pintar-melebihi-target>); ini menunjukkan bahwa Pendidikan Islam merupakan instrumen nasional untuk menjangkau peserta didik yang kurang mampu, yang sebagian besar berada di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau oleh pendidikan umum, termasuk daerah 3T.

Apabila dikaitkan dengan capaian APK nasional, peningkatan akses di tingkat menengah belum berhasil berkontribusi dalam menuntaskan program Wajib Belajar 12 Tahun (APK nasional di tingkat sekolah menengah atas baru mencapai 88,55% (Sumber: Dapodik, Kemendikbud, 2019).

Peningkatan akses di perguruan tinggi keagamaan cukup signifikan, tetapi jumlah absolut mahasiswa yang ditampung baru satu juta orang lebih sedikit (Tabel 1.7). Pemberian beasiswa BIDIKMISI kepada mahasiswa kurang mampu sebanyak 235.348 orang selama 2015-2019 atau sebesar 5,82% dari total mahasiswa belum bisa menaikkan akses PTK secara signifikan. Semetara itu, masih rendahnya APK perguruan tinggi secara keseluruhan sangat memengaruhi capaian IPM Nasional, yang pada tahun 2018, baru mencapai 71,39.

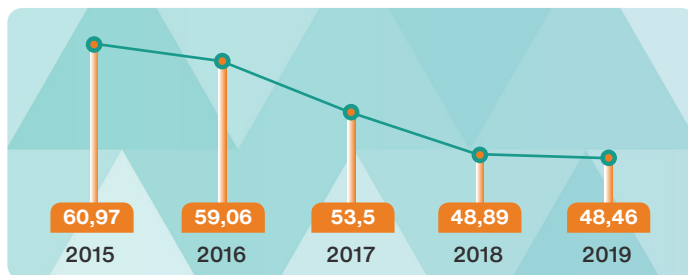
1.1.8. Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pencapaian tujuan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan ditandai oleh tiga hal, yaitu: (1) meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional



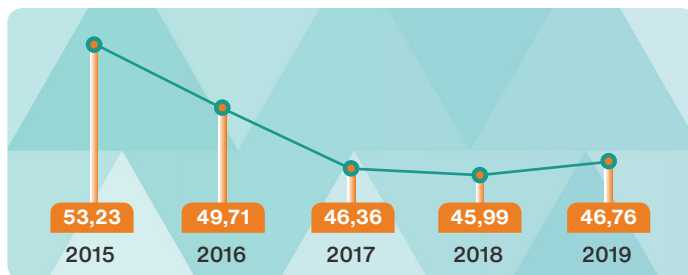
siswa MTs/SMPTK; (2) meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MA/SMTK/SMAK; dan (3) meningkatnya Indeks Integritas Siswa.

Pada Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019, rata-rata nilai Ujian Nasional siswa MTs/SMPTK cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata nilai Ujian Nasional MA/SMTK/SMAK. Hal tersebut dapat terlihat dari grafik berikut.



Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.27
Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MTs/SMPTK
Tahun 2015-2019



Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.28
Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MA/SMTK/
SMAK Tahun 2015-2019

Menurunnya nilai UN disebabkan oleh dua hal, yaitu: (1) tahun 2016 mulai diterapkannya penyelenggaraan UN berbasis komputer yg memiliki tingkat akuntabilitas penyelenggaraan lebih tinggi, (2) meningkatnya tingkat kesukaran soal, dan (3) diintegrasikannya soal-soal kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skill (HOTS)* dalam tes.

Hasil studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kemampuan yang diperlukan pada Abad ke-21 adalah kemampuan berpikir, kemampuan literasi, kreativitas, ketrampilan kolaborasi, komunikasi, keterampilan hidup, dan literasi informasi. Rendahnya skor kemampuan berpikir ditingkat MA dan MTs berhubungan dengan rendahnya kemampuan literasi dasar siswa pada tingkat MI mulai dari kelas rendah (kelas I s/d III). Hasil tes literasi dasar (huruf, suku kata, dan kata) pada siswa MI menunjukkan bahwa ada 23 persen siswa tidak lulus, sementara untuk siswa SD hanya 17 persen.

Berdasarkan perolehan tes PISA yang diberikan kepada siswa kelas X, siswa MTs hanya mencapai tingkat kemampuan berpikirnya peringkat ke-2 ke bawah (dari 6 peringkat) dengan skor 68,5; 55,4; dan 56 persen untuk mata pelajaran Matematika, Literasi (Membaca), dan IPA. Hal yang senada diperoleh dari tes nasional AKSI, tetapi lebih buruk pada mata pelajaran Matematika yaitu 77,30 persen, sementara untuk mata pelajaran Literasi (Membaca) 46,80 persen lebih baik dari capaian nasional yaitu sebesar 53,20 persen.

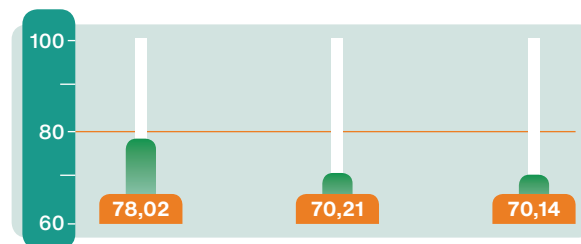


Tabel 1.8
Hasil Tes Kemampuan Berpikir dan Literasi Siswa Madrasah

No.	Jenis tes dan kategori	Capaian (%)	Capaian nasional (%)	Keterangan
1.	Persentase siswa peserta memperoleh di atas skor minimal hasil tes PISA			
	Matematika	31,50	31,40	
	Membaca	55,40	44,62	
	Sains	56,00	44,05	
2.	Persentase siswa peserta dari MI kelas IV memperoleh di bawah skor di bawah minimal hasil tes AKSI			Persentase menunjukkan yang belum menguasai kompetensi dasar (dibawah level 2)
	Matematika	77,30	22,90	
	Membaca	46,80	53,20	
	Sains		26,40	
3.	Persentase siswa peserta dari MI tidak lulus tes literasi dasar			Lokasi sampel di Jatim
	L+ P	23,00	17,00	
	Laki-laki	28,00	21,00	
	Perempuan	17,00	13,00	
4.	Nilai pemahaman berdasarkan kompetensi peserta dari MI			Hal yang dinilai: (a) fokus dan dapat mengambil informasi yang dinyatakan dengan jelas; (b) membuat kesimpulan yang jelas; (c) menafsirkan dan mengintegrasikan ide dan informasi; (d) menulis hasil dikte.
	L+P	69,3	72,3	
	Laki-laki	71,1	75,2	
	Perempuan	67,3	69,1	

Sumber: Puspendik Kemendikbud, 2018; Sakernas 2017; PISA, dan hasil tes AKSI dan literasi dari program Inovasi Kurikulum

Sejak tahun 2017 Kementerian Agama telah melakukan survei untuk mengukur Indeks Integritas Siswa pada jenjang menengah atas, yang hasilnya dapat dilihat pada Gambar 1.29 berikut.



Sumber : Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.29
Capaian Indeks Integritas Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2017-2019



Nilai indeks 78,02 persen pada tahun 2017 menunjukkan bahwa integritas siswa di Indonesia berada di kategori tinggi. Pada tahun 2018, survei integritas siswa di Indonesia kembali dilakukan dengan capaian sebesar 70,21 persen atau berpredikat baik, tetapi terjadi penurunan. Pada tahun 2019, survei terkait integritas siswa di Indonesia dilakukan survei indeks karakter siswa, yang di dalamnya termasuk komponen integritas. Jumlah siswa yang disurvei 11.287 siswa, yang hasilnya stagnan pada nilai 70,14, sehingga untuk meningkatkan menjadi penting.

Untuk meningkatkan integritas peserta didik (baik dimensi prioritas maupun bukan prioritas) diperlukan sinergitas antara trilogi pusat pendidikan, yaitu: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus sejalan, seirama, senafas, dan sewarna dengan bingkai pembiasaan dan keteladanan.

Pengembangan integritas peserta didik di madrasah dan lembaga Pendidikan keagamaan dilakukan oleh satuan pendidikan, khususnya oleh kepala satuan Pendidikan yang secara terus menerus dan berkesinambungan mengeluarkan kebijakan yang dapat menumbuhkembangkan perilaku integritas, misalnya: dengan menekan perilaku mencontek dengan membuat slogan: "kerja mandiri itu menyenangkan", "mencontek itu tidak asyik", dan "cari bocoran tidak asyik".

Peningkatan integritas siswa dilakukan oleh guru-guru, khususnya guru agama melalui keteladanan. Selain itu, guru membuat "buku siswa" yang ditandatangani oleh orang tua untuk tugas-tugas keagamaan. Peningkatan integritas peserta didik juga harus melibatkan keteladanan orang tua di rumah. Orang tua harus berkomunikasi dengan guru untuk memantau kegiatan peserta didik dalam kegiatan sehari-hari.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah lingkungan strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi (kekuatan) yang memengaruhi hasil capaian yang baik, peluang yang dihadapi, tantangan dan permasalahan (kelemahan) yang dimiliki. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, kelemahan untuk diperbaiki dan diperhitungkan dalam penyusunan program, tantangan untuk dimanfaatkan sebagai peluang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi mendatang.

1.2.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Tujuan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama diukur menggunakan Indeks Kesalehan Sosial. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung keberhasilan capaian tujuan ini, meliputi:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Peran yang telah dilakukan oleh penyuluh agama sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama cukup efektif sehingga menjadi modal yang luar biasa selama ini;	1. Akhir-akhir ini telah bermunculan berbagai platform digital untuk pembelajaran jarak jauh (<i>on-line</i>) menjadi tantangan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif metode penyuluhan, yang diterapkan guna menjangkau umat lebih banyak, terutama kaum milenial;



2. Pembiasaan nilai kesalehan di lingkungan keluarga terbukti memberi pengaruh yang tinggi, sehingga perlu pelestarian tradisi yang dicontohkan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak sejak dini, seperti ibadah, literasi kitab suci dan silaturahmi antarsesama;	2. Penyuluhan agama diarahkan pada kepedulian sosial, penguatan relasi antarmanusia berbeda SARA, etika di ruang publik, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan pada negara pemerintah;
3. Selain penyuluh agama, penyebaran pesan-pesan keagamaan oleh para tokoh agama, rohaniawan, dan tokoh-tokoh masyarakat memberikan kontribusi yang berarti. Kondisi faktual ini dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kekurangan jumlah penyuluh agama; dan	3. Berkembangnya berbagai media sosial seperti TV, instagram, internet, e-koran, memberikan peluang untuk pengembangan jalur media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan, perluasan jangkauan, dan promosi pesan-pesan keagamaan, tak terkecuali hingga di daerah 3 T; dan
4. Kegiatan keagamaan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Perhatian Pemerintah sangat tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan ditunjukkan pada penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dilakukan dalam skala regional, nasional, bahkan internasional.	4. Beragam kegiatan keagamaan yang lahir dan berkembang di masyarakat dapat menjadi instrumen untuk membangun jalinan interaksi sesama anak bangsa serta meneguhkan sikap toleransi intra dan antarumat beragama. Melalui sarana tersebut turut pula memupuk dan memperkuat solidaritas kolektif di lingkungan masyarakat, selain dapat pula menjadi ajang kompetitif yang memunculkan semangat sportifitas, baik melalui ajang lomba di tingkat nasional maupun internasional.

Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Metode penyuluhan yang dilakukan selama ini masih konvensional, mengandalkan pertemuan tatap muka yang membatasi cakupan kelompok sasaran penyuluhan yang mudah dijangkau;	1. Rendahnya kompetensi penyuluh agama dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam menggunakan <i>platform</i> digital. Kelemahan dalam kompetensi pedagogik dan metode inovasi penyuluhan oleh para penyuluh agama ini dapat menyebabkan keteringgalan dalam menangkap ceruk pasar dakwah keagamaan atau bahkan dapat berakibat pada penyampaian materi yang tidak otoritatif dan tidak maksimal.
2. Arah pembinaan masih fokus pada ritual keagamaan. Materi penyuluhan kesalehan sosial belum banyak menjadi fokus penyuluhan agama;	2. Materi penyuluhan dengan nilai kesalehan sosial yang tidak seimbang akan menyebabkan konten dakwah keagamaan yang kering dan tidak sesuai dengan semangat zaman;
3. Belum adanya sistem pengendalian dan <i>monitoring</i> dalam penyiaran pesan-pesan keagamaan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diatasi sejak dini; dan	3. Belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan bagi rohaniawan dan tokoh-tokoh agama dapat berakibat pada rendahnya kualitas konten pesan keagamaan, yang selanjutnya berakibat kepada pendangkalan dalam pemahaman keagamaan di kalangan sebagian umat beragama; dan
4. Adanya kegiatan keagamaan yang kadang-kadang disalahgunakan untuk kepentingan lain termasuk kepentingan politik. Kegiatan keagamaan yang melibatkan umat secara massal yang kurang terkendali dapat menimbulkan konflik atau kerusakan tatanan sosial.	4. Masih ada kegiatan keagamaan yang mengarah kepada penyimpangan dan konservatisme ajaran agama yang mengarah kepada eksklusivisme dan ekstrimisme beragama.



Memperhatikan potensi yang dimiliki, maupun kelemahan, dan peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka permasalahan strategis dalam Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama ke depan perlu difokuskan kepada: (1) meningkatkan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan *platform digital* untuk penyuluhan daring (*on-line*), (2) revitalisasi pembinaan keumatan dengan memperkuat kegiatan dan penyuluhan pada aspek kesalehan sosial; (3) standarisasi kompetensi bagi agen penyiaran pesan keagamaan, (4) optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, dan (5) pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

1.2.2. Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Sudah adanya dasar hukum pada tingkat implementasi dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;	1. Kedudukan hukum PBM belum mengikat Pemda, sehingga peningkatan status hukum PBM menjadi Perpres menjadi hal penting dalam usaha pemberdayaan FKUB;

- | | |
|--|---|
| 2. Praktik kehidupan kerukunan umat beragama telah banyak ditunjukkan dari budaya kearifan lokal (adat istiadat) dan nilai-nilai lokal (seperti adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah di Sumatera Barat, Pela Gadong di Maluku, Tongkonan di Tana Toraja) yang sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai khazanah kekayaan budaya bangsa; | 2. Kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu diangkat dan ikut mewarnai pola-pola kerukunan yang bersifat nasional dan dapat dijadikan sebagai modal untuk mewujudkan kerukunan nasional misalnya melalui program GNHR; |
| 3. Telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di pusat dan daerah, desa sadar kerukunan, yang didukung dengan kerja sama nasional dan internasional. FKUB telah berhasil menciptakan kerukunan umat beragama melalui perannya dalam pengembang toleransi beragama (promosi), pemberian advokasi, penasehat dan pembimbing toleransi (konsultasi), serta penengah yang adil dan bijaksana (arbitrasi); | 3. Antusiasme masyarakat untuk memperoleh tuntunan moderasi beragama dalam rangka menciptakan kerukunan beragama cukup tinggi, sehingga implementasi gerakan moderasi beragama ditunggu; |
| 4. Aktor-aktor yang terhimpun dalam FKUB pada umumnya memiliki pengaruh yang besar terhadap umat beragamanya masing-masing; | 4. Telah diterbitkan buku Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama yang memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep dan indikatornya (tidak sekadar kerukunan umat beragama), informasi pengalaman empirik, dan strategi penguatan dan panduan implementasinya; |
| 5. Dialog kerukunan telah efektif dalam memperkuat toleransi dan pencegahan konflik umat beragama; | 5. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi peluang yang perlu diantisipasi penggunaannya untuk menyebarluaskan isu tentang kerukunan umat beragama. Penguatan dialog kerukunan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi. |



- | | |
|--|---|
| <p>6. Referensi dan sumber belajar tentang ilmu keagamaan yang memuat kerukunan umat beragama telah diterbitkan dalam bentuk buku maupun <i>digital book</i> dan didistribusikan ke daerah; dan</p> <p>7. Banyak khazanah budaya nusantara sebagai aktualisasi dari nilai keagamaan yang diadopsi oleh budaya lokal.</p> | <p>6. <i>Digital database</i> kerukunan umat beragama secara nasional diperlukan dalam memetakan deteksi potensi konflik umat beragama, serta mengiringinya dengan pemberdayaan dialog kerukunan di lingkungan masyarakat yang mengangkat materi bina damai dan kerukunan; dan</p> <p>7. Budaya lokal yang sarat dengan nilai agama dapat dijadikan instrumen untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan keagamaan yang moderat.</p> |
|--|---|

Kelemahan	Ancaman/Masalah
<p>1. Belum semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melaksanakan amanat PBM secara optimal, khususnya terkait kebijakan anggaran kerukunan umat beragama; sementara itu kasus konflik dan intoleransi serta ketidakrukunan hidup beragama banyak terjadi pada tingkat lokal;</p> <p>2. Karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural, berpotensi memunculkan permasalahan yang disebabkan oleh gesekan yang berlatar belakang SARA;</p> <p>3. Peran FKUB lebih fokus kepada penyelesaian konflik, sementara cakupan moderasi beragama lebih luas;</p>	<p>1. Pemahaman yang dangkal tentang peraturan perundangan tentang kerukunan beragama, yang disertai asumsi atau pra pemahaman yang sempit dikhawatirkan dapat mengarah kepada pemicu konflik, terutama bagi para personal di lingkaran aktor agama atau pemerintahan;</p> <p>2. Respon penanganan konflik dan ketidakrukunan baik yang bersifat intern maupun ekstern antarumat beragama secara komprehensif, sinergis, berkesetupaduan, cepat, dan berkesinambungan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal;</p> <p>3. Gerakan sebagian aktor yang berwawasan radikal juga terus terjadi dan memengaruhi aktor-aktor lainnya yang tergabung dalam FKUB.</p>

- | | |
|---|--|
| <p>4. Sebagian besar aktor FKUB belum memahami konsep, indikator, strategi, dan implementasi moderasi beragama;</p> <p>5. Dialog kerukunan umat beragama belum maksimal dalam menyiarkan moderasi beragama;</p> <p>6. Konten buku dan referensi ilmu keagamaan yang memuat kerukunan masih bersifat teoritis dan belum secara praktis serta belum maksimal dimanfaatkan oleh satuan pendidikan; dan</p> <p>7. Belum diidentifikasi dan dipetakan dengan baik budaya lokal yang bernuansa keagamaan.</p> | <p>4. Belum tersedia paket pelatihan terstandar bagi aktor kerukunan umat beragama yang dapat dipakai instruktur dalam menyelenggarakan pelatihan;</p> <p>5. Dialog kerukunan umat beragama belum diselenggarakan secara maksimal di ruang publik. Belum maksimalnya dialog kerukunan lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi sebagai pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama;</p> <p>6. Buku dan referensi ilmu keagamaan belum cukup menampilkan contoh konkret dan praktik hidup rukun antarumat beragama; dan</p> <p>7. Apabila tidak dilakukan pembinaan, nilai-nilai budaya lokal dapat bertentangan dengan ajaran agama.</p> |
|---|--|

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul pada penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang perlu diangkat adalah: (1) perlu ditingkatkannya status dan cakupan peraturan perundangan tentang kerukunan umat beragama menjadi Peraturan Pemerintah tentang Moderasi Beragama yang didukung dengan UU tentang Pelindungan Umat Beragama; (2) penjabaran konsep moderasi beragama ke dalam tataran implementasi beserta contoh konkritnya disesuaikan dengan karakteristik agama masing-masing; (3) peningkatan



kapasitas FKUB dalam menyampaikan pesan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (4) meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya dalam pengendalian konflik; (5) mengendalikan konten moderasi beragama untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama; dan (6) penyebarluasan gagasan dan contoh moderasi beragama melalui berbagai metode dan saluran media sosial bahkan hingga pada satuan pendidikan.

1.2.3. Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Capaian tujuan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata diukur dengan tiga indikator, yaitu: (1) Indeks Layanan Keagamaan; (2) Indeks Kepuasan Layanan KUA; dan (3) Indeks Kepuasan Layanan Jaminan, Perlindungan, dan Pengawasan Produk Halal. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Kebiasaan membaca kitab suci menjadi modal masyarakat untuk memperoleh layanan kehidupan keagamaan secara kontinu. Penyediaan kitab suci sudah dilakukan 2.749.282 buah kitab suci dan buku keagamaan untuk seluruh agama dan segenap lapisan masyarakat yang membutuhkan;	1. Peta kebutuhan layanan keagamaan sangat penting sebagai dasar intervensi kebijakan, sehingga diketahui segmen masyarakat yang menjadi prioritas sasaran layanan. Misalnya kaum difabel (tuna netra), Daerah 3 T, dan seterusnya;

2. Rumah ibadah sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat peribadahan memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik;

3. Pelayanan kehidupan beragama menjadi bagian dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah sampai tingkat kecamatan dan berkelanjutan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan, telah dibangun 5.945 KUA. Pelayanan keagamaan pada KUA sebagian besar berkaitan dengan pencatatan nikah disamping tugas lainnya;

4. Pelaksanaan kursus calon pengantin atau Bimwin telah dilakukan bekerja sama dengan puskesmas, KPPA, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan jangkauan sasaran layanan yang diberikan;

5. Pelayanan bimbingan keluarga telah terintegrasi dengan semua layanan yang ada;

2. Rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dan ramah (anak, disabilitas, lansia);

3. Perkembangan digitalisasi berpotensi untuk dimanfaatkan dalam mendukung dalam meningkatkan pelayanan keagamaan di KUA;

4. Bimwin menjadi kegiatan pendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai prasyarat membangun keluarga yang tangguh;

5. Pelayanan bimbingan keluarga perlu diperluas agar menjangkau kalangan remaja melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;



6. UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diterbitkan agar penyelenggaraan JPH memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal; dan	6. Kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi dan menggunakan produk halal sudah meningkat. Namun, masih banyak produk yang beredar tetapi belum memiliki sertifikat halal. Potensi produk halal yang belum disertifikasi masih tinggi, sehingga dapat menghasilkan PNPB; dan
7. Pengkajian halal suatu produk telah mendorong berdirinya pusat riset halal atau lembaga pemeriksa halal di seluruh dunia. LPH menjadi sangat penting dalam manajemen pengelolaan halal di suatu Negara.	7. PTK mempunyai peran strategis dalam melakukan pemeriksaan produk halal. Antusiasme perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang lain untuk menjadi laboratorium pengujian produk halal sangat tinggi.
Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Kecukupan pengadaan kitab suci (termasuk bagi tuna netra), keterbukaan informasi, keterjangkauan penyebaran, dan efektifitas sosialisasi pelayanan kitab suci masih dianggap belum memadai karena data pendukung belum akurat; dan sistem informasi belum sempurna;	1. Pelayanan kitab suci belum memenuhi standar pelayanan yang mencakup: penyediaan, penyebaran dan pengawasan;
2. Pembinaan kepada pengelola rumah ibadah belum maksimal dilakukan;	2. Penyediaan rumah ibadah tidak dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Agama, hanya memberikan bantuan operasional;
3. Anggaran pendukung operasional KUA Kecamatan belum optimal dan kualitas sumber daya manusia pendukungnya terbatas;	3. Sekitar 7,08 persen gedung KUA sudah rusak berat dan 1.149 KUA belum memiliki gedung sendiri. Sehingga pelayanan KUA di gedung tersebut belum berjalan optimal. Kualitas sumber daya manusia pendukungnya terbatas;

4. Terbatasnya jumlah fasilitator (yang bersertifikat) dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dan sebagian besar peserta kesulitan dalam mendapatkan izin 2 (dua) hari kerja dari tempat bekerja;	4. Anggaran untuk Bimbingan Perkawinan Pranikah hanya teralokasi 7.37% dari rata-rata peristiwa nikah 2.000.000 pasang per tahun;
5. Bimbingan keluarga belum efektif dalam membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera (sakinah), karena jangkauan sasarannya masih terbatas;	5. Bimbingan keluarga sudah dilakukan pada pasangan dalam keluarga namun belum banyak dilakukan pada remaja;
6. Pemerintah mengambil tanggung jawab layanan produk halal, tetapi belum didukung dengan organisasi yang memadai sehingga belum efektif. Perangkat pelayanan registrasi dan sertifikasi halal baru berjalan sejak tahun 2019, dengan dikeluarkannya PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal; dan	6. Struktur kelembagaan pendukung ditingkat daerah belum dibentuk; dan
7. LPH saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh LPPOM.	7. Belum ada pemberdayaan PTK dan pusat penelitian lainnya untuk dikembangkan menjadi LPH yang ikut berperan aktif dalam pemeriksaan kehalalan produk.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama ke depan lebih difokuskan kepada: (1) digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses; (2) peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan operasionalnya; (3) peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran; (4) pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal; (5) pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal.



1.2.4. Peningkatan Pemanfaatan dan Perbaikan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendorong dalam peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Potensi dana sosial keagamaan terus meningkat setiap tahun;	1. Pengembangan dan pembinaan lembaga dana sosial keagamaan dilakukan secara masif;
2. Upaya untuk mengedukasi umat beragama dalam meningkatkan partisipasi dana sosial keagamaan telah dilakukan;	2. Jumlah orang yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam dana sosial keagamaan masih besar;
3. Adanya insentif penyaluran dana sosial keagamaan untuk mengurangi pajak sudah diberikan oleh pemerintah; dan	3. Dana sosial keagamaan dapat dimanfaatkan dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan; dan
4. Pemberdayaan ekonomi keuangan syariah berpotensi untuk dikembangkan mengingat besarnya jumlah umat Islam di Indonesia.	4. Sektor keuangan syariah dapat berkembang dan diminati umat Islam.

Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Potensi dana sosial ekonomi keagamaan umat yang besar belum terdata dengan baik. Misalnya angka pengumpulan dana zakat yang dihitung baru melalui BAZNAS, sementara masyarakat menyalurkan dana zakatnya di berbagai lembaga zakat dan bahkan langsung ke mustahik;	1. Dana sosial keagamaan yang terkumpul belum dikelola secara optimal dalam meningkatkan ekonomi umat;
2. Masyarakat masih menemui maraknya praktik penyalahgunaan dana sosial yang terkumpul karena tidak dilaporkan secara lengkap;	2. Jumlah umat yang menyalurkan dana sosial keagamaan relatif tidak meningkat;

3. Masih adanya lembaga pengelola dana sosial keagamaan yang belum menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> , pada satu sisi dapat menghambat kepercayaan masyarakat; dan	3. Tingkat pemahaman umat Islam tentang layanan lembaga keuangan syariah masih rendah, sementara itu sosialisasi yang dilakukan belum efektif; dan
4. Lembaga keuangan syariah yang sudah dikembangkan belum dimanfaatkan secara optimal.	4. Belum maksimalnya bidang investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul, isu strategis yang perlu diangkat adalah: (1) menyusun regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan; (2) meningkatkan partisipasi lembaga keuangan dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan; dan (3) edukasi dan sosialisasi pengelolaan dana sosial keagamaan kepada umat beragama.

1.2.5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah, sebagai berikut:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Pendaftaran calon jemaah haji semakin meningkat. Melalui Siskohat, sistem pendaftaran dan pelaporan haji terpadu sangat intensif;	1. Peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji;
2. Tingginya antusiasme masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji menjadikan masyarakat antusias dalam mencari informasi yang berkaitan dengan ibadah haji;	2. Perbedaan kondisi Indonesia dengan Arab Saudi sering kali menjadi permasalahan yang tidak terduga, sehingga perlu penanganan yang spesifik dan cepat tanggap;



3. Telah dilakukan revitalisasi satuan tugas operasional untuk memastikan jemaah haji memperoleh layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi dan transportasi;	3. Sistem pelaporan berbasis aplikasi <i>mobile</i> untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi;
4. Bimbingan manasik haji kepada calon jemaah haji dan umrah sudah dilakukan secara intensif;	4. Bimbingan manasik haji dilakukan melalui teknologi dan informasi;
5. Adanya peningkatan biro penyelenggaraan haji dan umrah yang siap memfasilitasi jemaah dalam persiapan dan pelaksanaan proses ibadah haji dan umrah;	5. Peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah di Arab Saudi diperlukan dengan membentuk Kantor Pelayanan Terpadu;
6. Proses perizinan PPIU dilakukan secara elektronik atau <i>online</i> ; dan	6. PPIU semakin banyak terbentuk dan diperlukan umrah digital untuk mendukung layanan umrah; dan
7. Kementerian Agama telah menetapkan Lembaga Akreditasi PPIU.	7. Semakin banyak non PPIU memproses perizinan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Integrasi rekam kesehatan jemaah dengan sistem aplikasi informasi terpadu masih perlu ditingkatkan;	1. Kuota haji yang tersedia relatif stagnan sehingga memperpanjang waktu tunggu keberangkatan calon jemaah haji. Upaya untuk meningkatkan kuota telah dilakukan terus menerus akan tetapi hasil yang diperoleh terbatas;
2. Petugas haji belum maksimal dibekali dengan kemampuan manajemen tanggap darurat;	2. Pembekalan petugas haji masih dilakukan secara konvensional;

3. Otoritas jasa layanan pemerintah Arab Saudi sehingga diperlukan koordinasi yang kuat;	3. Jumlah tenda sebagai tempat akomodasi yang tersedia masih terbatas;
4. Pembinaan pasca pelaksanaan haji dan umrah belum diprogramkan untuk mempertahankan kualitas pengamalan ajaran agama secara berkesinambungan;	4. Pembinaan pasca pemulangan haji belum dilakukan mengingat keterbatasan alokasi dan petugas;
5. Sistem pengendalian dan pengawasan biro penyelenggaraan ibadah haji dan umrah belum terintegrasi dalam satu aplikasi;	5. Masih banyak biro penyelenggara ibadah haji dan umrah yang curang sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban;
6. Jumlah SDM bidang umrah tidak proporsional; dan	6. PPIU semakin banyak namun sistem belum terintegrasi; dan
7. Izin PPIU telah dibuka namun tidak dilengkapi dengan dana penerimaan PNPB.	7. Adanya COVID-19 menyebabkan PPIU mengalami permasalahan dalam bisnisnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama ke depan lebih difokuskan kepada: (1) efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji; (2) peningkatan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji; (3) peningkatan respon darurat; (4) penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi; (5) penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah; dan (6) peningkatan kerja sama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.



Gambar 1.30
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019



1.2.6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

Terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagai berikut:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satuan kerja sudah berjalan dengan baik;	1. Karena sentralistik, cakupan pembinaannya mencapai 4.593 satuan kerja yang tersebar di seluruh provinsi, lingkup pengawasan yang sangat besar;
2. Dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Agama sudah mencapai opini WTP terhadap LKKA dari tahun 2016-2018;	2. Potensi PNPB yang sangat besar, termasuk pengelolaan asrama haji, pendidikan, dan jaminan produk halal, belum dapat digali secara optimal;
3. Dalam pengelolaan data, sudah digunakan teknologi dan informasi era 4.0 secara parsial pada masing-masing satuan kerja baik di Pusat maupun di Daerah;	3. Perkembangan TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan ketepatan data yang dikumpulkan, serta mengintegrasikan data yang ada;
4. Penerapan zona integritas dan budaya kinerja yang semakin baik merupakan wujud keberhasilan pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Agama;	4. Manajemen kinerja dan <i>merit system</i> yang selaras antara Pusat hingga Daerah dilakukan dalam upaya perbaikan kinerja;
5. Pelaksanaan audit berbasis risiko sudah sesuai dengan <i>best practices</i> yaitu pelaksanaan pengawasan diarahkan dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, yang didukung dengan program advokasi;	5. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam bentuk audit kinerja berbasis tugas fungsi, audit kinerja program, audit tematik dan lainnya mampu menghasilkan perbaikan tata kelola yang efektif dan akuntabel;

6. Peran penelitian kebijakan telah mendukung peningkatan kinerja organisasi. Beberapa hasil penelitian telah berhasil dikemas menjadi produk naskah kebijakan (*Policy Paper*) dan *policy brief* untuk mendukung perumusan kebijakan; dan

6. Hasil penelitian kebijakan memiliki potensi besar untuk digunakan dalam perumusan kebijakan; dan

7. Kesepahaman antara Balitbang dan Diklat sebagai lembaga *think tank* internal Kementerian Agama dengan unit organisasi menjadi bentuk komitmen atas pemanfaatan hasil penelitian kebijakan.

7. Komunikasi yang intens dengan unit teknis terkait, terkait dalam proses penelitian mulai dari perumusan masalah sampai dengan hasil penelitian.

Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Sistem komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tepat belum diformulasikan;	1. Dengan kompleksnya jumlah satuan kerja, proses koordinasi Reformasi Birokrasi belum diikuti keterlibatan pimpinan secara komprehensif;
2. Pengelolaan aset BMN belum tertib dalam menginventarisir barang;	2. Sebagian aset hak milik masih diakui oleh pihak lain, dan lambannya proses alih status kepemilikan;
3. Koordinasi, sinkronisasi, ketepatan data masih lemah;	3. Data yang dikumpulkan terjadi duplikasi karena program aplikasi yang digunakan bervariasi, sehingga susah untuk diintegrasikan;
4. Belum memiliki strategi komprehensif dalam penerapan nilai-nilai budaya kinerja;	4. Belum maksimal upaya yang dilakukan untuk mendorong perubahan secara nyata penerapan budaya kinerja, terutama satuan kerja di daerah;
5. Pemahaman ASN Kementerian Agama tentang manajemen risiko dan pengendalian intern sehingga masih terjadi berbagai penyimpangan setiap tahunnya;	5. Manajemen risiko dan pengendalian internal menjadi perhatian pimpinan satuan kerja;



6. Proporsi penelitian yang dirancang khusus sebagai penelitian kebijakan masih terbatas; dan	6. Masih lemahnya kesadaran akan pemberian prioritas pada suatu isu atau masalah strategis yang diperlukan oleh pelaksana program; dan
7. Penelitian yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak dapat secara cepat untuk menjawab berbagai permasalahan kebijakan yang mendesak.	7. Perumusan kebijakan membutuhkan waktu yang cepat, sehingga diperlukan kecepatan untuk menghasilkan naskah kebijakan. Model penelitian yang membutuhkan waktu lama tidak akan laku untuk perumusan kebijakan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peningkatan tata kelola pemerintahan kedepan lebih difokuskan kepada: (1) peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif; (2) peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang *valid, reliabel, uptodate*, dan terintegrasi; (3) pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*); (4) penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; (5) peningkatan kualitas hasil penelitian sebagai rumusan kebijakan yang didukung dengan data akurat.

1.2.7. Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pemerataan layanan pendidikan di Kementerian Agama mencakup pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan. Berikut merupakan beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat mendorong peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan telah membantu penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun dan menjangkau peserta didik dari keluarga miskin;	1. Pemerintah menjamin akses di tingkat Wajar Dikdas 12 Tahun dengan BOS dan KIP;
2. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas sudah dilakukan melalui pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan program kesetaraan;	2. Peningkatan kesiapan belajar siswa Pra-Sekolah;
3. Melalui madrasah dan pendidikan keagamaan telah menjangkau semua lapisan masyarakat, umat beragama di Indonesia dapat: (1) mengekspresikan identitas budaya; (2) menempuh pendidikan; (3) mendalami ajaran agama; (4) meretas jalan kultural yang mendorong proses mobilitas sosial; dan (5) menghasilkan sarjana-sarjana agama yang telah berperan dalam pembangunan melalui berbagai profesi;	3. Diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran;
4. Pemerintah telah memberikan bantuan operasional atau BOS, yang menjamin satuan pendidikan memperoleh anggaran untuk membiayai operasional dan peningkatan mutu pendidikan. Melalui PIP, telah disalurkan bantuan afirmasi kepada peserta didik yang kurang mampu dan ini telah berhasil mempertahankan peserta didik tidak putus sekolah;	4. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;



5. Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan telah banyak berperan dalam menuntaskan Wajar Dikdas 12 Tahun melalui PDF/ Muadalah dan pendidikan kesetaraan; dan	5. Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat; dan	4. Bagi sebagian satuan pendidikan, jumlah dana BOS belum mencukupi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jumlah dana PIP yang tersedia belum sebanding dengan jumlah peserta didik yang membutuhkan di lapangan karena belum sinkronnya data DTKS dengan data pendidikan di Kementerian Agama;	4. Proporsi dana BOS yang disediakan hanya mencukupi sebesar 30% dari total kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Penyaluran PIP sebagian besar dilakukan oleh Pusat sehingga proses distribusinya membutuhkan waktu yang lama;
6. Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan di Pesantren dan satuan pendidikan lainnya telah berhasil menjadi alternatif model pembelajaran non-formal untuk menuntaskan Wajar Dikdas 12 Tahun bagi peserta didik yang tidak memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal.	6. Data Dapodik menunjukkan bahwa masih ada sekitar 8 juta ATS. Pendidikan kesetaraan berpotensi besar untuk menampung ATS tersebut agar memperoleh pendidikan. Tantangannya adalah memperoleh data tersebut dan menarik kembali ATS tersebut ke dalam sistem pendidikan.	5. Lokasi pesantren berada di daerah terpencil, sehingga kurangnya akses dan kesempatan waktu yang tersedia. Disamping itu, jaminan mutu kelembagaan pada Pesantren masih rendah; dan	5. Skema pendanaan APBN berbasis mutu dalam Pesantren belum mengikutsertakan peran dan partisipasi swasta dan/atau masyarakat; dan
Kelemahan	Ancaman/Masalah		
1. Kenaikan APK belum diikuti dengan peningkatan mutunya. Masih banyaknya satuan pendidikan yang belum optimal dalam meningkatkan mutunya;	1. Akses pendidikan yang berkualitas memberikan kontribusi dalam pengukuran IPM;	6. Data ATS sebagian besar karena putus sekolah, sehingga datanya berada pada sekolah sebelumnya	6. ATS belum sepenuhnya diperhatikan karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data dengan satuan pendidikan lainnya.
2. Rendahnya tingkat “kesiapan belajar (<i>readiness to learn</i>)” di jenjang sekolah dasar;	2. Sebagian besar siswa belum sempat memperoleh pendidikan di tingkat PAUD (termasuk TK dan RA);		
3. Sebagian besar madrasah dan pendidikan keagamaan adalah swasta yang kualitas guru dan sarana prasarannya belum memadai;	3. Kualitas guru dan sarana prasarannya belum optimal, 70% belum memiliki laboratorium, 68% belum memiliki perpustakaan sendiri, sebagian besar didukung oleh guru Non PNS (81,8%), dan persebaran guru PNS masih terpusat di pulau Jawa;		

Memperhatikan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan perlu difokuskan kepada (1) afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi: (a) peserta didik di daerah 3 T dan (b) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan; (2) pemberian BOS, bantuan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran; (3) diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali; dan (4) mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.



Gambar 1.31
Siswa MI Merasugun Asso Walesi, Papua



1.2.8. Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan

Berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Penerapan kurikulum 2013 merintis pelaksanaan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir;	1. Metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir dapat diterapkan tanpa merubah kurikulum yang berlaku;
2. Pengintegrasian kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam soal-soal UN, telah mendorong guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir;	2. Meningkatkan kemampuan berpikir dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan;
3. Sesuai dengan SNP, guru minimal berkualifikasi ijazah S1 dan memiliki sertifikasi kompetensi. Lebih dari 90% guru sudah memenuhi kualifikasi minimal tetapi baru 47% yang memenuhi kompetensi;	3. Upaya untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan melalui penyelenggaraan PPG;
4. Pemenuhan standar nasional pendidikan memberikan kontribusi kepada capaian nilai akreditasi satuan pendidikan;	4. Pada akhir tahun 2019, satuan pendidikan yang memperoleh predikat A dan B antara 58,80-68,98 %, berarti masih cukup banyak satuan pendidikan yang belum memperoleh akreditasi yang diharapkan;
5. Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam peraturan perundangan;	5. Moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial yang ditandai dengan stagnannya Indeks KUB yaitu disekitar 73%;
6. Perluasan cakupan mata pelajaran agama ditambah dengan “budi pekerti” dimaksudkan untuk meningkatkan karakter dan etika peserta didik melalui pelajaran agama;	6. Peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan;
7. Mutu pendidikan tinggi keagamaan dapat diukur dengan daya serap lulusannya di dunia kerja dan nilai akreditasinya;	7. Daya serap lulusan PTK cukup menggembirakan (82,20%), tetapi perolehan akreditasinya belum menggembirakan. Pada akhir 2018, program studi yang terakreditasi minimal B baru 51,79%, dan sebagian besar yang belum memenuhi akreditasi tersebut adalah PTK swasta;
8. Peningkatan dosen yang berijazah S3 pada PTK cukup berarti dikarenakan adanya bantuan beasiswa; dan	8. Program 5.000 Doktor menghasilkan peningkatan dosen yang berijazah S3; dan
9. Publikasi artikel ilmiah sudah banyak dihasilkan pada tingkat nasional.	9. Publikasi artikel ilmiah hanya sebagian kecil yang diterima di jurnal internasional.



Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Kurikulum 2013 belum berhasil meningkatkan kemampuan berpikir (nilai UN bahkan menurun);	1. Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah salah satu kemampuan yang diperlukan abad ke-21, apabila tidak dikembangkan akan sangat memengaruhi kualitas angkatan kerja;
2. Hasil tes PISA menunjukkan kemampuan berpikir siswa pada Matematika, IPA, dan Bahasa sangat rendah. Metode pembelajaran masih fokus pada tingkat menghafal dan memahami tingkat rendah;	2. Apabila kemampuan seperti ini tidak dibina sejak tingkat sekolah dasar, maka ini akan memengaruhi hasil belajar pada tingkat yang lebih tinggi;
3. Tingginya persentase guru yang tidak memenuhi kompetensi karena sebagian besar satuan pendidikan adalah swasta didukung dengan guru Non PNS yang standar perekrutannya oleh Madrasah/Sekolah atau Yayasan;	3. Upaya untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan melalui penyelenggaraan PPG, namun hasilnya belum optimal karena: (a) jumlah LPTK yang memenuhi syarat menyelenggarakan PPG terbatas; (b) biaya penyelenggaraannya terbatas dibanding dengan kebutuhan; dan (c) tingkat kelulusannya rendah;
4. Masih rendahnya satuan pendidikan mutu (terutama yang swasta). Pendirian LAM untuk mengatasi keterbatasan tersebut terkendala oleh peraturan;	4. Kapasitas BAN-SM untuk menyelenggarakan akreditasi masih terbatas;
5. Pelajaran agama belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam memperkuat moderasi beragama. Moderasi beragama belum menjadi fokus pembelajaran pendidikan agama;	5. Belum lengkapnya pengaturan pendidikan agama dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (hanya 7 pasal). Di samping itu, belum terpenuhinya guru pendidikan agama yang kompeten, manajemen guru agama yang tidak berada satu naungan instansi, dan kurangnya dosen pendidikan agama di PTKN;

6. Muatan pendidikan agama masih fokus pada pembelajaran agama, maka hasil pendidikan karakter belum optimal;	6. Pendidikan karakter belum diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan;
7. Sebagian pendidikan keagamaan belum memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan;	7. Masih terbatasnya pendidik yang memenuhi kualifikasi minimal, sarana prasarana pembelajaran yang terbatas, dan belum adanya lembaga akreditasi yang mengukur mutunya. Rendahnya perolehan akreditasi tersebut, dikarenakan (a) masih rendahnya proporsi dosen yang berpendidikan S3, (b) terbatasnya kapasitas BAN-PT dalam menyelenggarakan akreditasi, (c) masih sedikitnya jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan, (d) belum dipilahnya sistem evaluasi PTK antara <i>teaching university</i> , <i>vocational university</i> , dan <i>research university</i> ;
8. Sampai dengan tahun 2019, Dosen yang berijazah S3 sebanyak 12,29%. Jumlah ini belum menggembirakan dari target yang ingin dicapai; dan	8. Rendahnya capaian ini disebabkan karena (a) masih banyak peserta program yang belum selesai dan (b) peminat program ini berkurang karena tidak dilengkapi dengan biaya kompensasi tunjangan profesi; dan
9. Kurangnya pembinaan dalam penulisan pendidikan ilmiah yang bertaraf internasional.	9. Terbatasnya biaya penelitian sehingga mengakibatkan kurangnya minat mahasiswa dan dosen untuk mempublikasikan artikel ilmiah.



Berdasarkan pembahasan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka ke depan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan kepada: (1) penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung; (2) peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran; (3) peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik; (4) peningkatan kualitas mental/karakter siswa; dan (5) peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas.



Gambar 1.32
Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019

BAB

2

**VISI, MISI DAN TUJUAN
KEMENTERIAN AGAMA**



2.1. Visi Kementerian Agama

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”**. Adapun Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
3. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
4. Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;

5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan
6. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.

Yang dimaksud “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”.



2.2. Misi Kementerian Agama

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam Renstra ini perlu dikutip sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan bercermin dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan enam misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian empat dari sembilan Visi Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan, yaitu:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5);
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5)
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)

4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1)
6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8)

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama tahun 2020-2024, Kementerian Agama berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bidang agama, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kementerian Agama akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh di depan khalik-Nya, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Kementerian Agama terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien



sehingga setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembiasaan ASN yang profesional dan andal, sebagai lokomotif penggerak dan sekaligus pelaksana dari semua misi yang dicanangkan. Dengan perpaduan seluruh misi yang dicanangkan, maka diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang visi Kementerian Agama akan dapat diwujudkan.



Gambar 2.1
Hubungan antara Misi Kementerian Agama dengan Misi Presiden-Wakil Presiden



2.3. Tujuan Kementerian Agama

Untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Agama

Dalam rangka mencapai 6 (enam) Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Agama menetapkan 13 Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama pada tahun 2024 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama

2. Tujuan 2: Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya.

3. Tujuan 3: Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Indeks kepuasan layanan KUA; 2. Tingkat kepuasan layanan produk halal; dan 3. Indeks kepuasan layanan ibadah haji
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan.



4. Tujuan 4: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	<ol style="list-style-type: none"> Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> Literasi; dan Numerasi Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA: <ol style="list-style-type: none"> Membaca; dan Matematika; dan Sains
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> APK RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha; APK MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman; APK MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman; APK MA/Ulya/SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman; APM MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman; APM MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman; APM MA/Ulya/SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman; dan APK PTK/Ma'had Aly.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B; Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B; Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B; dan Persentase PTK/ Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul.
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks karakter siswa

5. Tujuan 5: Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional; Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan; Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional; dan Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi.



6. Tujuan 6: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	1. Predikat opini laporan keuangan; dan 2. Nilai reformasi birokrasi.
SS13	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>Policy Paper</i>)

2.5. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran strategis. Adapun perumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama	1. Intensitas Ritual 2. Kepedulian Sosial 3. Relasi antar manusia 4. Etika dan budi pekerti	Survei	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
2.	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	1. Toleransi 2. Kesetaraan 3. Kerja sama	Survei	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Balitbang dan Diklat	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat
3.	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	1. Akomodatif terhadap budaya 2. Penurunan Konflik	Survei	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Balitbang dan Diklat	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	a. Indeks kepuasan layanan KUA	Alat ukur sesuai dengan Permenpan RB No. 14/2017: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana	Survei	Ditjen Bimas Islam	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat
		b. Tingkat kepuasan layanan produk halal	1. Registrasi 2. Sertifikasi	Survei Internal	BPJPH	Hasil Survei Internal BPJPH
		c. Indeks kepuasan layanan ibadah haji	1. Pendaftaran 2. Bimbingan manasik haji 3. Pemberangkatan 4. Prosesi ibadah haji 5. Pemulangan	Survei	Ditjen PHU	Hasil Survei Badan Pusat Statistik



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
5.	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	1. Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/ sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharma dana/ dana paramitha/ dana kebajikan) yang mendukung layanan pendidikan dan keagamaan 2. Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharma dana/dana paramitha/dana kebajikan)	Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/ sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharma dana/ dana paramitha/ dana kebajikan) yang mendukung layanan pendidikan dan keagamaan: Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/ sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharma dana/dana paramitha/ dana kebajikan)	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, BWI dan BAZNAS
6.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	a. Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi: 1) Literasi 2) Numerasi	1. Literasi 2. Numerasi	Survei	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Kemendikbud/ Kementerian Agama
		b. Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA: 1) Membaca 2) Matematika 3) Sains	1. Membaca 2. Matematika 3. Sains	Survei	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Hindu	OECD (<i>Organization For Economic Cooperation and Development</i>)



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
7.	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	a. APK RA/ Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/Nava Dhammasekha	1. Jumlah sisiwa RA/ Pratama Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 4 s.d 6	Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman: Jumlah penduduk usia 4 s.d 6 Tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, Ditjen Bimas Buddha, BPS
		b. APK MI/Ula/ SDTK/Adhi Widya Pasraman	1. Jumlah sisiwa MI/Ula/ SDTK/Adhi Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 7 s.d 12	Jumlah siswa MI/ Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman: Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 Tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
		c. APK MTs/ Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	1. Jumlah sisiwa MTs/ Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman 2. jumlah penduduk usia 13 s.d 15	Jumlah siswa MTs/ Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman: Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 Tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
		d. APK MA/Ulya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MA/ Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 16 s.d 18	Jumlah siswa MA/ Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman : Jumlah penduduk usia 16 s.d 18 Tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
		e. APM MI/Ula/ SDTK/Adhi Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MI/Ula/ SDTK/Adhi Widya Pasraman yang berusia 7 s.d 12 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 12 tahun	Jumlah siswa MI/ Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang berusia 7 s.d 12 tahun: Jumlah Penduduk Usia 7 s.d. 12 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
		f. APM MTs/ Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MTs/ Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang berusia 13 s.d 15 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 13 s.d 15 tahun	Jumlah siswa MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang berusia 13 s.d 15 tahun: Jumlah Penduduk Usia 13 s.d 15 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		g. APM MA/Ulya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MA/ Ulya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang berusia 16 s.d 18 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 16 s.d 18 tahun	Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman yang berusia 16 s.d 18 tahun: Jumlah Penduduk Usia 16 s.d 18 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
		h. APK PTK/Ma'had Aly	1. Jumlah sisiswa PTK/ Ma'had Aly 2. Jumlah penduduk usia 19 s.d 23 tahun	Jumlah siswa PTK/ Ma'had Aly/PTK: Jumlah penduduk usia 19 s.d 23 Tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
8.	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	1. Jumlah guru yang memenuhi SNP 2. Jumlah siswa	Jumlah guru yang memenuhi SNP: Jumlah siswa	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
9.	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	a. Persentase MI/ Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1. Jumlah MI/Ula/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2. Jumlah MI/Ula/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman	Jumlah MI/Ula/ SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B: Jumlah MI/Ula/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		b. Persentase MTs/ Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1. Jumlah MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2. Jumlah MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman	Jumlah MTs/ Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B: Jumlah MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		c. Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1. Jumlah MA/Ulya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2. Jumlah MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	Jumlah MA/Ulya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B: Jumlah MA/Ulya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		d. Persentase PTK/ Ma'had Aly yang terakreditasi A/ Unggul	1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul 2. Jumlah PTK/Ma'had Aly	Jumlah PTK/ Ma'had Aly yang terakreditasi A/ Unggul: Jumlah PTK/Ma'had Aly	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
10.	Meningkatnya kualitas mental/ karakter siswa	Indeks karakter siswa	1. Religiusitas 2. Rasa kebangsaan 3. Integritas 4. Kemandirian 5. Gotong Royong	Survei	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Hasil Penelitian Badan Litbang dan Diklat
11.	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	a. Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	1. Jumlah PTK yang memiliki prodi/kelas internasional 2. Jumlah PTK	Jumlah PTK yang memiliki prodi/ kelas internasional : Jumlah PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		b. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	1. Jumlah lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 2. Jumlah lulusan PTK	Jumlah lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: Jumlah lulusan PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		c. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	1. Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional 2. Jumlah publikasi ilmiah PTK	Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional : Jumlah publikasi ilmiah PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		d. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	1. Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional yang disitasi 2. Jumlah publikasi ilmiah PTK	Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional yang disitasi: Jumlah publikasi ilmiah PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
12.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	a. Predikat opini laporan keuangan	1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. Efektivitas sistem pengendalian intern	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh BPK	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BPJPH	BPK
		b. Nilai reformasi birokrasi	1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan 3. Penataan Organisasi/ Kelembagaan 4. Penataan Tatalaksana 5. Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Pengawasan 8. Pelayanan Publik	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Kementerian PAN dan RB	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BPJPH	Kememp dan RB
13.	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>Policy Paper</i>)	1. Jumlah penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>Policy Paper</i>) 2. Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan	Jumlah penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>Policy Paper</i>): Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan	Balitbang dan Diklat	Balitbang dan Diklat

Sumber: Biro Perencanaan, 2020



2.6. Nilai-nilai Kementerian Agama

Dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama dan pendidikan, Kementerian Agama menetapkan lima nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh ASN pelaksana pembangunan. Nilai-nilai itu telah dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama. Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dalam keimanan dan ketakwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan nilai keimanan dan ketakwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
- melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- melaksanakan tugas kemanusiaan;
- menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama yang berbeda-beda;
- membina kerukunan hidup beragama;
- tidak bertindak diskriminatif;
- tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

2. Integritas

Dalam nilai integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- tidak melakukan tindakan yang merekayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain;



- d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

3. Profesionalitas

Dalam nilai profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
- b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera;
- c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
- d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;
- e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;
- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;

- g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
- h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat memengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

4. Tanggung Jawab

Dalam nilai tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

Pelaksanaan nilai tanggung jawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan tugas secara patuh, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
- d. memelihara setiap aset/barang milik negara di Kementerian Agama;
- e. melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;
- f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
- g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau memengaruhi keputusan yang diambil.



5. Keteladanan

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
- e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.



Sumber : Biro HDI, Kementerian Agama, 2015

Gambar 2.2
Pelaksanaan Upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Tahun 2015

BAB

3

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN**



Arah kebijakan dan strategi dalam bab ini disusun sebagai upaya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Agama yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024 yang selanjutnya akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran nasional yang tertuang di RPJMN tahun 2020-2024. Rumusan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Renstra ini ada dua bagian, yaitu arah kebijakan dan strategi nasional sebagai penugasan dari RPJMN tahun 2020-2024 serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama.

Dalam implementasinya, strategi perlu didukung dengan kerangka regulasi yang memberikan dasar yuridis pelaksanaan program dan kegiatan dan kerangka kelembagaan yang mengatur struktur organisasi dan pengelolaan program dan kegiatan yang mendukung capaian tujuan Kementerian Agama.

Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan Kementerian Agama dalam Renstra ini merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 di bidang agama dan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan periode terakhir dari RPJPN 2005-2025, yang fokus kepada 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama mendukung 3 (tiga) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu nomor tiga (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, nomor empat (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dan nomor tujuh (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan nasional dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
2. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
3. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. mengentaskan kemiskinan; dan
7. meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Arah kebijakan nasional dalam Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
2. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
3. memperkuat moderasi beragama; dan
4. meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.



Visi : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Gotong Royong

MISI PRESIDEN

- 01 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 02 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 03 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 04 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 05 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 06 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 07 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 08 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 09 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

ARAHAN PRESIDEN

- 01 Pembangunan SDM
- 02 Pembangunan Infrastruktur
- 03 Penyederhanaan Regulasi
- 04 Penyederhanaan Birokrasi
- 05 Transformasi Ekonomi

7 AGENDA PEMBANGUNAN

- 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
- 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
- 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Gambar 3.1

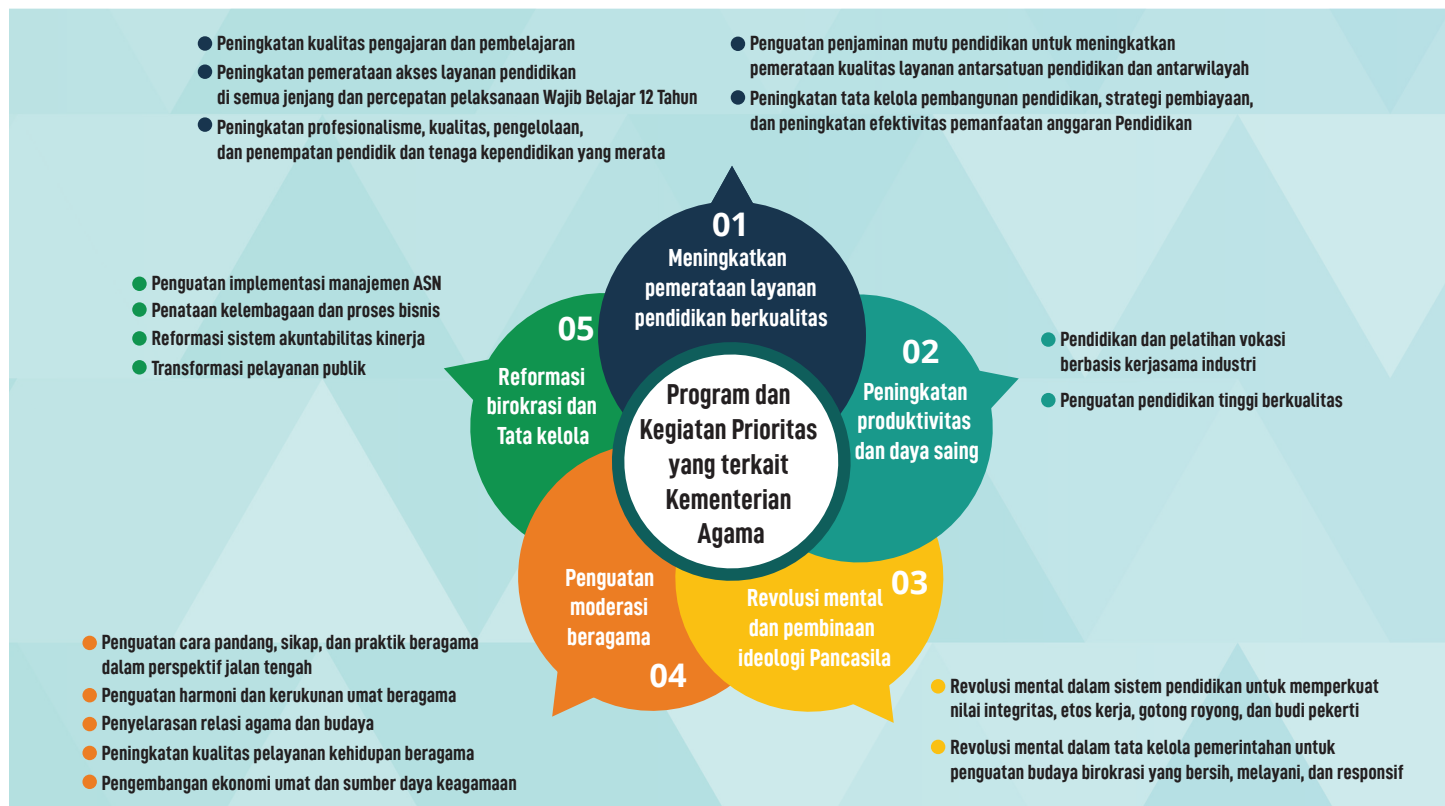
Visi-Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024



Arah kebijakan nasional dalam Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. konsolidasi demokrasi;
2. optimalisasi kebijakan luar negeri;
3. penegakan hukum yang mantap;
4. reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
5. menjaga stabilitas keamanan nasional.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama mendukung 5 (lima) Program Prioritas dari 16 Program Prioritas di atas, yang kemudian dijabarkan ke dalam 18 Kegiatan Prioritas, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.2
Program dan Kegiatan Prioritas yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Agama



Strategi yang dipergunakan untuk melaksanakan masing-masing Kegiatan Prioritas yang kemudian dijabarkan menjadi proyek prioritas nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, melalui:
 - a. penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan peningkatan kemampuan berpikir dalam matematika, literasi dan sains di semua jenjang;
 - b. penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran yang efektif dan tepat sasaran;
 - c. peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik;
 - d. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatannya bagi perbaikan proses pembelajaran;
 - e. peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) dengan sistem pembelajaran *online*;
 - f. integrasi *softskills* (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran;
 - g. peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; dan
 - h. peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan di pesantren.
2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, melalui:
 - a. pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak dari keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi; termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui KIP Kuliah;
 - b. pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T, seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/ SATAP), kelas filial, sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, pendidikan berpola asrama, dan pendidikan inklusif;
 - c. pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi;
 - d. penanganan ATS untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana;
 - e. peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan
 - f. peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.
3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, melalui:
 - a. peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - b. pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3);
 - c. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;
 - d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi



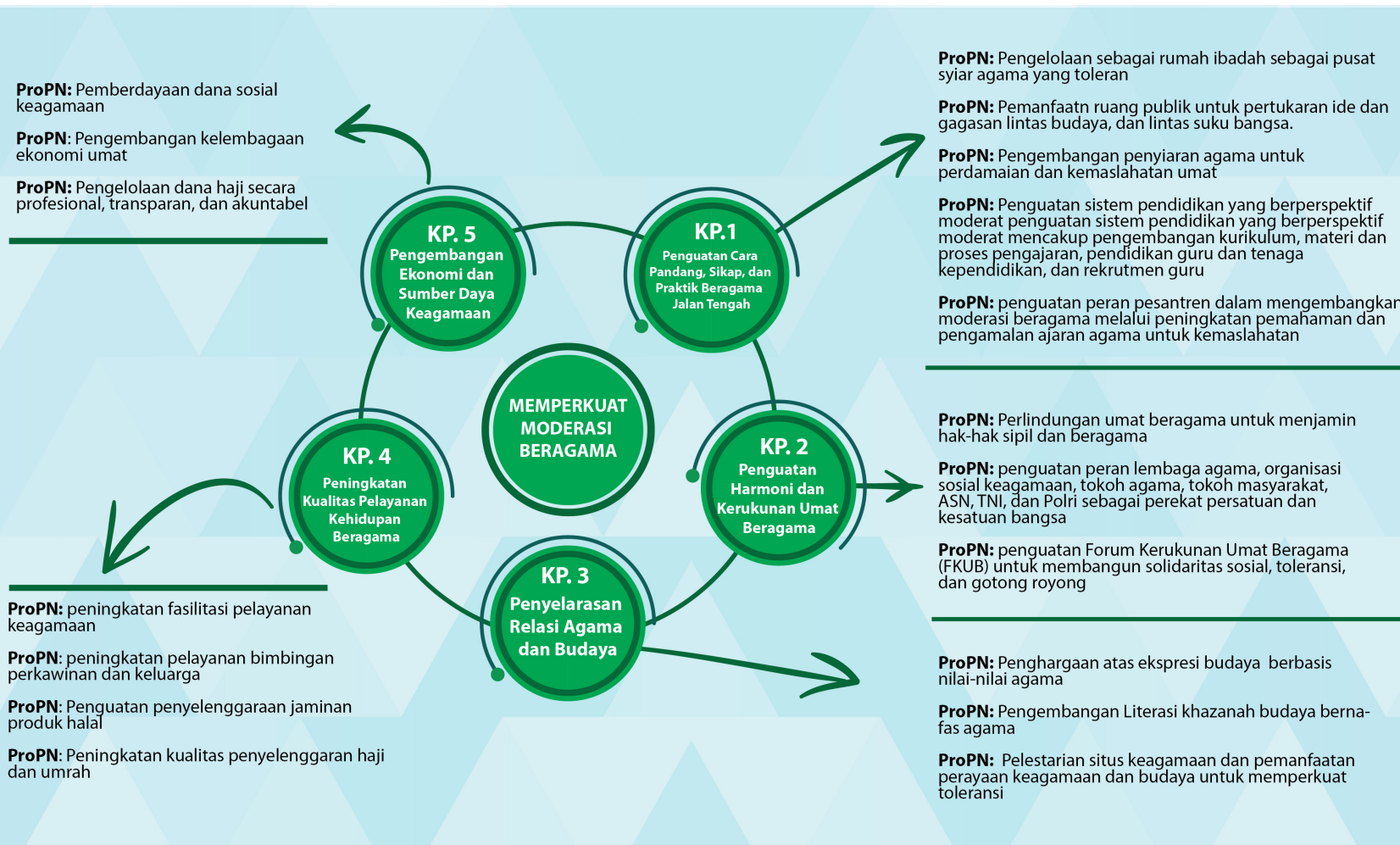
- pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.
4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, mencakup:
 - a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan;
 - b. penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi;
 - c. penguatan Standar Nasional Pendidikan; dan
 - d. penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan pendidikan.
 5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, mencakup:
 - a. peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan;
 - b. peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan;
 - c. peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antartingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan antarjenjang;
 - d. peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan anggaran pendidikan di daerah;
 - e. peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan;
 - f. pengendalian izin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu;
 - g. penguatan tata kelola pendidikan tinggi melalui upaya penyederhanaan jumlah dan penggabungan perguruan tinggi;
 - h. peningkatan koordinasi lintas sektor dan antartingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI); dan
 - i. peningkatan komitmen dan kapasitas daerah dalam pendidikan gizi untuk anak sekolah.
 6. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, melalui:
 - a. peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;
 - b. reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; penguatan pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (*dual TVET system*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan *teaching factory/teaching industry* berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan



- pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/*teaching factory/teaching industry*; penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren; peningkatan fasilitas dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan; dan
- c. peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri.
7. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas, melalui:
- a. pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri;
- b. pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri;
- c. peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri;
- d. peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda;
- e. pengembangan dana abadi (*endowment fund*) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi;
- f. perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university, teaching university*, atau *vocational university*;
- g. penguatan tata kelola PTN-BH yang lebih otonom dan akuntabel; dan
- h. penguatan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
8. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong dan budi pekerti, melalui:
- a. pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (*bullying free school environment*);
- b. penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan; dan
- c. peningkatan kepeloporan dan kesukarelawan pemuda, dan pengembangan pendidikan kepramukaan.
9. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, melalui:
- a. peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya; dan
- b. penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.
10. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, melalui:



- a. pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat;
 - b. penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru;
 - c. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan;
 - d. pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan
 - e. pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.
11. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, melalui:
- a. perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;
 - b. penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - c. penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.
12. Penyelarasan relasi agama dan budaya, melalui:
- a. penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama;
 - b. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; dan
 - c. pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
13. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, melalui:
- a. peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan;
 - b. peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga;
 - c. penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
 - d. peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.
14. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan, melalui:
- a. pemberdayaan dana sosial keagamaan;
 - b. pengembangan kelembagaan ekonomi umat; dan
 - c. pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.
15. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui:
- a. penerapan manajemen talenta nasional ASN; dan
 - b. peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional
16. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
- a. penataan kelembagaan instansi; dan
 - b. pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
17. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
- a. perluasan implementasi *system* integritas;
 - b. penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi; dan
 - c. reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
18. Transformasi pelayanan publik, melalui:
- a. pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*);
 - b. penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik; dan
 - c. penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu



Gambar 3.3
Program Prioritas Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024



3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

Rumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam mencapai visi dan tujuan, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis Kementerian Agama yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Rincian rumusannya adalah sebagai berikut:

Kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2020-2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatkan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, serta kinerja penyuluh agama. Adapun strateginya adalah:
 - a. pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
 - b. peningkatan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan *platform digital* untuk penyuluhan daring (*on-line*);
 - c. peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
 - d. penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
 - e. optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; dan
 - f. pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.
2. Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka memepererat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antarumat beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah:
 - a. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
 - b. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
 - c. pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
 - d. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
 - e. peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
 - f. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
 - g. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
 - h. peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama;
 - i. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
 - j. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;



- k. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa;
 - l. peningkatan frekuensi forum dialog antartokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antarumat beragama;
 - m. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intraumat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
 - n. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan
 - o. peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antarumat beragama.
3. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama. Ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
- a. penguatan dialog lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi;
 - b. pengembangan tafsir agama dalam konteks perkembangan kebudayaan;
 - c. penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama;
 - d. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama;
 - e. pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat; dan
 - f. pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan kepuasan layanan ibadah haji, KUA Kecamatan, dan sertifikasi produk halal yang memenuhi standar, berbasis digitalisasi layanan, dan memperhatikan pengarusutamaan *gender*. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;
- b. pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
- c. peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (*frontline*) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;
- d. peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya;
- e. peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital;
- f. peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
- g. peningkatan fasilitasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan mutu layanan;
- h. peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan;
- i. penyelenggaraan administrasi layanan yang berkualitas dalam registrasi dan sertifikasi produk halal;
- j. pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal;
- k. peningkatan kerja sama dan standarisasi penilaian produk halal;
- l. pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha, auditor halal, lembaga pemeriksa halal, penyelia halal, RPU dan RPH;
- m. peningkatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga lain;



- n. peningkatan efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji;
 - o. peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji;
 - p. peningkatan respon darurat di Armuzna sebagai bagian dari prosedur Pusat Krisis dengan melibatkan *muassasah*;
 - q. penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi *mobile* untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi dengan Siskohat;
 - r. penyediaan Konsumsi *Full Covered*, yaitu dengan penambahan konsumsi pada masa *peak season*;
 - s. revitalisasi dan pengembangan layanan asrama haji;
 - t. pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) untuk mempercepat serta meningkatkan layanan haji dan umrah di kabupaten/kota dan Arab Saudi;
 - u. efisiensi proses visa, yaitu dengan verifikasi dan *visa request* dilakukan di Kanwil;
 - v. penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah;
 - w. pembentukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam skema pendaftaran kantor akuntan publik untuk audit PPIU; dan
 - x. peningkatan kerja sama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.
5. Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.
Kebijakan dalam pemanfaatan ekonomi keagamaan umat difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan melalui strategi sebagai berikut:
- a. penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat;
 - b. peningkatan pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat;
 - c. peningkatan pengelolaan aset wakaf;
 - d. peningkatan pemberdayaan dan kualitas lembaga dana sumbangan keagamaan Kristen/sumbangan keagamaan Katolik/dharma dana/dana paramitha/dana kebajikan;
 - e. peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
 - f. peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah; dan
 - g. peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat.
6. Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.
Kebijakan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran adalah meningkatnya kualitas kemampuan literasi dan berpikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui pembelajaran. Strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:
- a. penerapan kurikulum Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang pendidikan tingkat sekolah;
 - b. penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada MI/SDTK/Ula);
 - c. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu; dan
 - d. peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran.



7. Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan. Dalam peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan, kebijakan ke depan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelas (*sitting capacity*) satuan pendidikan termasuk yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (termasuk daerah 3 T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada Pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan *gender*. Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
 - a. diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran seperti : (i) madrasah satu atap, (ii) madrasah inklusi, (iii) kelas filial, (iv) pembelajaran daring, (v) kampus jauh dan (vi) merdeka belajar;
 - b. afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi : (i) peserta didik di daerah 3 T, (ii) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan;
 - c. pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
 - e. penjangkaran ATS ke dalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok Pesantren;
 - f. diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;
 - g. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra sekolah, terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;
 - h. peningkatan jumlah RA negeri sebagai RA percontohan; dan
 - i. optimalisasi pemanfaatan satuan pendidikan yang sudah ada dan mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.
8. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dititikberatkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang ditempuh adalah:

 - a. peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan;
 - b. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - c. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui PKG;
 - d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;
 - f. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian yang merata pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, termasuk di daerah 3 T; dan
 - g. revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensinya.
9. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan. Kebijakan dalam peningkatan kualitas penjaminan



mutu pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada madrasah dan pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;
- b. penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi satuan pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan;
- c. meningkatkan budaya mutu pendidikan dalam Sistem Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan;
- d. peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas;
- e. peningkatan kualitas kelembagaan pengelola/pembinaan SPMI pada satuan kerja di pusat dan daerah;
- f. pengendalian izin pendirian satuan pendidikan;
- g. peningkatan keunggulan kompetitif siswa dan mahasiswa; dan
- h. pengembangan kualitas madrasah unggulan, keagamaan, keterampilan dan kejuruan.

10. Peningkatan kualitas mental/karakter siswa.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan kompetensi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman;
- b. peningkatan jumlah madrasah/pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter;
- c. pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler;
- d. peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerja sama ; dan

- e. penguatan kerja sama dengan orangtua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.

11. Peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas dititikberatkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional adalah:

- a. peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK;
- b. peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
- c. peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
- d. diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTK berbasis kekuatan lokal kelembagaan;
- e. pengendalian dan pembinaan PTKS yang kurang bermutu;
- f. peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi nasional dan internasional;
- g. peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);
- h. penyelenggaraan kelas/program studi pada PTK yang bertaraf internasional;
- i. peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*);
- j. peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif;
- k. pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);
- l. revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja; dan
- m. fasilitasi PTK untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*



12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan zaman;
- b. peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, *valid*, *reliabel*, *uptodate*, dan terdigitalisasi;
- c. pengelolaan portal satu pintu dalam *big data* melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
- d. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
- e. penguatan *public campaign/mainstreaming/* pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh Satker dengan mempublikasikan RB;
- f. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
- g. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- h. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;
- i. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;
- j. peningkatan layanan tanggap darurat;
- k. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *road map* peningkatan kompetensinya;
- l. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;

- m. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
- n. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
- o. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
- p. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
- q. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; dan
- r. peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.

13. Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan

Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan difokuskan untuk menghasilkan kebijakan yang akurat. Strategi yang dicapai adalah:

- a. peningkatan kualitas perumusan kebijakan yang didukung dengan data akurat dan hasil penelitian kebijakan yang berkualitas;
- b. peningkatan publikasi dan sitasi jurnal penelitian;
- c. peningkatan audiensi dan advokasi hasil penelitian kebijakan kepada *stakeholder* pengambil keputusan (Menteri, Eselon I/Eselon II pusat yang terkait); dan
- d. peningkatan hasil penelitian yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, tahun 2020 Kementerian Agama memiliki strategi melalui 12 Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Kerukunan Umat Beragama;
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Program Pendidikan Islam;
6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik;



8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu;
9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha;
10. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
11. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama;
12. Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sementara itu, berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020 B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 telah ditetapkan 5 (lima) Program Kementerian Agama. Sehingga mulai tahun 2021, Kementerian Agama menjalankan arah kebijakan tersebut melalui 5 (lima) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Pendidikan Tinggi;
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
5. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Dalam implementasinya, pelaksanaan ke lima program yang bertumpu kepada arah kebijakan tersebut di atas, perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain, lembaga keagamaan, swasta, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga internasional. Kebutuhan adanya koordinasi dan kerja sama sangat diperlukan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama, kontra radikalisme, pencegahan terorisme, penanganan bencana, pornografi, pengelolaan dana sosial keagamaan, pengentasan penyakit sosial, penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadah, FKUB, haji dan umrah, jaminan produk halal, pengembangan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, afirmasi kepada daerah 3T.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dimaksud dalam Renstra Kementerian Agama, yaitu peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Agama. Regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum dan meningkatkan integritas, transparansi, akuntabilitas, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama, serta bersifat antisipatif. Oleh karena itu, regulasi yang dimaksud harus baik secara kualitas. Kualitas regulasi yang baik ditentukan oleh materi muatan dan prosedur pembentukannya yang baik pula. Untuk mendapatkan materi muatan regulasi yang baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Rancangan regulasi merupakan hasil dari proses evaluasi secara mendalam, yaitu bahwa:
 1. Regulasi yang disusun untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau disusun berdasarkan kewenangan untuk menjalankan kebijakan di bidang agama tetapi ada kekosongan hukum; dan
 2. Materi muatan regulasi yang ada sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan/atau kebutuhan masyarakat.
- b. Materi muatan rancangan regulasi yang disusun harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- c. Materi muatan rancangan regulasi tidak bersifat reaktif tetapi bersifat antisipatif dan mempunyai daya jangkau keberlakuan yang panjang, serta menjaga kemungkinan munculnya kontroversi atau merugikan masyarakat secara luas pada saat sudah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lain.



Guna memenuhi keinginan di atas, maka penyusunan regulasi pada Kementerian Agama harus memenuhi ketentuan tata cara pembentukan regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama. Dalam tiga regulasi tersebut telah diatur secara taat asas mengenai tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan regulasi pada Kementerian Agama, yaitu:

- a. *Perencanaan*. Pada tahapan ini, satuan kerja eselon I pada Kementerian Agama selaku pemrakarsa mengidentifikasi dan menyusun daftar regulasi yang akan dibentuk untuk tahun 2020-2024. Regulasi dimaksud dapat berbentuk RUU, RPP, RPerpres, RPMA, dan RKMA. Untuk RUU wajib diajukan dan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024. Sedangkan untuk RPP dan RPerpres wajib diajukan dan masuk dalam Program Penyusunan RPP dan RPerpres per tahun. Adapun untuk RPMA wajib diajukan dan masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri (PPPM) yang dikelola oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. Dalam pengajuan RUU, RPP, dan RPerpres wajib menyertakan Naskah Akademik dan rancangan regulasi yang akan dibentuk. Sedangkan untuk pengajuan RPMA wajib menyertakan Usul Perencanaan Penyusunan RPMA yang memuat:
 1. daftar usulan judul;
 2. latar belakang;
 3. tujuan;
 4. sasaran; dan
 5. pokok materi muatan RPMA.
- b. *Penyusunan*. Pada tahapan ini, pemrakarsa melakukan penyusunan regulasi dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah,

masyarakat, akademisi, dan/atau peneliti, dan perancang peraturan perundang-undangan.

- c. *Pembahasan*. Pada tahapan ini, dilakukan pembulatan konsep dan harmonisasi regulasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk RUU, RPP, RPerpres, dan RPMA, serta oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri untuk RKMA. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan materi muatan rancangan regulasi selaras dan tidak bertentangan dengan jenis dan hierarki regulasi yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- d. *Pengesahan atau Penetapan*. Pada tahapan ini, untuk RUU akan melalui proses pengesahan di DPR dan penetapan oleh Presiden, sedangkan untuk RPP dan RPerpres akan ditetapkan oleh Presiden, serta RPMA dan RKMA ditetapkan oleh Menteri Agama.
- e. *Pengundangan*. Pada tahapan ini, RUU yang sudah disahkan menjadi UU oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, dan RPP dan RPerpres ditetapkan oleh Presiden selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk RPMA yang sudah ditetapkan oleh Menteri Agama selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sejak diundangkan regulasi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Evaluasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lain pada Kementerian Agama selama tahun 2015-2019 telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. Evaluasi dilakukan dalam sebuah kegiatan yang menghadirkan seluruh Kasubbag Hukum yang ada di satuan kerja eselon I pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Evaluasi diarahkan pada upaya memetakan regulasi yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi yang disimpulkan bahwa:



- a. perlu regulasi baru untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. terdapat regulasi yang perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru;
- c. terdapat regulasi yang perlu diganti dengan yang baru karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d. perlu peningkatan status hukum regulasi yang sudah ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi supaya mempunyai daya jangkau keberlakuan yang lebih luas dan mempunyai daya ikat secara hukum yang lebih kuat; dan
- e. terdapat beberapa regulasi yang perlu diunifikasi dan disimplifikasi karena mempunyai kesamaan materi muatan sehingga akan memudahkan bagi pengguna dan meminimalisir pertentangan norma satu dengan lainnya.

Jadi, berdasarkan hasil evaluasi regulasi di atas, terdapat 5 (lima) karakteristik pembentukan regulasi yang tertuang dalam Kerangka Regulasi. Berangkat dari hasil evaluasi regulasi di atas dan daftar usulan perencanaan penyusunan regulasi yang tertuang dalam PPPM, maka pada tahun 2020-2024 akan dibentuk 42 (empat puluh dua) regulasi dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Matriks Kerangka Regulasi.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kementerian Agama perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Kementerian Agama secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik pada lembaga di pusat maupun lembaga vertikal di tingkat provinsi

dan kabupaten/kota. Untuk itu kegiatan penataan dan penguatan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Penataan dan penguatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM difokuskan menitikberatkan pada peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan pelayanan prima. Struktur organisasi sebagai refleksi kelembagaan merupakan fakta yang kondisinya bisa berubah menyesuaikan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Di antaranya adalah amanat Pasal 28b, Pasal 28e, Pasal 28i, Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41/2004 tentang Wakaf, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 18/2019 tentang Pesantren, UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Kerukunan Umat Beragama, PP No. 46/2019 ttg Pendidikan Tinggi Keagamaan, PP No. 23/2019 ttg Statuta UUIII.

Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran (*rightsizing*) adalah organisasi sesuai fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut, sesuai dengan proses hubungan dan prosedur kerja jabatan, dan sesuai dengan kebutuhan dan analisis beban kerja organisasi. Dengan demikian upaya transformasi kelembagaan didasarkan pada empat perspektif, yaitu (1) mandatori Kementerian Agama dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, (2) arah pengembangan, lingkungan strategis dan prioritas pembangunan nasional/sektoral, (3) Undang-Undang terkait dan kebijakan fungsi kelembagaan, dan (4) partisipasi masyarakat/dunia usaha dan koordinasi antara pusat dan daerah.



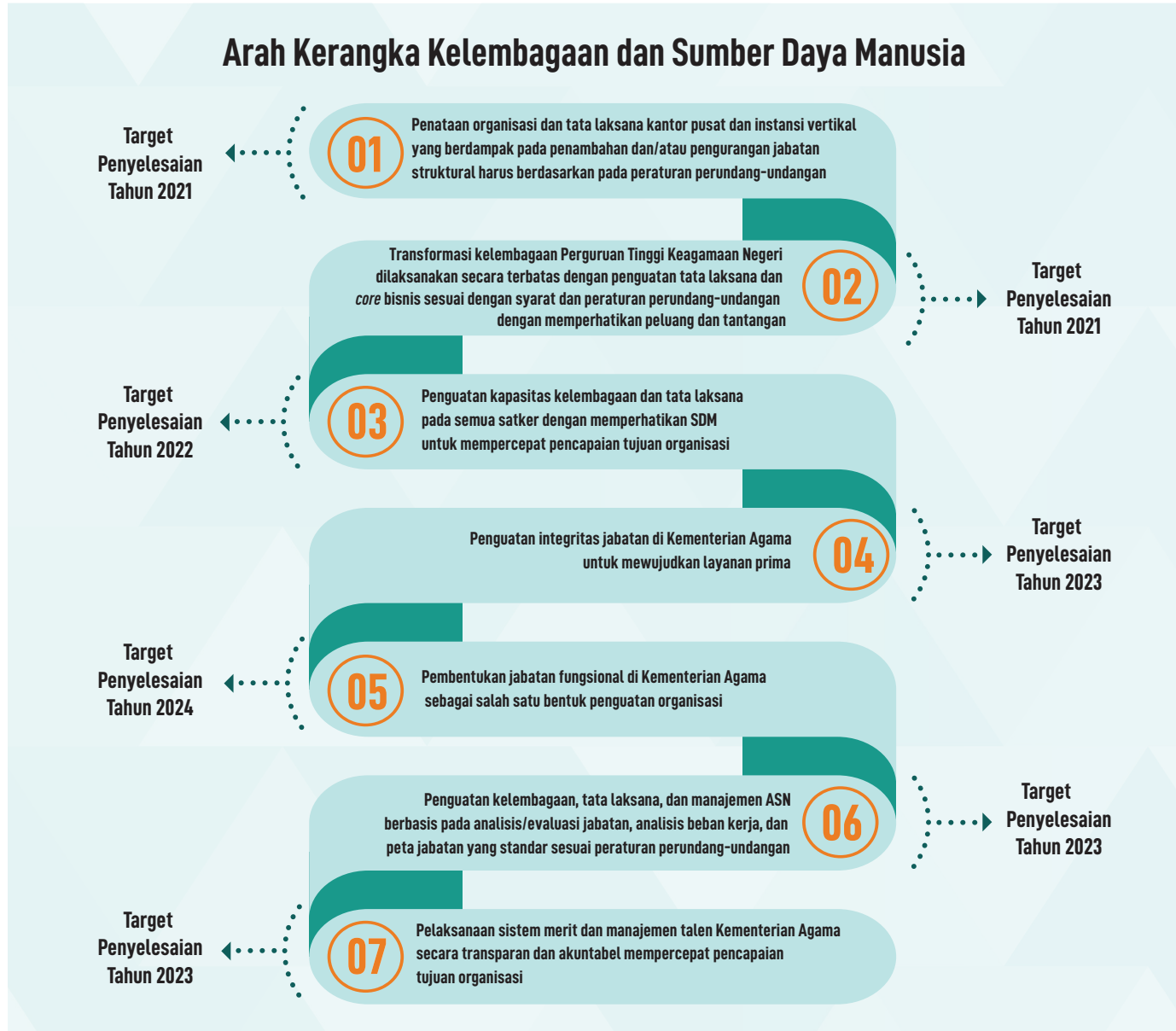
Kebijakan nasional tentang penyederhanaan birokrasi dengan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional menjadi hal yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan satker itu sendiri. Kekuatan dan kelemahan suatu organisasi ditentukan oleh SDM yang ada didalamnya, seberapa besar SDM itu memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang sesuai dengan jabatan yang diemban. Ada berapa persen pegawai telah menduduki dalam jabatan fungsional, karena jabatan fungsional memiliki butir-butir pekerjaan yang telah diukur dengan angkat kredit sehingga lebih profesional dibandingkan dengan jabatan pelaksana. Implikasinya, Kementerian Agama harus lebih banyak membentuk jabatan fungsional baru, khususnya di jabatan teknis (direktorat jenderal) untuk penguatan organisasi. Disamping itu juga, jabatan fungsional harus diberikan peran yang lebih besar daripada jabatan administrasi, tentunya tugas-tugas organisasi itu bersesuaian dengan butir-butir pekerjaan yang dimilikinya. Dengan demikian kebijakan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional atau penyederhanaan struktur organisasi dapat diimplementasikan dengan baik.

Perilaku ASN sangat dipengaruhi oleh bagaimana Kementerian Agama membentuk SDM-nya melalui penerapan sistem merit. Sistem yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari proses perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Terdapat enam poin penting dalam sistem merit. *Pertama*, pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian penyesuaian arah kebijakan nasional. *Kedua*, perekrutan berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan dan sertifikasi, TKD & TKB sistem komputerisasi. *Ketiga*, pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi. *Keempat*, penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk Tim Penilai Kinerja, *performance dialogue* dan insentif berbasis kinerja. *Kelima*, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara *talent mapping*, *succession*, pola karir, dan rotasi nasional sebagai perekat NKRI. *Open recruitment* adalah salah satu cara sebelum mendapatkan calon terbaik di organisasi. Dan *keenam*, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka kerangka kelembagaan yang diperlukan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama adalah sebagai berikut:



Arah Kerangka Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia



Sumber : Biro Ortala, Kementerian Agama, 2019

Gambar 3.4
Arah Kerangka Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

BAB

4

**TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN**



4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kementerian Agama menetapkan 6 (enam) tujuan dan telah dilengkapi dengan 13 sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kementerian Agama dalam 5 tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

(T1) Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama	Nilai	83,58 (Sumber : Balitbang dan Diklat Kementerian Agama)	86,08	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha.

(T2) Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	73,83 (Sumber : Balitbang dan Diklat Kementerian Agama)	75,80	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, dan Balitbang dan Diklat.
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	Nilai	NA	76,00	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Balitbang dan Diklat.



(T3) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Indeks kepuasan layanan KUA	Nilai	77,28 (Sumber: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama)	84,00	Ditjen Bimas Islam
		Tingkat kepuasan layanan produk halal	Nilai	NA	80	BPJPH
		Indeks kepuasan layanan ibadah haji	Nilai	85,91 (Sumber: BPS)	86	Ditjen PHU
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	Persen	49,70 (Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Agama)	55	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha

(T4) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi: a. Literasi b. Numerasi	Persen	53,20 22,30 (Sumber: Ditjen Pendis)	61,20 30,10	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	Persen	44,62 31,40 44,05 (Sumber: Ditjen Pendis)	49,80 39,83 48,00	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu



Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	APK RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha	Persen	9,40 (Sumber: Kemen- dikbud)	14	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		APK MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	Persen	13,89 (Sumber: Kemen- dikbud)	16	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APK MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman	Persen	24,37 (Sumber: Kemen- dikbud)	26,20	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APK MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman	Persen	10,78 (Sumber: Kemen- dikbud)	12,90	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APM MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	Persen	12,02 (Sumber: Kemen- dikbud)	12,60	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APM MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	Persen	21,38 (Sumber: Kemen- dikbud)	22,60	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APM MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman	Persen	9,82 (Sumber: Kemen- dikbud)	20,60	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		APK PTK/Ma'had Aly	Persen	5,29 (Sumber: Kemen- dikbud)	7,35	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha



Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	Nilai	25:1 (Sumber: Ditjen Pendis)	15:1	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	Persen	57 (Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama)	70	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	Persen	48 (Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama)	70	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	Persen	44 (Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama)	70	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	Persen	2,16 (Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama)	60	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks karakter siswa	Nilai	70,14 (Sumber : Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama)	73	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu



(T5) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	Persen	0,31 (Sumber: Biro Perencanaan, Kementerian Agama)	7,30	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	Persen	27,28 (Sumber: Biro Perencanaan, Kementerian Agama)	53,36	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	Persen	2,89 (Sumber : Ditjen Pendis, Kementerian Agama)	22	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	Persen	0,14 (Sumber : Ditjen Pendis, Kementerian Agama)	13,29	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha

(T6) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Predikat opini laporan keuangan	Opini	WTP (2018) (Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Agama)	WTP	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BPJPH
		Nilai reformasi birokrasi	Indeks	75,04 (Sumber : Biro Ortala, Kementerian Agama)	82	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BPJPH



Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS13	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>Policy Paper</i>)	Persen	NA	90	Balitbang dan Diklat

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, tahun 2020 telah ditetapkan beberapa Sasaran Program untuk 12 Program di Kementerian Agama, yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
Sasaran program (*Outcome*):

- a. meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- b. meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama:
 - 1) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - 2) nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 3) nilai Impelementasi Sistem Merit;
 - 4) persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai).
- c. meningkatnya tata kelola organisasi Sekretariat Jenderal yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- 4) nilai Maturitas SPIP; dan
- 5) Indeks Profesionalitas ASN.

2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

Sasaran program (*Outcome*):

- a. meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
 - 1) batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dan internal terhadap anggaran; dan
 - 2) persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang Efektif.
- b. meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase satuan kerja yang mendapat nilai PMPRB minimal 82;
 - 2) nilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 3) persentase satuan kerja yang mendapat nilai skor audit kinerja minimal 75;
 - 4) persentase satuan kerja yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja minimal BB;
 - 5) persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diverifikasi; dan
 - 6) persentase pengaduan masyarakat yang diverifikasi; dan
 - 7) nilai Kapabilitas APIP.
- c. meningkatnya tata kelola organisasi Inspektorat Jenderal yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:



- 1) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
3. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase *Policy Paper* yang dimanfaatkan;
 - 2) persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan;
 - 3) persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian;
 - 4) jumlah Publikasi Badan Litbang dan Diklat yang disitasi; dan
 - 5) jumlah Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).
 - b. meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase ASN Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat;
 - 2) jumlah Alumni Pelatihan yang memenuhi standar;
 - 3) persentase pencapaian standar mutu diklat;
 - 4) indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan; dan
 - 5) persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO.
 - c. meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 - 2) indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an;
 - 3) jumlah *viewer* yang memanfaatkan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama;
 - 4) jumlah pengunjung yang memafaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an; dan
 - 5) indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan.
 - d. meningkatnya tata kelola organisasi Balitbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
4. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase jemaah haji yang diberangkatkan dari kuota;
 - 2) persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar;
 - 3) rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jemaah haji; dan
 - 4) persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji.
 - b. menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi; dan



- 2) persentase lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi.
- c. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
5. Program Pendidikan Islam
Sasaran program (*Outcome*):
 - a. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat dengan indikator kinerja program:
 - 1) rerata nilai UASBN/UMBN /Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama;
 - 2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKI/PTU yang bermuatan moderasi beragama; dan
 - 3) persentase pemahaman moderasi beragama agama pada mahasiswa PTKI.
 - b. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
 - 2) rerata nilai asesmen siswa kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
 - c. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik;
 - 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
 - 3) persentase dosen berkualifikasi S3.
 - d. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase peningkatan siswa pada RA;
 - 2) persentase peningkatan siswa pada MI/Ula;
 - 3) persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha;
 - 4) persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya;
 - 5) persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK); dan
 - 6) persentase peningkatan mahasiswa pada PTKI/Ma'had Aly.
 - e. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
 - f. meningkatnya standar mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase Madrasah/PDF yang memenuhi 8 SNP
 - 2) persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul;
 - 3) persentase Madrasah/pendidikan keagamaan yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan; dan
 - 4) persentase PTKI/Ma'had Aly yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan.
 - g. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase siswa Madrasah/PDF yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
 - h. meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerja sama dengan dunia kerja/industri dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri; dan
 - 2) persentase program ekonomi kerakyatan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri.



- i. meningkatnya kualitas PTKI yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTKI yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
 - 2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTKI.
 - j. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTKI yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
 - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
 - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
 - k. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
 - 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
 - l. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Pendidikan Islam yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
6. Program Bimbingan Masyarakat Islam
Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam dengan indikator kinerja program:
 - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam; dan
 - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
 - b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
 - c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
 - d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
 - e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital;
 - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran; dan
 - 3) persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan.
 - f. meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana zakat;
 - 2) persentase peningkatan wakaf produktif; dan
 - 3) persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf.
 - g. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.



7. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Sasaran program (*Outcome*):

- a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Kristen dengan indikator kinerja program:
 - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Kristen; dan
 - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
- b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Kristen melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
- c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
- d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
- e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
 - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
- f. meningkatnya kualitas penerimaan sumbangan keagamaan Kristen dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam sumbangan keagamaan Kristen.
- g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat:
 - 1) rerata nilai UASBN SDTK/SMPTK/SMAK/SMTK yang bermuatan moderasi beragama; dan

- 2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
- h. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
 - 2) rerata nilai asesmen siswa kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
- i. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase guru bersertifikat pendidik;
 - 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
 - 3) persentase dosen berkualifikasi S3.
- j. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase peningkatan siswa pada SDTK;
 - 2) persentase peningkatan siswa pada SMPTK;
 - 3) persentase peningkatan siswa pada SMAK/SMTK; dan
 - 4) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK.
- k. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
- l. meningkatnya standar mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang memenuhi 8 SNP;
 - 2) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul;
 - 3) persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan; dan
 - 4) persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.



- m. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
 - n. meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
 - 2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.
 - o. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja:
 - 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
 - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
 - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
 - p. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
 - 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
 - q. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
8. Program Bimbingan Masyarakat Katolik
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Katolik dengan indikator kinerja program:
 - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Katolik; dan
 - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
 - b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Katolik melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
 - c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
 - d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
 - e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
 - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
 - f. meningkatnya kualitas penerimaan sumbangan keagamaan Katolik dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam BAKAT.
 - g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat
 - 1) rerata nilai UASBN SMAK yang bermuatan moderasi beragama; dan
 - 2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
 - h. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan



- 2) rerata nilai asesmen siswa kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
 - i. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase guru bersertifikat pendidik;
 - 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
 - 3) persentase dosen berkualifikasi S3.
 - j. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase peningkatan siswa pada SMAK; dan
 - 2) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK.
 - k. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
 - l. meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase SMAK yang memenuhi 8 SNP;
 - 2) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul;
 - 3) persentase SMAK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan; dan
 - 4) persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
 - m. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase siswa SMAK yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
 - n. meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
 - 2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.
 - o. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja:
 - 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan; dan
 - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
 - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
 - p. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian
 - 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
 - q. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
9. Program Bimbingan Masyarakat Hindu
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu dengan indikator kinerja program:
 - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Hindu; dan
 - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
 - b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Hindu melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
 - c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:



- 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
- d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
- e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
 - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
- f. meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana.
- g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat:
 - 1) rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama; dan
 - 2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
- h. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
 - 2) rerata nilai asesmen siswa kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
- i. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase guru bersertifikat pendidik;
 - 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
 - 3) persentase dosen berkualifikasi S3.
- j. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman;
 - 2) persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman;
 - 3) persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman;
 - 4) persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman; dan
 - 5) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK.
- k. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
- l. meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP;
 - 2) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul;
 - 3) persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan; dan
 - 4) persentase PTKH yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
- m. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
- n. meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional.



- o. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
 - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
 - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
 - p. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
 - 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
 - q. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
10. Program Bimbingan Masyarakat Buddha
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Buddha dengan indikator kinerja program:
 - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Buddha; dan
 - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
 - b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Buddha melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
 - c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
 - d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
 - e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
 - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
 - f. meningkatnya jumlah penerimaan dana sosial keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana paramitha.
 - g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat:
 - 1) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
 - h. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase guru bersertifikat pendidik;
 - 2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
 - 3) persentase dosen berkualifikasi S3.
 - i. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase peningkatan siswa pada Nava Dhammasekha; dan
 - 2) persentase peningkatan mahasiswa pada PTKB.
 - j. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.



- k. meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul; dan
 - 2) Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
 - l. meningkatnya kualitas PTKB yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTKB yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
 - 2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.
 - m. meningkatnya kualitas lulusan PTKB yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
 - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
 - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
 - n. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
 - 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
 - o. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
11. Program Kerukunan Umat Beragama
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama; dan
 - 2) Persentase kasus konflik antarumat beragama yang ditindaklanjuti.
 - b. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Khonghucu:
 - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Khonghucu; dan
 - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
 - c. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
 - d. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
 - e. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
 - f. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan:
 - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
 - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
 - g. meningkatnya jumlah penerimaan dana sosial keagamaan:
 - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana kebajikan.



h. meningkatnya kualitas pendidikan agama Khonghucu

- 1) persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat pendidik.

12. Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Sasaran program (*Outcome*):

a. meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal dengan indikator kinerja program:

- 1) persentase produk yang disertifikasi dan diregistrasi halal berdasarkan permohonan; dan
- 2) persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan.

b. meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal dengan indikator kinerja program:

- 1) efisiensi waktu registrasi sesuai SPM; dan
- 2) efisiensi waktu sertifikasi sesuai SPM.

c. meningkatnya tata kelola organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:

- 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
- 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 4) nilai Maturitas SPIP; dan
- 5) Indeks Profesionalitas ASN.

Sementara itu, mulai tahun 2021 Sasaran Program yang mendukung 5 (lima) Program Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program (*Outcome*):

a. meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:

- 1) persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

- 2) batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dan internal terhadap anggaran; dan
- 3) persentase pengendalian intern pelaporan keuangan yang efektif.

b. meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:

- 1) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- 2) nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3) nilai implemementasi sistem merit;
- 4) nilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- 5) persentase satuan kerja yang mendapat nilai PMPRB minimal 82;
- 6) persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai);
- 7) persentase satuan kerja yang mendapat nilai skor audit kinerja minimal 75;
- 8) persentase satuan kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal BB;
- 9) persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diverifikasi;
- 10) persentase pengaduan masyarakat yang diverifikasi; dan
- 11) nilai Kapabilitas APIP.

c. meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian dengan indikator kinerja program:

- 1) persentase *Policy Paper* yang dimanfaatkan;
- 2) persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan;
- 3) persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian;
- 4) jumlah publikasi Badan Litbang dan Diklat yang disitasi; dan
- 5) jumlah produk penelitian, pengembangan, dan pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).



- d. meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase ASN Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat;
 - 2) jumlah alumni pelatihan yang memenuhi standar;
 - 3) persentase capaian standar kompetensi peserta diklat;
 - 4) indeks pemanfaatan alumni diklat dan hasil pelatihan; dan
 - 5) persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO.
 - e. meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 - 2) indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an;
 - 3) jumlah *viewer* yang memanfaatkan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama;
 - 4) jumlah pengunjung yang memafaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an; dan
 - 5) indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan.
 - f. meningkatnya tata kelola organisasi unit eselon I yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
 - 2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 4) nilai Maturitas SPIP; dan
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN.
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
Sasaran program (*Outcome*):
 - a. menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama; dan
 - 2) persentase konflik antarumat beragama yang diselesaikan.
 - b. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama dengan indikator kinerja program:
 - 1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama; dan
 - 2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
 - c. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
 - d. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - 1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama.
 - e. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
 - f. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital;
 - 2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran; dan
 - 3) persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan.



- g. meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan; dan
 - 2) persentase peningkatan wakaf produktif.
 - h. terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase jemaah haji yang diberangkatkan dari kuota;
 - 2) persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar;
 - 3) rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jemaah haji; dan
 - 4) persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji.
 - i. menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi; dan
 - 2) persentase lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi.
 - j. meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan; dan
 - 2) persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan.
 - k. meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal dengan indikator kinerja program:
 - 1) efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM; dan
 - 2) efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM.
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- Sasaran program (*Outcome*):
- a. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat dengan indikator kinerja program:
 - 1) rerata nilai UASBN/UMBN/Ujian satuan pendidikan yang bermuatan moderasi beragama.
 - b. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
 - 2) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
 - c. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik.
 - d. meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
 - e. meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memenuhi 8 SNP; dan
 - 2) persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
 - f. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai karakter minimal Baik.
 - g. meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerja sama dengan dunia kerja/industri dengan indikator kinerja program:



- 1) persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri; dan
 - 2) persentase Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri.
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
Sasaran program (*Outcome*):
- a. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase peningkatan siswa pada RA/Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/Nava Dammasekha;
 - 2) persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman;
 - 3) persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman;
 - 4) persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman;
 - 5) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly; dan
 - 6) persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK).
 - b. meningkatnya kualitas tenaga pendidik dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
 - 2) persentase dosen berkualifikasi S3.
 - c. meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/ Unggul; dan
 - 2) persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
 - d. meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
 - 2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.
 - e. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
 - f. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
 - 2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3 dan
 - 3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.

4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan program Kementerian Agama yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, Surat Berharga Syariah Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan umum dan Pinjaman Luar Negeri. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kementerian Agama 2020-2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kementerian Agama berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.



Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama sampai dengan 2024 pada tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 12 Program Kementerian Agama 2020-2024

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian agama	1.921.414	2.192.530	2.228.560	2.247.492	2.276.999	10.866.995
Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur	162.396	170.516	179.042	187.994	197.394	897.342
Program penelitian pengembangan dan pendidikan	560.974	1.159.718	1.251.605	1.369.589	1.497.671	5.839.558
Program penyelenggaraan haji dan umrah	1.554.866	1.865.840	1.903.156	1.941.219	1.980.044	9.245.126
Program pendidikan Islam	51.454.930	55.504.976	58.398.794	61.255.012	64.093.048	290.706.760
Program bimbingan masyarakat Islam	5.617.459	6.083.443	6.995.959	8.045.353	9.252.156	35.994.371
Program bimbingan masyarakat Kristen	1.779.758	2.564.710	3.248.730	3.818.476	4.599.811	16.011.485
Program bimbingan masyarakat Katolik	884.925	2.522.560	3.027.070	3.632.490	4.358.950	14.425.995
Program bimbingan masyarakat Hindu	760.798	1.052.494	1.112.424	1.129.037	1.145.892	5.200.645



Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Program bimbingan masyarakat Buddha	269.782	461.948	501.438	544.541	591.603	2.369.312
Program kerukunan umat beragama	53.340	180.146	182.015	182.972	184.537	783.010
Program penyelenggaraan jaminan produk halal	124.105	163.285	161.683	161.346	162.635	773.054
Total	65.144.748	73.922.166	79.190.476	84.515.522	90.340.741	393.113.654

Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2020

Tabel 4.2
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 5 Program Kementerian Agama 2020-2024

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Program Dukungan Manajemen	27.475.500	29.759.162	31.727.637	33.935.448	36.431.609	159.329.356
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.574.756	4.042.279	4.547.467	5.117.324	5.798.770	22.080.596
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	15.367.289	17.614.769	18.555.665	19.542.650	20.581.081	91.661.454
Program PAUD dan Wajar 12 Tahun	13.253.729	14.666.210	15.108.733	15.275.909	15.480.085	73.784.666
Program Pendidikan Tinggi	6.473.474	7.839.746	9.250.974	10.644.191	12.049.197	46.257.582
Total	65.144.748	73.922.166	79.190.476	84.515.522	90.340.742	393.113.654

Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2020

BAB

5

PENUTUP



Penutup

Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang mengandung Visi dan Misi Presiden-Wakil Presiden serta Prioritas Nasional. Rencana Strategis Kementerian Agama memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang agama dan pendidikan. Renstra Kementerian Agama menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKSP dan IKSK, untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra Kementerian Agama ini harus digunakan sebagai pedoman dan rujukan arah pembangunan bidang agama dan pendidikan yang hendak dicapai pada Tahun 2020-2024. Renstra ini merupakan dasar dan acuan bagi satuan kerja dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral.

Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana. Untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparaturnya Kementerian Agama. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kementerian Agama kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan harapan umat.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FACHRUL RAZI



LAMPIRAN

Lampiran II

Kerangka Regulasi Kementerian Agama

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024**

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	RPMA tentang Penyuluh Agama	Konsolidasi standar kriteria, jenis, tugas dan fungsi, kelompok binaan, standar kompetensi, kenaikan pangkat Penyuluh Agama secara komprehensif	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	KemenPAN dan RB dan BKN	2021
2	RPMA tentang Peta Penyiaran Agama	Belum adanya regulasi peta penyiaran agama untuk pendistribusian penyiar agama yang merata	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, MATAKIN	2021
3	RUU tentang Perlindungan Umat Beragama	Pasal 29 UUD 1945 ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"	Sekretariat Jenderal / Badan Litbang dan Diklat	Kemendagri, Kemenkopolkham, Kemenkum HAM, Kejaksaan, POLRI	2021
4	RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama	Perlu ada Peraturan Pemerintah atas amanat UU tentang Perlindungan Umat Beragama	Sekretariat Jenderal / Badan Litbang dan Diklat	Kemendagri, Kemenkopolkham, Kemenkum HAM, Kejaksaan, POLRI	2022
5	RPMA tentang Moderasi Beragama	Memberikan landasan hukum implementasi program dan kegiatan peningkatan moderasi dan kerukunan umat beragama	Sekretariat Jenderal / Badan Litbang dan Diklat	Kemenko PMK, Kemenkopolkham, BPIP, POLRI	2020
6	RPMA tentang Identifikasi, Deteksi dan Respon Dini Penanganan Konflik Paham Keagamaan	Untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban antar sesama dalam umat beragama dan kelompok masyarakat yg berbeda paham menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat pada umumnya.	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemendagri, Badan Litbang dan Diklat Kemenag	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTINGSI, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
7	RPMA tentang Rumah Ibadah Bersih, Sehat, Inklusif, dan Ramah	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang standar rumah ibadah yang bersih, sehat, inklusif, dan ramah	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemen PP dan PA, Kementerian Kesehatan	2021
8	RPMA tentang Penyelenggaraan Ziarah Keagamaan di Indonesia	Indonesia negara multireligi, dan sampai saat ini sudah banyak agen perjalanan wisata yang menawarkan wisata kerohanian tetapi belum diatur secara khusus dalam regulasi. Adapun perijinan operasional saat ini masih menggunakan ijin wisata umum, sehingga pada saat terjadi masalah dan kerugian timbul Kementerian Agama tidak bisa ikut serta mengatasi dan memberikan perlindungan kepada umat yang menjadi korban.	Ditjen Bimas Kristen	Kemendagri	2022
9	RPP tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Menindaklanjuti pasal 109 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kemendagri	2020
10	RPMA tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang berisi: (1) tata cara pendaftaran jemaah haji (2) persyaratan kesehatan jemaah haji (3) tata cara pelimpahan porsi haji (4) pengisian kuota haji tambahan (5) penetapan kuota haji (6) pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia (7) pengisian sisa kuota haji kabupaten/ kota (8) pengisian kuota haji reguler (9) tata cara pengenaan sanksi administratif bagi PIHK (10) PPIH dan petugas haji daerah (11) Pemberangkatan jemaah haji berdasarkan nomor urut pendaftaran (12) Pembinaan haji (13) Pelibatan KBIHU dalam penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler (14) pelaksanaan pelayanan kesehatan (15) pengadaan jasa transportasi Jemaah Haji	Menindaklanjuti Pasal 4,5,6,9,13,14,15,16 ,19,26,30,32,33,34,38,39,40,42,51,55,56,61,63,66,67,72,74,76,78,79,84,85,92,94,98,99,100,105,106,110 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah		2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> (16) penyediaan akomodasi (17) penyediaan asuransi (18) laporan pertanggungjawaban keuangan (19) persyaratan memperoleh izin KBIHU, evaluasi, standardisasi bimbingan dan pendampingan, serta akreditasi KBIHU (20) kuota pembimbing, seleksi dan standar pembimbing, serta penggabungan KBIHU (21) persyaratan PIHK, izin PIHK, dan pembukaan kantor cabang PIHK (22) tata cara pengenaan dan pelaksanaan sanksi administratif PIHK (23) pengisian kuota haji khusus (24) penggabungan Jemaah Haji Khusus (25) penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus (26) pendaftaran, pemberangkatan Jemaah Haji Khusus berdasarkan nomor urut pendaftaran, pengecualian bagi Jemaah Haji Khusus lanjut usia yang dapat diberangkatkan, dan penundaan keberangkatan (26) standardisasi pelayanan minimal transportasi Ibadah Haji khusus (27) standardisasi pelayanan minimal akomodasi dan konsumsi Ibadah Haji khusus (28) tata cara pengawasan dan evaluasi (29) akreditasi PIHK (30) pemberian izin dan pembukaan kantor cabang PPIU (31) tata cara pemberian sanksi administratif (32) bentuk perlindungan PPIU (33) tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan Ibadah Umrah (34) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah (35) akreditasi terhadap PPIU (36) penyuluhan dan pembimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah 				

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
11	Revisi PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Menindaklanjuti perubahan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akibat adanya kebijakan <i>omnibus law</i>	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Luar Negeri, BPOM, BSN, LPH, MUI, lembaga penerbit sertifikat halal	2020
12	Revisi PMA Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Menindaklanjuti Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Luar Negeri, BPOM, BSN, LPH, MUI, lembaga penerbit sertifikat halal	2020
13	RPMA tentang Lembaga Keagamaan	Lembaga keagamaan adalah mitra strategis dalam pembinaan umat; keberadaannya masih belum optimal, sehingga diperlukan regulasi agar lembaga keagamaan secara optimal melakukan pembinaan umat	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, MATAKIN	2021
14	RPMA tentang Notaris sebagai PPAIW	Amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan dalam rangka mempermudah para wakif untuk berwakaf sehingga PPAIW tidak hanya dari KUA. Menegaskan kedudukan dan kewenangan Notaris sebagai PPAIW dalam pencatatan akad wakaf	Ditjen Bimas Islam	BWI, Notaris dan LKS-PWU	2020

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
15	RPMA tentang Jabatan Penghulu	Menindak lanjut permenpan RB nomor 9 tahun 2019 tentang jabatan fungsional penghulu. Regulasi ini dibutuhkan untuk mengatur kreteria kompetensi, sistem rekrutmen, pengangkatan ke dalam jabatan penghulu, pembinaan, perhitungan kebutuhan, pangkat dan ruang, penyusunan tugas jabatan, jenjang jabatan, kegiatan penghulu, sistem kenaikan pangkat dan sistem penilaian kinerja.	Ditjen Bimas Islam	KemenPAN dan RB dan BKN	2020
16	Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Banyaknya hal baru yang akan diatur dengan kondisi perkembangan dinamika perzakatan saat ini dalam mengimplementasikan pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.	Ditjen Bimas Islam	Baznas Provinsi, Kab/Kota, Unit Pengelola Baznas, LAZnas	2020
17	Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	Banyaknya hal baru yang akan diatur dengan kondisi perkembangan dinamika perwakafan saat ini. Selain itu untuk menegaskan kedudukan dan kewenangan masing-masing pihak pengelolaan wakaf.	Ditjen Bimas Islam	BWI	2020
18	RPMA tentang Lembaga Pengelola Dana Keagamaan	Peningkatan pengelolaan dana sosial keagamaan (izin, persyaratan, jumlah, status badan hukum, peruntukan, akuntabilitas)	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Lembaga Dana Sosial Keagamaan	2020
19	Revisi PMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang	Teknis pelaksanaan pendaftaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan wakaf uang dan Wakaf melalui uang. Pelaporan dan Pengawasan yang akan diatur secara luas terkait dengan fenomena wakaf yang ada seperti wakaf melalui uang dan wakaf saham	Ditjen Bimas Islam	LKS-PWU, Nazhir, Wakif, Kemenag, dan BWI	2020
20	RPMA tentang Penggunaan Teknologi <i>internet/ blockchain</i> dalam Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya	Perkembangan Teknologi yang semakin cepat dan banyaknya lembaga amil zakat yang telah memanfaatkan teknologi internet untuk pengumpulan dana ZIS	Ditjen Bimas Islam	Baznas Provinsi, Kab/Kota, Unit Pengelola Baznas, LAZnas, dan Fintech	2020

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTINGSI, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
21	Revisi PMA Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang	Amanat UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Petunjuk teknis terkait pelaksanaan pada benda bergerak selain uang, seperti Surat Berharga, kendaraan, logam mulia, hak atas kekayaan intelektual, jasa profesi, dll	Ditjen Bimas Islam	PPAIW, Nazhir, Wakif, Kemenag, dan BWI	2020
22	RPMA tentang Implementasi Keselarasan Budaya dengan Nilai Ajaran Agama	Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Jumlah ragam aktifitas budaya yang menggambarkan nilai agama dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini diharapkan tidak ada dikotomi antara budaya dan agama	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemendikbud, Kemendagri	2021
23	Revisi PMA Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pespawari) Nasional (LPPN)	Adanya PMA tentang pembentukan LPPN yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Kristen yang sesuai dengan PMA Nomor 42 Tahun 2016.	Ditjen Bimas Kristen	Kemendikbud, Kemendagri	2020
24	<p>RPMA tentang Penyelenggaraan Pesantren yang isinya mencakup pengaturan-pengaturan tentang Penyelenggaraan Pesantren Dalam fungsi Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan umum • Tujuan • Jenjang, jenis, dan jalur pendidikan Pesantren • Kurikulum • Standar nasional • Sistem penjaminan mutu (termasuk tujuan, sistem, proses, peran Dewan Masajikh dan Majelis Masajikh • Tenaga pendidik dan kependidikan • Sarana dan prasarana • Sistem penilaian • Sistem sertifikasi <p>Penyelenggaraan Pesantren Dalam fungsi Dakwah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan umum • Tujuan • Jenjang, jenis, dan jalur pendidikan Pesantren • Konten dan metode • Sistem penjaminan mutu • Da'i: persyaratan, kompetensi (sertifikasi) • Sarana dan prasaran pendukung • Sistem akuntabilitas • Peran Pemerintah 	Menindaklanjuti Pasal 7,14,18,24,28,30,36 pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren	Ditjen Pendidikan Islam	Kemendikbud, KemenPAN dan RB	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
	<p>Penyelenggaraan Pesantren Dalam fungsi Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan umum • Tujuan • Bentuk dan jenis program • Sistem penjaminan mutu • Fasilitator/Motivator: persyaratan, kompetensi (sertifikasi) • Sarana dan prasaran pendukung • Sistem akuntabilitas • Peran Pemerintah 				
25	Revisi PMA tentang Penyelenggaraan Madrasah	Merevisi Permenag No. 90/2013 tentang Penyelenggaraan Madrasah, yang telah direvisi dengan No. 63/2016, terutama yang berkaitan dengan diversifikasi madrasah : kelas filial, madrasah inklusi, MTs Satu Atap, MA Satu Atap, Madrasah Aliyah Keagamaan Islam MA Program Keterampilan Madrasah Aliyah Unggul (Insan Cendekia) dan Sistem penjaminan mutu Budaya mutu Struktur organisasi Madrasah (setiap jenjang dan jenis)	Ditjen Pendidikan Islam	Kemendikbud, KemenPAN dan RB	2021
26	RPMA tentang Alih Fungsi Untuk Pemanfaatan MI dan MTs yang Kosong	Untuk mendayagunakan sarana dan prasarana MI dan MTs yang kosong guna memperluas akses	Ditjen Pendidikan Islam	Kemendikbud, Kemendagri	2020
27	<p>Revisi PMA yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan (dari jenjang PAUD sampai dengan pendidikan menengah), yang isinya mencakup pengaturan-pengaturan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan umum b. Tujuan c. Jenjang, jenis, dan jalur Pendidikan Keagamaan Islam d. Santri e. Kurikulum f. Standar nasional g. Sistem penjaminan mutu (termasuk tujuan, sistem, proses, peran Dewan Masjid dan Majelis Masjid) h. Tenaga pendidik dan kependidikan i. Sarana dan prasaran j. Sistem penilaian k. Sistem sertifikasi l. Sistem akreditasi 	Menindaklanjuti Pasal 14 s/d 20 PP No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Peraturan perundangan yang ada belum menyeluruh cakupannya.	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Pendidikan Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	KemenPAN dan RB, Kemendikbud, Kemenristekdikti, BAN-SM	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
28	RPMA tentang Sistem Pengelolaan Pemenuhan dan Pendistribusian Guru dan Dosen	Guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas dalam pengelolaan guru	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Pendidikan Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemendagri, KemenPAN dan RB	2021
29	RPMA tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK) yang isinya mencakup pengaturan-pengaturan tentang: a. Organisasi PTK yang meliputi: senat, pemimpin, satuan pengawas internal, dewan penyantun, unit pengawas dan penjamin mutu, penunjang akademik dan sumber belajar, dan pelaksana administrasi b. Tata cara penyusunan statuta PTKN dan PTKN Badan Hukum c. Standar Nasional d. Sistem penjaminan mutu e. Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan lektor dan guru besar dalam rumpun ilmu agama	Menindaklanjuti Pasal 37 s/d 64 PP No. 46/2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Pendidikan Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemendikbud, KemenPAN dan RB, BAN-PT	2021
30	RPMA tentang Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan	Menunjang penjaminan mutu Madrasah, Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Keagamaan	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Pendidikan Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemendikbud	2020
31	Revisi PMA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter	Disesuaikan dengan Permendikbud No 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Pendidikan Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemendikbud, Kemendagri	2021
32	RPMA tentang Program Ekonomi Kerakyatan di Pesantren	Meningkatkan relevansi program dengan kebutuhan masyarakat	Ditjen Pendidikan Islam	Kemendikbud, Kemenaker	2020
33	RPMA tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK) yang isinya mencakup pengaturan-pengaturan tentang: a. Sistem, akses, mutu, relevansi, pendidikan tenaga kependidikan, anggaran, dan hak mahasiswa PTK b. Kebijakan nasional (jangka panjang, menengah, dan tahunan) dalam pengembangan, penghimpunan dan pendayagunaan potensi sumberdaya masyarakat bagi Badan Penyelenggara dan PTK c. Sistem pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sistem penjaminan mutu d. Ijin pendirian, perubahan, dan pencabutan ijin bagi program studi rumpun ilmu agama	Menindaklanjuti Pasal 3 s/d 36 PP No. 46/2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Pendidikan Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemendikbud, KemenPAN dan RB, BAN-PT	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
	e. Pemantapan dan peningkatan pengelolaan akademik dan sumber daya, relevansi PTK f. Majelis Pengembangan Ilmu Keagamaan g. Persyaratan pendirian dan ketentuan tentang pedoman penyusunan rencana induk pengembangan PTKN h. Tata cara dan persyaratan pendirian PTKS i. Perubahan bentuk dan status, pencabutan ijin PTKS, persyaratan dan tata caranya. j. Tata cara pembentukan pemberian ijin pendirian dan pencabutan ijin Fakultas, jurusan, dan program studi PTK, dan persyaratannya k. Kurikulum PTK l. Gelar dan ijazah: format, kesetaraan, dan terjemahan resminya. m. Sertifikasi profesi: bentuk, isi, dan tata cara pemberiannya				
34	RPMA tentang Pembentukan Dana Abadi/ Wakaf (<i>endowment fund</i>) pada PTK	Meningkatkan variasi sumber dan keberlanjutan pendanaan PTKI	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Pendidikan Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemendikbud	2020
35	RPMA Road Map Reformasi Birokrasi Kemenag	Road Map RB Kemenag 2020-2024 sebagai arah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan RB lima tahun. Road Map menggambarkan rencana rinci RB dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.	Sekretariat Jenderal	KemenPAN dan RB	2020
36	RPMA tentang Profesionalitas ASN	Menindaklanjuti Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Sekretariat Jenderal	BKN	2020
37	RPMA tentang Manajemen Pegawai	Menindaklanjuti PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang berdasarkan Sistem Merit, maka diperlukan pengaturan Manajemen PNS. Pengaturan Manajemen PNS bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.	Sekretariat Jenderal	BKN, LAN, KemenPAN dan RB	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
38	RPMA tentang <i>Mora one Search (MoS)</i>	Menindaklanjuti PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kementerian Agama akan melakukan integrasi sistem informasi yang bertujuan untuk mendukung satu data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan	Sekretariat Jenderal	BPS, Bappenas	2020
39	Revisi PMA 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama	Menindaklanjuti pidato presiden tanggal pada point keempat tentang penyederhanaan birokrasi dengan merevisi PMA 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama serta PMA 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.	Sekretariat Jenderal	Kemen PAN & RB	2020
40	RPMA tentang Analisis Beban Kerja	Menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi diperlukan analisis beban kerja yang mengubah KMA Nomor 164 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (<i>Work Load Analysis</i>) di Lingkungan Kementerian Agama	Sekretariat Jenderal	Kemen PAN & RB	2020
41	RPMA tentang Jabatan Fungsional di Kementerian Agama	Sebagai dampak penyederhanaan birokrasi perlu dibuat PMA tentang Jabatan Fungsional di Kementerian Agama yang mengatur Jenis, Kriteria, Tugas dan Fungsi, Jenjang, dan Pembinaan.	Sekretariat Jenderal	Kemen PAN & RB	2020
42	RPMA tentang Penelitian Kebijakan	Penelitian bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi perumusan kebijakan. Penyusunan <i>policy paper</i> dimaksudkan untuk menjembatani gap atau kesenjangan antara peneliti dengan pembuat kebijakan.	Badan Litbang dan Diklat	BRIN, LAN	2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FACHRUL RAZI

Lampiran III

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KEMENTERIAN AGAMA										65,144,748	73,922,166	79,190,476	84,515,522	90,340,741		
SS1 Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama																
IKSS1.1	Indeks kesalehan umat beragama		Nilai	83,58	84,08	84,58	85,08	85,58	86,08							
SS2 Meningkatkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama																
IKSS2.1	Indeks kerukunan umat beragama		Nilai	73,83	73,91	74,00	74,70	75,00	75,80							
SS3 Meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya																
IKSS3.1	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya		Nilai	NA	60,00	65,00	70,00	72,00	76,00							
SS4 Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama																
IKSS4.1	Indeks kepuasan layanan KUA		Nilai	77,28	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00							
IKSS4.2	Tingkat kepuasan layanan produk halal		Nilai	NA	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00							
IKSS4.3	Indeks kepuasan layanan ibadah haji		Nilai	85,91	85,95	85,96	85,97	85,99	86,00							
SS5 Meningkatkan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat																
IKSS5.1	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan		%	49,70	50,00	51,00	53,00	54,00	55,00							
SS6 Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran																
IKSS6.1	Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi:															
	a. Literasi		%	53,20	55,20	56,90	58,50	60,30	61,20							
	b. Numerasi		%	22,30	23,60	24,70	25,50	27,10	30,10							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSS6.2	Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA:															
	a. Membaca		%	44,62 (2018)	NA	46.79	NA	NA	49.80							
	b. Matematika		%	31,4 (2018)	NA	35.64	NA	NA	39.83							
	c. Sains		%	44,05 (2018)	NA	45.45	NA	NA	48.00							
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan															
IKSS7.1	APK RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/Nava Dhammasekha		%	9.40	9.70	10.00	12.00	13.00	14.00							
IKSS7.2	APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman		%	13.89	13.90	14.00	14.70	15.67	16.00							
IKSS7.3	APK MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman		%	24.37	24.47	24.70	25.20	25.70	26.20							
IKSS7.4	APK MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman		%	10.78	11.44	11.60	11.90	12.40	12.90							
IKSS7.5	APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman		%	12.02	12.08	12.11	12.33	12.46	12.60							
IKSS7.6	APM MTs/Wustha/ SMPTK/Adi Widya Pasraman		%	21.38	21.39	21.65	21.78	22.38	22.60							
IKSS7.7	APM MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman		%	9.82	9.83	19.40	19.80	20.20	20.60							
IKSS7.8	APK PTK/Ma'had Aly		%	5.29	5.50	6.47	6.87	7.27	7.35							
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik															
IKSS8.1	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP		Nilai	25:1	20:1	20:1	20:1	15:1	15:1							
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan															
IKSS9.1	Persentase MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B		%	57.00	61.04	63.28	65.52	67.76	70.00							
IKSS9.2	Persentase MTs/ Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman yang terakreditasi/B		%	48.00	61.04	63.28	65.52	67.76	70.00							
IKSS9.3	Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B		%	44.00	61.04	63.28	65.52	67.76	70.00							
IKSS9.4	Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/ Unggul		%	2.16	10.26	17.66	25.06	32.46	60.00							
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa															
IKSS10.1	Indeks karakter siswa		Nilai	70,14	71,87	72,00	72,13	72,26	73,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SS11 Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas															
IKSS11.1	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional		%	0.31	1.46	2.92	4.38	5.84	7.30						
IKSS11.2	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan		%	27.28	32.32	37.36	42.40	47.44	53.36						
IKSS11.3	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional		%	2.89	5.76	13.00	16.00	19.00	22.00						
IKSS11.4	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi		%	0.14	2.77	5.40	8.03	10.66	13.29						
SS12 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel															
IKSS12.1	Predikat opini laporan keuangan		Opini	WTP (2018)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
IKSS12.2	Nilai reformasi birokrasi		Nilai	75.04	76.00	77.00	79.00	80.00	82.00						
SS13 Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan															
IKSS13.1	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (policy paper)		%	NA	80.00	82.00	85.00	87.00	90.00						
025.01-PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		PUSAT-DAERAH								27,475,500	29,759,162	31,727,637	33,935,448	36,431,609	SETJEN, ITJEN, BALITBANG DAN DIKLAT, DJTJEN PHU, DJTJEN PENDIS, DJTJEN BIMAS ISLAM, DJTJEN BIMAS KRISTEN, DJTJEN BIMAS KATOLIK, DJTJEN BIMAS HINDU, DJTJEN BIMAS BUDDHA, BJPH
SP1.1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama															
IKSP1.1.1	Persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSP1.1.2	Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dan internal terhadap anggaran		%	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05						
IKSP1.1.3	Persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang efektif		%	NA	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00						
SP1.2 Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama															
IKSP1.2.1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Nilai	NA	80.00	81.00	84.00	85.00	87.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSP1.2.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	70.52	71.00	72.00	74.00	77.00	80.00						
IKSP1.2.3	Nilai implemetansi sistem merit		Nilai	NA	50.00	80.00	85.00	87.00	95.00						
IKSP1.2.4	Nilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)		Nilai	3.11	3.31	3.51	3.71	3.91	4.00						
IKSP1.2.5	Persentase satuan kerja yang mendapat nilai PMPRB minimal 82		%	27.27	45.45	63.64	81.82	100.00	100.00						
IKSP1.2.6	Persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai)		%	72.00	72.50	85.00	87.50	95.00	97.50						
IKSP1.2.7	Persentase satuan kerja yang mendapat nilai skor audit kinerja minimal 75		%	45.00	47.22	49.44	50.52	52.54	54.55						
IKSP1.2.8	Persentase satuan kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal BB		%	62.00	78.13	81.25	84.38	87.50	90.63						
IKSP1.2.9	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diverifikasi		%	87.00	88.00	90.00	94.00	96.00	98.00						
IKSP1.2.10	Persentase pengaduan masyarakat yang diverifikasi		%	89.00	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00						
IKSP1.2.11	Nilai Kapabilitas APIP		Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4						
SP1.3 Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian															
IKSP1.3.1	Persentase Policy Paper yang dimanfaatkan		%	NA	80.00	82.00	85.00	87.00	90.00						
IKSP1.3.2	Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan		%	NA	15.00	18.00	22.00	25.00	30.00						
IKSP1.3.3	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian		%	80.00	80.00	82.00	85.00	87.00	90.00						
IKSP1.3.4	Jumlah publikasi Badan Litbang dan Diklat yang disitasi		Dokumen	NA	3,000	7,000	12,500	19,500	29,500						
IKSP1.3.5	Jumlah produk penelitian, pengembangan, dan pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)		Dokumen	2	7	17	30	46	65						
SP1.4 Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul															
IKSP1.4.1	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat		%	NA	13.00	23.50	33.50	44.00	55.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSP1.4.2	Jumlah alumni pelatihan yang memenuhi standar		Orang	50,000	50,000	110,000	180,000	260,000	350,000							
IKSP1.4.3	Persentase capaian standar kompetensi peserta diklat		%	80.00	80.00	82.00	85.00	87.00	90.00							
IKSP1.4.4	Indeks pemanfaatan alumni diklat dan hasil pelatihan		Nilai	85.00	85.20	85.40	85.60	85.80	86.00							
IKSP1.4.5	Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO		%	NA	12.50	25.00	50.00	75.00	100.00							
SP1.5 Meningkatkan kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan																
IKSP1.5.1	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an		Nilai	80.30	85.00	85.20	85.40	85.60	85.80							
IKSP1.5.2	Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an		Nilai	83.92	85.00	85.20	85.40	85.60	85.80							
IKSP1.5.3	Jumlah viewer yang memanfaatkan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama		Orang	220,000	230,000	470,000	720,000	980,000	1,250,000							
IKSP1.5.4	Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an		Orang	60,000	60,000	125,000	195,000	270,000	350,000							
IKSP1.5.5	Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan		Nilai	50.00	70.00	72.00	75.00	77.00	79.00							
SP 1.6 Meningkatkan tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel																
IKSP1.6.1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan		%	74.83	78.00	82.27	85.55	88.36	91.27							
IKSP1.6.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Nilai	87.48	88.31	90.16	90.82	91.49	92.14							
IKSP1.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	81.52	82.63	85.98	87.86	90.21	92.53							
IKSP1.6.4	Nilai Maturitas SPIP		Nilai	3.05	3.12	4.07	4.28	4.57	4.72							
IKSP1.6.5	Indeks Profesionalitas ASN		Nilai	NA	70.60	73.27	75.73	77.27	79.64							
2098-Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN										5,489	22,937	22,984	23,083	23,147	Biro Hukum dan KLN	
SK.1.2098.1 Meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum																
IKSK.1.2098.1.1	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan		%	85.00	85.00	95.00	95.00	95.00	95.00							
IKSK.1.2098.1.2	Persentase produk hukum yang diterbitkan		%	85.00	85.00	95.00	95.00	95.00	95.00							
IKSK.1.2098.1.3	Persentase kasus hukum yang terselesaikan		%	45.00	50.00	75.00	80.00	95.00	100.00							
IKSK.1.2098.1.4	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan		Kegiatan	3	3	10	10	10	10							
SK.1.2098.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan kerja sama luar negeri																
IKSK.1.2098.2.1	Persentase penyelesaian naskah kerja sama dan perjanjian internasional		%	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2098.2.2	Persentase rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri		%	90.00	92.00	94.00	95.00	96.00	99.00						
IKSK.1.2098.2.3	Persentase rekomendasi izin orang asing		%	90.00	94.00	95.00	96.00	97.00	99.00						
2099-Pembinaan Administrasi Kepegawaian										5,820	41,851	41,926	41,966	42,029	Biro Kepegawaian
SK.1.2099.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)															
IKSK.1.2099.1.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja		%	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.1.2099.1.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti		%	80.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00						
IKSK.1.2099.1.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan		%	50.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00						
IKSK.1.2099.1.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	50.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00						
IKSK.1.2099.1.5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	40.00	40.00	60.00	70.00	85.00	95.00						
IKSK.1.2099.1.6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu		%	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00						
IKSK.1.2099.1.7	Persentase data ASN yang diupdate		%	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00						
IKSK.1.2099.1.8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses		%	70.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00						
2100-Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN										1,253,624	1,274,747	1,308,052	1,325,483	1,352,697	Biro Keuangan dan BMN
SK.1.2100.1 Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan															
IKSK.1.2100.1.1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu		Dokumen	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00						
IKSK.1.2100.1.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)		%	90.00	92.00	95.00	98.00	99.00	100.00						
IKSK.1.2100.1.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal		%	94.00	94.80	95.69	96.59	97.80	98.29						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.1.2100.1.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama		%	25.00	30.00	50.00	60.00	70.00	80.00							
IKSK.1.2100.1.5	Persentase pencapaian dan penetapan target PNB dan BLU		%	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
SK.1.2100.2	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel															
IKSK.1.2100.2.1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	41.95	41.95	41.95	45.77	49.93	100.00							
IKSK.1.2100.2.2	Persentase tanah yang bersertifikat		%	25.00	28.52	31.35	36.50	40.00	43.77							
IKSK.1.2100.2.3	Persentase nilai <i>Opname Physic (OP)</i> BMN		%	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00							
2101-Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana										5,593	27,080	27,158	27,200	27,242	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
SK.1.2101.1	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi															
IKSK.1.2101.1.1	Persentase satuan kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi		%	80.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00							
IKSK.1.2101.1.2	Jumlah dokumen perencanaan organisasi baru, pusat dan daerah yang diusulkan		Dokumen	NA	15	17	19	20	21							
IKSK.1.2101.1.3	Persentase jabatan satuan kerja yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan regulasi baru		%	NA	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00							
IKSK.1.2101.1.4	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis		%	NA	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00							
IKSK.1.2101.1.5	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi		%	15.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00							
IKSK.1.2101.1.6	Jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan regulasinya		Dokumen	80	30	40	50	60	70							
IKSK.1.2101.1.7	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		%	71.30	95	95	95	95	95							
SK.1.2101.2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi															
IKSK.1.2101.2.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi		%	80.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.1.2101.2.2	Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)		Satker	10	19	34	57	90	135							
IKSK.1.2101.2.3	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas		Satker	470	510	548	584	617	651							
IKSK.1.2101.2.4	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja		Orang	112	461	512	568	630	700							
2102-Pembinaan Administrasi Perencanaan										5,789	57,055	57,133	57,174	57,240	Biro Perencanaan	
SK.1.2102.1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran																
IKSK.1.2102.1.1	Persentase output perencanaan yang berbasis data		%	90.00	90.00	93.00	95.00	95.00	100.00							
IKSK.1.2102.1.2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	90.00	90.00	90.00	95.00	100.00	100.00							
IKSK.1.2102.1.3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti		%	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00	75.00							
SK.1.2102.2 Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran																
IKSK.1.2102.2.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas		%	92.26	93.00	94.00	95.00	96.00	96.00							
IKSK.1.2102.2.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti		%	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00	80.00							
IKSK.1.2102.2.3	Persentase kebijakan Prioritas Presiden dan Direktif Menteri yang dievaluasi		%	80.00	85.00	90.00	90.00	95.00	100.00							
2103-Pembinaan Administrasi Umum										636,039	731,063	733,059	734,102	735,780	Biro Umum	
SK.1.2103.1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor																
IKSK.1.2103.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar		%	60,00	60,00	75,00	80,00	90,00	95,00							
SK.1.2103.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan tata persurutan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa																
IKSK.1.2103.2.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu		%	97.00	98.06	99.03	100.00	100.00	100.00							
IKSK.1.2103.2.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik		%	55.00	56.41	85.79	100.00	100.00	100.00							
IKSK.1.2103.2.3	Persentase surat yang disiapkan dalam e-dokumen		%	72.00	74.21	83.26	100.00	100.00	100.00							
IKSK.1.2103.2.4	Persentase menurunnya lelang gagal		%	65.00	68.05	74.95	85.27	89.60	98.85							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.1.2103.2.5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding		%	50.00	52.25	71.65	82.77	86.90	96.85							
SK.1.2103.3 Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan rumah tangga																
IKSK.1.2103.3.1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan		%	60.00	60.00	75.00	80.00	90.00	95.00							
IKSK.1.2103.3.2	Persentase penatausahaan dan penertiban aset BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal		%	85.00	86,65	88,25	90,40	93,60	96,80							
2106-Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan										9,060	37,797	38,248	38,484	38,863	Biro Humas, Data dan Informasi	
SK.1.2106.1 Meningkatkan kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi																
IKSK.1.2106.1.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi		Kegiatan	1,000	1,200	1,300	1,400	1,450	1,500							
IKSK.1.2106.1.2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang di <i>counter</i>		%	90.00	90.00	91.00	93.00	95.00	100.00							
IKSK.1.2106.1.3	Persentase opini positif berita Kemenag		%	75.00	75.00	77.50	80.00	87.50	100.00							
SK.1.2106.2 Meningkatkan kualitas data dan sistem informasi																
IKSK.1.2106.2.1	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar		Unit	45	60	70	80	90	100							
IKSK.1.2106.2.2	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam MOS (<i>Mora One Search</i>)		Unit	5	6	7	8	9	10							
IKSK.1.2106.2.3	Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet		Satker	45	45	45	45	45	45							
IKSK.1.2106.2.4	Persentase data agama dan pendidikan yang <i>valid</i> , dan <i>reliable</i>		%	60.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00							
2113-Pengawasan Fungsional Pendidikan										41,020	43,071	45,224	47,485	49,860	Inspektorat Wilayah I-IV	
SK.1.2113.1 Meningkatkan pengawasan atas pengelolaan keuangan pada satuan kerja pendidikan																
IKSK.1.2113.1.1	Persentase laporan keuangan satuan kerja pendidikan telah disajikan sesuai dengan SAP		%	73.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00							
IKSK.1.2113.1.2	Nilai materialitas temuan keuangan pada satuan kerja pendidikan		%	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05							
IKSK.1.2113.1.3	Persentase hasil reviu pengendalian intern pelaporan keuangan yang ditindaklanjuti		%	NA	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00							
SK.1.2113.2 Meningkatkan kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko																
IKSK.1.2113.2.1	Jumlah satuan kerja pendidikan yang dievaluasi pengendalian intern		Satker	NA	24	28	32	36	40							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2113.2.2	Jumlah satuan kerja pendidikan yang dievaluasi manajemen risiko		Satker	NA	790	793	796	800	805						
IKSK.1.2113.2.3	Jumlah hasil pengawasan proyek strategis satuan kerja pendidikan		Dokumen	98	102	114	126	138	150						
SK.1.2113.3 Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pada satuan kerja pendidikan															
IKSK.1.2113.3.1	Jumlah satuan kerja pendidikan yang dievaluasi PMPZI		Satker	2	13	21	28	35	42						
IKSK.1.2113.3.2	Jumlah satuan organisasi/ satuan kerja pendidikan yang dilakukan audit kinerja		Satker	903	962	1,014	1,066	1,118	1,170						
IKSK.1.2113.3.3	Jumlah satuan kerja pendidikan yang dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja		Satker	5	15	19	23	27	31						
IKSK.1.2113.3.4	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan satuan kerja pendidikan		Dokumen	60	62	64	68	70	72						
2115-Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah I										10,552	11,080	11,634	12,216	12,827	Inspektorat Wilayah I
SK.1.2115.1 Meningkatnya pengawasan atas pengelolaan keuangan															
IKSK.1.2115.1.1	Persentase laporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah I telah disajikan sesuai dengan SAP		%	73.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00						
IKSK.1.2115.1.2	Nilai materialitas temuan keuangan pada satuan kerja Inspektorat Wilayah I		%	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05						
IKSK.1.2115.1.3	Persentase hasil revidi pengendalian intern pelaporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti		%	NA	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00						
SK.1.2115.2 Meningkatnya kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko															
IKSK.1.2115.2.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah I yang dievaluasi pengendalian intern		Satker	NA	6	7	8	9	10						
IKSK.1.2115.2.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah I yang dievaluasi manajemen risiko		Satker	NA	6	7	8	9	10						
IKSK.1.2115.2.3	Jumlah hasil pengawasan atas proyek strategis satuan kerja Inspektorat Wilayah I		Dokumen	4	5	6	7	8	9						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.2115.3 Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi pada satuan kerja															
IKSK.1.2115.3.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah I yang dievaluasi PMPRB		Satker	NA	76	77	79	80	82						
IKSK.1.2115.3.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah I yang dievaluasi PMPZI		Satker	14	18	20	22	24	26						
IKSK.1.2115.3.3	Jumlah satuan organisasi/ satuan kerja Inspektorat Wilayah I yang dilakukan audit kinerja		Satker	80	89	91	93	95	97						
IKSK.1.2115.3.4	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah I yang dievaluasi akuntabilitas kinerja		Satker	3	4	5	6	7	8						
IKSK.1.2115.3.5	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan satuan kerja Inspektorat Wilayah I		Dokumen	5	6	7	8	9	10						
2116-Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah II										10,922	11,469	12,042	12,644	13,276	Inspektorat Wilayah II
SK.1.2116.1 Meningkatnya pengawasan atas pengelolaan keuangan															
IKSK.1.2116.1.1	Persentase hasil revidi laporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah II yang ditindaklanjuti		%	73.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00						
IKSK.1.2116.1.2	Nilai materialitas temuan keuangan pada satuan kerja Inspektorat Wilayah II		%	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05						
IKSK.1.2116.1.3	Persentase hasil revidi pengendalian intern pelaporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah II yang ditindaklanjuti		%	NA	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00						
SK.1.2116.2 Meningkatnya kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko															
IKSK.1.2116.2.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah II yang dievaluasi pengendalian intern		Satker	NA	7	8	9	10	11						
IKSK.1.2116.2.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah II yang dievaluasi manajemen risiko		Satker	NA	7	8	9	10	11						
IKSK.1.2116.2.3	Jumlah hasil pengawasan atas proyek strategis satuan kerja Inspektorat Wilayah II		Dokumen	4	5	6	7	8	9						
SK.1.2116.3 Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi pada satuan kerja															
IKSK.1.2116.3.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah II yang dievaluasi PMPRB		Satker	NA	76	77	79	80	82						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.1.2116.3.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah II yang dievaluasi PMPZI		Satker	12	15	17	18	20	21							
IKSK.1.2116.3.3	Jumlah satuan organisasi/ satuan kerja Inspektorat Wilayah II yang dilakukan audit kinerja		Satker	75	80	82	84	86	88							
IKSK.1.2116.3.4	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah II yang dievaluasi akuntabilitas kinerja		Satker	3	4	5	6	7	8							
IKSK.1.2116.3.5	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan satuan kerja Inspektorat Wilayah II		Dokumen	5	7	8	9	10	11							
2117-Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah III										11,151	11,708	12,293	12,908	13,554	Inspektorat Wilayah III	
SK.1.2117.1 Meningkatkan pengawasan atas pengelolaan keuangan																
IKSK.1.2117.1.1	Persentase hasil revidi laporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah III yang ditindak lanjuti		%	73.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00							
IKSK.1.2117.1.2	Nilai materialitas temuan keuangan pada satuan kerja Inspektorat Wilayah III		%	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05							
IKSK.1.2117.1.3	Persentase hasil revidi pengendalian intern pelaporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti		%	NA	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00							
SK.1.2117.2 Meningkatkan kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko																
IKSK.1.2117.2.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah III yang dievaluasi pengendalian intern		Satker	NA	7	8	9	10	11							
IKSK.1.2117.2.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah III yang dievaluasi manajemen risiko		Satker	NA	7	8	9	10	11							
IKSK.1.2117.2.3	Jumlah hasil pengawasan atas proyek strategis satuan kerja Inspektorat Wilayah III		Dokumen	4.00	5	6	7	8	9							
SK.1.2117.3 Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pada satuan kerja																
IKSK.1.2117.3.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah III yang dievaluasi PMPRB		Satker	NA	76	77	79	80	82							
IKSK.1.2117.3.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah III yang dievaluasi PMPZI		Satker	3	15	17	18	20	21							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.1.2117.3.3	Jumlah satuan organisasi/ satuan kerja Inspektorat Wilayah III yang dilakukan audit kinerja		Satker	78	89	91	93	95	97							
IKSK.1.2117.3.4	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah III yang dievaluasi akuntabilitas kinerja		Satker	3	7	8	9	10	11							
IKSK.1.2117.3.5	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan satuan kerja Inspektorat Wilayah III		Dokumen	5	7	8	9	10	11							
2118-Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah IV										10,279	10,793	11,333	11,899	12,494	Inspektorat Wilayah IV	
SK.1.2118.1 Meningkatkan pengawasan atas pengelolaan keuangan																
IKSK.1.2118.1.1	Persentase hasil revidi laporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah IV yang ditindak lanjuti		%	73.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00							
IKSK.1.2118.1.2	Nilai materialitas temuan keuangan pada satuan kerja Inspektorat Wilayah IV		%	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05							
IKSK.1.2118.1.3	Persentase hasil revidi pengendalian intern pelaporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti		%	NA	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00							
SK.1.2118.2 Meningkatkan kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko																
IKSK.1.2118.2.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah IV yang dievaluasi pengendalian intern		Satker	NA	7	8	9	10	11							
IKSK.1.2118.2.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah IV yang dievaluasi manajemen risiko		Satker	NA	7	8	9	10	11							
IKSK.1.2118.2.3	Jumlah hasil pengawasan atas proyek strategis satuan kerja Inspektorat Wilayah IV		Dokumen	NA	5	6	7	8	9							
SK.1.2118.3 Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pada satuan kerja																
IKSK.1.2118.3.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah IV yang dievaluasi PMPRB		Satker	NA	76	77	79	80	82							
IKSK.1.2118.3.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah IV yang dievaluasi PMPZI		Satker	12	15	17	18	20	21							
IKSK.1.2118.3.3	Jumlah Satuan organisasi/ satuan kerja Inspektorat Wilayah IV yang dilakukan audit kinerja		Satker	78	80	82	84	86	88							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.1.2118.3.4	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah IV yang dievaluasi akuntabilitas kinerja		Satker	3	7	8	9	10	11							
IKSK.1.2118.3.5	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan satuan kerja Inspektorat Wilayah IV		Dokumen	5	7	8	9	10	11							
2119-Pengawasan Fungsional Inspektorat Investigasi										7,936	8,333	8,750	9,187	9,646	Inspektorat Investigasi	
SK.1.2119.1 Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat dan laporan <i>whistle blowing system</i>																
IKSK.1.2119.1.1	Jumlah laporan hasil audit investigasi atas pengaduan masyarakat		Dokumen	62	66	74	82	90	98							
IKSK.1.2119.1.2	Jumlah laporan <i>whistle blowing system</i> yang ditindaklanjuti		Dokumen	35	39	44	51	57	64							
IKSK.1.2119.1.3	Jumlah laporan hasil audit dengan tujuan tertentu (tematik)		Dokumen	9	10	12	14	16	18							
2120-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya										70,536	74,063	77,766	81,654	85,737	Sekretariat Inspektorat Jenderal	
SK.1.2120.1 Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal																
IKSK.1.2120.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
SK.1.2120.2 Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi																
IKSK.1.2120.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	NA	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00							
IKSK.1.2120.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	80,00	85,00	90,00	93,00	96,00	100,00							
SK.1.2120.3 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja																
IKSK.1.2120.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	NA	90,00	93,00	95,00	97,00	100,00							
IKSK.1.2120.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja		%	94.57	94.90	95.23	95.56	95.89	96.22							
IKSK.1.2120.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	NA	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00							
SK.1.2120.4 Meningkatkan kematangan pengendalian intern																
IKSK.1.2120.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	90,00	93,00	95,00	97,00	100,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.1.2120.4.2	Persentase data hasil pengawasan bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	NA	90,00	93,00	95,00	97,00	100,00							
SK.1.2120.5 Meningkatkan ASN yang profesional																
IKSK.1.2120.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	90,00	92,00	94,00	96,00	99,00							
IKSK.1.2120.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	NA	75,00	80,00	85,00	95,00	100,00							
2109-Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an										2,711	19,668	23,374	25,633	28,196	Lajnah Pentashihan Al- Quran	
SK.1.2109.1 Mengembangkan tafsir agama dalam konteks budaya																
IKSK.1.2109.1.1	Jumlah buku tafsir agama yang menjelaskan teks keagamaan dalam konteks budaya		Eksemplar	2,000	2,000	4,000	6,000	8,000	10,000							
SK.1.2109.2 Terwujudnya pentashihan master mushaf Al-Quran secara cermat, teliti dan cepat																
IKSK.1.2109.2.1	Jumlah naskah Mushaf Al-Qur'an yang ditashih		Naskah	120	120	245	375	520	670							
IKSK.1.2109.2.2	Jumlah SDM Pentashih yang menjadi jabatan Fungsional Pentashih		Orang	NA	NA	15,00	35,00	60,00	90,00							
IKSK.1.2109.2.3	Indeks kepuasan pelayanan tashih Al-Qur'an		Nilai	80,30	85,00	85,20	85,40	85,60	85,80							
IKSK.1.2109.2.4	Jumlah Instansi/ lembaga yang memperoleh manfaat pembinaan pentashihan		Lembaga	3	3	6	10	14	19							
IKSK.1.2109.2.5	Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an		Nilai	80,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00							
IKSK.1.2109.2.6	Jumlah penerbit yang menggunakan teks master mushaf Al-Qur'an standar Indonesia terbitan LPMQ		Lembaga	2	2	6	12	20	30							
SK.1.2109.3 Meningkatkan kualitas pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an																
IKSK.1.2109.3.1	Jumlah dokumen pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an yang terkait moderasi beragama		Dokumen	5	5	11	17	24	32							
IKSK.1.2109.3.2	Jumlah masyarakat dan atau penerbit yang memanfaatkan hasil kajian Al-Qur'an		Orang/ Penerbit	336,000	336,000	687,500	1,054,500	1,437,000	1,835,000							
IKSK.1.2109.3.3	Jumlah produk hasil pengembangan yang diterbitkan/dicetak		Dokumen	1,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000							
IKSK.1.2109.3.4	Jumlah diseminasi hasil kajian Al-Qur'an		Kegiatan	5	7	14	21	28	35							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.2109.4 Terciptanya inovasi pengembangan hasil kajian															
IKSK.1.2109.4.1	Jumlah inovasi film dokumenter hasil al-quran dan tutorial pembelajaran Ulumul Qur'an		Film	2	2	5	9	14	20						
IKSK.1.2109.4.2	Jumlah produk hasil kajian lajnah (versi e-pub) yang dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas tunanetra		Unit	NA	NA	5	10	15	21						
IKSK.1.2109.4.3	Jumlah pengembangan aplikasi Jendela Al-Qur'an digital		Unit	4	5	10	15	20	25						
SK.1.2109.5 Terwujudnya penerbitan hasil pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an tepat waktu															
IKSK.1.2109.5.1	Jumlah Jurnal Shuhuf (Kajian Al-Qur'an)		Dokumen	1,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000						
IKSK.1.2109.5.2	Jumlah cetakan bahan bacaan Tafsir Al-Qur'an		Dokumen	1,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000						
IKSK.1.2109.5.3	Jumlah booklet Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal yang dicetak		Dokumen	600	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000						
SK.1.2109.6 Meningkatnya kualitas pelayanan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal															
IKSK.1.2109.6.1	Nilai Akreditasi Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal		Nilai	NA	NA	B	NA	NA	A						
IKSK.1.2109.6.2	Jumlah pameran dan edukasi terkait moderasi beragama		Kegiatan	5	5	10	16	22	30						
IKSK.1.2109.6.3	Jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal		Orang	60,000	60,000	125,000	195,000	270,000	350,000						
IKSK.1.2109.6.4	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal		Nilai	83.92	85.00	85.20	85.40	85.60	85.80						
2151-Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi										259	51,125	61,128	77,521	93,359	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi
SK.1.2151.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam materi diklat															
IKSK.1.2151.1.1	Persentase tenaga administrasi Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat		%	NA	12.00	15.00	18.00	22.00	25.00						
SK.1.2151.2 Meningkatnya kompetensi pegawai Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama															
IKSK.1.2151.2.1	Persentase alumni pelatihan tenaga administrasi yang memenuhi standar kompetensi		%	85.00	85.00	88.00	90.00	92.00	95.00						
IKSK.1.2151.2.2	Jumlah aparatur Kementerian Agama yang selesai mengikuti pelatihan		Orang	3,950	4,050	9,570	16,170	24,540	34,620						
IKSK.1.2151.2.3	Jumlah alumni pelatihan tenaga administrasi melalui e-learning (e-DJJ)		Orang	450	500	1,500	3,000	5,000	7,500						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.2151.3 Tersedianya pengembangan sistem pelatihan tenaga administrasi yang efektif															
IKSK.1.2151.3.1	Indeks kepuasan pengguna produk sistem pelatihan tenaga administrasi		Nilai	85.00	85.50	86.00	86.50	87.00	87.50						
IKSK.1.2151.3.2	Jumlah dokumen pengembangan sistem pelatihan tenaga administrasi		Dokumen	40	66	144	234	336	454						
SK.1.2151.4 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi															
IKSK.1.2151.4.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan tenaga administrasi		Nilai	87.00	87.40	87.80	88.30	88.60	89.00						
IKSK.1.2151.4.2	Indeks kepuasan pengguna pelatihan tenaga administrasi		Nilai	85.00	85.20	85.40	85.60	85.80	86.00						
IKSK.1.2151.4.3	Indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga administrasi		Nilai	85.00	85.20	85.40	85.60	85.80	86.00						
IKSK.1.2151.4.4	Jumlah lembaga pelatihan memperoleh akreditasi A untuk pelatihan PIM III		Lembaga	NA	NA	1	NA	NA	NA						
IKSK.1.2151.4.5	Jumlah Balai Diklat Keagamaan yang mendapatkan akreditasi A untuk pelatihan PIM IV		Satker	3	5	9	12	13	14						
IKSK.1.2151.4.6	Jumlah Balai Diklat Keagamaan yang mendapatkan akreditasi A untuk Pelatihan Dasar (Latsar)		Satker	3	5	9	12	13	14						
IKSK.1.2151.4.7	Persentase Lembaga pelatihan memperoleh akreditasi Barang dan Jasa		%	20.00	20.00	26.67	33.33	40.00	46.67						
IKSK.1.2151.4.8	Rerata nilai mutu pelatihan tenaga administrasi		Nilai	3.40	3.47	3.50	3.53	3.56	3.59						
2152-Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan										290	89,786	100,888	107,786	118,565	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan
SK.1.2152.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam materi diklat															
IKSK.1.2152.1.1	Persentase tenaga teknis keagamaan Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat		%	NA	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00						
SK.1.2152.2 Meningkatkan kompetensi pegawai Tenaga Keagamaan pada Kementerian Agama															
IKSK.1.2152.2.1	Persentase alumni pelatihan tenaga teknis keagamaan yang memenuhi standar kompetensi		%	75.00	75.00	78.00	80.00	82.00	85.00						
IKSK.1.2152.2.2	Jumlah aparatur Kementerian Agama yang selesai mengikuti pelatihan		Orang	20,000	21,870	46,860	74,940	104,940	137,940						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2152.2.3	Jumlah alumni pelatihan tenaga teknis Keagamaan melalui <i>e-learning</i> (e-DJJ)		Orang	NA	1,000	3,000	6,000	10,000	15,000						
SK.1.2152.3 Tersedianya pengembangan sistem pelatihan tenaga teknis keagamaan yang efektif															
IKSK.1.2152.3.1	Indeks kepuasan pengguna produk sistem pelatihan tenaga teknis Keagamaan		Nilai	80.00	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00						
IKSK.1.2152.3.2	Jumlah dokumen pengembangan sistem kediklatan tenaga teknis Keagamaan		Dokumen	40	108	228	360	508	668						
SK.1.2152.4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga teknis Keagamaan															
IKSK.1.2152.4.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan tenaga teknis Keagamaan		Nilai	80.00	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00						
IKSK.1.2152.4.2	Indeks kepuasan pengguna pelatihan tenaga teknis Keagamaan		Nilai	75.00	76.00	78.00	80.00	82.00	84.00						
IKSK.1.2152.4.3	Indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga teknis Keagamaan		Nilai	85.00	85.20	85.40	85.60	85.80	86.00						
IKSK.1.2152.4.4	Rerata nilai mutu diklat tenaga teknis keagamaan		Nilai	80.00	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00						
2153-Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan										5,280	38,271	46,474	56,756	62,322	Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan
SK.1.2153.1 Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan bidang bimas agama dan layanan keagamaan															
IKSK.1.2153.1.1	Jumlah penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (<i>policy paper</i>)		Dokumen	5	5	12	21	32	45						
IKSK.1.2153.1.2	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.1.2153.1.3	Jumlah sitasi atas publikasi Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan		Dokumen	618	868	959	1,050	1,141	1,232						
IKSK.1.2153.1.4	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI		Dokumen	2	2	4	6	8	10						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.1.2153.1.5	Jumlah artikel hasil penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi		Dokumen	2	2	4	6	8	10							
IKSK.1.2153.1.6	Persentase penelitian bimas agama dan layanan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2		%	30.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00							
IKSK.1.2153.1.7	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
2154-Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi										1,050	15,785	17,454	20,584	22,212	Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	
SK.1.2154.1 Meningkatkan kualitas hasil penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi																
IKSK.1.2154.1.1	Jumlah penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (<i>policy paper</i>)		Dokumen	2	4	10	18	28	40							
IKSK.1.2154.1.2	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
IKSK.1.2154.1.3	Jumlah sitasi atas publikasi penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi		Dokumen	86	259	291	330	369	408							
IKSK.1.2154.1.4	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang layak diajukan memperoleh HAKI		Dokumen	1	1	3	5	7	9							
IKSK.1.2154.1.5	Jumlah artikel hasil penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi		Dokumen	1	1	3	5	7	9							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2154.1.6	Persentase penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2		%	11.00	30.00	35.00	40.00	45.00	55.00						
IKSK.1.2154.1.7	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
SK.1.2154.2 Meningkatkan kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama															
IKSK.1.2154.2.1	Persentase literasi khazanah budaya bernafas agama yang dihasilkan dan mudah diakses		%	20.00	26.60	27.30	28.30	29.00	30.00						
2155-Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan										23,762	43,595	49,595	59,073	68,231	Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan
SK.1.2155.1 Meningkatkan kualitas hasil penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan															
IKSK.1.2155.1.1	Jumlah penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (<i>policy paper</i>)		Dokumen	NA	7	16	27	40	55						
IKSK.1.2155.1.2	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.1.2155.1.3	Jumlah sitasi atas publikasi penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan		Dokumen	395	500	588	676	764	852						
IKSK.1.2155.1.4	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI		Dokumen	2	2	6	12	20	30						
IKSK.1.2155.1.5	Jumlah artikel hasil penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi		Dokumen	2	2	6	12	20	30						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.1.2155.1.6	Persentase penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2		%	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00							
IKSK.1.2155.1.7	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
2156-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat										241,055	566,656	594,989	639,613	703,574	Sekretariat Badan Litbang dan Diklat	
SK.1.2156.1 Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal																
IKSK.1.2156.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	60,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00							
SK.1.2156.2 Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi																
IKSK.1.2156.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	70,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00							
IKSK.1.2156.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	90,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00							
SK.1.2156.3 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja																
IKSK.1.2156.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
IKSK.1.2156.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	95,00	95,00	95,30	95,50	95,70	96,00							
IKSK.1.2156.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00							
SK.1.2156.4 Meningkatkan kematangan pengendalian intern																
IKSK.1.2156.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00							
IKSK.1.2156.4.2	Persentase data agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.2156.5 Meningkatkan ASN yang profesional															
IKSK.1.2156.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	83,00	84,00	87,00	92,00	95,00	98,00						
IKSK.1.2156.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
2219-Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan										84,988	118,785	130,291	141,621	148,702	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi
SK.1.2219.1 Meningkatnya kompetensi pegawai administrasi di Lembaga Pendidikan Kementerian Agama															
IKSK.1.2219.1.1	Jumlah aparatur di Lembaga Pendidikan Kementerian Agama yang selesai mengikuti Diklat		Orang	17.350	17.520	37.650	59.730	83.730	108.930						
IKSK.1.2219.1.2	Persentase alumni Diklat administrasi di lembaga pendidikan Kementerian Agama yang memenuhi standar kompetensi		%	85,00	85,00	88,00	90,00	92,00	95,00						
5109-Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan										161.261	190.426	197.271	204.237	212.182	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan
SK.1.5109.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam materi diklat															
IKSK.1.5109.1.1	Persentase Tenaga Teknis Pendidikan Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat		%	NA	15,00	30,00	45,00	60,00	75,00						
SK.1.5109.2 Meningkatnya kompetensi pegawai Tenaga Pendidikan pada Kementerian Agama															
IKSK.1.5109.2.1	Persentase alumni pelatihan tenaga teknis pendidikan yang memenuhi standar kompetensi		%	75,00	75,00	78,00	80,00	82,00	85,00						
IKSK.1.5109.2.2	Jumlah tenaga pendidik/dosen dan tenaga kependidikan pada Kementerian Agama yang selesai mengikuti pelatihan		Orang	28.500	44.190	90.930	139.350	189.480	241.560						
IKSK.1.5109.2.3	Jumlah alumni pelatihan tenaga teknis pendidikan melalui <i>e-learning</i> (e-DJJ)		Orang	NA	4.000	9.000	15.000	22.000	30.000						
SK.1.5109.3 Tersedianya pengembangan sistem pelatihan tenaga teknis pendidikan yang efektif															
IKSK.1.5109.3.1	Indeks kepuasan pengguna produk sistem pelatihan tenaga teknis pendidikan		Nilai	83,75	85,00	88,00	90,00	92,00	95,00						
IKSK.1.5109.3.2	Jumlah dokumen pengembangan sistem kediklatan tenaga teknis pendidikan		Dokumen	100	108	228	360	508	668						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
SK.1.5109.4 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga teknis pendidikan															
IKSK.1.5109.4.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan tenaga teknis pendidikan		Nilai	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
IKSK.1.5109.4.2	Indeks kepuasan pengguna pelatihan tenaga teknis pendidikan		Nilai	75,00	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00						
IKSK.1.5109.4.3	Indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga teknis pendidikan		Nilai	85,00	85,20	85,40	85,60	85,80	86,00						
IKSK.1.5109.4.4	Rerata nilai mutu diklat tenaga teknis pendidikan		Nilai	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
5311-Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan										40.318	25.623	30.142	36.764	40.329	Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan
SK.1.5311.1 Meningkatkan kualitas hasil penelitian bidang Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan															
IKSK.1.5311.1.1	Jumlah penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (<i>policy paper</i>)		Dokumen	5	6	14	24	36	50						
IKSK.1.5311.1.2	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.1.5311.1.3	Jumlah sitasi atas publikasi penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan		Dokumen	73	200	235	276	317	358						
IKSK.1.5311.1.4	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI		Dokumen	1	1	3	6	10	15						
IKSK.1.5311.1.5	Jumlah artikel hasil penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi		Dokumen	1	1	3	6	10	15						
IKSK.1.5311.1.6	Persentase penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang teruat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2		%	11.00	30.00	35.00	40.00	45.00	55.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.5311.1.7	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
SK.1.5311.2 Meningkatkan kualitas layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan															
IKSK.1.5311.2.1	Tingkat kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan		Nilai	50.00	70.00	72.00	75.00	77.00	80.00						
IKSK.1.5311.2.2	Jumlah buku pendidikan agama dan keagamaan yang dilakukan penilaian		Eksemplar	283	310	650	1,020	1,420	1,850						
2150-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah										591,037	709,244	723,429	737,898	752,656	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
SK.1.2150.1 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.1.2150.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	NA	80,00	81,00	81,50	82,00	84,00						
SK.1.2150.2 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.1.2150.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	NA	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00						
IKSK.1.2150.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	80,00	80,00	85,00	90,00	90,00	95,00						
SK.1.2150.3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.1.2150.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	70.00	70.00	71.00	72.00	73.00	75.00						
IKSK.1.2150.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	91.00	92.00	92.50	93.00	93.50	94.00						
IKSK.1.2150.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	NA	85.00	86.00	87.00	88.00	90.00						
SK.1.2150.4 Meningkatnya kematangan pengendalian intern															
IKSK.1.2150.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	70,00	75,00	75,00	80,00	80,00						
IKSK.1.2150.4.2	Persentase data agama yang komprehensif, valid dan reliabel		%	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.2150.5 Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.1.2150.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	70,00	73,00	75,00	77,00	78,00						
IKSK.1.2150.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	NA	75,00	77,00	78,00	80,00	82,00						
5107-Pelayanan Atase Haji di Jeddah										221,767	266,121	271,443	276,872	282,410	Atase Haji Jeddah
SK.1.5107.1 Meningkatnya kualitas pelayanan Atase di Jeddah															
IKSK.1.5107.1.1	Persentase petugas haji tenaga musiman yang profesional		%	87,66	87,70	87,75	87,80	87,85	88,00						
2135-Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam										17,012,881	17,619,351	18,253,509	18,917,465	19,613,189	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
SK.1.2135.1 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.1.2135.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	70,00	73,00	75,00	78,00	80,00	82,00						
SK.1.2135.2 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.1.2135.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	14,00	15,00	20,00	25,00	30,00	37,00						
IKSK.1.2135.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	50,00	52,00	60,00	70,00	80,00	90,00						
SK.1.2135.3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.1.2135.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00						
IKSK.1.2135.3.2	Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	75,00	80,00	83,00	84,00	87,00	88,00						
IKSK.1.2135.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	75,00	85,00	90,00	95,00	97,00	98,00						
SK.1.2135.4 Meningkatnya kematangan pengendalian intern															
IKSK.1.2135.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko audit yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	14,00	15,00	20,00	25,00	30,00	37,00						
IKSK.1.2135.4.2	Persentase data pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	95,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.2135.5 Meningkatkan ASN yang profesional															
IKSK.1.2135.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	75,00	79,00	82,00	85,00	87,00						
IKSK.1.2135.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	84,00	85,00	87,00	89,00	93,00	95,00						
2125-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam										4,070,851	4,140,796	4,761,915	5,476,203	6,297,633	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
SK.1.2125.1 Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.1.2125.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
SK.1.2125.2 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.1.2125.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2125.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	80,00	85,00	90,00	93,00	96,00	100,00						
SK.1.2125.3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.1.2125.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	NA	90,00	93,00	95,00	97,00	100,00						
IKSK.1.2125.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja		%	96,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2125.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00						
SK.1.2125.4 Meningkatnya kematangan pengendalian intern															
IKSK.1.2125.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	70,00	75,00	75,00	80,00	80,00						
IKSK.1.2125.4.2	Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel		%	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00						
SK.1.2125.5 Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.1.2125.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.1.2125.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensinya		%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
2138-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen										153,106	183,727	220,472	264,566	317,840	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen	
SK.1.2138.1 Meningkatkan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal																
IKSK.1.2138.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							
SK.1.2138.2 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi																
IKSK.1.2138.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
IKSK.1.2138.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
SK.1.2138.3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja																
IKSK.1.2138.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00							
IKSK.1.2138.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja		%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00							
IKSK.1.2138.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00							
SK.1.2138.4 Meningkatnya kematangan pengendalian intern																
IKSK.1.2138.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00							
IKSK.1.2138.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00							
SK.1.2138.5 Meningkatnya ASN yang profesional																
IKSK.1.2138.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
IKSK.1.2138.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensinya		%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
5100-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen									1,306,780	1,568,137	1,881,764	2,258,117	2,709,740	Direktorat Pendidikan Kristen	
SK.1.5100.1 Meningkatkan kualitas administrasi pendidikan keagamaan															
IKSK.1.5100.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	4	4	4	4	4	4						
IKSK.1.5100.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	7	7	7	7	7	7						
IKSK.1.5100.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan yang disediakan		Unit	1	1	1	1	1	1						
IKSK.1.5100.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen	100	100	100	100	100	100						
2141-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik									125,761	215,910	259,090	310,910	373,100	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik	
SK.1.2144.1 Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.1.2141.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	70,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00						
SK.1.2141.2 Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.1.2141.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2141.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.1.2141.3 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.1.2141.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2141.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2141.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.1.2141.4 Meningkatkan kematangan pengendalian intern															
IKSK.1.2141.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2141.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.2141.5 Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.1.2141.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00						
IKSK.1.2141.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00						
5102-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik										552,006	639,050	766,860	920,230	1,104,280	Direktorat Pendidikan Katolik
SK.1.5102.1 Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan															
IKSK.1.5102.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	6	6	6	6	6	6						
IKSK.1.5102.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	349	349	349	349	349	249						
IKSK.1.5102.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan yang disediakan		Unit	349	349	349	349	349	349						
IKSK.1.5102.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen	60	60	60	60	60	60						
2144-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu										48,098	54,828	56,407	58,033	59,708	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
SK.1.2144.1 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.1.2144.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	63.45	70.00	75.00	75.00	80.00	85.00						
SK.1.2144.2 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.1.2144.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
IKSK.1.2144.2.2	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	100,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00						
SK.1.2144.3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.1.2144.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	60.00	60.00	70.00	80.00	85.00	85.00						
IKSK.1.2144.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	70.00	70.00	75.00	80.00	85.00	85.00						
IKSK.1.2144.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	60.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.2144.4 Meningkatkan kematangan pengendalian intern															
IKSK.1.2144.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	NA	10,00	10,00	10,00	10,00						
IKSK.1.2144.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00						
SK.1.2144.5 Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.1.2144.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	NA	70,00	75,00	80,00	85,00						
IKSK.1.2144.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	45,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00						
5103-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu										483,326	512,361	538,513	566,060	595,082	Direktorat Pendidikan Hindu
SK.1.5103.1 Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan															
IKSK.1.5103.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	12	12	12	12	12	12						
IKSK.1.5103.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	150	145	175	200	250	300						
IKSK.1.5103.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan yang disediakan		Unit	675	696	731	766	801	836						
IKSK.1.5103.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00						
2146-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha										25.193	44.212	48.634	53.497	58.847	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
SK.1.2146.1 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.1.2146.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
SK.1.2146.2 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.1.2146.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00						
IKSK.1.2146.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE		TARGET				ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
SK.1.2146.3 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.1.2146.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
IKSK.1.2146.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	80,00	80,00	82,00	85,00	87,00	90,00						
IKSK.1.2146.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						
SK.1.2146.4 Meningkatkan kematangan pengendalian intern															
IKSK.1.2146.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	60,00	70,00	75,00	75,00	80,00						
IKSK.1.2146.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00						
SK.1.2146.5 Meningkatkan ASN yang profesional															
IKSK.1.2146.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
IKSK.1.2146.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	60,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00						
5105-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha										124,784	134,100	140,805	147,845	155,238	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
SK.1.5105.1 Meningkatkan kualitas administrasi pendidikan keagamaan															
IKSK.1.5105.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	3	3	3	3	3	3						
IKSK.1.5105.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	NA	NA	1	NA	1	NA						
IKSK.1.5105.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan yang disediakan		Unit	1	1	1	1	1	1						
IKSK.1.5105.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen	6	6	6	6	6	6						
2111-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH										115,125	148,560	145,589	142,677	139,823	Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
SK.1.2111.1 Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.1.2111.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.2111.2 Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.1.2111.2.1	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP		%	60,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00						
IKSK.1.2111.2.2	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00						
SK.1.2111.3 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.1.2111.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2111.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	86,00	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00						
IKSK.1.2111.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.1.2111.4 Meningkatkan kematangan pengendalian intern															
IKSK.1.2111.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00						
IKSK.1.2111.4.2	Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel		%	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00						
SK.1.2111.5 Meningkatkan ASN yang profesional															
IKSK.1.2111.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	60,00	70,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2111.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	NA	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00						
025-02 PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA		PUSAT-DAERAH								2,574,756	4,042,279	4,547,467	5,117,324	5,798,770	SETJEN, DITJEN PHU, DITJEN BIMAS ISLAM, DITJEN BIMAS KRISTEN, DITJEN BIMAS KATOLIK, DITJEN BIMAS HINDU, DITJEN BIMAS BUDDHA, BPJPH
SP.2.1 Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama															
IKSP.2.1.1	Persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama		%	97,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSP.2.1.2	Persentase konflik antarumat beragama yang diselesaikan		%	80,00	81,00	87,00	88,00	90,00	95,00						
SP.2.2 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama															
IKSP.2.2.1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama		Nilai	1:6	1:6	1:6	1:5	1:5	1:4						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSP.2.2.2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal		%	54.00	62.43	74.92	79.08	83.24	85.74						
SP.2.3 Meningkatkan intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama															
IKSP.2.3.1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan		%	58,75	60,00	56,25	60,60	66,67	73,33						
SP.2.4 Meningkatkan kualitas pembinaan moderasi beragama															
IKSP.2.4.1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama		Nilai	87,50	82,67	86,42	89,58	93,08	94,21						
SP.2.5 Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama															
IKSP.2.5.1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan		%	68,33	75,00	75,00	75,83	78,33	79,17						
SP.2.6 Meningkatkan kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan															
IKSP.2.6.1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital		%	49.75	53.40	57.17	64.00	70.83	77.67						
IKSP.2.6.2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran		%	73.83	78.33	85.00	90.00	95.00	100.00						
IKSP.2.6.3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan		%	54.00	54.00	59.00	55.00	60.00	56.00						
SP.2.7 Meningkatkan kualitas penerimaan dana sosial keagamaan															
IKSP.2.7.1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan		%	8.92	23.29	27.37	29.01	29.89	33.36						
IKSP.2.7.2	Persentase peningkatan wakaf produktif		%	NA	5.71	7.09	8.79	10.89	13.51						
SP.2.8 Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel															
IKSP.2.8.1	Persentase jemaah haji yang diberangkatkan dari kuota		%	99.40	99.50	99.55	99.60	99.65	99.70						
IKSP.2.8.2	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar		%	84.47	85.00	85.50	86.00	86.50	87.00						
IKSP.2.8.3	Rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jemaah haji		Nilai	1 : 36	1 : 35	1 : 33	1 : 32	1 : 31	1 : 30						
IKSP.2.8.4	Persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji		%	1.05	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50						
SP.2.9 Menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar															
IKSP.2.9.1	Persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi		%	94,97	95,00	95,20	95,50	95,80	96,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSP.2.9.2	Persentase lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi		%	77,08	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00						
SP.2.10 Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal															
IKSP.2.10.1	Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan		%	NA	59,00	60,00	63,00	66,00	72,00						
IKSP.2.10.2	Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan		%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SP.2.11 Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal															
IKSP.2.11.1	Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM		%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSP.2.11.2	Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM		%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
5620-Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama										43,953	167,280	168.899	169,724	171,078	Pusat Kerukunan Umat Beragama
SK.2.5620.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama															
IKSK.2.5620.1.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.2.5620.1.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina		Orang	8,586	8,863	9,254	9,339	9,424	9,543						
IKSK.2.5620.1.3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina		Lokasi	3,400	78	112	112	112	112						
SK.2.5620.2 Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa															
IKSK.2.5620.2.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi		Lembaga	191	191	191	191	191	204						
IKSK.2.5620.2.2	Jumlah forum dialog antarumat beragama yang diselenggarakan		Kegiatan	82	82	82	82	164	164						
SK.2.5620.3 Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)															
IKSK.2.5620.3.1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP		%	96.00	96.00	97.00	100.00	100.00	100.00						
SK.2.5620.4 Menguatnya dialog lintas agama dan budaya															
IKSK.2.5620.4.1	Jumlah diaog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan		Kegiatan	668	668	707	1219	1253	1258						
2104-Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah										919,958	949,524	1,091,953	1,255,745	1,444,107	Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah
SK.2.2104.1 Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk															
IKSK.2.2104.1.1	Jumlah KUA yang ditingkatkan mutunya		Lokasi	128	228	135	135	135	135						
IKSK.2.2104.1.2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana		Lokasi	895	875	325	325	325	325						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.2.2104.1.3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah		Orang	220,834	84,000	150,000	200,000	250,000	300,000							
IKSK.2.2104.1.4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah		Orang	NA	65,000	150,000	200,000	250,000	300,000							
IKSK.2.2104.1.5	Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina		Orang	3,020	3,020	4,020	4,020	4,020	4,020							
IKSK.2.2104.1.6	Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan		Dokumen	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000							
SK.2.2104.2 Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga																
IKSK.2.2104.2.1	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah		Pasangan	18,000	37,800	55,800	73,800	91,800	109,800							
2122-Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf										49,989	91,115	104,782	120,500	138,575	Direktorat Zakat dan Wakaf	
SK.2.2122.1 Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat																
IKSK.2.2122.1.1	Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah		%	49.00	53.94	59.27	65.14	71.56	78.72							
IKSK.2.2122.1.2	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi		%	NA	1.82	2.74	4.38	4.93	6.13							
IKSK.2.2122.1.3	Persentase lembaga zakat yang dibina		%	53.19	6.38	56.54	65.43	73.51	87.77							
SK.2.2122.2 Meningkatkan pengelolaan aset wakaf																
IKSK.2.2122.2.1	Persentase lembaga wakaf yang dibina		%	54.56	9.82	62.46	71.23	80.00	88.77							
IKSK.2.2122.2.2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan		%	83.91	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00							
IKSK.2.2122.2.3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat		%	9.47	6.67	10.00	13.33	16.67	20.00							
SK.2.2122.3 Meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi umat																
IKSK.2.2122.3.1	Persentase partisipasi umat Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah		%	6,01	8,00	12,00	16,00	20,00	20,00							
IKSK.2.2122.3.2	Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan		%	40,00	15,00	45,00	55,00	65,00	75,00							
2123-Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam										491,620	757,299	870,894	1,001,528	1,151,757	Direktorat Penerangan Agama Islam	
SK.2.2123.1 Meningkatkan kualitas penyuluhan agama																
IKSK.2.2123.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
IKSK.2.2123.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	50.09	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90							
IKSK.2.2123.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	40	40	40	40	40	40							
IKSK.2.2123.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	110,396	22,080	22,080	22,080	22,080	22,080							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.2.2123.2 Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama															
IKSK.2.2123.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama		%	6,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00						
IKSK.2.2123.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan		Lokasi	34	34	34	34	34	34						
SK.2.2123.3 Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama															
IKSK.2.2123.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	50,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.2.2123.4 Meningkatkan kegiatan penyiaran agama di ruang publik															
IKSK.2.2123.4.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	10	35	35	35	35	35						
SK.2.2123.5 Meningkatkan pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat															
IKSK.2.2123.5.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	NA	5	10	15	20	25						
SK.2.2123.6 Meningkatkan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi															
IKSK.2.2123.6.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	8	8	8	8	8	8						
SK.2.2123.7 Meningkatkan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama															
IKSK.2.2123.7.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, dll)		Kegiatan	35	35	70	70	70	70						
SK.2.2123.8 Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan															
IKSK.2.2123.8.1	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	6,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00						
2124-Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah										85,041	144,709	166,415	191,378	220,084	Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
SK.2.2124.1 Meningkatkan penanganan konflik intra umat beragama															
IKSK.2.2124.1.1	Persentase konflik intra umat beragama yang ditindaklanjuti		%	30	35	35	35	40	40						
SK.2.2124.2 Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran															
IKSK.2.2124.2.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	0,10	0,11	0,30	0,31	0,33	0,35						
IKSK.2.2124.2.2	Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina		Orang	3,640	4,140	4,640	5,140	5,640	6,140						
IKSK.2.2124.2.3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya		Orang	NA	NA	5,500	11,000	16,500	22,000						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.2.2124.2.4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan		Lokasi	NA	NA	3	5	7	9							
SK.2.2124.3 Meningkatkan kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama																
IKSK.2.2124.3.1	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	200	6	200	200	200	200							
IKSK.2.2124.3.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	80	80	160	320	640	640							
SK.2.2124.4 Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan																
IKSK.2.2124.4.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	1,343	590	1,600	1,700	1,800	1,900							
IKSK.2.2124.4.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	1,000,000	650,000	800,000	820,000	850,000	870,000							
IKSK.2.2124.4.3	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan		Kegiatan	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000							
IKSK.2.2124.4.4	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat		Lokasi	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000							
IKSK.2.2124.4.5	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina		Orang	680	680	720	720	720	720							
IKSK.2.2124.4.6	Jumlah POB yang memenuhi standar		Lokasi	NA	1	2	2	1	1							
IKSK.2.2124.4.7	Jumlah lembaga hisab rukyat yang ditingkatkan mutunya		Lembaga	10	NA	10	10	10	10							
2137-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen										101,327	240,001	288,001	345,601	432,001	Direktorat Urusan Agama Kristen	
SK.2.2137.1 Meningkatkan kualitas penyuluhan agama Kristen																
IKSK.2.2137.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
IKSK.2.2137.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
IKSK.2.2137.1.3	Jumlah penyiari agama yang dibina kompetensi		Orang	40	40	40	40	40	40							
IKSK.2.2137.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	26,829	26,829	26,844	26,894	26,899	26,904							
SK.2.2137.2 Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Kristen																
IKSK.2.2137.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Kristen		%	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00							
IKSK.2.2137.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Kristen yang diselenggarakan		Lokasi	34	34	34	34	34	34							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.2.2137.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.2.2137.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.2.2137.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.2.2137.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.2.2137.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	2,00	2,00	5,00	6,00	8,00	9,00						
SK.2.2137.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik		Lokasi	1	1	1	1	1	1						
IKSK.2.2137.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	1	1	1	1	1	1						
SK.2.2137.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama		Kegiatan	35	35	35	35	35	35						
IKSK.2.2137.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, dll)		Kegiatan	35	35	35	35	35	35						
SK.2.2137.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama		Dokumen	10	10	10	10	10	10						
IKSK.9.2137.7.1	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	10	10	10	10	10	10						
IKSK.9.2137.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	50	50	50	50	50	50						
SK.2.2137.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat		Unit	5	5	5	5	5	5						
IKSK.2.2137.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	5	5	5	5	5	5						
SK.2.2137.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi		Kegiatan	35	35	35	35	35	35						
IKSK.2.2137.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	35	35	35	35	35	35						
SK.2.2137.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan		Unit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
IKSK.2.2137.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
IKSK.2.2137.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000						
IKSK.2.2137.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00						
SK.2.2137.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga		Pasangan	35	35	35	35	35	35						
IKSK.2.2137.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani		Pasangan	35	35	35	35	35	35						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK.2.2137.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan Kristen															
IKSK.2.2137.12.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan Kristen yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	5	5	5	5	5	5							
2140-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik										47,253	538,450	646,140	775,370	930,400	Direktorat Urusan Agama Katolik	
SK.2.2140.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Katolik															
IKSK.2.2140.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
IKSK.2.2140.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	15.00	15.00	33.00	56.00	79.00	100.00							
IKSK.2.2140.1.3	Jumlah penyar agama yang dibina kompetensi		Orang	100	138	300	300	300	300							
IKSK.2.2140.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	5936	5936	6784	7632	8480	8480							
SK.2.2140.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Katolik															
IKSK.2.2140.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Katolik		%	15,00	15,00	35,00	50,00	75,00	100,00							
IKSK.2.2140.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Katolik yang diselenggarakan		Kegiatan	55	35	42	20	33	33							
SK.2.2140.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama															
IKSK.2.2140.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
SK.2.2140.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran															
IKSK.2.2140.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	5,00	4,77	35,00	55,00	75,00	100,00							
IKSK.2.2140.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	NA	NA	35,00	55,00	75,00	100,00							
SK.2.2140.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik															
IKSK.2.2140.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	34	34	34	34	34	34							
SK.2.2140.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama															
IKSK.2.2140.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparani, dll)		Kegiatan	1	3	12	15	35	35							
SK.2.2140.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama															
IKK.2.2140.7.1	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	NA	NA	8	15	25	38							
IKK.2.2140.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	NA	NA	24	45	75	114							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.2.2140.8 Meningkatkan pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat															
IKSK.2.2140.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	NA	NA	8	15	25	38						
SK.2.2140.9 Meningkatkan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi															
IKSK.2.2140.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	2	2	2	2	2	2						
SK.2.2140.10 Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan															
IKSK.2.2140.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	NA	NA	38	38	38	38						
IKSK.2.2140.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	10,000	5,000	20,000	20,000	20,000	20,000						
IKSK.2.2140.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	15.00	15.00	35.00	55.00	70.00	100.00						
SK.2.2140.11 Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga															
IKSK.2.2140.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia		Pasangan	3.000	805	3.387	4.808	4.000	7.000						
SK.2.2140.12 Meningkatkan pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan katolik															
IKSK.2.2140.12.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan katolik yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	1	1	1	1	1	1						
2143-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu										52,493	132,583	158,589	172,606	189,610	Direktorat Urusan Agama Hindu
SK.2.2143.1 Meningkatkan kualitas penyuluhan agama Hindu															
IKSK.2.2143.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	70.00	70.00	75.00	77.00	79.00	85.00						
IKSK.2.2143.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.2.2143.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	NA	1,500	1,500	1,600	1,700	1,700						
IKSK.2.2143.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	63	33	66	100	150	200						
SK.2.2143.2 Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Hindu															
IKSK.2.2143.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Hindu		%	75.00	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00						
IKSK.2.2143.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Hindu yang diselenggarakan		Lokasi	30	30	40	50	60	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.2.2143.3 Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama															
IKSK.2.2143.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.2.2143.4 Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran															
IKSK.2.2143.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00						
IKSK.2.2143.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	NA	0,01	1,00	10,00	20,00	50,00						
SK.2.2143.5 Meningkatkan kegiatan penyiaran agama di ruang publik															
IKSK.2.2143.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	30	40	60	70	80	90						
SK.2.2143.6 Meningkatkan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama															
IKSK.2.2143.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Dharmagita, dll)		Kegiatan	1	NA	1	NA	1	NA						
SK.2.2143.7 Meningkatkan kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama															
IKSK.2.2143.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	NA	NA	5	10	15	20						
IKSK.2.2143.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	NA	NA	5	10	15	20						
SK.2.2143.8 Meningkatkan pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat															
IKSK.2.2143.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	NA	NA	2	4	6	8						
SK.2.2143.9 Meningkatkan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi															
IKSK.2.2143.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan, sekaten, dll)		Kegiatan	6	13	39	47	50	60						
SK.2.2143.10 Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan															
IKSK.2.2143.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	310	224	250	300	350	400						
IKSK.2.2143.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	36,400	NA	35,000	40,000	45,000	50,000						
IKSK.2.2143.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	74,00	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00						
SK.2.2143.11 Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga															
IKSK.2.2143.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sakinah		Pasangan	2,889	1,275	1,500	1,700	2,000	2,500						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK.2.2143.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga darma dana															
IKSK.2.2143.12.1	Jumlah lembaga darma dan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	NA	NA	1	1	1	1							
2145-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha										29,060	111,393	122,533	134,786	148,264	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	
SK.2.2145.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Buddha															
IKSK.2.2415.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	70.00	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00							
IKSK.2.2415.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
IKSK.2.2415.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	50	50	60	70	80	100							
IKSK.2.2415.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	4,288	4,288	4,288	4,288	4,288	4,288							
SK.2.2145.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Buddha															
IKSK.2.2415.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Buddha		%	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00							
IKSK.2.2415.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Buddha yang diselenggarakan		Lokasi	36.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00							
SK.2.2145.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama															
IKSK.2.2145.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00							
SK.2.2145.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran															
IKSK.2.2145.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00							
IKSK.2.2145.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	12.00	15.00	20.00	25.00	35.00	40.00							
SK.2.2145.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik															
IKSK.2.2145.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	12	12	12	12	12	12							
SK.2.2145.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama															
IKSK.2.2145.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Sippa Dhamma Samajja, dll)		Kegiatan	NA	1	NA	NA	1	NA							
SK.2.2145.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama															
IKSK.2.2145.7.1	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	NA	NA	5	7	9	11							
IKSK.2.2145.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	NA	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.2.2145.8 Meningkatkan pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat															
IKSK.2.2145.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	NA	1	2	3	4	5						
SK.2.2145.9 Meningkatkan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi															
IKSK.2.2145.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	1	2	2	2	2	2						
SK.2.2145.10 Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan															
IKSK.2.2145.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	3,125	3,000	20,000	20,000	20,000	20,000						
IKSK.2.2145.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	20,000	5,000	20,000	25,000	30,000	35,000						
IKSK.2.2145.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
SK.2.2145.11 Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga															
IKSK.2.2145.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya		Pasangan	1,200	500	1,000	1,500	2,000	2,500						
SK.2.2145.12 Meningkatkan pemberdayaan lembaga dana paramitha															
IKSK.2.2145.12.1	Jumlah lembaga dana paramitha yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	4	5	5	5	5	5						
2130-Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu										3,020	4,725	4,884	4,968	5,102	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
SK.2.2130.1 Meningkatkan kualitas penyuluhan agama Khonghucu															
IKSK.2.2130.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	NA	70	72	73	74	75						
IKSK.2.2130.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.2.2130.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	170	171	171	171	171	171						
IKSK.2.2130.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	NA	20	20	25	25	25						
SK.2.2130.2 Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Khonghucu															
IKSK.2.2130.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Khonghucu		%	NA	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.2.2130.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Khonghucu yang diselenggarakan		Kegiatan	NA	NA	20	20	20	20						
SK.2.2130.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama														
IKSK.2.2130.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
SK.2.2130.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran														
IKSK.2.2130.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50						
IKSK.2.2130.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	NA	NA	10,00	20,00	30,00	40,00						
SK.2.2130.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik														
IKSK.2.2130.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	NA	1	1	2	2	3						
SK.2.2130.6	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat														
IKSK.2.2130.6.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	NA	5	5	7	7	8						
SK.2.2130.7	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi														
IKSK.2.2130.7.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan, sekaten, dll)		Kegiatan	NA	1	1	1	1	1						
SK.2.2130.8	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.2.2130.8.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	26	26	28	28	28	28						
IKSK.2.2130.8.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	1150	2090	2299	2529	2782	3060						
IKSK.2.2130.8.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	NA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
SK.2.2130.9	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana kebajikan														
IKSK.2.2130.9.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan dana kebajikan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	NA	1	1	1	1	1						
2126-Pembinaan Umrah dan Haji Khusus										5,646	6,775	6,910	7,049	7,190	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus
SK.2.2126.1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus														
IKSK.2.2126.1.1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi		%	75.00	78.00	78.50	89.00	90.00	95.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.2.2126.1.2	Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi		%	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00							
2147-Pelayanan Haji Dalam Negeri										507,740	609,288	621,474	633,903	646,581	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	
SK.2.2147.1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji																
IKSK.2.2147.1.1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan		%	3.19	11.16	19.52	30.88	42.23	51.59							
IKSK.2.2147.1.2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan		%	0.60	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30							
SK.2.2147.2 Meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji																
IKSK.2.2147.2.1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan		%	15.00	17.00	21.00	24.00	27.00	30.00							
IKSK.2.2147.2.2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu		%	80.34	85.00	85.50	86.00	87.00	87.50							
2148-Pembinaan Haji										192,432	230,918	235,536	240,247	245,052	Direktorat Bina Haji	
SK.2.2148.1 Meningkatkan kualitas pembinaan jemaah haji																
IKSK.2.2148.1.1	Persentase petugas haji yang profesional		%	87.66	87.70	87.75	87.80	87.85	88.00							
IKSK.2.2148.1.2	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji		%	94.50	95.00	95.50	95.75	96.00	96.50							
IKSK.2.2148.1.3	Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan		%	70.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00							
IKSK.2.2148.1.4	Jumlah advokasi haji yang terselenggara		Kegiatan	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00							
IKSK.2.2148.1.5	Persentase pembimbing haji yang bersertifikat		%	82.71	83.33	83.54	85.53	87.50	88.89							
2149-Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu										28,171	33,805	34,481	35,170	35,874	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	
SK.2.2149.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel																
IKSK.2.2149.1.1	Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji		%	92.00	92.00	93.00	94.00	94.50	95.00							
SK.2.2149.2 Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu																
IKSK.2.2149.2.1	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)		%	90.00	93.00	94.00	96.00	97.00	99.00							
IKSK.2.2149.2.2	Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji		Nilai	NA	70.00	72.00	75.00	77.00	80.00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
5310-Pelayanan Haji Luar Negeri									8,074	9,689	9,882	10,080	10,282	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	
SK.2.5310.1 Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di Arab Saudi															
IKSK.2.5310.1.1	Persentase jemaah haji yang mendapatkan akomodasi sesuai standar		%	82.00	83.00	83.50	84.00	84.50	85.00						
IKSK.2.5310.1.2	Persentase jemaah haji yang mendapatkan konsumsi sesuai standar		%	86.00	86.20	86.50	86.70	86.80	87.00						
IKSK.2.5310.1.3	Persentase jemaah haji yang mendapatkan transportasi sesuai standar		%	85.00	85.50	85.75	86.00	86.50	87.00						
2105-Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal									3,000	4,315	5,175	5,950	6,545	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	
SK.2.2105.1 Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal															
IKSK.2.2105.1.1	Persentase produk yang tersertifikasi		%	NA	59.00	60.00	63.00	66.00	72.00						
IKSK.2.2105.1.2	Persentase produk luar negeri yang teregistrasi		%	NA	85.00	90.00	90.00	95.00	100.00						
IKSK.2.2105.1.3	Persentase produk yang terverifikasi		%	NA	59.00	60.00	63.00	66.00	72.00						
IKSK.2.2105.1.4	Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terakreditasi		%	NA	43.00	46.00	49.00	52.00	55.00						
IKSK.2.2105.1.5	Persentase auditor halal yang teregistrasi		%	NA	28.00	31.00	34.00	37.00	41.00						
2108-Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal									3,030	4,215	4,415	5,888	9,094	Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	
SK.2.2108.1 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal															
IKSK.2.2108.1.1	Persentase pelaku usaha yang terbina		%	NA	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00						
IKSK.2.2108.1.2	Persentase auditor halal yang terbina		%	NA	38.15	41.00	44.00	46.50	49.43						
IKSK.2.2108.1.3	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terbina		%	NA	43.00	46.00	49.00	52.00	55.00						
IKSK.2.2108.1.4	Persentase penyelia halal yang terbina		%	NA	43.00	46.00	49.00	52.00	55.00						
IKSK.2.2108.1.5	Persentase Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang terbina		%	NA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00						
IKSK.2.2108.1.6	Persentase sertifikat halal yang terawasi		%	NA	43.00	46.00	49.00	52.00	55.00						
IKSK.2.2108.1.7	Persentase label halal yang terawasi		%	NA	43.00	46.00	49.00	52.00	55.00						
IKSK.2.2108.1.8	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terawasi		%	NA	43.00	46.00	49.00	52.00	55.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.2.2108.1.9	Persentase Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang terawasi		%	NA	14,00	16,00	17,00	18,00	18,00							
2110-Kerja Sama dan Standardisasi Halal										2,950	6,195	6,504	6,831	7,173	Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal	
SK.2.2110.1 Meningkatkan kualitas kerja sama dan standardisasi halal																
IKSK.2.2110.1.1	Persentase naskah kerjasama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang tersusun		%	NA	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00							
IKSK.2.2110.1.2	Persentase standardisasi dan penilaian kesesuaian penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang tersusun		%	NA	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00							
IKSK.2.2110.1.3	Persentase kesepakatan kerja sama Lembaga Halal Luar Negeri		%	NA	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00							
025-03 PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN		PUSAT-DAERAH									15,342,748	17,574,855	18,507,859	19,490,750	20,530,454	SETJEN, DITJEN PENDIS, DITJEN BIMAS KRISTEN, DITJEN BIMAS KATOLIK, DITJEN BIMAS HINDU, DITJEN BIMAS BUDDHA
SP.3.1 Menguatnya sistem pendidikan yang berspektif moderat																
IKSP.3.1.1	Rerata nilai UASBN/UMBN/Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama		Nilai	78.67	79.67	80.73	82.77	84.80	86.83							
SP.3.2 Meningkatkan kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa																
IKSP.3.2.1	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi		Nilai	Literasi 397,00, Numerasi 386,00	Literasi 400,12, Numerasi 388,16	Literasi 403,24, Numerasi 390,32	Literasi 406,36, Numerasi 392,48	Literasi 409,48, Numerasi 394,64	Literasi 412,60, Numerasi 396,80							
IKSP.3.2.2	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA		Nilai	Membaca 397,00, Matematika 386,00, Sains 403,00	NA, Matematika 388,16, Sains 403,00	Membaca 403,24, Matematika 390,32, Sains 392,00	NA, Matematika 392,48, Sains 392,00	NA, Matematika 394,64, Sains 394,64	Membaca 412,60, Matematika 396,80, Sains 418,00							
SP.3.3 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan																
IKSP.3.3.1	Persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik		%	49.50	51.50	60.25	65.75	70.75	74.50							
SP.3.4 Meningkatkan kualitas guru yang memenuhi SNP																
IKSP.3.4.1	Persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang		%	35.69	37,25	38,50	39,75	41,25	44,50							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP.3.5 Meningkatkan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan															
IKSP.3.5.1	Persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memenuhi 8 SNP		%	50.50	52.50	57.25	58.50	60.00	62.75						
IKSP.3.5.2	Persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan		%	38.60	44.00	49.00	52.40	57.40	63.00						
SP.3.6 Menguatnya pendidikan karakter siswa															
IKSP.3.6.1	Persentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai karakter minimal Baik		%	53,75	67,5	73,75	76,75	78,75	83,75						
SP.3.7 Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi berbasis kerja sama dengan dunia kerja/industri															
IKSP.3.7.1	Persentase MA Kejuruan/ MA Program Keterampilan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri		%	45.00	50.00	55.00	60.00	70.00	80.00						
IKSP.3.7.2	Persentase Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri		%	30.00	35.00	37.00	40.00	45.00	50.00						
4422-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah										70,609	72,300	93,600	100,900	107,400	Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah
SK.3.4422.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama															
IKSK.3.4422.1.1	Persentase siswa madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	NA	50.00	70.00	80.00	90.00	100.00						
IKSK.3.4422.1.2	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	2,000	3,000	7,000	8,000	9,000	10,000						
SK.3.4422.2 Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif															
IKSK.3.4422.2.1	Persentase madrasah yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	89.00	90.00	92.00	93.00	95.00	100.00						
IKSK.3.4422.2.2	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	74.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00						
IKSK.3.4422.2.3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan		Lembaga	NA	10	10	10	10	13						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.4422.2.4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan		Lembaga	NA	22	22	22	22	79						
SK.3.4422.3 Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan															
IKSK.3.4422.3.1	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi		%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.3.4422.4 Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran															
IKSK.3.4422.4.1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	5,00	6,00	10,00	20,00	35,00	50,00						
IKSK.3.4422.4.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	5,00	6,00	10,00	20,00	35,00	50,00						
SK.3.4422.5 Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi															
IKSK.3.4422.5.1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	350	400	1.000	10.000	10.000	10.000						
SK.3.4422.6 Meningkatkan budaya mutu pendidikan															
IKSK.4422.6.1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu		%	NA	50,00	70,00	80,00	80,00	90,00						
IKSK.4422.6.2	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	3,00	4,00	4,50	4,70	4,90	5,00						
SK.3.4422.7 Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan															
IKSK.3.4422.7.1	Persentase madrasah yang mendapatkan pelatihan sistem e-RKAM		%	NA	20,00	35,00	70,00	100,00	100,00						
SK.3.4422.8 Meningkatkan budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan															
IKSK.3.4422.8.1	Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	NA	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
IKSK.3.4422.8.2	Persentase madrasah yang ramah anak		%	37,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00						
SK.3.4422.9 Meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan															
IKSK.3.4422.9.1	Jumlah organisasi siswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	NA	500	700	800	900	1.000						
IKSK.3.4422.9.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina		Unit	NA	725	825	900	970	1.000						
SK.3.4422.10 Menguatnya penyelenggaraan pendidikan vokasi															
IKSK.3.4422.10.1	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan <i>life skill</i> melalui program magang		%	60,00	70,00	80,00	85,00	87,00	90,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2133-Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah										10,341,891	11,179,351	11,513,704	11,857,327	12,212,865	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
SK.3.2133.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama															
IKSK.3.2133.1.1	Persentase guru madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	4.00	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50						
IKSK.3.2133.1.2	Persentase pengawas madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	6.00	9.28	20.10	20.84	21.65	28.14						
SK.3.2133.2 Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan															
IKSK.3.2133.2.1	Persentase guru pada madrasah yang lulus sertifikasi		%	73.00	NA	74.00	75.00	76.00	77.00						
IKSK.3.2133.2.2	Persentase tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	8.00	14.67	17.65	18.31	19.01	24.71						
IKSK.3.2133.2.3	Persentase kepala madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	0.20	0.51	9.30	9.30	9.30	9.30						
IKSK.3.2133.2.4	Persentase guru madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	0.02	0.04	12.23	12.23	12.23	12.23						
SK.3.2133.3 Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan															
IKSK.3.2133.3.1	Persentase guru madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	46.50	47.78	48.53	49.28	50.03	50.78						
IKSK.3.2133.3.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah		Orang	320	98	98	98	98	98						
SK.3.2133.4 Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik															
IKSK.3.2133.4.1	Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG		%	2.00	2.00	3.00	5.00	7.00	7.00						
IKSK.3.2133.4.2	Persentase calon pengawas yang menerima beasiswa S2		%	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50						
SK.3.2133.5 Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan															
IKSK.3.2133.5.1	Persentase guru pada madrasah daerah khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.3.2133.5.2	Persentase tenaga kependidikan madrasah daerah khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus		%	NA	NA	50,00	100,00	100,00	100,00						
SK.3.2133.6 Meningkatnya kualitas pendidik vokasi															
IKSK.3.2133.6.1	Jumlah guru MA Kejuruan/ MA Program Keterampilan yang mengikuti peningkatan kompetensi		Orang	20	30	100	150	200	300						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
4433-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam											24,435	149,500	244,800	340,600	415,500	Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
SK.3.4433.1 Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama																
IKSK.3.4433.1.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat		%	NA	80,00	95,00	97,00	98,00	100,00							
IKSK.3.4433.1.2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan Al-Qur'an		%	2,00	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00							
SK.3.4433.2 Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir																
IKSK.3.4433.2.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	85,00	87,00	88,00	89,00	90,00	92,00							
SK.3.4433.3 Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif																
IKSK.3.4433.3.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	NA	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00							
SK.3.4433.4 Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan																
IKSK.3.4433.4.1	Persentase ustadz pada pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi		%	85,00	87,00	88,00	89,00	90,00	92,00							
IKSK.3.4433.4.2	Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	3,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00							
IKSK.3.4433.4.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	NA	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00							
IKSK.3.4433.4.4	Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP Pola PKB dan AKG		%	NA	5,00	15,00	20,00	25,00	30,00							
SK.3.4433.5 Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan																
IKSK.3.4433.5.1	Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	46,71	47,78	48,53	49,28	50,03	50,78							
SK.3.4433.6 Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran																
IKSK.3.4433.6.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	NA	0,50	2,00	4,00	7,00	8,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.3.4433.7 Meningkatkan kualitas pendidikan profesi melalui peningkatan kualifikasi pendidik															
IKSK.3.4433.7.1	Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mengikuti PPG		%	7.00	7.00	10.00	20.00	30.00	50.00						
IKSK.3.4433.7.2	Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah berkualifikasi minimal S1		%	20.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00						
SK.3.4433.8 Meningkatkan kapasitas dan akselerasi akreditasi															
IKSK.3.4433.8.1	Jumlah pendidikan diniyah/muadalah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	NA	NA	500	1,000	2,000	4,000						
SK.3.4433.9 Meningkatkan budaya mutu pendidikan															
IKSK.3.4433.9.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan budaya mutu		%	NA	NA	50.00	60.00	80.00	100.00						
IKSK.3.4433.9.2	Persentase santri pendidikan diniyah/muadalah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	NA	NA	2.00	2.00	2.00	3.00						
SK.3.4433.10 Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan															
IKSK.3.4433.10.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	NA	50.00	60.00	70.00	90.00	100.00						
IKSK.3.4433.10.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman		%	NA	10.00	40.00	50.00	80.00	100.00						
SK.3.4433.11 Meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan															
IKSK.3.4433.11.1	Jumlah organisasi siswa pendidikan diniyah/muadalah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	50	NA	50	100	150	150						
IKSK.3.4433.11.2	Jumlah gugus pramuka pada pendidikan diniyah/muadalah yang dibina		Unit	50	NA	50	50	50	50						
SK.3.4433.12 Meningkatkan kualitas pendidik vokasi															
IKSK.3.4433.12.1	Jumlah guru/instruktur pada Program Ekonomi Kerakyatan di Pesantren yang mengikuti peningkatan kompetensi		Orang	NA	20	40	80	120	300						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2127-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam									4.690.343	5.036.373	5.294.617	5.565.048	5.848.275	Direktorat Pendidikan Agama Islam	
SK.3.2127.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran/mata kuliah agama															
IKSK.3.2127.1.1	Persentase siswa muslim di sekolah yang memperoleh pendidikan agama Islam bermuatan moderasi beragama		%	47,00	50,00	55,00	60,00	70,00	75,00						
IKSK.3.2127.1.2	Persentase guru pendidikan agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00						
IKSK.3.2127.1.3	Persentase pengawas pendidikan agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00						
IKSK.3.2127.1.4	Persentase mahasiswa muslim di PTU yang memperoleh pendidikan agama Islam bermuatan moderasi beragama		%	NA	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00						
IKSK.3.2127.1.5	Persentase dosen pendidikan agama Islam di PTU yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00						
SK.3.2127.2 Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan															
IKSK.3.2127.2.1	Persentase guru pendidikan agama Islam yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	50,00	55,00	57,00	60,00	65,00	70,00						
IKSK.3.2127.2.2	Persentase dosen pendidikan agama Islam pada PTU yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	2,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00						
SK.3.2127.3 Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan															
IKSK.3.2127.3.1	Persentase guru pendidikan agama Islam pada sekolah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	46,50	47,78	48,53	49,28	50,03	50,78						
SK.3.2127.4 Meningkatkan kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik															
IKSK.3.2127.4.1	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG		%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
IKSK.3.2127.4.2	Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1		%	77,50	78,00	80,00	81,00	82,00	85,00						
SK.3.2127.5 Meningkatkan pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan															
IKSK.3.2127.5.1	Persentase guru pendidikan agama Islam pada Sekolah daerah khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus		%	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	97,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.3.2127.6 Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan															
IKSK.3.2127.6.1	Persentase guru pendidikan agama Islam yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama		%	NA	40.00	47.00	49.00	50.00	52.00						
IKSK.3.2127.6.2	Persentase pengawas pendidikan agama Islam yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama		%	NA	20.00	25.00	27.00	29.00	31.00						
4434-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen										62,282	163,171	214,437	264,770	325,908	Direktorat Pendidikan Kristen
SK.3.4434.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama															
IKSK.3.4434.1.1	Persentase siswa di SDTK/SMPTK/SMTK/ SMAK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						
IKSK.3.4434.1.2	Persentase guru SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						
IKSK.3.4434.1.3	Persentase pengawas SDTK/SMPTK/SMTK/ SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00						
IKSK.3.4434.1.4	Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	10	10	10	10	10	10						
IKSK.3.4434.1.5	Persentase siswa beragama Kristen di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Kristen bermuatan moderasi beragama		%	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00						
IKSK.3.4434.1.6	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00						
IKSK.3.4434.1.7	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.3.4434.2 Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir															
IKSK.3.4434.2.1	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMMAK yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
SK.3.4434.3 Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif															
IKSK.3.4434.3.1	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMMAK yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
SK.3.4434.4 Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan															
IKSK.3.4434.4.1	Persentase guru SDTK/SMPTK/SMTK/SMMAK yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00						
IKSK.3.4434.4.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMMAK		Orang	1	1	1	1	1	1						
IKSK.3.4434.4.3	Jumlah siswa yang mengikuti asesmen kompetensi		Orang	100	100	100	100	100	100						
SK.3.4434.5 Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran															
IKSK.3.4434.5.1	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMMAK yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00						
IKSK.3.4434.5.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00						
SK.3.4434.6 Terpenuhi jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal															
IKSK.3.4434.6.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
IKSK.3.4434.6.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
SK.3.4434.7 Meningkatkan kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan															
IKSK.3.4434.7.1	Persentase guru SDTK/SMPTK/SMTK/SMMAK yang mengikuti PPG		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
IKSK.3.4434.7.2	Persentase guru pendidikan agama Kristen yang mengikuti PPG		%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00						
IKSK.3.4434.7.3	Persentase Calon Pengawas dan Kepala SDTK/SMPTK/SMTK/SMMAK yang menerima beasiswa S2		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.3.4434.8 Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan															
IKSK.3.4434.8.1	Jumlah SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
SK.3.4434.9 Meningkatkan budaya mutu pendidikan															
IKSK.3.4434.9.1	Persentase SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang menerapkan budaya mutu		%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
IKSK.3.4434.9.2	Persentase siswa SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
SK.3.4434.10 Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan															
IKSK.3.4434.10.1	Persentase SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00						
IKSK.3.4434.10.2	Persentase SMPTK/ SMTK/SMAK yang Ramah Anak		%	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00						
SK.3.4434.11 Meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan															
IKSK.3.4434.11.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan		Kegiatan	7	7	7	7	7	7						
IKSK.3.4434.11.2	Jumlah gugus pramuka pada SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang dibina		Unit	78	78	78	78	78	78						
4435-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik										78,949	861,225	1,033,474	1,240,166	1,488,200	Direktorat Pendidikan Katolik
SK.3.4435.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama															
IKSK.3.4435.1.1	Persentase siswa SMAK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	50,00	50,00	75,00	85,00	95,00	100,00						
IKSK.3.4435.1.2	Persentase guru SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	25,00	25,00	50,00	75,00	85,00	100,00						
IKSK.3.4435.1.3	Persentase pengawas SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	25,00	25,00	50,00	75,00	85,00	100,00						
IKSK.3.4435.1.4	Persentase guru pendidikan agama Katolik yang dibina dalam moderasi beragama		%	25,00	25,00	50,00	75,00	85,00	100,00						
IKSK.3.4435.1.5	Persentase pengawas pendidikan agama Katolik yang dibina dalam moderasi beragama		%	25,00	25,00	50,00	75,00	85,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.4435.1.6	Persentase siswa beragama Katolik di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Katolik bermuatan moderasi beragama		%	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00						
IKSK.3.4435.1.7	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada SMAK yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	40	40	40	40	40	40						
SK.3.4435.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir														
IKSK.3.4435.2.1	Persentase SMAK yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	50,00	50,00	75,00	85,00	95,00	100,00						
SK.3.4435.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif														
IKSK.3.4435.3.1	Persentase SMAK yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	50,00	50,00	75,00	85,00	95,00	100,00						
SK.3.4435.4	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.3.4435.4.1	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi		%	10,00	10,00	30,00	50,00	80,00	100,00						
SK.3.4435.5	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran														
IKSK.3.4435.5.1	Persentase SMAK yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	25,00	25,00	35,00	55,00	75,00	100,00						
IKSK.3.4435.5.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						
SK.3.4435.6	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal														
IKSK.3.4435.6.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	50,00	50,00	75,00	85,00	95,00	100,00						
IKSK.3.4435.6.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	50,00	50,00	75,00	85,00	95,00	100,00						
SK.3.4435.7	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan														
IKSK.3.4435.7.1	Persentase guru SMAK yang mengikuti PPG		%	NA	NA	15,00	35,00	55,00	100,00						
IKSK.3.4435.7.2	Persentase guru Pendidikan Agama Katolik yang mengikuti PPG		%	NA	NA	13,00	40,00	65,00	100,00						
IKSK.3.4435.7.3	Persentase Calon Pengawas dan Kepala SMAK yang menerima beasiswa S2		%	NA	NA	20,00	40,00	80,00	100,00						
SK.3.4435.8	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan														
IKSK.3.4435.8.1	Jumlah SMAK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	5	30	19	30	19	30						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.3.4435.9 Meningkatkan budaya mutu pendidikan															
IKSK.3.4435.9.1	Persentase SMAK yang menerapkan budaya mutu		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.3.4435.9.2	Persentase siswa SMAK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
SK.3.4435.10 Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan															
IKSK.3.4435.10.1	Persentase SMAK yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	50,00	50,00	75,00	85,00	95,00	100,00						
IKSK.3.4435.10.2	Persentase SMAK yang Ramah Anak		%	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00						
SK.3.4435.11 Meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan															
IKSK.3.4435.11.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada SMAK yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan		Kegiatan	5	10	20	30	35	40						
IKSK.3.4435.11.2	Jumlah gugus pramuka pada SMAK yang dibina		Unit	40	40	40	40	40	40						
4436-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu										33,759	45,923	40,237	42,424	45,591	Direktorat Pendidikan Hindu
SK.3.4436.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama															
IKSK.3.4436.1.1	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.3.4436.1.2	Persentase guru Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dibina dalam moderasi beragama		%	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	100,00						
IKSK.3.4436.1.3	Persentase pengawas Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	NA	20,00	30,00	40,00	50,00						
IKSK.3.4436.1.4	Persentase guru pendidikan agama Hindu yang dibina dalam moderasi beragama		%	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	100,00						
IKSK.3.4436.1.5	Persentase pengawas pendidikan agama Hindu yang dibina dalam moderasi beragama		%	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.4436.1.6	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	1	1	2	2	3	3						
IKSK.3.4436.1.7	Persentase siswa beragama Hindu di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	10,00	15,00	30,00	50,00	70,00	90,00						
SK.3.4436.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir														
IKSK.3.4436.2.1	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00						
SK.3.4436.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif														
IKSK.3.4436.3.1	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	NA	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00						
SK.3.4436.4	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.3.4436.4.1	Persentase guru Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	NA	0,00	20,00	25,00	30,00	40,00						
IKSK.3.4436.4.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman		Orang	NA	NA	2	4	6	8						
IKSK.3.4436.4.3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa		Kegiatan	NA	NA	1	2	2	3						
IKSK.3.4436.4.4	Jumlah siswa yang mengikuti asesmen kompetensi		Orang	NA	NA	5	10	12	15						
SK.3.4436.5	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran														
IKSK.3.4436.5.1	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	NA	NA	10,00	20,00	30,00	40,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.4436.5.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	NA	NA	10,00	20,00	30,00	40,00						
SK.3.4436.6 Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal															
IKSK.3.4436.6.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	65,00	70,00	75,00	80,00	86,00	90,00						
IKSK.3.4436.6.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00						
SK.3.4436.7 Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan															
IKSK.3.4436.7.1	Persentase guru Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang mengikuti PPG		%	NA	NA	5,00	10,00	15,00	20,00						
IKSK.3.4436.7.2	Persentase guru Pendidikan Agama Hindu yang mengikuti PPG		%	58,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00						
IKSK.3.4436.7.3	Persentase Calon Pengawas dan Kepala Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang menerima beasiswa S2		%	NA	NA	5,00	10,00	15,00	20,00						
SK.3.4436.8 Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan															
IKSK.3.4436.8.1	Jumlah Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	1	2	3	4	5	6						
SK.3.4436.9 Meningkatnya budaya mutu pendidikan															
IKSK.3.4436.9.1	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang menerapkan budaya mutu		%	2,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00						
IKSK.3.4436.9.2	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	2,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00						
SK.3.4436.10 Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan															
IKSK.3.4436.10.1	Persentase Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	50,00	50,00	75,00	80,00	90,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.3.4436.10.2	Persentase Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang Ramah Anak		%	50,00	50,00	75,00	80,00	90,00	100,00							
SK.3.4436.11 Meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan																
IKSK.3.4436.11.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan		Organisasi	1	2	3	4	5	6							
IKSK.3.4436.11.2	Jumlah gugus pramuka pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasramann yang dibina		Unit	1	2	3	4	5	6							
4437-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha										34,113	58,871	64,759	71,235	78,358	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	
SK.3.4137.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama																
IKSK.3.4137.1.1	Persentase guru pendidikan agama Buddha yang dibina dalam moderasi beragama		%	55.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00							
IKSK.3.4137.1.2	Persentase pengawas pendidikan agama Buddha yang dibina dalam moderasi beragama		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
IKSK.3.4137.1.3	Presentase tenaga pendidik dan kependidikan keagamaan Buddha yang dibina dalam moderasi beragama		%	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00							
SK.3.4137.2 Terpenuhnya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal																
IKSK.3.4137.2.1	Persentase guru pendidikan agama Buddha yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	10.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00							
IKSK.3.4137.2.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
SK.3.4137.3 Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan																
IKSK.3.4137.3.1	Persentase guru pendidikan agama Buddha yang mengikuti PPG		%	NA	0,07	8,00	9,00	10,00	11,00							
5621-Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu										6,367	8,141	8232	8280	8,357	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	
SK.3.5621.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama																

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.5621.1.1	Persentase guru pendidikan agama Khonghucu di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.3.5621.1.2	Persentase mahasiswa beragama Khonghucu di PTU yang memperoleh pendidikan agama Khonghucu bermuatan moderasi beragama		%	NA	NA	82.00	84.00	86.00	88.00						
IKSK.3.5621.1.3	Persentase dosen pendidikan agama Khonghucu di PTU yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	NA	85.00	90.00	95.00	100.00						
SK.3.5621.2 Meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama Khonghucu															
IKSK.3.5621.2.1	Persentase guru pendidikan agama Khonghucu yang mengikuti pembinaan kompetensi		%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
025-04 PROGRAM PAUD DAN WAJAH 12 TAHUN		PUSAT-DAERAH								13,278,270	14,706,124	15,156,539	15,327,809	15,530,712	DITJEN PENDIS, DITJEN BIMAS KRISTEN, DITJEN BIMAS KATOLIK, DITJEN BIMAS HINDU, DITJEN BIMAS BUDDHA
SP.4.1 Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan															
IKSP.4.4.1	Persentase peningkatan siswa pada RA/Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/Nava Dammasekha		%	9.11	2.19	3.14	3.22	4.51	4.56						
IKSP.4.4.2	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman		%	12.46	12.99	13.55	13.61	14.18	14.25						
IKSP.4.4.3	Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMP TK/ Madyama Widya Pasraman		%	17.33	17.83	18.25	18.67	19.08	19.17						
IKSP.4.4.4	Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman		%	20.33	20.50	20.58	20.67	20.75	20.83						
IKSP.4.4.5	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly		%	18.82	19.32	20.84	21.06	22.38	22.50						
IKSP.4.4.6	Persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK)		%	0.75	0.85	1.00	1.15	1.30	1.50						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2129-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah									12,704,254	13,156,031	13,318,837	13,412,974	13,520,425	Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah	
SK.4.2129.1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.4.2129.1.1	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	75.00	76.00	78.00	79.00	80.00	83.00						
IKSK.4.2129.1.2	Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	78.00	79.00	81.00	82.00	84.00	85.00						
IKSK.4.2129.1.3	Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00						
IKSK.4.2129.1.4	Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	81.00	84.00	87.00	89.00	91.00	93.00						
IKSK.4.2129.1.5	Persentase madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	65.00	66.00	67.00	68.00	69.00	70.00						
SK.4.2129.2 Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat															
IKSK.4.2129.2.1	Jumlah siswa MI penerima BOS		Orang	3,894,365	3,894,365	3,972,252	4,051,697	4,092,214	4,133,136						
IKSK.4.2129.2.2	Jumlah siswa MTs penerima BOS		Orang	3,358,773	3,358,773	3,425,948	3,494,467	3,529,412	3,564,706						
IKSK.4.2129.2.3	Jumlah siswa MA penerima BOS		Orang	1,495,294	1,495,294	1,525,200	1,555,704	1,571,261	1,586,974						
IKSK.4.2129.2.4	Persentase siswa MI penerima PIP		%	22.00	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50						
IKSK.4.2129.2.5	Persentase siswa MTs penerima PIP		%	25.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00						
IKSK.4.2129.2.6	Persentase siswa MA penerima PIP		%	21.00	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50						
IKSK.4.2129.2.7	Jumlah madrasah yang didirikan di daerah afirmasi		Lembaga	NA	50	75	80	90	100						
SK.4.2129.3 Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah															
IKSK.4.2129.3.1	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Orang	1,331,207	1,331,207	1,344,519	1,357,964	1,371,543	1,385,258						
SK.4.2129.4 Meningkatkan kualitas penanganan ATS															
IKSK.4.2129.4.1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi		%	0.01	0.05	0.10	0.15	0.17	0.20						
2128-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam									480,000	1,336,960	1,595,610	1,643,160	1,710,710	Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	
SK.4.2128.1 Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama															
IKSK.4.2128.1.1	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan Al-Qur'an		%	2.00	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.4.2128.2 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.4.2128.2.1	Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	NA	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00						
IKSK.4.2128.2.2	Persentase Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	NA	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00						
IKSK.4.2128.2.3	Persentase Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	NA	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00						
IKSK.4.2128.2.4	Persentase pendidikan diniyah/muadalah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	NA	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00						
SK.4.2128.3 Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat															
IKSK.4.2128.3.1	Jumlah siswa penerima BOS pada pendidikan diniyah/muadalah		Orang	160,619	160,619	200,000	215,000	220,000	225,000						
IKSK.4.2128.3.2	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional		%	6.00	4.00	9.00	11.00	13.00	15.00						
IKSK.4.2128.3.3	Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan diniyah/muadalah		%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						
SK.4.2128.4 Meningkatkan kualitas penanganan ATS															
IKSK.4.2128.4.1	Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pesantren		%	35.00	37.00	38.00	39.00	40.00	43.00						
2136-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen										30,219	58,421	62,553	67,618	72,957	Direktorat Pendidikan Kristen
SK.4.2136.1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.4.2136.1.1	Persentase SDTK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00						
IKSK.4.2136.1.2	Persentase SMPTK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						
IKSK.4.2136.1.3	Persentase SMTK/SMAK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00						
IKSK.4.2136.1.4	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						
SK.4.2136.2 Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat															
IKSK.4.2136.2.1	Jumlah siswa SDTK penerima BOS		Orang	2,500	2,500	2,700	2,900	3,100	3,300						
IKSK.4.2136.2.2	Jumlah siswa SMPTK penerima BOS		Orang	3,088	3,088	3,288	3,488	3,688	3,888						
IKSK.4.2136.2.3	Jumlah siswa SMTK/SMAK penerima BOS		Orang	8,750	8,750	8,950	9,150	9,350	9,550						
IKSK.4.2136.2.4	Persentase siswa SDTK penerima PIP		%	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.4.2136.2.5	Persentase siswa SMP TK penerima PIP		%	91.90	91.90	91.90	91.90	91.90	91.90							
IKSK.4.2136.2.6	Persentase siswa SMTK/ SMAK penerima PIP		%	90.98	90.98	90.98	90.98	90.98	90.98							
2139-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik										5,320	57,905	69,486	83,384	100,060	Direktorat Pendidikan Katolik	
SK.4.2139.1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan																
IKSK.4.2139.1.1	Persentase Taman Seminari yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
IKSK.4.2139.1.2	Persentase SMAK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	50.00	50.00	75.00	85.00	95.00	100.00							
IKSK.4.2139.1.3	Persentase SMAK di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	50.00	50.00	75.00	85.00	95.00	100.00							
SK.4.2139.2 Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat																
IKSK.4.2139.2.1	Jumlah siswa SMAK penerima BOS		Orang	2,500	4,266	5,466	6,666	7,866	9,066							
IKSK.4.2139.2.2	Persentase siswa SMAK penerima PIP		%	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00							
IKSK.4.2139.2.3	Jumlah SMAK yang didirikan di daerah afirmasi		Lembaga	NA	NA	2	3	4	5							
SK.4.2139.3 Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah																
IKSK.4.2139.3.1	Jumlah Taman Seminari yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Lembaga	51	51	100	100	100	100							
2142-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu										28,720	45,432	53,540	58,510	58,180	Direktorat Pendidikan Hindu	
SK.4.2142.1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan																
IKSK.4.2142.1.1	Persentase Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00							
IKSK.4.2142.1.2	Persentase Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	45.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00							
IKSK.4.2142.1.3	Persentase Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	70.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00							
IKSK.4.2142.1.4	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	30.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00							
SK.4.2142.2 Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat																
IKSK.4.2142.2.1	Jumlah siswa Adhi Widya Pasraman penerima BOS		Orang	140	233	250	275	300	350							
IKSK.4.2142.2.2	Jumlah siswa Madyama Widya Pasraman penerima BOS		Orang	26	90	100	120	130	150							
IKSK.4.2142.2.3	Jumlah siswa Utama Widya Pasraman penerima BOS		Orang	10	76	90	100	110	120							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.4.2142.2.4	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman penerima PIP		%	48.00	90.00	95.00	95.00	95.00	100.00							
IKSK.4.2142.2.5	Persentase siswa Madyama Widya Pasraman penerima PIP		%	28.00	80.00	90.00	95.00	95.00	100.00							
IKSK.4.2142.2.6	Persentase siswa Utama Widya Pasraman penerima PIP		%	13.00	30.00	50.00	70.00	90.00	100.00							
IKSK.4.2142.2.7	Jumlah Adhi/Madyama/Utama Widya Pasraman yang didirikan di daerah afirmasi		Lembaga	3	3	4	4	5	5							
SK.4.2129.3 Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah																
IKSK.4.2129.3.1	Jumlah siswa Pratama Widya Pasraman yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Orang	958	975	990	1,000	1,025	1,050							
4012-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha										29,757	51,375	56,512	62,163	68,380	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	
SK.4.4012.1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan																
IKSK.4.4012.1.1	Persentase Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	5.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00							
IKSK.4.4012.1.2	Persentase Nava Dhammasekha di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00							
IKSK.4.4012.1.3	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	6.00	25.00	26.00	27.00	28.00	30.00							
SK.4.4012.2 Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah																
IKSK.4.4012.2.1	Jumlah Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Lembaga	NA	NA	2	3	4	5							
025-05 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI		PUSAT-DAERAH								6,473,474	7,839,746	9,250,974	10,644,191	12,049,197	DITJEN PENDIS, DITJEN BIMAS KRISTEN, DITJEN BIMAS KATOLIK, DITJEN BIMAS HINDU, DITJEN BIMAS BUDDHA	
SP.5.1 Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat																
IKSP.5.1.1	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama		Nilai	44.40	44.40	61.39	62.51	63.71	64.91							
SP.5.2 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik																
IKSP.5.2.1	Persentase dosen bersertifikat pendidik		%	56.60	58.86	66.00	69.60	73.20	75.60							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSP.5.2.2	Persentase dosen berkualifikasi S3		%	17.99	21.40	27.00	31.40	36.00	40.00							
SP.5.3 Meningkatkan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan																
IKSP.5.3.1	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul		%	20.76	21.00	23.60	28.00	32.40	36.80							
IKSP.5.3.2	Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan		%	49.40	55.00	59.00	67.00	72.00	77.00							
SP.5.4 Meningkatkan kualitas PTK yang bereputasi internasional																
IKSP.5.4.1	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional		%	9.03	9.10	9.15	11.75	13.88	16.4							
IKSP.5.4.2	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK		%	0.38	0.45	0.56	0.63	0.79	0.95							
SP.5.5 Meningkatkan kualitas pemanfaatan penelitian																
IKSP.5.5.1	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional		%	18.5	40.00	42.00	43.00	45.00	46.00							
SP.5.6 Meningkatkan kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja																
IKSP.5.6.1	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan		%	37.50	39.25	42.50	53.67	56.67	61.33							
IKSP.5.6.2	Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK															
	a. S1		Nilai	NA	2.65	2.65	2.70	2.75	2.75							
	b. S2		Nilai	NA	3.15	3.20	3.25	3.25	3.25							
	c. S3		Nilai	NA	3.40	3.40	3.45	3.45	3.50							
IKSP.5.6.3	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan		Bulan	11	9	8	7	6	5							
2132-Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam										5,823,991	6,607,355	7,679,911	8,946,661	10,131,450	Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	
SK.5.2132.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama																
IKSK.5.2132.1.1	Persentase mahasiswa PTKI yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00							
IKSK.5.2132.1.2	Persentase dosen PTKI yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	10.00	15.00	17.00	19.00	20.00							
SK.5.2132.2 Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif																
IKSK.5.2132.2.1	Persentase Prodi PTKI yang menyelenggarakan pembelajaran daring		%	NA	7,00	10,00	12,00	15,00	20,00							
SK.5.2132.3 Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan																
IKSK.5.2132.3.1	Persentase dosen PTKI yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00							
IKSK.5.2132.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTKI yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	1,00	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.5.2132.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan														
IKSK.5.2132.4.1	Persentase PTKI yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi		%	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00						
SK.5.2132.5	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat														
IKSK.5.2132.5.1	Persentase mahasiswa PTKI penerima PIP Kuliah/Bidikmisi		%	4.70	5.00	8.00	10.00	13.00	17.00						
IKSK.5.2132.5.2	Persentase mahasiswa PTKI penerima beasiswa PPA		%	0.40	0.40	0.50	0.70	0.80	1.00						
IKSK.5.2132.5.3	Persentase mahasiswa PTKI penerima beasiswa Tahfidz pada PTKI		%	0.40	0.40	0.50	0.70	0.80	1.00						
IKSK.5.2132.5.4	Persentase mahasiswa PTKI penerima beasiswa Afirmasi (UP4B)		%	0.40	0.40	0.50	0.70	0.80	1.00						
IKSK.5.2132.5.5	Jumlah mahasiswa asing di PTKI yang menerima beasiswa		Orang	300	300	600	900	900	1,200						
IKSK.5.2132.5.6	Persentase mahasiswa PTKI berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3		%	0.02	0.03	0.04	0.05	0.10	0.15						
IKSK.5.2132.5.7	Jumlah PTKI yang diafirmasi dalam peningkatan status institusi		Lembaga	4	5	7	8	9	10						
SK.5.2132.6	Meningkatnya kualitas LPTK														
IKSK.5.2132.6.1	Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG		%	35.00	35.00	40.00	45.00	50.00	60.00						
IKSK.5.2132.6.2	Persentase LPTK yang terevitalisasi		%	3.00	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00						
SK.5.2132.7	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi														
IKSK.5.2132.7.1	Jumlah PTKI yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		%	NA	NA	50	70	80	100						
IKSK.5.2132.7.2	Persentase Prodi PTKI yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka		%	NA	3.00	4.00	6.00	8.00	10.00						
SK.5.2132.8	Meningkatnya budaya mutu pendidikan														
IKSK.5.2132.8.1	Persentase PTKI yang menerapkan budaya mutu		%	NA	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00						
IKSK.5.2132.8.2	Persentase mahasiswa PTKI yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30						
IKSK.5.2132.8.3	Persentase dosen PTKI yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional		%	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	10.00						
SK.5.2132.9	Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan														
IKSK.5.2132.9.1	Persentase PTKI yang memperoleh pembinaan dalam SPMI		%	30,00	35,00	37,00	39,00	41,00	46,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.5.2132.10 Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan															
IKSK.5.2132.10.1	Jumlah PTKN yang berstatus PTKN BLU dan PTKN-BH		Lembaga	18	19	22	27	31	35						
IKSK.5.2132.10.2	Persentase anggaran PNBPN dan PNBPN-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan		%	4,10	5,10	6,00	7,00	9,00	10,00						
IKSK.5.2132.10.3	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN		%	0,01	NA	15,00	17,00	20,00	23,00						
SK.5.2132.11 Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional															
IKSK.5.2132.11.1	Persentase Prodi PTKI yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional		%	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00						
IKSK.5.2132.11.2	Persentase PTKI yang melakukan kolaborasi internasional		%	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50						
IKSK.5.2132.11.3	Persentase kerja sama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran		%	2.00	3.00	5.00	9.00	10.00	15.00						
IKSK.5.2132.11.4	Persentase kerja sama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi		%	2.10	3.00	5.00	7.00	9.00	11.00						
IKSK.5.2132.11.5	Persentase kerja sama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat		%	2.50	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00						
SK.5.2132.12 Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK															
IKSK.5.2132.12.1	Persentase hasil penelitian PTKI yang memperoleh HAKI		%	30,00	40,00	42,00	43,00	45,00	46,00						
IKSK.5.2132.12.2	Persentase hasil penelitian PTKI yang menghasilkan Hak Paten		%	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00						
SK.5.2132.13 Meningkatnya kualitas lulusan PTK															
IKSK.5.2132.13.1	Persentase lulusan PTKI yang tepat waktu		%	78,00	79,00	81,00	83,00	85,00	90,00						
IKSK.5.2132.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa PTKI		Tahun	4	4	4	4	4	4						
4438-Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Ma'had Aly										306,526	347,756	404,206	470,877	533,234	Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
SK.5.4438.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama															
IKSK.5.4438.1.1	Persentase mahasiswa Ma'had Aly yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00						
IKSK.5.4438.1.2	Persentase dosen Ma'had Aly yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	10,00	15,00	17,00	19,00	20,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.5.4438.2 Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan															
IKSK.5.4438.2.1	Persentase dosen Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	3,00	4,00	5,00	7,00	10,00	12,00						
IKSK.5.4438.2.2	Persentase tenaga kependidikan Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	1,00	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00						
SK.5.4438.3 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.5.4438.3.1	Persentase Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi		%	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	40,00						
SK.5.4438.4 Meningkatkan budaya mutu pendidikan															
IKSK.5.4438.4.1	Persentase Ma'had Aly yang menerapkan budaya mutu		%	10,00	15,00	17,00	20,00	24,00	28,00						
IKSK.5.4438.4.2	Persentase mahasiswa Ma'had Aly yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	NA	3,00	5,00	6,00	7,00	8,00						
SK.5.4438.5 Meningkatkan kualitas lulusan Ma'had Aly															
IKSK.5.4438.5.1	Persentase lulusan Ma'had Aly yang tepat waktu		%	78,00	79,00	81,00	83,00	85,00	90,00						
IKSK.5.4438.5.2	Rerata lama masa studi mahasiswa Ma'had Aly		Tahun	4	4	4	4	4	4						
5101-Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, Daya saing, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen										126,044	351,253	581,503	617,804	741,365	Direktorat Pendidikan Kristen
SK.5.5101.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama															
IKSK.5.5101.1.1	Persentase mahasiswa PTK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00						
IKSK.5.5101.1.2	Persentase dosen PTK yang dibina dalam moderasi beragama		%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00						
IKSK.5.5101.1.3	Persentase mahasiswa beragama Kristen di PTU yang memperoleh pendidikan agama Kristen bermuatan moderasi beragama		%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
IKSK.5.5101.1.4	Persentase dosen pendidikan agama Kristen di PTU yang dibina dalam moderasi beragama		%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
SK.5.5101.2 Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif															
IKSK.5.5101.2.1	Persentase Prodi PTK yang menyelenggarakan pembelajaran daring		%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00						
SK.5.5101.3 Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan															
IKSK.5.5101.3.1	Persentase dosen PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	25,00	25,00	35,00	45,00	55,00	55,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.5.5101.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	25,00	25,00	35,00	45,00	55,00	55,00						
SK.5.5101.4		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan													
IKSK.5.5101.4.1	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi		%	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00						
SK.5.5101.5		Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat													
IKSK.5.5101.5.1	Persentase mahasiswa PTK penerima PIP Kuliah/Bidikmisi pada PTK		%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00						
IKSK.5.5101.5.2	Persentase mahasiswa PTK penerima Beasiswa PPA pada PTK		%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						
IKSK.5.5101.5.3	Persentase mahasiswa PTK penerima Beasiswa Afirmasi (UP4B)		%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
IKSK.5.5101.5.4	Jumlah mahasiswa asing di PTK yang menerima beasiswa		Orang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
IKSK.5.5101.5.5	Persentase mahasiswa PTK berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3		%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00						
IKSK.5.5101.5.6	Jumlah PTK yang diafirmasi dalam peningkatan status		Lembaga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
SK.5.5101.6		Meningkatnya kualitas LPTK													
IKSK.5.5101.6.1	Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
IKSK.5.5101.6.2	Persentase LPTK yang terrevitalisasi		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
SK.5.5101.7		Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan													
IKSK.5.5101.7.1	Jumlah PTK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00						
IKSK.5.5101.7.2	Persentase Prodi PTK yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka		%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00						
SK.5.5101.8		Meningkatnya budaya mutu pendidikan													
IKSK.5.5101.8.1	Persentase PTK yang menerapkan budaya mutu		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
IKSK.5.5101.8.2	Persentase mahasiswa PTK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
SK.5.5101.9		Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan													
IKSK.5.5101.9.1	Persentase PTK yang memperoleh pembinaan dalam SPMI		%	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.5.5101.10														Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	
IKSK.5.5101.10.1	Jumlah PTKN yang berstatus PTKN BLU dan PTKN-BH		Lembaga	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00						
IKSK.5.5101.10.2	Persentase anggaran PNPB dan PNPB-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan		%	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24						
IKSK.5.5101.10.3	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN		%	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
SK.5.5101.11														Meningkatnya kualitas PTKI berstandar Internasional	
IKSK.5.5101.11.1	Persentase Prodi PTK yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional		%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50						
IKSK.5.5101.11.2	Persentase PTK yang melakukan kolaborasi internasional		%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50						
IKSK.5.5101.11.3	Persentase kerja sama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran		%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50						
IKSK.5.5101.11.4	Persentase kerja sama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi		%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50						
IKSK.5.5101.11.5	Persentase kerja sama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat		%	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00						
SK.5.5101.12														Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK	
IKSK.5.5101.12.1	Persentase hasil penelitian PTK yang memperoleh HAKI		%	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00						
IKSK.5.5101.12.2	Persentase hasil penelitian PTK yang menghasilkan Hak Paten		%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30						
SK.5.5101.13														Meningkatnya kualitas lulusan PTK	
IKSK.5.5101.13.1	Persentase lulusan PTK yang tepat waktu		%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						
IKSK.5.5101.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa PTK		Tahun	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00						
2131-Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik										75,636	210,020	252,020	302,430	362,910	Direktorat Pendidikan Katolik
SK.5.2131.1														Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama	
IKSK.5.2131.1.1	Persentase mahasiswa PTK yang dibina dalam moderasi beragama		%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
IKSK.5.2131.1.2	Persentase dosen PTK yang dibina dalam moderasi beragama		%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.5.2131.1.3	Persentase mahasiswa beragama Katolik di PTU yang memperoleh pendidikan agama Katolik bermuatan moderasi beragama		%	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00						
IKSK.5.2131.1.4	Persentase dosen pendidikan agama Katolik di PTU yang dibina dalam moderasi beragama		%	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00						
SK.5.2131.2		Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif													
IKSK.5.2131.2.1	Persentase Prodi PTK yang menyelenggarakan pembelajaran daring		%	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00						
SK.5.2131.3		Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan													
IKSK.5.2131.3.1	Persentase dosen PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00						
IKSK.5.2131.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00						
SK.5.2131.4		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan													
IKSK.5.2131.4.1	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi			30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00						
SK.5.2131.5		Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat													
IKSK.5.2131.5.1	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi pada PTK		%	2,30	2,30	4,17	6,05	7,92	9,39						
IKSK.5.2131.5.2	Jumlah PTK yang diafirmasi dalam peningkatan status		Lembaga	NA	NA	1	1	1	1						
SK.5.2131.6		Meningkatnya kualitas LPTK													
IKSK.5.2131.6.1	Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG		%	NA	NA	13,04	26,09	39,13	52,17						
IKSK.5.2131.6.2	Persentase LPTK yang terevitalisasi		%	NA	NA	13,04	26,09	39,13	52,17						
SK.5.2131.7		Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan													
IKSK.5.2131.7.1	Jumlah PTK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	5	6	5	5	5	5						
IKSK.5.2131.7.2	Persentase Prodi PTK yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka		%	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00						
SK.5.2131.8		Meningkatnya budaya mutu pendidikan													
IKSK.5.2131.8.1	Persentase PTK yang menerapkan budaya mutu		%	10,00	20,00	30,00	40,00	45,00	50,00						
IKSK.5.2131.8.2	Persentase mahasiswa PTK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	NA	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.5.2131.9 Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan															
IKSK.5.2131.9.1	Persentase PTK yang memperoleh pembinaan dalam SPMI		%	20,00	21,74	43,48	65,22	86,96	100,00						
SK.5.2131.10 Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan															
IKSK.5.2131.10.1	Jumlah PTKN yang berstatus PTKN BLU dan PTKN-BH		Lembaga	NA	NA	NA	NA	NA	5						
IKSK.5.2131.10.2	Persentase anggaran PNPB dan PNPB-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan		%	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12						
IKSK.5.2131.10.3	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN		%	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35						
SK.5.2131.11 Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional															
IKSK.5.2131.11.1	Persentase Prodi PTK yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional		%	NA	NA	NA	2	4	6						
IKSK.5.2131.11.2	Persentase PTK yang melakukan kolaborasi internasional		%	NA	NA	NA	2	4	6						
IKSK.5.2131.11.3	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran		%	NA	NA	NA	2	4	6						
IKSK.5.2131.11.4	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi		%	NA	NA	NA	2	4	6						
IKSK.5.2131.11.5	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat		%	NA	NA	NA	2	4	6						
SK.5.2131.12 Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK															
IKSK.5.2131.12.1	Persentase hasil penelitian PTK yang memperoleh HAKI		%	NA	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00						
SK.5.2131.13 Meningkatnya kualitas lulusan PTK															
IKSK.5.2131.13.1	Persentase lulusan PTK yang tepat waktu		%	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00						
IKSK.5.2131.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa PTK		Tahun	6	5	5	5	4	4						
5104-Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu										114,402	261,367	265,138	231,404	197,721	Direktorat Pendidikan Hindu
SK.5.5104.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama															
IKSK.5.5104.1.1	Persentase mahasiswa PTKH yang dibina dalam moderasi beragama		%	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.5.5104.1.2	Persentase dosen PTKH yang dibina dalam moderasi beragama		%	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.5.5104.1.3	Persentase mahasiswa beragama Hindu di PTU yang memperoleh pendidikan agama Hindu bermuatan moderasi beragama		%	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00						
IKSK.5.5104.1.4	Persentase dosen pendidikan agama Hindu di PTU yang dibina dalam moderasi beragama		%	25.00	40.00	55.00	70.00	85.00	100.00						
SK.5.5104.2		Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif													
IKSK.5.5104.2.1	Persentase Prodi PTK yang menyelenggarakan pembelajaran daring		%	NA	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00						
SK.5.5104.3		Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan													
IKSK.5.5104.3.1	Persentase dosen PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	30.00	32.00	35.00	40.00	45.00	50.00						
IKSK.5.5104.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	20.00	22.00	25.00	30.00	35.00	40.00						
SK.5.5104.4		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan													
IKSK.5.5104.4.1	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi		%	50.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00						
SK.5.5104.5		Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat													
IKSK.5.5104.5.1	Persentase mahasiswa PTK penerima PIP Kuliah/Bidikmisi		%	10.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00						
IKSK.5.5104.5.2	Persentase mahasiswa PTK penerima Beasiswa PPA		%	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00						
IKSK.5.5104.5.3	Persentase mahasiswa PTK berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3		%	NA	NA	3.00	5.00	7.00	10.00						
SK.5.5104.6		Meningkatnya kualitas LPTK													
IKSK.5.5104.6.1	Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG		%	7.00	10.00	20.00	25.00	30.00	40.00						
IKSK.5.5104.6.2	Persentase LPTK yang terrevitalisasi		%	7.00	10.00	20.00	25.00	30.00	40.00						
SK.5.5104.7		Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan													
IKSK.5.5104.7.1	Jumlah PTK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	13	13	13	13	13	13						
IKSK.5.5104.7.2	Persentase Prodi PTK yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka		%	NA	10.00	25.00	40.00	55.00	70.00						
SK.5.5104.8		Meningkatnya budaya mutu pendidikan													
IKSK.5.5104.8.1	Persentase PTK yang menerapkan budaya mutu		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.5.5104.8.2	Persentase mahasiswa PTK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	60.00						
SK.5.5104.9 Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan															
IKSK.5.5104.9.1	Persentase PTK yang memperoleh pembinaan dalam SPMI		%	30.00	30.00	50.00	70.00	80.00	100.00						
SK.5.5104.10 Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan															
IKSK.5.5104.10.1	Persentase anggaran PNPB dan PNBP-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan		%	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70						
IKSK.5.5104.10.2	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN		%	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
SK.5.5104.11 Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional															
IKSK.5.5104.11.1	Persentase Prodi PTK yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional		%	NA	NA	NA	NA	0.08	0.08						
IKSK.5.5104.11.2	Persentase PTK yang melakukan kolaborasi internasional		%	NA	NA	5.00	8.00	10.00	10.00						
IKSK.5.5104.11.3	Persentase kerja sama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran		%	NA	NA	8.00	10.00	12.00	14.00						
IKSK.5.5104.11.4	Persentase kerja sama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi		%	NA	NA	8.00	10.00	12.00	14.00						
IKSK.5.5104.11.5	Persentase kerja sama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat		%	NA	NA	NA	8.00	10.00	12.00						
SK.5.5104.12 Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK															
IKSK.5.5104.12.1	Persentase hasil penelitian PTK yang memperoleh HAKI		%	5.00	10.00	12.00	15.00	17.00	20.00						
IKSK.5.5104.12.2	Persentase hasil penelitian PTK yang menghasilkan Hak Paten		%	NA	5.00	7.00	10.00	12.00	15.00						
SK.5.5104.13 Meningkatnya kualitas lulusan PTK															
IKSK.5.5104.13.1	Persentase lulusan PTK yang tepat waktu		%	70.00	70.00	80.00	90.00	95.00	100.00						
IKSK.5.5104.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa PTK		Tahun	4	4	4	4	4	4						
5106-Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha										26,875	61,996	68,196	75,015	82,517	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
SK.5.5106.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama															
IKSK.5.5106.1.1	Persentase mahasiswa PTKB yang dibina dalam Moderasi beragama		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.5.5106.1.2	Persentase dosen PTKB yang dibina dalam moderasi beragama		%	10.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00						
IKSK.5.5106.1.3	Persentase mahasiswa beragama Buddha di PTU yang memperoleh pendidikan agama Buddha bermuatan moderasi beragama		%	20.00	20.00	25.00	30.00	40.00	50.00						
IKSK.5.5106.1.4	Persentase dosen pendidikan agama Buddha di PTU yang dibina dalam moderasi beragama		%	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
SK.5.5106.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif														
IKSK.5.5106.2.1	Persentase Prodi PTK yang menyelenggarakan pembelajaran daring		%	NA	7.41	12.50	16.67	15.91	23.40						
SK.5.5106.3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan														
IKSK.5.5106.3.1	Persentase dosen PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	45.00	45.00	55.00	55.00	55.00	60.00						
IKSK.5.5106.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	10.00	10.00	15.00	25.00	25.00	25.00						
SK.5.5106.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan														
IKSK.5.5106.4.1	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi		%	50.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00						
SK.5.5106.5	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat														
IKSK.5.5106.5.1	Persentase mahasiswa PTK penerima PIP Kuliah/Bidikmisi		%	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	30.00						
IKSK.5.5106.5.2	Persentase mahasiswa PTK penerima Beasiswa PPA		%	10.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00						
IKSK.5.5106.5.3	Persentase mahasiswa PTK berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
IKSK.5.5106.5.4	Jumlah PTK yang diafirmasi dalam peningkatan status		Lembaga	NA	NA	2	1	NA	NA						
SK.5.5106.6	Meningkatnya kualitas LPTK														
IKSK.5.5106.6.1	Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.5.5106.6.2	Persentase LPTK yang direvitalisasi		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
SK.5.5106.7	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan														
IKSK.5.5106.7.1	Jumlah PTK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	2	4	4	2	3	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.5.5106.7.2	Persentase Prodi PTK yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka		%	NA	NA	NA	44.00	47.00	55.00						
SK.5.5106.8 Meningkatkan budaya mutu pendidikan															
IKSK.5.5106.8.1	Persentase PTK yang menerapkan budaya mutu		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.5.5106.8.2	Persentase mahasiswa PTK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	10.00	16.51	17.62	19.18	19.21	19.37						
SK.5.5106.9 Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan															
IKSK.5.5106.9.1	Persentase PTK yang memperoleh pembinaan dalam SPMI		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
SK.5.5106.10 Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan															
IKSK.5.5106.10.1	Persentase anggaran PNPB dan PNPB-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan		%	0.20	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24						
IKSK.5.5106.10.2	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN		%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						
SK.5.5106.11 Meningkatkan kualitas PTK berstandar Internasional															
IKSK.5.5106.11.1	Persentase PTK yang melakukan kolaborasi internasional		%	NA	17.00	20.00	25.00	30.00	40.00						
IKSK.5.5106.11.2	Persentase kerja sama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran		%	NA	NA	10.00	10.00	10.00	10.00						
IKSK.5.5106.11.3	Persentase kerja sama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi		%	NA	NA	10.00	10.00	10.00	10.00						
IKSK.5.5106.11.4	Persentase kerja sama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat		%	NA	NA	10.00	10.00	10.00	10.00						
SK.5.5106.12 Meningkatkan kualitas hasil penelitian PTK															
IKSK.5.5106.12.1	Persentase hasil penelitian PTK yang memperoleh HAKI		%	NA	5.67	8.38	10.75	11.00	13.74						
IKSK.5.5106.12.2	Persentase hasil penelitian PTK yang menghasilkan Hak Paten		%	NA	1.42	2.40	3.76	5.00	6.16						
SK.5.5106.13 Meningkatkan kualitas lulusan PTK															
IKSK.5.5106.13.1	Persentase lulusan PTK yang tepat waktu		%	80.00	83.41	84.42	98.88	98.70	98.70						
IKSK.5.5106.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa PTK		Tahun	4	4	4	4	4	4						

Lampiran III

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN AGAMA										65,144,748	73,922,166	79,190,476	84,515,522	90,340,741	
SS1 Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama															
IKSS1.1	Indeks kesalehan umat beragama		Nilai	83.58	84.08	84.58	85.08	85.58	86.08						
SS2 Meningkatnya moderasi dan kerukunan umat beragama															
IKSS2.1	Indeks kerukunan umat beragama		Nilai	73.83	73.91	74.00	74.70	75.00	75.80						
SS3 Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya															
IKSS3.1	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya		Nilai	NA	60.00	65.00	70.00	72.00	76.00						
SS4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama															
IKSS4.1	Indeks kepuasan layanan KUA		Nilai	77.28	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00						
IKSS4.2	Tingkat kepuasan layanan produk halal		Nilai	NA	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00						
IKSS4.3	Indeks kepuasan layanan ibadah haji		Nilai	85.91	85.95	85.96	85.97	85.99	86.00						
SS5 Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat															
IKSS5.1	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan		%	49.70	50.00	51.00	53.00	54.00	55.00						
SS6 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran															
IKSS6.1	Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi:														
	a. Literasi		%	53.20	55.20	56.90	58.50	60.30	61.20						
	b. Numerasi		%	22.30	23.60	24.70	25.50	27.10	30.10						
IKSS6.2	Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA:														
	a. Membaca		%	44,62 (2018)	NA	46.79	NA	NA	49.80						
	b. Matematika		%	31,4 (2018)	NA	35.64	NA	NA	39.83						
	c. Sains		%	44,05 (2018)	NA	45.45	NA	NA	48.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SS7 Meningkatkan kualitas pemerataan akses pendidikan															
IKSS7.1	APK RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/Nava Dharmasekha		%	9.40	9.70	10.00	12.00	13.00	14.00						
IKSS7.2	APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman		%	13.89	13.90	14.00	14.70	15.67	16.00						
IKSS7.3	APK MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman		%	24.37	24.47	24.70	25.20	25.70	26.20						
IKSS7.4	APK MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman		%	10.78	11.44	11.60	11.90	12.40	12.90						
IKSS7.5	APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman		%	12.02	12.08	12.11	12.33	12.46	12.60						
IKSS7.6	APM MTs/Wustha/ SMPTK/Adi Widya Pasraman		%	21.38	21.39	21.65	21.78	22.38	22.60						
IKSS7.7	APM MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman		%	9.82	9.83	19.40	19.80	20.20	20.60						
IKSS7.8	APK PTK/Ma'had Aly		%	5.29	5.50	6.47	6.87	7.27	7.35						
SS8 Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik															
IKSS8.1	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP		Nilai	25:1	20:1	20:1	20:1	15:1	15:1						
SS9 Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan															
IKSS9.1	Persentase MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B		%	57.00	61.04	63.28	65.52	67.76	70.00						
IKSS9.2	Persentase MTs/ Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman yang terakreditasi/B		%	48.00	61.04	63.28	65.52	67.76	70.00						
IKSS9.3	Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B		%	44.00	61.04	63.28	65.52	67.76	70.00						
IKSS9.4	Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/ Unggul		%	2.16	10.26	17.66	25.06	32.46	60.00						
SS10 Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa															
IKSS10.1	Indeks karakter siswa		Nilai	70.14	71.87	72.00	72.13	72.26	73.00						
SS11 Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas															
IKSS11.1	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional		%	0.31	1.46	2.92	4.38	5.84	7.30						
IKSS11.2	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan		%	27.28	32.32	37.36	42.40	47.44	53.36						
IKSS11.3	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional		%	2.89	5.76	13.00	16.00	19.00	22.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSS11.4	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi		%	0.14	2.77	5.40	8.03	10.66	13.29						
SS12 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel															
IKSS12.1	Predikat opini laporan keuangan		Opini	WTP (2018)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
IKSS12.2	Nilai reformasi birokrasi		Nilai	75.04	76.00	77.00	79.00	80.00	82.00						
SS13 Meningkatkan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan															
IKSS13.1	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (policy paper)		%	NA	80.00	82.00	85.00	87.00	90.00						
025.01-PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA										1,921,414	2,192,530	2,228,560	2,247,492	2,276,999	Sekretariat Jenderal
SP 1.1 Meningkatkan akuntabilitas keuangan Kementerian Agama															
IKSP1.1.1	Persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
SP 1.2 Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama															
IKSP1.2.1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Nilai	NA	80.00	81.00	84.00	85.00	87.00						
IKSP1.2.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	70.52	71.00	72.00	74.00	77.00	80.00						
IKSP1.2.3	Nilai Impelementasi Sistem Merit		Nilai	NA	50.00	80.00	85.00	87.00	95.00						
IKSP1.2.4	Persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai)		%	72.00	72.50	85.00	87.50	95.00	97.50						
SP 1.3 Meningkatkan tata kelola organisasi Sekretariat Jenderal yang efektif dan akuntabel															
IKSP1.3.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan		%	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00						
IKSP1.3.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Nilai	83.16	84.00	84.84	85.68	86.52	87.36						
IKSP1.3.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	79.82	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00						
IKSP1.3.4	Nilai Maturitas SPIP		Nilai	2.15	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00						
IKSP1.3.5	Indeks Profesionalitas ASN		Nilai	NA	70.00	75.00	77.00	79.00	81.00						
2098-Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN										5.489	22.937	22.984	23.083	23.147	Biro Hukum dan KLN
SK.1.2098.1 Meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum															
IKSK.1.2098.1.1	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan		%	85.00	85.00	95.00	95.00	95.00	95.00						
IKSK.1.2098.1.2	Persentase produk hukum yang diterbitkan		%	85.00	85.00	95.00	95.00	95.00	95.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2098.1.3	Persentase kasus hukum yang terselesaikan		%	45.00	50.00	75.00	80.00	95.00	100.00						
IKSK.1.2098.1.4	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan		Kegiatan	3	3	10	10	10	10						
SK.1.2098.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri														
IKSK.1.2098.2.1	Persentase penyelesaian naskah kerjasama dan perjanjian internasional		%	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00						
IKSK.1.2098.2.2	Persentase rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri		%	90.00	92.00	94.00	95.00	96.00	99.00						
IKSK.1.2098.2.3	Persentase rekomendasi izin orang asing		%	90.00	94.00	95.00	96.00	97.00	99.00						
2099-Pembinaan Administrasi Kepegawaian										5,820	41,851	41,926	41,966	42,029	Biro Kepegawaian
SK.1.2099.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)														
IKSK.1.2099.1.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja		%	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.1.2099.1.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti		%	80.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00						
IKSK.1.2099.1.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan		%	50.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00						
IKSK.1.2099.1.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	50.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00						
IKSK.1.2099.1.5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	40.00	40.00	60.00	70.00	85.00	95.00						
IKSK.1.2099.1.6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu		%	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00						
IKSK.1.2099.1.7	Persentase data ASN yang diupdate		%	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00						
IKSK.1.2099.1.8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses		%	70.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00						
2100-Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN										1,253,624	1,274,747	1,308,052	1,325,483	1,352,697	Biro Keuangan dan BMN
SK.1.2100.1	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan														
IKSK.1.2100.1.1	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu		Dokumen	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.1.2100.1.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)		%	90.00	92.00	95.00	98.00	99.00	100.00	100.00						
IKSK.1.2100.1.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal		%	94.00	94.80	95.69	96.59	97.80	98.29	98.29						
IKSK.1.2100.1.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama		%	25.00	30.00	50.00	60.00	70.00	80.00	80.00						
IKSK.1.2100.1.5	Persentase pencapaian dan penetapan target PNPB dan BLU		%	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
SK.1.2100.2	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel															
IKSK.1.2100.2.1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	41.95	41.95	41.95	45.77	49.93	100.00	100.00						
IKSK.1.2100.2.2	Persentase tanah yang bersertifikat		%	25.00	28.52	31.35	36.50	40.00	43.77	44.00						
IKSK.1.2100.2.3	Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN		%	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00						
2101-Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana										5.593	27.080	27.158	27.200	27.242	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
SK.1.2101.1	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi															
IKSK.1.2101.1.1	Persentase satuan kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi		%	80.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00							
IKSK.1.2101.1.2	Jumlah dokumen perencanaan organisasi baru, pusat dan daerah yang diusulkan		Dokumen	NA	15	17	19	20	21							
IKSK.1.2101.1.3	Persentase jabatan satuan kerja yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan regulasi baru		%	NA	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00							
IKSK.1.2101.1.4	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis		%	NA	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00							
IKSK.1.2101.1.5	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi		%	15.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00							
IKSK.1.2101.1.6	Jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan regulasinya		Dokumen	80	30	40	50	60	70							
IKSK.1.2101.1.7	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		%	71.30	95	95	95	95	95							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.2101.2 Meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi															
IKSK.1.2101.2.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi		%	80.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00						
IKSK.1.2101.2.2	Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)		Satker	10	19	34	57	90	135						
IKSK.1.2101.2.3	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas		Satker	470	510	548	584	617	651						
IKSK.1.2101.2.4	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja		Orang	112	461	512	568	630	700						
2102-Pembinaan Administrasi Perencanaan										5,789	57,055	57,133	57,174	57,240	Biro Perencanaan
SK.1.2102.1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran															
IKSK.1.2102.1.1	Persentase output perencanaan yang berbasis data		%	90.00	90.00	93.00	95.00	95.00	100.00						
IKSK.1.2102.1.2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	90.00	90.00	90.00	95.00	100.00	100.00						
IKSK.1.2102.1.3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti		%	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00	75.00						
SK.1.2102.2 Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran															
IKSK.1.2102.2.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas		%	92.26	93.00	94.00	95.00	96.00	96.00						
IKSK.1.2102.2.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti		%	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00	80.00						
IKSK.1.2102.2.3	Persentase kebijakan Prioritas Presiden dan Direktif Menteri yang dievaluasi		%	80.00	85.00	90.00	90.00	95.00	100.00						
2103-Pembinaan Administrasi Umum										636,039	731,063	733,059	734,102	735,780	Biro Umum
SK.1.2103.1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor															
IKSK.1.2103.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar		%	60.00	60.00	75.00	80.00	90.00	95.00						
SK.1.2103.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa															
IKSK.1.2103.2.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu		%	97.00	98.06	99.03	100.00	100.00	100.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2103.2.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik		%	55.00	56.41	85.79	100.00	100.00	100.00						
IKSK.1.2103.2.3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen		%	72.00	74.21	83.26	100.00	100.00	100.00						
IKSK.1.2103.2.4	Persentase menurunnya lelang gagal		%	65.00	68.05	74.95	85.27	89.60	98.85						
IKSK.1.2103.2.5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding		%	50.00	52.25	71.65	82.77	86.90	96.85						
SK.1.2103.3	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga														
IKSK.1.2103.3.1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan		%	60.00	60.00	75.00	80.00	90.00	95.00						
IKSK.1.2103.3.2	Persentase penatausahaan dan penertiban aset BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal		%	85.00	86,65	88,25	90,40	93,60	96,80						
2106-Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan										9,060	37,797	38,248	38,484	38,863	Biro Humas, Data dan Informasi
SK.1.2106.1	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi														
IKSK.1.2106.1.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi		Kegiatan	1,000	1,200	1,300	1,400	1,450	1,500						
IKSK.1.2106.1.2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang di counter		%	90.00	90.00	91.00	93.00	95.00	100.00						
IKSK.1.2106.1.3	Persentase opini positif berita Kemenag		%	75.00	75.00	77.50	80.00	87.50	100.00						
SK.1.2106.2	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi														
IKSK.1.2106.2.1	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar		Unit	45	60	70	80	90	100						
IKSK.1.2106.2.2	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam MoS (Mora one Search)		Unit	5	6	7	8	9	10						
IKSK.1.2106.2.3	Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet		Satker	45	45	45	45	45	45						
IKSK.1.2106.2.4	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable		%	60.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00						
025.03-PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN AGAMA										162,396	170,516	179,042	187,994	197,394	Inspektorat Jenderal
SP.3.1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama														
IKSP.3.1.1	Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dan internal terhadap anggaran		%	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05						
IKSP.3.1.2	Persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang Efektif		%	NA	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP.3.2 Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama															
IKSP.3.2.1	Persentase satuan kerja yang mendapat nilai PMPRB minimal 82		%	27.27	45.45	63.64	81.82	100.00	100.00						
IKSP.3.2.2	Nilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)		Nilai	3.11	3.31	3.51	3.71	3.91	4.00						
IKSP.3.2.3	Persentase satuan kerja yang mendapat nilai skor audit kinerja minimal 75		%	45.00	47.22	49.44	50.52	52.54	54.55						
IKSP.3.2.4	Persentase satuan kerja yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja minimal BB		%	62.00	78.13	81.25	84.38	87.50	90.63						
IKSP.3.2.5	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diverifikasi		%	87.00	88.00	90.00	94.00	96.00	98.00						
IKSP.3.2.6	Persentase pengaduan masyarakat yang diverifikasi		%	89.00	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00						
IKSP.3.2.7	Nilai Kapabilitas APIP		Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4						
SP.3.3 Meningkatnya tata kelola organisasi Inspektorat Jenderal yang efektif dan akuntabel															
IKSP.3.3.1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSP.3.3.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Nilai	83.20	83.53	83.86	84.19	84.52	84.85						
IKSP.3.3.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	85.78	86.11	86.44	86.77	87.10	87.43						
IKSP.3.3.4	Nilai Maturitas SPIP		Nilai	3.40	3.60	3.80	4.00	4.10	4.20						
IKSP.3.3.5	Indeks Profesionalitas ASN		Nilai	NA	71.00	75.00	77.00	79.00	81.00						
2113-Pengawasan Fungsional Pendidikan										41.020	43.071	45.224	47.485	49.860	Inspektorat Wilayah I-IV
SK.3.2113.1 Meningkatnya pengawasan atas pengelolaan keuangan pada satuan kerja pendidikan															
IKSK.3.2113.1.1	Persentase laporan keuangan satuan kerja pendidikan telah disajikan sesuai dengan SAP		%	73.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00						
IKSK.3.2113.1.2	Nilai materialitas temuan keuangan pada satuan kerja pendidikan		%	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05						
IKSK.3.2113.1.3	Persentase hasil revidu pengendalian intern pelaporan keuangan yang ditindaklanjuti		%	NA	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00						
SK.3.2113.2 Meningkatnya kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko															
IKSK.3.2113.2.1	Jumlah satuan kerja pendidikan yang di evaluasi pengendalian intern		Satker	NA	24	28	32	36	40						
IKSK.3.2113.2.2	Jumlah satuan kerja pendidikan yang di evaluasi manajemen risiko		Satker	NA	790	793	796	800	805						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.3.2113.2.3	Jumlah hasil pengawasan proyek strategis satuan kerja pendidikan		Dokumen	98	102	114	126	138	150							
SK.3.2113.3 Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pada satuan kerja pendidikan																
IKSK.3.2113.3.1	Jumlah satuan kerja pendidikan yang dievaluasi PMPZI		Satker	2	13	21	28	35	42							
IKSK.3.2113.3.2	Jumlah Satuan organisasi/ satuan kerja pendidikan yang dilakukan audit kinerja		Satker	903	962	1,014	1,066	1,118	1,170							
IKSK.3.2113.3.3	Jumlah satuan kerja pendidikan yang dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja		Satker	5	15	19	23	27	31							
IKSK.3.2113.3.4	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan satuan kerja pendidikan		Dokumen	60	62	64	68	70	72							
2115-Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah I										10.552	11.080	11.634	12.216	12.827	Inspektorat Wilayah I	
SK.3.2115.1 Meningkatnya pengawasan atas pengelolaan keuangan																
IKSK.3.2115.1.1	Persentase laporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah I telah disajikan sesuai dengan SAP		%	73.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00							
IKSK.3.2115.1.2	Nilai materialitas temuan keuangan pada satuan kerja Inspektorat Wilayah I		%	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05							
IKSK.3.2115.1.3	Persentase hasil reviu pengendalian intern pelaporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti		%	NA	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00							
SK.3.2115.2 Meningkatnya kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko																
IKSK.3.2115.2.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah I yang dievaluasi pengendalian intern		Satker	NA	6	7	8	9	10							
IKSK.3.2115.2.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah I yang dievaluasi manajemen risiko		Satker	NA	6	7	8	9	10							
IKSK.3.2115.2.3	Jumlah hasil pengawasan atas proyek strategis satuan kerja Inspektorat Wilayah I		Dokumen	4	5	6	7	8	9							
SK.3.2115.3 Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pada satuan kerja																
IKSK.3.2115.3.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah I yang dievaluasi PMPRB		Satker	NA	76	77	79	80	82							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.3.2115.3.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah I yang dievaluasi PMPZI		Satker	14	18	20	22	24	26							
IKSK.3.2115.3.3	Jumlah Satuan organisasi/satuan kerja Inspektorat Wilayah I yang dilakukan audit kinerja		Satker	80	89	91	93	95	97							
IKSK.3.2115.3.4	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah I yang dievaluasi akuntabilitas kinerja		Satker	3	4	5	6	7	8							
IKSK.3.2115.3.5	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan satuan kerja Inspektorat Wilayah I		Dokumen	5	6	7	8	9	10							
2116-Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah II										10,922	11,469	12,042	12,644	13,276	Inspektorat Wilayah II	
SK.3.2116.1 Meningkatnya pengawasan atas pengelolaan keuangan																
IKSK.3.2116.1.1	Persentase hasil revidi laporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah II yang ditindak lanjuti		%	73.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00							
IKSK.3.2116.1.2	Nilai materialitas temuan keuangan pada satuan kerja Inspektorat Wilayah II		%	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05							
IKSK.3.2116.1.3	Persentase hasil revidi pengendalian intern pelaporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah II yang ditindaklanjuti		%	NA	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00							
SK.3.2116.2 Meningkatnya kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko																
IKSK.3.2116.2.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah II yang dievaluasi pengendalian intern		Satker	NA	7	8	9	10	11							
IKSK.3.2116.2.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah II yang dievaluasi manajemen risiko		Satker	NA	7	8	9	10	11							
IKSK.3.2116.2.3	Jumlah hasil pengawasan atas proyek strategis satuan kerja Inspektorat Wilayah II		Dokumen	4	5	6	7	8	9							
SK.3.2116.3 Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi pada satuan kerja																
IKSK.3.2116.3.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah II yang dievaluasi PMPRB		Satker	NA	76	77	79	80	82							
IKSK.3.2116.3.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah II yang dievaluasi PMPZI		Satker	12	15	17	18	20	21							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.3.2116.3.3	Jumlah Satuan organisasi/ satuan kerja Inspektorat Wilayah II yang dilakukan audit kinerja		Satker	75	80	82	84	86	88							
IKSK.3.2116.3.4	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah II yang dievaluasi akuntabilitas kinerja		Satker	3	4	5	6	7	8							
IKSK.3.2116.3.5	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan satuan kerja Inspektorat Wilayah II		Dokumen	5	7	8	9	10	11							
2117-Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah III										11,151	11,708	12,293	12,908	13,554	Inspektorat Wilayah III	
SK.3.2117.1 Meningkatkan pengawasan atas pengelolaan keuangan																
IKSK.3.2117.1.1	Persentase hasil revidu laporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah III yang ditindak lanjuti		%	73.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00							
IKSK.3.2117.1.2	Nilai materialitas temuan keuangan pada satuan kerja Inspektorat Wilayah III		%	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05							
IKSK.3.2117.1.3	Persentase hasil revidu pengendalian intern pelaporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti		%	NA	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00							
SK.3.2117.2 Meningkatkan kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko																
IKSK.3.2117.2.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah III yang dievaluasi pengendalian intern		Satker	NA	7	8	9	10	11							
IKSK.3.2117.2.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah III yang dievaluasi manajemen risiko		Satker	NA	7	8	9	10	11							
IKSK.3.2117.2.3	Jumlah hasil pengawasan atas proyek strategis satuan kerja Inspektorat Wilayah III		Dokumen	4,00	5	6	7	8	9							
SK.3.2117.3 Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pada satuan kerja																
IKSK.3.2117.3.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah III yang dievaluasi PMPRB		Satker	NA	76	77	79	80	82							
IKSK.3.2117.3.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah III yang dievaluasi PMPZI		Satker	3	15	17	18	20	21							
IKSK.3.2117.3.3	Jumlah Satuan organisasi/ satuan kerja Inspektorat Wilayah III yang dilakukan audit kinerja		Satker	78	89	91	93	95	97							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.3.2117.3.4	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah III yang dievaluasi akuntabilitas kinerja		Satker	3	7	8	9	10	11							
IKSK.3.2117.3.5	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan satuan kerja Inspektorat Wilayah III		Dokumen	5	7	8	9	10	11							
2118-Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah IV										10,279	10,793	11,333	11,899	12,494	Inspektorat Wilayah IV	
SK.3.2118.1 Meningkatkan pengawasan atas pengelolaan keuangan																
IKSK.3.2118.1.1	Persentase hasil revidi laporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah IV yang ditindak lanjuti		%	73.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00							
IKSK.3.2118.1.2	Nilai materialitas temuan keuangan pada satuan kerja Inspektorat Wilayah IV		%	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05							
IKSK.3.2118.1.3	Persentase hasil revidi pengendalian intern pelaporan keuangan pada satuan kerja di Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti		%	NA	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00							
SK.3.2118.2 Meningkatkan kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko																
IKSK.3.2118.2.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah IV yang dievaluasi pengendalian intern		Satker	NA	7	8	9	10	11							
IKSK.3.2118.2.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah IV yang dievaluasi manajemen risiko		Satker	NA	7	8	9	10	11							
IKSK.3.2118.2.3	Jumlah hasil pengawasan atas proyek strategis satuan kerja Inspektorat Wilayah IV		Dokumen	NA	5	6	7	8	9							
SK.3.2118.3 Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pada satuan kerja																
IKSK.3.2118.3.1	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah IV yang dievaluasi PMPRB		Satker	NA	76	77	79	80	82							
IKSK.3.2118.3.2	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah IV yang dievaluasi PMPZI		Satker	12	15	17	18	20	21							
IKSK.3.2118.3.3	Jumlah Satuan organisasi/satuan kerja Inspektorat Wilayah IV yang dilakukan audit kinerja		Satker	78	80	82	84	86	88							
IKSK.3.2118.3.4	Jumlah satuan kerja Inspektorat Wilayah IV yang dievaluasi akuntabilitas kinerja		Satker	3	7	8	9	10	11							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.3.2118.3.5	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan satuan kerja Inspektorat Wilayah IV		Dokumen	5	7	8	9	10	11							
2119-Pengawasan Fungsional Inspektorat Investigasi										7,936	8,333	8,750	9,187	9,646	Inspektorat Investigasi	
SK.3.2119.1 Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat dan laporan <i>whistle blowing system</i>																
IKSK.3.2119.1.1	Jumlah laporan hasil audit investigasi atas pengaduan masyarakat		Dokumen	62	66	74	82	90	98							
IKSK.3.2119.1.2	Jumlah laporan <i>whistle blowing system</i> yang ditindaklanjuti		Dokumen	35	39	44	51	57	64							
IKSK.3.2119.1.3	Jumlah laporan hasil audit dengan tujuan tertentu (tematik)		Dokumen	9	10	12	14	16	18							
2120-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya										70,536	74,063	77,766	81,654	85,737	Sekretariat Inspektorat Jenderal	
SK.3.2120.1 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal																
IKSK.3.2120.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
SK.3.2120.2 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi																
IKSK.3.2120.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	NA	95.00	96.00	97.00	98.00	100.00							
IKSK.3.2120.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	80.00	85.00	90.00	93.00	96.00	100.00							
SK.3.2120.3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja																
IKSK.3.2120.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	NA	90.00	93.00	95.00	97.00	100.00							
IKSK.3.2120.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja		%	94.57	94.90	95.23	95.56	95.89	96.22							
IKSK.3.2120.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	NA	95.00	96.00	97.00	98.00	100.00							
SK.3.2120.4 Meningkatnya kematangan pengendalian intern																
IKSK.3.2120.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	90.00	93.00	95.00	97.00	100.00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.3.2120.4.2	Persentase data hasil pengawasan bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	NA	90.00	93.00	95.00	97.00	100.00							
SK.3.2120.5	Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.3.2120.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	90.00	92.00	94.00	96.00	99.00							
IKSK.3.2120.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	NA	75.00	80.00	85.00	95.00	100.00							
025.04-PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA		PUSAT - DAERAH								560,974	1,159,718	1,251,605	1,369,589	1,497,671	Badan Litbang dan Diklat	
SP.4.1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian															
IKSP.4.1.1	Persentase <i>policy paper</i> yang dimanfaatkan		%	NA	80.00	82.00	85.00	87.00	90.00							
IKSP.4.1.2	Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan		%	NA	15.00	18.00	22.00	25.00	30.00							
IKSP.4.1.3	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian		%	80.00	80.00	82.00	85.00	87.00	90.00							
IKSP.4.1.4	Jumlah Publikasi Badan Litbang dan Diklat yang disitasi		Dokumen	NA	3,000	7,000	12,500	19,500	29,500							
IKSP.4.1.5	Jumlah Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)		Dokumen	2	7	17	30	46	65							
SP.4.2	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul															
IKSP.4.2.1	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat		%	NA	13.00	23.50	33.50	44.00	55.00							
IKSP.4.2.2	Jumlah Alumni Pelatihan yang memenuhi standar		Orang	50,000	50,000	110,000	180,000	260,000	350,000							
IKSP.4.2.3	Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat		%	80.00	80.00	82.00	85.00	87.00	90.00							
IKSP.4.2.4	Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan		Nilai	85.00	85.20	85.40	85.60	85.80	86.00							
IKSP.4.2.5	Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO		%	NA	12.50	25.00	50.00	75.00	100.00							
SP.4.3	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan															
IKSP.4.3.1	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an		Nilai	80.30	85.00	85.20	85.40	85.60	85.80							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSP.4.3.2	Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an		Nilai	83.92	85.00	85.20	85.40	85.60	85.80						
IKSP.4.3.3	Jumlah viewer yang memanfaatkan AI-Qur'an Digital Kementerian Agama		Orang	220,000	230,000	470,000	720,000	980,000	1,250,000						
IKSP.4.3.4	Jumlah pengunjung yang memafaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an		Orang	60,000	60,000	125,000	195,000	270,000	350,000						
IKSP.4.3.5	Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan		Nilai	50.00	70.00	72.00	75.00	77.00	79.00						
SP.4.4 Meningkatkan tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel															
IKSP.4.4.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan		%	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00						
IKSP.4.4.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Nilai	83.04	83.10	83.50	83.75	84.00	84.25						
IKSP.4.4.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	81.06	81.10	81.20	81.50	82.00	82.50						
IKSP.4.4.4	Nilai Maturitas SPIP		Nilai	2.90	2.90	3.00	3.05	3.10	3.15						
IKSP.4.4.5	Indeks Profesionalitas ASN		Nilai	NA	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00						
2109-Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an										2,711	19,668	23,374	25,633	28,196	Lajnah Pentashihan Al-Quran
SK.4.2109.1 Mengembangkan tafsir agama dalam konteks budaya															
IKSK.4.2109.1.1	Jumlah buku tafsir agama yang menjelaskan teks keagamaan dalam konteks budaya		Eksemplar	2,000	2,000	4,000	6,000	8,000	10,000						
SK.1.2109.2 Terwujudnya pentashihan master mushaf Al-Qur'an secara cermat, teliti dan cepat															
IKSK.4.2109.2.1	Jumlah naskah Mushaf Al-Qur'an yang ditashih		Naskah	120	120	245	375	520	670						
IKSK.4.2109.2.2	Jumlah SDM Pentashih yang menjadi jabatan Fungsional Pentashih		Orang	NA	NA	15.00	35.00	60.00	90.00						
IKSK.4.2109.2.3	Indeks kepuasan pelayanan tashih Al-Qur'an		Nilai	80.30	85.00	85.20	85.40	85.60	85.80						
IKSK.4.2109.2.4	Jumlah Instansi/ lembaga yang memperoleh manfaat pembinaan pentashihan		Lembaga	3	3	6	10	14	19						
IKSK.4.2109.2.5	Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an		Nilai	80.00	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00						
IKSK.4.2109.2.6	Jumlah penerbit yang menggunakan teks master mushaf Al-Qur'an standar Indonesia terbitan LPMQ		Lembaga	2	2	6	12	20	30						
SK.4.2109.3 Meningkatkan kualitas pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an															
IKSK.4.2109.3.1	Jumlah dokumen pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an yang terkait moderasi beragama		Dokumen	5	5	11	17	24	32						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.4.2109.3.2	Jumlah masyarakat dan atau penerbit yang memanfaatkan hasil kajian Al-Qur'an		Orang/ Penerbit	336,000	336,000	687,500	1,054,500	1,437,000	1,835,000							
IKSK.4.2109.3.3	Jumlah produk hasil pengembangan yang diterbitkan/dicetak		Dokumen	1,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000							
IKSK.4.2109.3.4	Jumlah Diseminasi hasil kajian alqur'an		Kegiatan	5	7	14	21	28	35							
SK.4.2109.4 Terciptanya inovasi pengembangan hasil kajian																
IKSK.4.2109.4.1	Jumlah inovasi film dokumenter hasil Al-Quran dan tutorial pembelajaran Ulumul Qur'an		Film	2	2	5	9	14	20							
IKSK.4.2109.4.2	Jumlah produk hasil kajian lajnah (versi e-pub) yang dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas tunanetra		Unit	NA	NA	5	10	15	21							
IKSK.4.2109.4.3	Jumlah pengembangan aplikasi Jendela Al-Qur'an digital		Unit	4	5	10	15	20	25							
SK.4.2109.5 Terwujudnya penerbitan hasil pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an tepat waktu																
IKSK.4.2109.5.1	Jumlah Jurnal Shuhuf (Kajian Al-Qur'an)		Dokumen	1,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000							
IKSK.4.2109.5.2	Jumlah cetakan bahan bacaan Tafsir Al-Qur'an		Dokumen	1,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000							
IKSK.4.2109.5.3	Jumlah booklet Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal yang dicetak		Dokumen	600	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000							
SK.4.2109.6 Meningkatnya kualitas pelayanan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal																
IKSK.4.2109.6.1	Nilai Akreditasi Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal		Nilai	NA	NA	B	NA	NA	A							
IKSK.4.2109.6.2	Jumlah pameran dan edukasi terkait moderasi beragama		Kegiatan	5	5	10	16	22	30							
IKSK.4.2109.6.3	Jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal		Orang	60,000	60,000	125,000	195,000	270,000	350,000							
IKSK.4.2109.6.4	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal		Nilai	83.92	85.00	85.20	85.40	85.60	85.80							
2151-Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi										259	51,125	61,128	77,521	93,359	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	
SK.4.2151.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam materi diklat																
IKSK.4.2151.1.1	Persentase Tenaga Administrasi Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat		%	NA	12.00	15.00	18.00	22.00	25.00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.4.2151.2 Meningkatkan kompetensi pegawai Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama															
IKSK.4.2151.2.1	Persentase alumni pelatihan tenaga administrasi yang memenuhi standar kompetensi		%	85.00	85.00	88.00	90.00	92.00	95.00						
IKSK.4.2151.2.2	Jumlah aparatur Kementerian Agama yang selesai mengikuti pelatihan		Orang	3,950	4,050	9,570	16,170	24,540	34,620						
IKSK.4.2151.2.3	Jumlah alumni pelatihan tenaga administrasi melalui e-learning (e-DJJ)		Orang	450	500	1,500	3,000	5,000	7,500						
SK.4.2151.3 Tersedianya pengembangan sistem pelatihan tenaga administrasi yang efektif															
IKK.4.2151.3.1	Indeks kepuasan pengguna produk sistem pelatihan tenaga administrasi		Nilai	85.00	85.50	86.00	86.50	87.00	87.50						
IKK.4.2151.3.2	Jumlah dokumen pengembangan sistem pelatihan tenaga administrasi		Dokumen	40	66	144	234	336	454						
SK.4.2151.4 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi															
IKK.4.2151.4.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan tenaga administrasi		Nilai	87.00	87.40	87.80	88.30	88.60	89.00						
IKK.4.2151.4.2	Indeks kepuasan pengguna pelatihan tenaga administrasi		Nilai	85.00	85.20	85.40	85.60	85.80	86.00						
IKK.4.2151.4.3	Indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga administrasi		Nilai	85.00	85.20	85.40	85.60	85.80	86.00						
IKK.4.2151.4.4	Jumlah lembaga pelatihan memperoleh akreditasi A untuk pelatihan PIM III		Lembaga	NA	NA	1	NA	NA	NA						
IKK.4.2151.4.5	Jumlah Balai Diklat Keagamaan yang mendapatkan akreditasi A untuk pelatihan PIM IV		Satker	3	5	9	12	13	14						
IKK.4.2151.4.6	Jumlah Balai Diklat Keagamaan yang mendapatkan akreditasi A untuk Pelatihan Dasar (Latsar)		Satker	3	5	9	12	13	14						
IKK.4.2151.4.7	Persentase Lembaga pelatihan memperoleh akreditasi Barang dan Jasa		%	20.00	20.00	26.67	33.33	40.00	46.67						
IKK.4.2151.4.8	Rerata nilai mutu pelatihan tenaga administrasi		Nilai	3.40	3.47	3.50	3.53	3.56	3.59						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2152-Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan									290	89,786	100,888	107,786	118,565	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan	
SK.4.2152.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam materi diklat															
IKSK.4.2152.1.1	Persentase tenaga teknis keagamaan Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat		%	NA	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00						
SK.4.2152.2 Meningkatnya kompetensi pegawai Tenaga Keagamaan pada Kementerian Agama															
IKSK.4.2152.2.1	Persentase alumni pelatihan tenaga teknis keagamaan yang memenuhi standar kompetensi		%	75,00	75,00	78,00	80,00	82,00	85,00						
IKSK.4.2152.2.2	Jumlah aparatur Kementerian Agama yang selesai mengikuti pelatihan		Orang	20,000	21,870	46,860	74,940	104,940	137,940						
IKSK.4.2152.2.3	Jumlah alumni pelatihan tenaga teknis Keagamaan melalui e-learning (e-DJU)		Orang	NA	1,000	3,000	6,000	10,000	15,000						
SK.4.2152.3 Tersedianya pengembangan sistem pelatihan tenaga teknis keagamaan yang efektif															
IKSK.4.2152.3.1	Indeks kepuasan pengguna produk sistem pelatihan tenaga teknis Keagamaan		Nilai	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
IKSK.4.2152.3.2	Jumlah dokumen pengembangan sistem kediklatan tenaga teknis Keagamaan		Dokumen	40	108	228	360	508	668						
SK.4.2152.4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga teknis Keagamaan															
IKSK.4.2152.4.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan tenaga teknis Keagamaan		Nilai	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
IKSK.4.2152.4.2	Indeks kepuasan pengguna pelatihan tenaga teknis Keagamaan		Nilai	75,00	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00						
IKSK.4.2152.4.3	Indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga teknis Keagamaan		Nilai	85,00	85,20	85,40	85,60	85,80	86,00						
IKSK.4.2152.4.4	Rerata nilai mutu diklat tenaga teknis keagamaan		Nilai	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
2153-Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan									5,280	38,271	46,474	56,756	62,322	Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	
SK.4.2153.1 Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan bidang bimas agama dan layanan keagamaan															
IKSK.4.2153.1.1	Jumlah penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)		Dokumen	5	5	12	21	32	45						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.4.2153.1.2	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
IKSK.4.2153.1.3	Jumlah sitasi atas publikasi Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan		Dokumen	618	868	959	1,050	1,141	1,232							
IKSK.4.2153.1.4	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI		Dokumen	2	2	4	6	8	10							
IKSK.4.2153.1.5	Jumlah artikel hasil penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi		Dokumen	2	2	4	6	8	10							
IKSK.4.2153.1.6	Persentase penelitian bimas agama dan layanan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2		%	30.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00							
IKSK.4.2153.1.7	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
2154-Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi										1,050	15,785	17,454	20,584	22,212	Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	
SK.4.2154.1 Meningkatkan kualitas hasil penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi																
IKSK.4.2154.1.1	Jumlah penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang menghasilkan naskah kebijakan (<i>policy paper</i>)		Dokumen	2	4	10	18	28	40							
IKSK.4.2154.1.2	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
IKSK.4.2154.1.3	Jumlah sitasi atas publikasi penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi		Dokumen	86	259	291	330	369	408							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.4.2154.1.4	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang layak diajukan memperoleh HAKI		Dokumen	1	1	3	5	7	9							
IKSK.4.2154.1.5	Jumlah artikel hasil penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi		Dokumen	1	1	3	5	7	9							
IKSK.4.2154.1.6	Persentase penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2		%	11,00	30,00	35,00	40,00	45,00	55,00							
IKSK.4.2154.1.7	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
SK.4.2154.2 Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama																
IKSK.4.2154.2.1	Persentase literasi khazanah budaya bernafas agama yang dihasilkan dan mudah diakses		%	20,00	26,60	27,30	28,30	29,00	30,00							
2155-Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan										23.762	43.595	49.595	59.073	68.231	Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	
SK.4.2155.1 Meningkatnya kualitas hasil penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan																
IKSK.4.2155.1.1	Jumlah penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (<i>policy paper</i>)		Dokumen	NA	7	16	27	40	55							
IKSK.4.2155.1.2	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
IKSK.4.2155.1.3	Jumlah sitasi atas publikasi penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan		Dokumen	395	500	588	676	764	852							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.4.2155.1.4	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI		Dokumen	2	2	6	12	20	30							
IKSK.4.2155.1.5	Jumlah artikel hasil penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi		Dokumen	2	2	6	12	20	30							
IKSK.4.2155.1.6	Persentase penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2		%	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00							
IKSK.4.2155.1.7	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
2156-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat										241,055	566,656	594,989	639,613	703,574	Sekretariat Badan Litbang dan Diklat	
SK.4.2156.1 Meningkatkan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal																
IKSK.4.2156.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	60.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00							
SK.4.2156.2 Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi																
IKSK.4.2156.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	70.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00							
IKSK.4.2156.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	90.00	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00							
SK.4.2156.3 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja																
IKSK.4.2156.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
IKSK.4.2156.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	95.00	95.00	95.30	95.50	95.70	96.00							
IKSK.4.2156.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	20.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.4.2156.4 Meningkatkan kematangan pengendalian intern															
IKSK.4.2156.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00						
IKSK.4.2156.4.2	Persentase data agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	20.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00						
SK.4.2156.5 Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.4.2156.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	83.00	84.00	87.00	92.00	95.00	98.00						
IKSK.4.2156.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	70.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00						
2219-Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan										84,988	118,785	130,291	141,621	148,702	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi
SK.4.2219.1 Meningkatnya kompetensi pegawai administrasi di Lembaga Pendidikan Kementerian Agama															
IKSK.4.2219.1.1	Jumlah aparatur di Lembaga Pendidikan Kementerian Agama yang selesai mengikuti Diklat		Orang	17,350	17,520	37,650	59,730	83,730	108,930						
IKSK.4.2219.1.2	Persentase alumni diklat administrasi di lembaga pendidikan Kementerian Agama yang memenuhi standar kompetensi		%	85.00	85.00	88.00	90.00	92.00	95.00						
5109-Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan										161,261	190,426	197,271	204,237	212,182	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan
SK.4.5109.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam materi diklat															
IKSK.4.5109.1.1	Persentase Tenaga Teknis Pendidikan Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat		%	NA	15.00	30.00	45.00	60.00	75.00						
SK.4.5109.2 Meningkatnya kompetensi pegawai Tenaga Pendidikan pada Kementerian Agama															
IKSK.4.5109.2.1	Persentase alumni pelatihan tenaga teknis pendidikan yang memenuhi standar kompetensi		%	75.00	75.00	78.00	80.00	82.00	85.00						
IKSK.4.5109.2.2	Jumlah tenaga pendidik/dosen dan tenaga kependidikan pada Kementerian Agama yang selesai mengikuti pelatihan		Orang	28,500	44,190	90,930	139,350	189,480	241,560						
IKSK.4.5109.2.3	Jumlah alumni pelatihan tenaga teknis pendidikan melalui <i>e-learning</i> (e-DJJ)		Orang	NA	4,000	9,000	15,000	22,000	30,000						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.4.5109.3 Tersedianya pengembangan sistem pelatihan tenaga teknis pendidikan yang efektif															
IKSK.4.5109.3.1	Indeks kepuasan pengguna produk sistem pelatihan tenaga teknis pendidikan		Nilai	83.75	85.00	88.00	90.00	92.00	95.00						
IKSK.4.5109.3.2	Jumlah dokumen pengembangan sistem kediklatan tenaga teknis pendidikan		Dokumen	100	108	228	360	508	668						
SK.4.5109.4 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga teknis pendidikan															
IKSK.4.5109.4.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan tenaga teknis pendidikan		Nilai	80.00	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00						
IKSK.4.5109.4.2	Indeks kepuasan pengguna pelatihan tenaga teknis pendidikan		Nilai	75.00	76.00	78.00	80.00	82.00	84.00						
IKSK.4.5109.4.3	Indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga teknis pendidikan		Nilai	85.00	85.20	85.40	85.60	85.80	86.00						
IKSK.4.5109.4.4	Rerata nilai mutu diklat tenaga teknis pendidikan		Nilai	80.00	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00						
5311-Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan										40,318	25,623	30,142	36,764	40,329	Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan
SK.4.5311.1 Meningkatkan kualitas hasil penelitian bidang Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan															
IKSK.4.5311.1.1	Jumlah penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (<i>policy paper</i>)		Dokumen	5	6	14	24	36	50						
IKSK.4.5311.1.2	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.4.5311.1.3	Jumlah sitasi atas publikasi penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan		Dokumen	73	200	235	276	317	358						
IKSK.4.5311.1.4	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI		Dokumen	1	1	3	6	10	15						
IKSK.4.5311.1.5	Jumlah artikel hasil penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi		Dokumen	1	1	3	6	10	15						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.4.5311.6	Persentase penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2		%	11.00	30.00	35.00	40.00	45.00	55.00							
IKSK.4.5311.7	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
SK.4.5311.2 Meningkatkan kualitas layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan																
IKSK.4.5311.2.1	Tingkat kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan		Nilai	50.00	70.00	72.00	75.00	77.00	80.00							
IKSK.4.5311.2.2	Jumlah buku pendidikan agama dan keagamaan yang dilakukan penilaian		Eksemplar	283	310	650	1,020	1,420	1,850							
025.06-PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH		PUSAT - DAERAH								1,554,866	1,865,840	1,903,156	1,941,219	1,980,044	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	
SP.6.1 Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel																
IKSP.6.1.1	Persentase jemaah haji yang diberangkatkan dari kuota		%	99.40	99.50	99.55	99.60	99.65	99.70							
IKSP.6.1.2	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar		%	84.47	85.00	85.50	86.00	86.50	87.00							
IKSP.6.1.3	Rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jemaah haji		Nilai	1 : 36	1 : 35	1 : 33	1 : 32	1 : 31	1 : 30							
IKSP.6.1.4	Persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji		%	1.05	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50							
SP.6.2 Menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar																
IKSP.6.2.1	Persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi		%	94.97	95.00	95.20	95.50	95.80	96.00							
IKSP.6.2.2	Persentase lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi		%	77.08	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00							
SP.6.3 Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen PHU yang efektif dan akuntabel																
IKSP.6.3.1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan		%	70.00	73.00	75.00	80.00	85.00	90.00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSP.6.3.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Nilai	74.60	74.80	75.00	75.25	75.50	76.00						
IKSP.6.3.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	75.36	75.50	75.70	76.00	76.25	76.50						
IKSP.6.3.4	Nilai Maturitas SPIP		Nilai	2.10	2.50	2.70	2.80	2.90	3.00						
IKSP.6.3.5	Indeks Profesionalitas ASN		Nilai	NA	70.00	73.00	76.00	78.00	80.00						
2126-Pembinaan Umrah dan Haji Khusus										5,646	6,775	6,910	7,049	7,190	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus
SK.6.2126.1 Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus															
IKSK.6.2126.1.1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi		%	75.00	78.00	78.50	89.00	90.00	95.00						
IKSK.6.2126.1.2	Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi		%	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00						
2147-Pelayanan Haji Dalam Negeri										507,740	609,288	621,474	633,903	646,581	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri
SK.6.2147.1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji															
IKSK.6.2147.1.1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan		%	3.19	11.16	19.52	30.88	42.23	51.59						
IKSK.6.2147.1.2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan		%	0.60	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30						
SK.6.2147.2 Meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji															
IKSK.6.2147.2.1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan		%	15.00	17.00	21.00	24.00	27.00	30.00						
IKSK.6.2147.2.2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu		%	80.34	85.00	85.50	86.00	87.00	87.50						
2148-Pembinaan Haji										192,432	230,918	235,536	240,247	245,052	Direktorat Bina Haji
SK.6.2148.1 Meningkatkan kualitas pembinaan jemaah haji															
IKSK.6.2148.1.1	Persentase petugas haji yang profesional		%	87.66	87.70	87.75	87.80	87.85	88.00						
IKSK.6.2148.1.2	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji		%	94.50	95.00	95.50	95.75	96.00	96.50						
IKSK.6.2148.1.3	Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan		%	70.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00						
IKSK.6.2148.1.4	Jumlah advokasi haji yang terselenggara		Kegiatan	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00						
IKSK.6.2148.1.5	Persentase pembimbing haji yang bersertifikat		%	82.71	83.33	83.54	85.53	87.50	88.89						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2149-Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu									28,171	33,805	34,481	35,170	35,874	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	
SK.6.2149.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel															
IKSK.6.2149.1.1	Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji		%	92.00	92.00	93.00	94.00	94.50	95.00						
SK.6.2149.2 Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu															
IKSK.6.2149.2.1	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)		%	90.00	93.00	94.00	96.00	97.00	99.00						
IKSK.6.2149.2.2	Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji		Nilai	NA	70.00	72.00	75.00	77.00	80.00						
2150-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah									591.037	709.244	723.429	737.898	752.656	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	
SK.6.2150.1 Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.6.2150.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	NA	80.00	81.00	81.50	82.00	84.00						
SK.6.2150.2 Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.6.2150.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	NA	85.00	86.00	87.00	88.00	90.00						
IKSK.6.2150.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	80.00	80.00	85.00	90.00	90.00	95.00						
SK.6.2150.3 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.6.2150.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	70.00	70.00	71.00	72.00	73.00	75.00						
IKSK.6.2150.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	91.00	92.00	92.50	93.00	93.50	94.00						
IKSK.6.2150.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	NA	85.00	86.00	87.00	88.00	90.00						
SK.6.2150.4 Meningkatkan kematangan pengendalian intern															
IKSK.6.2150.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	70.00	75.00	75.00	80.00	80.00						
IKSK.6.2150.4.2	Persentase data agama yang komprehensif, valid dan reliabel		%	80.00	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK.6.2150.5 Meningkatkan ASN yang profesional																
IKSK.6.2150.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	70.00	73.00	75.00	77.00	78.00							
IKSK.6.2150.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	NA	75.00	77.00	78.00	80.00	82.00							
5107-Pelayanan Atase Haji di Jeddah										221,767	266,121	271,443	276,872	282,410	Atase Haji Jeddah	
SK.6.5107.1 Meningkatkan kualitas pelayanan Atase di Jeddah																
IKSK.6.5107.1.1	Persentase petugas haji tenaga musiman yang profesional		%	87.66	87.70	87.75	87.80	87.85	88.00							
5310-Pelayanan Haji Luar Negeri										8,074	9,689	9,882	10,080	10,282	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	
SK.6.5310.1 Meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji di Arab Saudi																
IKSK.6.5310.1.1	Persentase jemaah haji yang mendapatkan akomodasi sesuai standar		%	82.00	83.00	83.50	84.00	84.50	85.00							
IKSK.6.5310.1.2	Persentase jemaah haji yang mendapatkan konsumsi sesuai standar		%	86.00	86.20	86.50	86.70	86.80	87.00							
IKSK.6.5310.1.3	Persentase jemaah haji yang mendapatkan transportasi sesuai standar		%	85.00	85.50	85.75	86.00	86.50	87.00							
025.07-PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM										51,454,930	55,504,976	58,398,794	61,255,012	64,093,048	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	
SP.7.1 Menguatnya sistem pendidikan yang berspektif moderat																
IKSP.7.1.1	Rerata nilai UASBN/UMBN /Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama		Nilai	51.00	52.00	53.00	55.00	57.00	59.00							
IKSP.7.1.2	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKI/PTU yang bermuatan moderasi beragama		Nilai	60.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00							
IKSP.7.1.3	Persentase pemahaman moderasi beragama pada mahasiswa Strata Satu PTKI		%	70.00	75.00	78.00	79.00	80.00	82.00							
SP.7.2 Meningkatkan kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa																
IKSP.7.1.1	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi		Nilai	Literasi 397,00, Numerasi 386,00	Literasi 400,12 Numerasi 388,16	Literasi 403,24 Numerasi 390,32	Literasi 406,36 Numerasi 392,48	Literasi 409,48 Numerasi 394,64	Literasi 412,60 Numerasi 396,80							
IKSP.7.1.2	Rerata nilai asesmen siswa dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA		Nilai	Membaca 397,00, Matemati- ka 386,00 Sains 403,00	NA Membaca 403,24 Matemati- ka 390,32 Sains 392,00	NA Membaca 403,24 Matemati- ka 390,32 Sains 392,00	NA Membaca 403,24 Matemati- ka 390,32 Sains 392,00	NA Membaca 403,24 Matemati- ka 390,32 Sains 392,00	Membaca 412,60 Matemati- ka 396,80 Sains 418,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP.7.3 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan															
IKSP.7.3.1	Persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik		%	48.00	48.00	53.00	60.00	65.00	70.00						
IKSP.7.3.2	Persentase dosen bersertifikat pendidik		%	81.00	82.30	85.00	86.00	87.00	88.00						
IKSP.7.3.3	Persentase dosen berkualifikasi S3		%	14.00	19.00	30.00	35.00	40.00	50.00						
SP.7.4 Meningkatkan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan															
IKSP.7.4.1	Persentase peningkatan siswa pada RA		%	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75						
IKSP.7.4.2	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula		%	0.75	0.85	1.00	1.15	1.30	1.50						
IKSP.7.4.3	Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha		%	1.00	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50						
IKSP.7.4.4	Persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK)		%	0.75	0.85	1.00	1.15	1.30	1.50						
IKSP.7.4.5	Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya		%	1.00	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50						
IKSP.7.4.6	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKI/ Ma'had Aly		%	2.00	3.50	4.00	5.00	6.50	7.00						
SP.7.5 Meningkatkan jumlah guru yang memenuhi SNP															
IKSP.7.5.1	Persentase Provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang		%	4.75	5.00	7.00	10.00	15.00	25.00						
SP.7.6 Meningkatkan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan															
IKSP.7.6.1	Persentase Madrasah/PDF yang memenuhi 8 SNP		%	69.00	70.00	73.00	74.00	75.00	80.00						
IKSP.7.6.2	Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul		%	9.42	10.50	13.00	15.00	17.00	19.00						
IKSP.7.6.3	Persentase Madrasah/ Pendidikan Keagamaan yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan		%	NA	NA	20.00	30.00	50.00	70.00						
IKSP.7.6.4	Persentase PTKI yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan		%	17.00	20.00	25.00	50.00	60.00	70.00						
SP.7.7 Menguatnya pendidikan karakter siswa															
IKSP.7.7.1	Persentase siswa Madrasah/PDF yang memperoleh nilai karakter minimal baik		%	NA	50.00	55.00	57.00	60.00	65.00						
SP.7.8 Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi berbasis kerja sama dengan dunia kerja/industri															
IKSP.7.8.1	Persentase MA Kejuruan/ MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri		%	45.00	50.00	55.00	60.00	70.00	80.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSP.7.8.2	Persentase Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri		%	30.00	35.00	37.00	40.00	45.00	50.00						
SP.7.9 Meningkatkan kualitas PTKI yang bereputasi internasional															
IKSP.7.9.1	Persentase PTKI yang memperoleh peringkat reputasi internasional		%	0.05	0.20	0.30	0.50	0.75	1.00						
IKSP.7.9.2	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTKI		%	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75						
SP.7.10 Meningkatkan kualitas lulusan PTKI yang diterima di dunia kerja															
IKSP.7.10.1	Persentase PTKI yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan		%	20.00	22.00	25.00	30.00	35.00	40.00						
IKSP.7.10.2	Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK														
	a. S1		Nilai	NA	2.65	2.65	2.70	2.75	2.75						
	b. S2		Nilai	NA	3.15	3.20	3.25	3.25	3.25						
	c. S3		Nilai	NA	3.40	3.40	3.45	3.45	3.50						
IKSP.7.10.3	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan		Bulan	30	24	17	15	12	8						
SP.7.11 Meningkatkan kualitas pemanfaatan penelitian															
IKSP.7.11.1	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional		%	30.00	40.00	42.00	43.00	45.00	46.00						
SP.7.12 Meningkatkan tata kelola organisasi Ditjen Pendidikan Islam yang efektif dan akuntabel															
IKSP.7.12.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan		%	70.00	73.00	75.00	78.00	80.00	82.00						
IKSP.7.12.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Nilai	83.00	85.00	87.00	88.00	89.00	90.00						
IKSP.7.12.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	75.00	76.00	80.00	85.00	86.00	90.00						
IKSP.7.12.4	Nilai Maturitas SPIP		Nilai	3.00	3.10	3.40	3.60	3.80	4.00						
IKSP.7.12.5	Indeks Profesionalitas ASN		Nilai	NA	76.00	78.00	80.00	81.00	82.00						
2127-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam										4,690,343	5,036,373	5,294,617	5,565,048	5,848,275	Direktorat Pendidikan Agama Islam
SK.7.2127.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran/mata kuliah agama															
IKSK.7.2127.1.1	Persentase siswa muslim di sekolah yang memperoleh Pendidikan Agama Islam bermuatan moderasi beragama		%	47.00	50.00	55.00	60.00	70.00	75.00						
IKSK.7.2127.1.2	Persentase guru Pendidikan Agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.2127.1.3	Persentase pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00						
IKSK.7.2127.1.4	Persentase mahasiswa muslim di PTU, memperoleh Pendidikan Agama Islam yang bermuatan moderasi beragama		%	NA	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00						
IKSK.7.2127.1.5	Persentase dosen Pendidikan Agama Islam di PTU yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00						
SK.7.2127.2 Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan															
IKSK.7.2127.2.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	50.00	55.00	57.00	60.00	65.00	70.00						
IKSK.7.2127.2.2	Persentase dosen Pendidikan Agama Islam pada PTU yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	2.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00						
SK.7.2127.3 Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan															
IKSK.7.2127.3.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	46.50	47.78	48.53	49.28	50.03	50.78						
SK.7.2127.4 Meningkatkan kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik															
IKSK.7.2127.4.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang mengikuti PPG		%	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00						
IKSK.7.2127.4.2	Persentase guru Pendidikan Agama Islam berkualifikasi minimal S1		%	77.50	78.00	80.00	81.00	82.00	85.00						
SK.7.2127.5 Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan															
IKSK.7.2127.5.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Daerah Khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus		%	90.00	92.00	93.00	94.00	95.00	97.00						
SK.7.2127.6 Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan															
IKSK.7.2127.6.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama		%	NA	40.00	47.00	49.00	50.00	52.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.7.2127.6.2	Persentase pengawas Pendidikan Agama Islam yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama		%	NA	20.00	25.00	27.00	29.00	31.00							
2128-Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam										504,435	1,486,460	1,840,410	1,983,760	2,126,210	Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	
SK.7.2128.1 Menguatnya peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama																
IKSK.7.2128.1.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat		%	NA	80.00	95.00	97.00	98.00	100.00							
IKSK.7.2128.1.2	Persentase peningkatan peserta Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an		%	2.00	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00							
SK.7.2128.2 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama																
IKSK.7.2128.2.1	Persentase mahasiswa Ma'had Aly yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00							
IKSK.7.2128.2.2	Persentase dosen Ma'had Aly yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	10.00	15.00	17.00	19.00	20.00							
SK.7.2128.3 Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir																
IKSK.7.2128.3.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	85.00	87.00	88.00	89.00	90.00	92.00							
SK.7.2128.4 Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif																
IKSK.7.2128.4.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	NA	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00							
SK.7.2128.5 Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan																
IKSK.7.2128.5.1	Persentase ustadz pada pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi		%	85.00	87.00	88.00	89.00	90.00	92.00							
IKSK.7.2128.5.2	Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	3.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00							
IKSK.7.2128.5.3	Persentase Kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	NA	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.2128.5.4	Persentase ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP Pola PKB dan AKG		%	NA	5.00	15.00	20.00	25.00	30.00						
IKSK.7.2128.5.5	Persentase dosen Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	3.00	4.00	5.00	7.00	10.00	12.00						
IKSK.7.2128.5.6	Persentase tenaga kependidikan Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	1.00	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00						
SK.7.2128.6	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.7.2128.6.1	Persentase ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	46.71	47.78	48.53	49.28	50.03	50.78						
SK.5.2128.7	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran														
IKSK.7.2128.7.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	NA	0.50	2.00	4.00	7.00	8.00						
SK.7.2128.8	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan														
IKSK.7.2128.8.1	Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	NA	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00						
IKSK.7.2128.8.2	Persentase Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	NA	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00						
IKSK.7.2128.8.3	Persentase Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	NA	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00						
IKSK.7.2128.8.4	Persentase Pendidikan Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	NA	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00						
IKSK.7.2128.8.5	Persentase Mahad Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi		%	NA	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00						
SK.7.2128.9	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat														
IKSK.7.2128.9.1	Jumlah siswa penerima BOS pada pendidikan diniyah/muadalah		Orang	160,619	160,619	200,000	215,000	220,000	225,000						
IKSK.7.2128.9.2	Persentase Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional		%	6.00	4.00	9.00	11.00	13.00	15.00						
IKSK.7.2128.9.3	Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan diniyah/muadalah		%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.7.2128.10	Meningkatnya jumlah Anak Tidak Sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan		%	35.00	37.00	38.00	39.00	40.00	43.00						
IKSK.7.2128.10.1	Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pesantren		%	35.00	37.00	38.00	39.00	40.00	43.00						
SK.7.2128.11	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik		%	7.00	7.00	10.00	20.00	30.00	50.00						
IKSK.7.2128.11.1	Persentase Ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang mengikuti PPG		%	7.00	7.00	10.00	20.00	30.00	50.00						
IKSK.7.2128.11.2	Persentase Ustadz pendidikan diniyah/ muadalah berkualifikasi minimal S1		%	20.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00						
SK.7.2128.12	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi		Lembaga	NA	NA	500	1,000	2,000	4,000						
IKSK.7.2128.12.1	Jumlah Pendidikan keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	NA	NA	500	1,000	2,000	4,000						
SK.7.2128.13	Meningkatnya budaya mutu pendidikan		%	NA	NA	50.00	60.00	80.00	100.00						
IKSK.7.2128.13.1	Persentase lembaga pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan budaya mutu		%	NA	NA	50.00	60.00	80.00	100.00						
IKSK.7.2128.13.2	Persentase santri pendidikan diniyah/ muadalah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	NA	NA	2.00	2.00	2.00	3.00						
IKSK.7.2128.13.3	Persentase Ma'had Aly yang menerapkan budaya mutu		%	10.00	15.00	17.00	20.00	24.00	28.00						
IKSK.7.2128.13.4	Persentase mahasiswa Ma'had Aly yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	NA	3.00	5.00	6.00	7.00	8.00						
SK.7.2128.14	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan		%	NA	50.00	60.00	70.00	90.00	100.00						
IKSK.7.2128.14.1	Persentase pendidikan diniyah/ muadalah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	NA	50.00	60.00	70.00	90.00	100.00						
IKSK.7.2128.14.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman		%	NA	10.00	40.00	50.00	80.00	100.00						
SK.7.2128.15	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan		Kegiatan	50	NA	50	100	150	150						
IKSK.7.2128.15.1	Jumlah organisasi siswa pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	50	NA	50	100	150	150						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.7.2128.15.2	Jumlah gugus pramuka pada pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina		Unit	50	NA	50	50	50	50							
SK.7.2128.16		Meningkatnya kualitas pendidik vokasi														
IKSK.7.2128.16.1	Jumlah Guru/Instruktur pada Program Ekonomi Kerakyatan di Pesantren yang mengikuti Peningkatan Kompetensi		Orang	NA	20	40	80	120	300							
SK.7.2128.17		Meningkatnya kualitas lulusan Ma'had Aly														
IKSK.7.2128.17.1	Persentase lulusan Ma'had Aly yang tepat waktu		%	78.00	79.00	81.00	83.00	85.00	90.00							
IKSK.7.2128.17.2	Rerata lama masa studi mahasiswa Ma'had Aly		Tahun	4	4	4	4	4	4							
2129-Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah										12,774,863	13,228,331	13,412,437	13,513,874	13,627,825	Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah	
SK.7.2129.1		Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama														
IKSK.7.2129.1.1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	NA	50.00	70.00	80.00	90.00	100.00							
IKSK.7.2129.1.2	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	2,000	3,000	7,000	8,000	9,000	10,000							
SK.7.2129.2		Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir														
IKSK.7.2129.2.1	Persentase madrasah yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	89.00	90.00	92.00	93.00	95.00	100.00							
SK.7.2129.3		Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif														
IKSK.7.2129.3.1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	74.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00							
SK.7.2129.4		Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.7.2129.4.1	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi		%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
SK.7.2129.5		Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran														
IKSK.7.2129.5.1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	5.00	6.00	10.00	20.00	35.00	50.00							
IKSK.7.2129.5.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	5.00	6.00	10.00	20.00	35.00	50.00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.7.2129.6 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.7.2129.6.1	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	75.00	76.00	78.00	79.00	80.00	83.00						
IKSK.7.2129.6.2	Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	78.00	79.00	81.00	82.00	84.00	85.00						
IKSK.7.2129.6.3	Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00						
IKSK.7.2129.6.4	Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	81.00	84.00	87.00	89.00	91.00	93.00						
IKSK.7.2129.6.5	Persentase Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	65.00	66.00	67.00	68.00	69.00	70.00						
SK.7.2129.7 Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat															
IKSK.7.2129.7.1	Jumlah siswa MI penerima BOS		Orang	3,894,365	3,894,365	3,972,252	4,051,697	4,092,214	4,133,136						
IKSK.7.2129.7.2	Jumlah siswa MTs penerima BOS		Orang	3,358,773	3,358,773	3,425,948	3,494,467	3,529,412	3,564,706						
IKSK.7.2129.7.3	Jumlah siswa MA penerima BOS		Orang	1,495,294	1,495,294	1,525,200	1,555,704	1,571,261	1,586,974						
IKSK.7.2129.7.4	Persentase siswa MI penerima PIP		%	22.00	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50						
IKSK.7.2129.7.5	Persentase siswa MTs penerima PIP		%	25.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00						
IKSK.7.2129.7.6	Persentase siswa MA penerima PIP		%	21.00	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50						
IKSK.7.2129.7.7	Jumlah Madrasah yang didirikan di daerah afirmasi		Lembaga	NA	50	75	80	90	100						
SK.7.2129.8 Meningkatkan jumlah Anak Tidak Sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan															
IKSK.7.2129.8.1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi		%	0.01	0.05	0.10	0.15	0.17	0.20						
SK.7.2129.9 Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah															
IKSK.7.2129.9.1	Jumlah Siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Orang	1,331,207	1,331,207	1,344,519	1,357,964	1,371,543	1,385,258						
SK.7.2129.10 Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi															
IKSK.7.2129.10.1	Jumlah Madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	350	400	1,000	10,000	10,000	10,000						
SK.7.2129.11 Meningkatkan budaya mutu pendidikan															
IKSK.7.2129.11.1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu		%	NA	50.00	70.00	80.00	80.00	90.00						
IKSK.7.2129.11.2	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	3.00	4.00	4.50	4.70	4.90	5.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.7.2129.12	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan		%	NA	20.00	35.00	70.00	100.00	100.00						
IKSK.7.2129.12.1	Persentase Madrasah yang mendapatkan Pelatihan Sistem e-RKAM		%	NA	20.00	35.00	70.00	100.00	100.00						
SK.7.2129.13	Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan		%	NA	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00						
IKSK.7.2129.13.1	Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	NA	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00						
IKSK.7.2129.13.2	Persentase Madrasah Ramah Anak		%	37.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00						
SK.7.2129.14	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan		Kegiatan	NA	500	700	800	900	1,000						
IKSK.7.2129.14.1	Jumlah organisasi siswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	NA	500	700	800	900	1,000						
IKSK.7.2129.14.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina		Unit	NA	725	825	900	970	1,000						
SK.7.2129.15	Menguatnya reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi		%	60.00	70.00	80.00	85.00	87.00	90.00						
IKSK.7.2129.15.1	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan <i>life skill</i> melalui program magang		%	60.00	70.00	80.00	85.00	87.00	90.00						
2132-Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam										6,130,517	6,955,110	8,084,117	9,417,538	10,664,684	Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
SK.7.2132.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama		%	NA	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00						
IKSK.7.2132.1.1	Persentase Mahasiswa yang dibina dalam Moderasi beragama		%	NA	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00						
IKSK.7.2132.1.2	Persentase dosen PTKI yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	10.00	15.00	17.00	19.00	20.00						
SK.7.2132.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif		%	NA	7.00	10.00	12.00	15.00	20.00						
IKSK.7.2132.2.1	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring		%	NA	7.00	10.00	12.00	15.00	20.00						
SK.7.2132.3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan		%	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00						
IKSK.7.2132.3.1	Persentase Dosen PTKI yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00						
IKSK.7.2132.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTKI yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	1.00	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00						
SK.7.2132.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan		%	50.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00						
IKSK.7.2132.4.1	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi		%	50.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.7.2132.5 Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat															
IKSK.7.2132.5.1	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi		%	4.70	5.00	8.00	10.00	13.00	17.00						
IKSK.7.2132.5.2	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA		%	0.40	0.40	0.50	0.70	0.80	1.00						
IKSK.7.2132.5.3	Persentase mahasiswa Penerima Beasiswa Tahfidz pada PTKI		%	0.40	0.40	0.50	0.70	0.80	1.00						
IKSK.7.2132.5.4	Persentase Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi (UP4B)		%	0.40	0.40	0.50	0.70	0.80	1.00						
IKSK.7.2132.5.5	Jumlah mahasiswa asing di PTKI yang menerima beasiswa		Orang	300	300	600	900	900	1,200						
IKSK.7.2132.5.6	Persentase mahasiswa PTKI berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3		%	0.02	0.03	0.04	0.05	0.10	0.15						
IKSK.7.2132.5.7	Jumlah PTKI yang diafirmasi dalam peningkatan status institusi		Lembaga	4	5	7	8	9	10						
SK.7.2132.6 Meningkatkan kualitas LPTK															
IKSK.7.2132.6.1	Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG		%	35.00	35.00	40.00	45.00	50.00	60.00						
IKSK.7.2132.6.2	Persentase LPTK yang terevitalisasi		%	3.00	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00						
SK.7.2132.7 Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi															
IKSK.7.2132.7.1	Jumlah PTKI yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		%	NA	NA	50	70	80	100						
IKSK.7.2132.7.2	Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka		%	NA	3.00	4.00	6.00	8.00	10.00						
SK.7.2132.8 Meningkatkan budaya mutu pendidikan															
IKSK.7.2132.8.1	Persentase PTKI yang menerapkan budaya mutu		%	NA	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00						
IKSK.7.2132.8.2	Persentase mahasiswa PTKI yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30						
IKSK.7.2132.8.3	Persentase Dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional		%	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	10.00						
SK.7.2132.9 Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pada satuan pendidikan															
IKSK.7.2132.9.1	Persentase PTK yang memperoleh pembinaan dalam SPMI		%	30.00	35.00	37.00	39.00	41.00	46.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.7.2132.10															Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan
IKSK.7.2132.10.1	Jumlah PTKN yang berstatus PTKIN BLU dan PTKN-BH		Lembaga	18	19	22	27	31	35						
IKSK.7.2132.10.2	Persentase anggaran PNBP dan PNBP-BLU pada PTKIN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan		%	4.10	5.10	6.00	7.00	9.00	10.00						
IKSK.7.2132.10.3	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN		%	0.01	NA	15.00	17.00	20.00	23.00						
SK.7.2132.11															Meningkatnya Program Studi PTKI Berstandar Internasional
IKSK.5.2132.11.1	Persentase Program Studi PTKI yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional		%	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00						
IKSK.5.2132.11.2	Persentase PTKI yang melakukan kolaborasi internasional		%	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50						
IKSK.5.2132.11.3	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran		%	2.00	3.00	5.00	9.00	10.00	15.00						
IKSK.5.2132.11.4	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi		%	2.10	3.00	5.00	7.00	9.00	11.00						
IKSK.5.2132.11.5	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat		%	2.50	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00						
SK.7.2132.12															Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian
IKSK.5.2132.12.1	Persentase hasil penelitian PTK yang memperoleh HAKI		%	30.00	40.00	42.00	43.00	45.00	46.00						
IKSK.5.2132.12.2	Persentase hasil penelitian PTK yang menghasilkan Hak Paten		%	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00						
SK.7.2132.13															Meningkatnya kualitas lulusan PTKI
IKSK.5.2132.13.1	Persentase lulusan yang tepat waktu		%	78.00	79.00	81.00	83.00	85.00	90.00						
IKSK.5.2132.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa		Tahun	4	4	4	4	4	4						
2133-Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah										10,341,891	11,179,351	11,513,704	11,857,327	12,212,865	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
SK.7.2133.1															Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama
IKSK.7.2133.1.1	Persentase guru madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	4.00	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.2133.1.2	Persentase pengawas madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	6.00	9.28	20.10	20.84	21.65	28.14						
SK.7.2133.2 Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan															
IKSK.7.2133.2.1	Persentase Guru pada Madrasah yang lulus sertifikasi		%	73.00	NA	74.00	75.00	76.00	77.00						
IKSK.7.2133.2.2	Persentase tenaga kependidikan Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	8.00	14.67	17.65	18.31	19.01	24.71						
IKSK.7.2133.2.3	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	0.20	0.51	9.30	9.30	9.30	9.30						
IKSK.7.2133.2.4	Persentase Guru Madrasah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/ MGMP Pola PKB dan AKG		%	0.02	0.04	12.23	12.23	12.23	12.23						
SK.7.2133.3 Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan															
IKSK.7.2133.3.1	Persentase guru Madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	46.50	47.78	48.53	49.28	50.03	50.78						
IKSK.7.2133.3.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Madrasah		Orang	320	98	98	98	98	98						
SK.7.2133.4 Meningkatkan kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik															
IKSK.7.2133.4.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG		%	2.00	2.00	3.00	5.00	7.00	7.00						
IKSK.7.2133.4.2	Persentase Calon Pengawas yang menerima beasiswa S2		%	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50						
SK.7.2133.5 Meningkatkan pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan															
IKSK.7.2133.5.1	Persentase Guru pada Madrasah Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan Khusus		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.7.2133.5.2	Persentase Tenaga Kependidikan Madrasah Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan Khusus		%	NA	NA	50.00	100.00	100.00	100.00						
SK.7.2133.6 Meningkatkan kualitas pendidik vokasi															
IKSK.7.2133.6.1	Jumlah Guru MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi		Orang	20	30	100	150	200	300						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2135-Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam										17,012,881	17,619,351	18,253,509	18,917,465	19,613,189	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
SK.7.2135.1 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.7.2135.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	70.00	73.00	75.00	78.00	80.00	82.00						
SK.7.2135.2 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.7.2135.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	14.00	15.00	20.00	25.00	30.00	37.00						
IKSK.7.2135.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	50.00	52.00	60.00	70.00	80.00	90.00						
SK.7.2135.3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.7.2135.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00						
IKSK.7.2135.3.2	Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	75.00	80.00	83.00	84.00	87.00	88.00						
IKSK.7.2135.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	75.00	85.00	90.00	95.00	97.00	98.00						
SK.7.2135.4 Meningkatnya kematangan pengendalian intern															
IKSK.7.2135.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko audit yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	14.00	15.00	20.00	25.00	30.00	37.00						
IKSK.7.2135.4.2	Persentase data pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00	95.00						
SK.7.2135.5 Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.7.2135.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	75.00	79.00	82.00	85.00	87.00						
IKSK.7.2135.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	84.00	85.00	87.00	89.00	93.00	95.00						
025.08-PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM		PUSAT - DAERAH								5,617,459	6,083,443	6,995,959	8,045,353	9,252,156	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
SP.8.1 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam															
IKSP.8.1.1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam		Nilai	1 : 2	1 : 3	1 : 4	1 : 4	1 : 5	1 : 5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSP.8.1.2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal		%	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
SP.8.2 Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama															
IKSP.8.2.1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan		%	30.00	35.00	35.00	35.00	40.00	40.00						
SP.8.3 Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama															
IKSP.8.3.1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama		Nilai	NA	70.00	75.00	80.00	90.00	95.00						
SP.8.4 Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama															
IKSP.8.4.1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan		%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
SP.8.5 Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan															
IKSP.8.5.1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital		%	79.00	87.00	93.00	94.00	95.00	96.00						
IKSP.8.5.2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran		%	NA	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00						
IKSP.8.5.3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan		%	54.00	59.00	55.00	60.00	56.00	61.00						
SP.8.6 Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf															
IKSP.8.6.1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana zakat		%	4.64	12.40	15.38	19.07	23.64	29.32						
IKSP.8.6.2	Persentase peningkatan wakaf produktif		%	NA	5.71	7.09	8.79	10.89	13.51						
IKSP.8.6.3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf		%	NA	15.00	20.00	20.00	20.00	25.00						
SP.8.7 Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel															
IKSP.8.7.1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan		%	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00						
IKSP.8.7.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Nilai	79.26	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00						
IKSP.8.7.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77.51	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00						
IKSP.8.7.4	Nilai Maturitas SPIP		Nilai	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00						
IKSP.8.7.5	Indeks Profesionalitas ASN		Nilai	NA	70.00	75.00	77.00	80.00	85.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2104-Pengelolaan KUA dan Pembiayaan Keluarga Sakinah									919,958	949,524	1,091,953	1,255,745	1,444,107	Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah	
SK.8.2104.1 Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk															
IKSK.8.2104.1.1	Jumlah KUA yang direvitalisasi		Lokasi	128	228	135	135	135	135						
IKSK.8.2104.1.2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana		Lokasi	895	875	325	325	325	325						
IKSK.8.2104.1.3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah		Orang	220,834	84,000	150,000	200,000	250,000	300,000						
IKSK.8.2104.1.4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah		Orang	NA	65,000	150,000	200,000	250,000	300,000						
IKSK.8.2104.1.5	Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina		Orang	3,020	3,020	4,020	4,020	4,020	4,020						
IKSK.8.2104.1.6	Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan		Dokumen	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						
SK.8.2104.2 Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga															
IKSK.8.2104.2.1	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah		Pasangan	18,000	37,800	55,800	73,800	91,800	109,800						
2122-Pengelolaan dan Pembiayaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf									49,989	91,115	104,782	120,500	138,575	Direktorat Zakat dan Wakaf	
SK.8.2122.1 Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat															
IKSK.8.2122.1.1	Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah		%	49.00	53.94	59.27	65.14	71.56	78.72						
IKSK.8.2122.1.2	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi		%	NA	1.82	2.74	4.38	4.93	6.13						
IKSK.8.2122.1.3	Persentase lembaga zakat yang dibina		%	53.19	6.38	56.54	65.43	73.51	87.77						
SK.8.2122.2 Meningkatnya pengelolaan aset wakaf															
IKSK.8.2122.2.1	Persentase lembaga wakaf yang dibina		%	54.56	9.82	62.46	71.23	80.00	88.77						
IKSK.8.2122.2.2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan		%	83.91	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						
IKSK.8.2122.2.3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat		%	9.47	6.67	10.00	13.33	16.67	20.00						
SK.8.2122.3 Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi umat															
IKSK.8.2122.3.1	Persentase partisipasi umat Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah		%	6.01	8.00	12.00	16.00	20.00	20.00						
IKSK.8.2122.3.2	Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan		%	40.00	15.00	45.00	55.00	65.00	75.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2123-Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan agama Islam									491,620	757,299	870,894	1,001,528	1,151,757	Direktorat Penerangan Agama Islam	
SK.8.2123.1 Meningkatkan kualitas penyuluhan agama															
IKSK.8.2123.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.8.2123.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	50.09	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90						
IKSK.8.2123.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	40	40	40	40	40	40						
IKSK.8.2123.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	110,396	22,080	22,080	22,080	22,080	22,080						
SK.8.2123.2 Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama															
IKSK.8.2123.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama		%	6.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00						
IKSK.8.2123.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan		Lokasi	34	34	34	34	34	34						
SK.8.2123.3 Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama															
IKSK.8.2123.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	50.09	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
SK.8.2123.4 Meningkatkan kegiatan penyiaran agama di ruang publik															
IKSK.8.2123.4.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	10	35	35	35	35	35						
SK.8.2123.5 Meningkatkan pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat															
IKSK.8.2123.5.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	NA	5	10	15	20	25						
SK.8.2123.6 Meningkatkan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi															
IKSK.8.2123.6.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	8	8	8	8	8	8						
SK.8.2123.7 Meningkatkan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama															
IKSK.8.2123.7.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, dll)		Kegiatan	35	35	70	70	70	70						
SK.8.2123.8 Meningkatkan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama															
IKSK.8.2123.8.1	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	6.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2124-Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah									85,041	144,709	166,415	191,378	220,084	Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	
SK.8.2124.1 Meningkatnya penanganan konflik intra umat beragama															
IKSK.8.2124.1.1	Persentase konflik intra umat beragama yang ditindaklanjuti		%	30	35	35	35	40	40						
SK.8.2124.2 Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran															
IKSK.8.2124.2.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	0.10	0.11	0.30	0.31	0.33	0.35						
IKSK.8.2124.2.2	Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina		Orang	3,640	4,140	4,640	5,140	5,640	6,140						
IKSK.8.2124.2.3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya		Orang	NA	NA	5,500	11,000	16,500	22,000						
IKSK.8.2124.2.4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan		Lokasi	NA	NA	3	5	7	9						
SK.8.2124.3 Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama															
IKSK.8.2124.3.1	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	200	6	200	200	200	200						
IKSK.8.2124.3.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	80	80	160	320	640	640						
SK.8.2124.4 Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan															
IKSK.8.2124.4.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	1,343	590	1,600	1,700	1,800	1,900						
IKSK.8.2124.4.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	1,000,000	650,000	800,000	820,000	850,000	870,000						
IKSK.8.2124.4.3	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan		Kegiatan	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000						
IKSK.8.2124.4.4	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat		Lokasi	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						
IKSK.8.2124.4.5	Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang terbina		Orang	680	680	720	720	720	720						
IKSK.8.2124.4.6	Jumlah POB yang memenuhi standar		Lokasi	NA	1	2	2	1	1						
IKSK.8.2124.4.7	Jumlah lembaga hisab rukyat yang ditingkatkan mutunya		Lembaga	10	NA	10	10	10	10						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2125-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam										4,070,851	4,140,796	4,761,915	5,476,203	6,297,633	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
SK.8.2125.1 Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.8.2125.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
SK.8.2125.2 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.8.2125.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.8.2125.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	80,00	85,00	90,00	93,00	96,00	100,00						
SK.8.2125.3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.8.2125.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	NA	90,00	93,00	95,00	97,00	100,00						
IKSK.8.2125.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja		%	96,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00						
IKSK.8.2125.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00						
SK.8.2125.4 Meningkatnya kematangan pengendalian intern															
IKSK.8.2125.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	70,00	75,00	75,00	80,00	80,00						
IKSK.8.2125.4.2	Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel		%	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00						
SK.8.2125.5 Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.8.2125.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00						
IKSK.8.2125.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
025.09-PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN		PUSAT - DAERAH									1,779,758	2,564,710	3,248,730	3,818,476	4,599,811	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
SP.9.1 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Kristen																
IKSP.9.1.1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Kristen		Nilai	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3							
IKSP.9.1.2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal		%	35,00	34,57	34,52	34,49	34,45	34,41							
SP.9.2 Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Kristen melalui pendekatan moderasi beragama																
IKSP.9.2.1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan		%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00							
SP.9.3 Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama																
IKSP.9.3.1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama		Nilai	70,00	70,00	80,00	90,00	95,00	95,00							
SP.9.4 Menurunkan aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama																
IKSP.9.4.1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan		%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00							
SP.9.5 Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan																
IKSP.9.5.1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital		%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00							
IKSP.9.5.2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
SP.9.6 Meningkatnya kualitas penerimaan sumbangan keagamaan Kristen																
IKSP.9.6.1	Persentase partisipasi umat beragama dalam sumbangan keagamaan kristen		%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00							
SP.9.7 Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat																
IKSP.9.7.1	Rerata nilai UASBN SDTK/ SMPTK/ SMAK/ SMTK yang bermuatan moderasi beragama		Nilai	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							
IKSP.9.7.2	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama		Nilai	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP.9.8 Meningkatkan kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa															
IKSP.9.8.1	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi		Nilai	Literasi 400,12 Numerasi 388,16	Literasi 400,12 Numerasi 388,16	Literasi 403,24 Numerasi 390,32	Literasi 406,36 Numerasi 392,48	Literasi 409,48 Numerasi 394,64	Literasi 412,60 Numerasi 396,80						
IKSP.9.8.2	Rerata nilai asesmen siswa dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA		Nilai	Membaca 400,12 Matemati- ka 388,16 Sains 389,00	NA	Membaca 403,24 Matemati- ka 390,32 Sains 392,00	NA	NA	Membaca 412,60 Matemati- ka 396,80 Sains 418,00						
SP.9.9 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan															
IKSP.9.9.1	Persentase guru bersertifikat pendidik		%	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00						
IKSP.9.9.2	Persentase dosen bersertifikat pendidik		%	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00						
IKSP.9.9.3	Persentase dosen berkualifikasi S3		%	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00						
SP.9.10 Meningkatkan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan															
IKSP.9.10.1	Persentase peningkatan siswa pada SDTK		%	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00						
IKSP.9.10.2	Persentase peningkatan siswa pada SMPTK		%	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00						
IKSP.9.10.3	Persentase peningkatan siswa pada SMAK/SMTK		%	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00						
IKSP.9.10.4	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK		%	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00						
SP.9.11 Meningkatkan jumlah guru yang memenuhi SNP															
IKSP.9.11.1	Persentase Provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang		%	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00						
SP.9.12 Meningkatkan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan															
IKSP.9.12.1	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang memenuhi 8 SNP		%	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00						
IKSP.9.12.2	Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul		%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						
IKSP.9.12.3	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan		%	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00						
IKSP.9.12.4	Persentase PTK yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan		%	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP.9.13 Menguatnya pendidikan karakter siswa															
IKSP.9.13.1	Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik		%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
SP.9.14 Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional															
IKSP.9.14.1	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional		%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00						
IKSP.9.14.2	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK		%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
SP.9.15 Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja															
IKSP.9.15.1	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan		%	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00						
IKSP.9.15.2	Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK														
	a. S1		Nilai	NA	2.65	2.65	2.70	2.75	2.75						
	b. S2		Nilai	NA	3.15	3.20	3.25	3.25	3.25						
	c. S3		Nilai	NA	3.40	3.40	3.45	3.45	3.50						
IKSP.9.15.3	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan		Bulan	6	6	6	6	6	6						
SP.9.16 Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian															
IKSP.9.11.1	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional		%	30,00	35,00	50,00	65,00	70,00	85,00						
SP.9.17 Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen yang efektif dan akuntabel															
IKSP.9.17.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan		%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						
IKSP.9.17.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Nilai	82,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00						
IKSP.9.17.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77,28	77,28	77,98	78,69	79,39	80,10						
IKSP.9.17.4	Nilai Maturitas SPIP		Nilai	3,00	3,00	3,25	3,50	3,74	4,00						
IKSP.9.17.5	Indeks Profesionalitas ASN		Nilai	NA	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00						
2136-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen										92,501	221,592	276,990	332,388	398,865	Direktorat Pendidikan Kristen
SK.9.2136.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama															
IKSK.9.2136.1.1	Persentase siswa di SDTK/SMPTK/SMTK/ SMAK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.9.2136.1.2	Persentase guru SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						
IKSK.9.2136.1.3	Persentase pengawas SDTK/SMPTK/SMTK/ SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00						
IKSK.9.2136.1.4	Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
IKSK.9.2136.1.5	Persentase siswa beragama Kristen di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Kristen bermuatan moderasi beragama		%	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00						
IKSK.9.2136.1.6	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00						
IKSK.9.2136.1.7	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
SK.9.2136.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir														
IKSK.9.2136.2.1	Persentase SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
SK.9.2136.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif														
IKSK.9.2136.3.1	Persentase SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
SK.9.2136.4	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.9.2136.4.1	Persentase guru SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00						
IKSK.9.2136.4.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK		Orang	1	1	1	1	1	1						
IKSK.9.2136.4.3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa		Kegiatan	1	1	1	1	1	1						
IKSK.9.2136.4.4	Jumlah siswa yang mengikuti asesmen kompetensi		Orang	100	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.9.2136.5 Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran															
IKSK.9.2136.5.1	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00						
IKSK.9.2136.5.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00						
SK.9.2136.6 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.9.2136.6.1	Persentase SDTK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00						
IKSK.9.2136.6.2	Persentase SMPTK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						
IKSK.9.2136.6.3	Persentase SMTK/SMAK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00						
IKSK.9.2136.6.4	Persentase Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						
SK.9.2136.7 Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat															
IKSK.9.2136.7.1	Jumlah siswa SDTK penerima BOS		Orang	2,500	2,500	2,700	2,900	3,100	3,300						
IKSK.9.2136.7.2	Jumlah siswa SMPTK penerima BOS		Orang	3,088	3,088	3,288	3,488	3,688	3,888						
IKSK.9.2136.7.3	Jumlah siswa SMTK/SMAK penerima BOS		Orang	8,750	8,750	8,950	9,150	9,350	9,550						
IKSK.9.2136.7.4	Persentase siswa SDTK penerima PIP		%	41,28	41,28	41,28	41,28	41,28	41,28						
IKSK.9.2136.7.5	Persentase siswa SMPTK penerima PIP		%	91,90	91,90	91,90	91,90	91,90	91,90						
IKSK.9.2136.7.6	Persentase siswa SMTK/SMAK penerima PIP		%	90,98	90,98	90,98	90,98	90,98	90,98						
SK.9.2136.8 Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal															
IKSK.9.2136.8.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
IKSK.9.2136.8.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
SK.9.2136.9 Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan															
IKSK.9.2136.9.1	Persentase Guru SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang mengikuti PPG		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
IKSK.9.2136.9.2	Persentase Guru Pendidikan Agama Kristen yang mengikuti PPG		%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.9.2136.9.3	Persentase Calon Pengawas dan Kepala SDTK/SMPTK/SMTK/ SMAK yang menerima beasiswa S2		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
SK.9.2136.10 Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan															
IKSK.9.2136.10.1	Jumlah SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
SK.9.2136.11 Meningkatnya budaya mutu pendidikan															
IKSK.9.2136.11.1	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang menerapkan budaya mutu		%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
IKSK.9.2136.11.2	Persentase siswa SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
SK.9.2136.12 Meningkatnya jumlah pendidikan keagamaan yang melaksanakan program pendidikan karakter															
IKSK.9.2136.12.1	Persentase SMPTK/SMTK/SMAK yang melaksanakan program pendidikan karakter		%	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00						
SK.9.2136.13 Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan															
IKSK.9.2136.13.1	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00						
IKSK.9.2136.13.2	Persentase SMPTK/SMTK/SMAK Ramah Anak		%	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00						
SK.9.2136.14 Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan															
IKSK.9.2136.14.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	7	7	7	7	7	7						
IKSK.9.2136.14.2	Jumlah gugus pramuka pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina		Unit	78	78	78	78	78	78						
2137-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen										101,327	240,001	288,001	345,601	432,001	Direktorat Urusan Agama Kristen
SK.9.2137.1 Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Kristen															
IKSK.9.2137.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.9.2137.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.9.2137.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	40	40	40	40	40	40						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.9.2137.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	26.829	26.829	26.844	26.894	26.899	26.904							
SK.9.2137.2 Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Kristen																
IKSK.9.2137.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Kristen		%	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00							
IKSK.9.2137.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Kristen yang diselenggarakan		Lokasi	34	34	34	34	34	34							
SK.9.2137.3 Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama																
IKSK.9.2137.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
SK.9.2137.4 Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran																
IKSK.9.2137.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
IKSK.9.2137.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	2,00	2,00	5,00	6,00	8,00	9,00							
SK.9.2137.5 Meningkatkan kegiatan penyiaran agama di ruang publik																
IKSK.9.2137.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	1	1	1	1	1	1							
SK.9.2137.6 Meningkatkan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama																
IKSK.9.2137.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, dll)		Kegiatan	35	35	35	35	35	35							
SK.9.2137.7 Meningkatkan kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama																
IKSK.9.2137.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	10	10	10	10	10	10							
IKSK.9.2137.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	50	50	50	50	50	50							
SK.9.2137.8 Meningkatkan pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat																
IKSK.9.2137.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	5	5	5	5	5	5							
SK.9.2137.9 Meningkatkan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi																
IKSK.9.2137.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	35	35	35	35	35	35							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.9.2137.10 Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan															
IKSK.9.2137.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
IKSK.9.2137.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000						
IKSK.9.2137.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00						
SK.9.2137.11 Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga															
IKSK.9.2137.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani		Pasangan	35	35	35	35	35	35						
SK.9.2137.12 Meningkatkan pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan kristen															
IKSK.9.2137.12.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan kristen yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	5	5	5	5	5	5						
2138-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen										153,106	183,727	220,472	264,566	317,840	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
SK.9.2138.1 Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.9.2138.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
SK.9.2138.2 Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.9.2138.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.9.2138.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.9.2138.3 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.9.2138.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						
IKSK.9.2138.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						
IKSK.9.2138.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.9.2138.4 Meningkatkan kematangan pengendalian intern															
IKSK.9.2138.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	30.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00						
IKSK.9.2138.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00						
SK.9.2138.5 Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.9.2138.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00						
IKSK.9.2138.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00						
5100-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen										1,306,780	1,568,137	1,881,764	2,258,117	2,709,740	Direktorat Pendidikan Kristen
SK.9.5100.1 Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan															
IKSK.9.5100.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	4	4	4	4	4	4						
IKSK.9.5100.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	7	7	7	7	7	7						
IKSK.9.5100.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan		Unit	1	1	1	1	1	1						
IKSK.9.5100.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen	100	100	100	100	100	100						
5101-Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, Daya Saing, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen										126,044	351,253	581,503	617,804	741,365	Direktorat Pendidikan Kristen
SK.9.5101.1 Menkuatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama															
IKSK.9.5101.1.1	Persentase mahasiswa PTK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00						
IKSK.9.5101.1.2	Persentase dosen PTK yang dibina dalam moderasi beragama		%	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00						
IKSK.9.5101.1.3	Persentase mahasiswa beragama Kristen di PTU yang memperoleh pendidikan agama Kristen bermuatan moderasi beragama		%	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00						
IKSK.9.5101.1.4	Persentase dosen pendidikan agama Kristen di PTU yang dibina dalam moderasi beragama		%	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.9.5101.2 Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif															
IKSK.9.5101.2.1	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring		%	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00						
SK.9.5101.3 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.9.5101.3.1	Persentase dosen PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	25.00	25.00	35.00	45.00	55.00	55.00						
IKSK.9.5101.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	25.00	25.00	35.00	45.00	55.00	55.00						
SK.9.5101.4 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.9.5101.4.1	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi		%	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00						
SK.9.5101.5 Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat															
IKSK.9.5101.5.1	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi pada PTK		%	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00						
IKSK.9.5101.5.2	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA pada PTK		%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						
IKSK.9.5101.5.3	Persentase Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi (UP4B)		%	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
IKSK.9.5101.5.4	Jumlah mahasiswa asing di PTK yang menerima beasiswa		Orang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
IKSK.9.5101.5.5	Persentase mahasiswa PTK berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3		%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00						
IKSK.9.5101.5.6	Jumlah PTK yang diafirmasi dalam peningkatan status		Lembaga	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
SK.9.5101.6 Meningkatkan kualitas LPTK															
IKSK.9.5101.6.1	Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG		%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						
IKSK.9.5101.6.2	Persentase LPTK yang terrevitalisasi		%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						
SK.9.5101.7 Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan															
IKSK.9.5101.7.1	Jumlah PTK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00						
IKSK.9.5101.7.2	Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka		%	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00						
SK.9.5101.8 Meningkatkan budaya mutu pendidikan															
IKSK.9.5101.8.1	Persentase PTK yang menerapkan budaya mutu		%	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.9.5101.8.2	Persentase mahasiswa PTK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						
SK.9.5101.9 Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pada satuan pendidikan															
IKSK.9.5101.9.1	Persentase PTK yang memperoleh pembinaan dalam SPMI		%	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00						
SK.9.5101.10 Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan															
IKSK.9.5101.10.1	Jumlah PTKN yang berstatus PTKN BLU dan PTKN-BH		Lembaga	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00						
IKSK.9.5101.10.2	Persentase anggaran PNPB dan PNPB-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan		%	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24						
IKSK.9.5101.10.3	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN		%	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00						
SK.9.5101.11 Meningkatnya Program Studi PTK Berstandar Internasional															
IKSK.9.5101.11.1	Persentase Program Studi PTK yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50						
IKSK.9.5101.11.2	Persentase PTK yang melakukan kolaborasi internasional		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50						
IKSK.9.5101.11.3	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50						
IKSK.9.5101.11.4	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50						
IKSK.9.5101.11.5	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat		%	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00						
SK.9.5101.12 Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian															
IKSK.9.5101.12.1	Persentase hasil penelitian PTK yang memperoleh HAKI		%	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00						
IKSK.9.5101.12.2	Persentase hasil penelitian PTK yang menghasilkan Hak Paten		%	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30						
SK.9.5101.13 Meningkatnya kualitas lulusan PTK															
IKSK.9.5101.13.1	Persentase lulusan yang tepat waktu		%	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00						
IKSK.9.5101.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa		Tahun	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
025.10-PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK		PUSAT - DAERAH									884,925	2,522,560	3,027,070	3,632,490	4,358,950	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
SP10.1 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Katolik																
IKSP:10.1.1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Katolik		Nilai	1 : 6	1 : 6	1 : 5	1 : 4	1 : 2	1 : 2							
IKSP:10.1.2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal		%	70,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00							
SP10.2 Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Katolik melalui pendekatan moderasi beragama																
IKSP:10.2.1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
SP10.3 Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama																
IKSP:10.3.1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama		Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
SP10.4 Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama																
IKSP:10.4.1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
SP10.5 Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan																
IKSP:10.5.1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital		%	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00							
IKSP:10.5.2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
SP10.6 Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Katolik																
IKSP:10.6.1	Persentase partisipasi umat beragama dalam BAKAT		%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03							
SP10.7 Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat																
IKSP:10.7.1	Rerata nilai UASBN SMAK yang bermuatan moderasi beragama		Nilai	6,00	6,00	6,20	6,30	6,40	6,50							
IKSP:10.7.2	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama		Nilai	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00							
SP10.8 Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa																
IKSP:10.8.1	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi		Nilai	Literasi 400,12 Numerasi 388,16	Literasi 400,12 Numerasi 388,16	Literasi 403,24 Numerasi 390,32	Literasi 406,36 Numerasi 392,48	Literasi 409,48 Numerasi 394,64	Literasi 412,60 Numerasi 396,80							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSP10.8.2	Rerata nilai asesmen siswa dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA		Nilai	Membaca 400,12 Matemati- ka 388,16 Sains 389,00	NA	Membaca 403,24 Matemati- ka 390,32 Sains 392,00	NA	NA	Membaca 412,60 Matemati- ka 396,80 Sains 418,00						
SP.10.9 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan															
IKSP10.9.1	Persentase guru bersertifikat pendidik		%	50,00	50,00	75,00	85,00	95,00	100,00						
IKSP10.9.2	Persentase dosen bersertifikat pendidik		%	50,00	50,00	75,00	85,00	95,00	100,00						
IKSP10.9.3	Persentase dosen berkualifikasi S3		%	11,95	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00						
SP.10.10 Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan															
IKSP10.10.1	Persentase peningkatan siswa pada Taman Seminari		%	30,94	0,00	1,57	1,62	1,52	1,50						
IKSP10.10.2	Persentase peningkatan siswa pada SMAK		%	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06						
IKSP10.10.3	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK		%	0,10	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50						
SP.10.11 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP															
IKSP10.11.1	Persentase Provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang		%	90,00	94,00	96,00	97,00	98,00	100,00						
SP.10.12 Meningkatnya pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada satuan pendidikan															
IKSP10.12.1	Persentase SMAK yang memenuhi 8 SNP		%	65,00	70,00	85,00	88,00	93,00	98,00						
IKSP10.12.2	Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul		%	5,00	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00						
IKSP10.12.3	Persentase SMAK yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan		%	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00						
IKSP10.12.4	Persentase PTK yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan		%	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00						
SP.10.13 Menguatnya pendidikan karakter siswa															
IKSP10.13.1	Persentase siswa SMAK yang memperoleh nilai karakter minimal baik		%	65,00	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00						
SP.10.14 Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional															
IKSP10.14.1	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional		%	NA	NA	NA	NA	4,00	8,00						
IKSP10.14.2	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK		%	NA	0,06	0,11	0,17	0,23	0,28						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP.10.15 Meningkatkan kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja															
IKSP.10.15.1	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan		%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
IKSP.10.15.2	Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK														
	a. S1		Nilai	NA	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75						
	b. S2		Nilai	NA	3.00	3.20	3.25	3.25	3.25						
	c. S3		Nilai	NA	NA	3.40	3.45	3.45	3.50						
IKSP.10.15.3	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan		Bulan	14	12	10	8	7	6						
SP.10.16 Meningkatkan kualitas pemanfaatan penelitian															
IKSP.10.16.1	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional		%	4,00	9,00	13,00	18,00	22,00	27,00						
SP.10.17 Meningkatkan tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik yang efektif dan akuntabel															
IKSP.10.17.1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan		%	20,00	20,00	20,00	21,00	22,00	25,00						
IKSP.10.17.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Nilai	78,00	79,00	79,50	79,60	79,80	80,00						
IKSP.10.17.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	79,91	79,91	79,91	81,00	81,00	90,00						
IKSP.10.17.4	Nilai Maturitas SPIP		Nilai	3,00	3,00	3,50	4,00	4,50	4,50						
IKSP.10.17.5	Indeks Profesionalitas ASN		Nilai	NA	75,00	77,00	79,00	80,00	85,00						
2131-Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik										75,636	210,020	252,020	302,430	362,910	Direktorat Pendidikan Katolik
SK.10.2131.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama															
IKSK.10.2131.1.1	Persentase mahasiswa PTK memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
IKSK.10.2131.1.2	Persentase dosen PTK yang dibina dalam moderasi beragama		%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
IKSK.10.2131.1.3	Persentase mahasiswa beragama Katolik di PTU yang memperoleh pendidikan agama Katolik bermuatan moderasi beragama		%	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00						
IKSK.10.2131.1.4	Persentase dosen pendidikan agama Katolik di PTU yang dibina dalam moderasi beragama		%	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.10.2131.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif		%	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00						
IKSK.10.2131.2.1	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring		%	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00						
SK.10.2131.3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan		%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00						
IKSK.10.2131.3.1	Persentase Dosen PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00						
IKSK.10.2131.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00						
SK.10.2131.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan			30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00						
IKSK.10.2131.4.1	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi			30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00						
SK.10.2131.5	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat		%	2,30	2,30	4,17	6,05	7,92	9,39						
IKSK.10.2131.5.1	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi pada PTK		%	2,30	2,30	4,17	6,05	7,92	9,39						
IKSK.10.2131.5.2	Jumlah PTK yang diafirmasi dalam peningkatan status		Lembaga	NA	NA	1	1	1	1						
SK.10.2131.6	Meningkatnya kualitas LPTK		%	NA	NA	13,04	26,09	39,13	52,17						
IKSK.10.2131.6.1	Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG		%	NA	NA	13,04	26,09	39,13	52,17						
IKSK.10.2131.6.2	Persentase LPTK yang terevitalisasi		%	NA	NA	13,04	26,09	39,13	52,17						
SK.10.2131.7	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan		Lembaga	5	6	5	5	5	5						
IKSK.10.2131.7.1	Jumlah PTK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	5	6	5	5	5	5						
IKSK.10.2131.7.2	Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka		%	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00						
SK.10.2131.8	Meningkatnya budaya mutu pendidikan		%	10,00	20,00	30,00	40,00	45,00	50,00						
IKSK.10.2131.8.1	Persentase PTK yang menerapkan budaya mutu		%	10,00	20,00	30,00	40,00	45,00	50,00						
IKSK.10.2131.8.2	Persentase mahasiswa PTK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	NA	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50						
SK.10.2131.9	Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pada satuan pendidikan		%	20,00	21,74	43,48	65,22	86,96	100,00						
IKSK.10.2131.9.1	Persentase PTK yang memperoleh pembinaan dalam SPMI		%	20,00	21,74	43,48	65,22	86,96	100,00						
SK.10.2131.10	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan		Lembaga	NA	NA	NA	NA	NA	5						
IKSK.10.2131.10.1	Jumlah PTKN yang berstatus PTKN BLU dan PTKN-BH		Lembaga	NA	NA	NA	NA	NA	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.10.2131.10.2	Persentase anggaran PNPB dan PNPB-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan		%	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12							
IKSK.10.2131.10.3	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN		%	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35							
SK.10.2131.11 Meningkatkan Program Studi PTK Berstandar Internasional																
IKSK.10.2131.11.1	Persentase Program Studi PTK yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional		%	NA	NA	NA	2	4	6							
IKSK.10.2131.11.2	Persentase PTK yang melakukan kolaborasi internasional		%	NA	NA	NA	2	4	6							
IKSK.10.2131.11.3	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran		%	NA	NA	NA	2	4	6							
IKSK.10.2131.11.4	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi		%	NA	NA	NA	2	4	6							
IKSK.10.2131.11.5	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat		%	NA	NA	NA	2	4	6							
SK.10.2131.12 Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan penelitian																
IKSK.10.2131.12.1	Persentase hasil penelitian PTK yang memperoleh HAKI		%	NA	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00							
SK.10.2131.13 Meningkatkan kualitas lulusan PTK																
IKSK.10.2131.13.1	Persentase lulusan yang tepat waktu		%	50.00	50.00	60.00	70.00	80.00	85.00							
IKSK.10.2131.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa		Tahun	6	5	5	5	4	4							
2139-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik										84,269	919,130	1,102,960	1,323,550	1,588,260	Direktorat Pendidikan Katolik	
SK.10.2139.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama																
IKSK.10.2139.1.1	Persentase siswa SMAK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	50.00	50.00	75.00	85.00	95.00	100.00							
IKSK.10.2139.1.2	Persentase guru SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	25.00	25.00	50.00	75.00	85.00	100							
IKSK.10.2139.1.3	Persentase pengawas SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	25.00	25.00	50.00	75.00	85.00	100							
IKSK.10.2139.1.4	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	25.00	25.00	50.00	75.00	85.00	100							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.10.2139.1.5	Persentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	25.00	25.00	50.00	75.00	85.00	100						
IKSK.10.2139.1.6	Persentase siswa beragama Katolik di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Katolik bermuatan moderasi beragama		%	10.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00						
IKSK.10.2139.1.7	Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada SMAK yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	40	40	40	40	40	40						
SK.10.2139.2	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.10.2139.2.1	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi		%	10,00	10,00	30,00	50,00	80,00	100,00						
SK.10.2139.3	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran														
IKSK.10.2139.3.1	Persentase SMAK yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	25,00	25,00	35,00	55,00	75,00	100,00						
IKSK.10.2139.3.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						
SK.10.2139.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan														
IKSK.10.2139.4.1	Persentase Taman Seminari yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.10.2139.4.2	Persentase SMAK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	50.00	50.00	75.00	85.00	95.00	100.00						
IKSK.10.2139.4.3	Persentase SMAK di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	50.00	50.00	75.00	85.00	95.00	100.00						
SK.10.2139.5	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat														
IKSK.10.2139.5.1	Jumlah siswa SMAK penerima BOS		Orang	2.500	4.266	5.466	6.666	7.866	9.066						
IKSK.10.2139.5.2	Persentase siswa SMAK penerima PIP		%	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00						
IKSK.10.2139.5.3	Jumlah SMAK yang didirikan di daerah afirmasi		Lembaga	NA	NA	2	3	4	5						
SK.10.2139.6	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah														
IKSK.10.2139.6.1	Jumlah Taman Seminari yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Lembaga	51	51	100	100	100	100						
SK.10.2139.7	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal														
IKSK.10.2139.7.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	50,00	50,00	75,00	85,00	95,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.10.2139.7.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	50,00	50,00	75,00	85,00	95,00	100,00						
SK.10.2139.8		Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan													
IKSK.10.2139.8.1	Persentase Guru SMAK yang mengikuti PPG		%	NA	NA	15,00	35,00	55,00	100,00						
IKSK.10.2139.8.2	Persentase Guru Pendidikan Agama Katolik yang mengikuti PPG		%	NA	NA	13,00	40,00	65,00	100,00						
IKSK.10.2139.8.3	Persentase Calon Pengawas dan Kepala SMAK yang menerima beasiswa S2		%	NA	NA	20,00	40,00	80,00	100,00						
SK.10.2139.9		Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan													
IKSK.10.2139.9.1	Jumlah SMAK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	5	30	19	30	19	30						
SK.10.2139.10		Meningkatnya budaya mutu pendidikan													
IKSK.10.2139.10.1	Persentase kepala SMAK yang menerapkan budaya mutu		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.10.2139.10.2	Persentase siswa SMAK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
SK.10.2139.11		Meningkatnya jumlah pendidikan keagamaan yang melaksanakan program pendidikan karakter													
IKSK.10.2139.11.1	Persentase SMAK yang melaksanakan program pendidikan karakter		%	50,00	50,00	75,00	85,00	95,00	100,00						
SK.10.2139.12		Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan													
IKSK.10.2139.12.1	Persentase SMAK yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	50,00	50,00	75,00	85,00	95,00	100,00						
IKSK.10.2139.12.2	Persentase SMAK Ramah Anak		%	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00						
SK.10.2139.13		Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan													
IKSK.10.2139.13.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada SMAK yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	5	10	20	30	35	40						
IKSK.10.2139.13.2	Jumlah gugus pramuka pada SMAK yang dibina		Unit	40	40	40	40	40	40						
2140-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik										47,253	538,450	646,140	775,370	930,400	Direktorat Urusan Agama Katolik
SK.10.2140.1		Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Katolik													
IKSK.10.2140.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.10.2140.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	15,00	15,00	33,00	56,00	79,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.10.2140.1.3	Jumlah penyiari agama yang dibina kompetensi		Orang	100	138	300	300	300	300							
IKSK.10.2140.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	5936	5936	6784	7632	8480	8480							
SK.10.2140.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Katolik															
IKSK.10.2140.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Katolik		%	15,00	15,00	35,00	50,00	75,00	100,00							
IKSK.10.2140.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Katolik yang diselenggarakan		Kegiatan	55	35	42	20	33	33							
SK.10.2140.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama															
IKSK.10.2140.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
SK.10.2140.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran															
IKSK.10.2140.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	5,00	4,77	35,00	55,00	75,00	100,00							
IKSK.10.2140.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	NA	NA	35,00	55,00	75,00	100,00							
SK.10.2140.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik															
IKSK.10.2140.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	34	34	34	34	34	34							
SK.10.2140.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama															
IKSK.10.2140.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparani, dll)		Kegiatan	1	3	12	15	35	35							
SK.10.2140.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama															
IKK.10.2140.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	NA	NA	8	15	25	38							
IKK.10.2140.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	NA	NA	24	45	75	114							
SK.10.2140.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat															
IKSK.10.2140.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	NA	NA	8	15	25	38							
SK.10.2140.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi															
IKSK.10.2140.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	2	2	2	2	2	2							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.10.2140.10 Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan															
IKSK.10.2140.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	NA	NA	38	38	38	38						
IKSK.10.2140.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	10.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
IKSK.10.2140.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	15,00	15,00	35,00	55,00	70,00	100,00						
SK.10.2140.11 Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga															
IKSK.10.2140.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia		Pasangan	3.000	805	3.387	4.808	4.000	7.000						
SK.10.2140.12 Meningkatkan pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan katolik															
IKSK.10.2140.12.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan Katolik yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	1	1	1	1	1	1						
2141-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik										125,761	215,910	259,090	310,910	373,100	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
SK.10.2141.1 Meningkatkan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.10.2141.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	70,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00						
SK.10.2141.2 Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.10.2141.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.10.2141.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.10.2141.3 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.10.2141.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.10.2141.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.10.2141.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.10.2141.4 Meningkatkan kematangan pengendalian intern															
IKSK.10.2141.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.10.2141.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.10.2141.5 Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.10.2141.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00						
IKSK.10.2141.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00						
5102-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik										552,006	639,050	766,860	920,230	1,104,280	Direktorat Pendidikan Katolik
SK.10.5102.1 Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan															
IKSK.10.5102.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	6	6	6	6	6	6						
IKSK.10.5102.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	349	349	349	349	349	249						
IKSK.10.5102.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan		Unit	349	349	349	349	349	349						
IKSK.10.5102.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen	60	60	60	60	60	60						
025.11-PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU		PUSAT - DAERAH								760,798	1,052,494	1,112,424	1,129,037	1,145,892	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu
SP.11.1 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu															
IKSP.11.1.1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Hindu		Nilai	1 : 15	1 : 13	1 : 11	1 : 10	1 : 8	1 : 5						
IKSP.11.1.2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal		%	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
SP.11.2 Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Hindu melalui pendekatan moderasi beragama															
IKSP.11.2.1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SP.11.3 Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama															
IKSP.11.3.1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran		Nilai	70,00	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP11.4 Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama															
IKSP11.4.1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SP11.5 Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan															
IKSP11.5.1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital		%	NA	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00						
IKSP11.5.2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran		%	43,00	50,00	70,00	80,00	90,00	100,00						
SP11.6 Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu															
IKSP11.6.1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana		%	NA	70,00	80,00	90,00	90,00	90,00						
SP11.7 Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat															
IKSP11.7.1	Rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama		Nilai	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00						
IKSP11.7.2	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama		Nilai	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00						
SP11.8 Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa															
IKSP11.8.1	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi		Nilai	NA	NA	Literasi 390 Numerasi 345	Literasi 400 Numerasi 360	Literasi 420 Numerasi 390	Literasi 430 Numerasi 390						
IKSP11.8.2	Rerata nilai asesmen siswa dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA		Nilai	NA	NA	Membaca 390 Matematika 345 Sains 370	NA	NA	Membaca 430 Matematika 390 Sains 400						
SP11.9 Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan															
IKSP11.9.1	Persentase guru bersertifikat pendidik		%	52,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00						
IKSP11.9.2	Persentase dosen bersertifikat pendidik		%	42,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00						
IKSP11.9.3	Persentase dosen berkualifikasi S3		%	17,00	18,00	20,00	22,00	25,00	30,00						
SP11.10 Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan															
IKSP11.10.1	Persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman		%	2,00	3,00	5,00	5,00	10,00	10,00						
IKSP11.10.2	Persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman		%	1,00	3,00	5,00	5,00	7,00	7,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSP:11.10.3	Persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman		%	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00						
IKSP:11.10.4	Persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman		%	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00						
IKSP:11.10.5	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKH		%	2.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00						
SP:11.11 Meningkatkan jumlah guru yang memenuhi SNP															
IKSP:11.11.1	Persentase Provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang		%	3,00	5,00	6,00	7,00	7,00	8,00						
SP:11.12 Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan															
IKSP:11.12.1	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP		%	3.00	5.00	5.00	7.00	7.00	10.00						
IKSP:11.12.2	Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul		%	9.40	9.50	10.00	12.00	13.00	15.00						
IKSP:11.12.3	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan		%	3.00	5.00	5.00	7.00	7.00	10.00						
IKSP:11.12.4	Persentase PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan		%	30.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00						
SP:11.13 Menguatnya pendidikan karakter siswa															
IKP:11.13.1	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik		%	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	90,00						
SP:11.14 Meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional															
IKSP:11.14.1	Persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional		%	NA	NA	NA	5,00	5,00	5,00						
SP:11.15 Meningkatnya kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja															
IKSP:11.15.1	Persentase PTKH yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan		%	10,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00						
IKSP:11.15.2	Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	a. S1		Nilai	NA	3.02	3.03	3.10	3.15	3.25						
	b. S2		Nilai	NA	3.23	3.25	3.25	3.25	3.25						
	c. S3		Nilai	NA	3.41	3.41	3.45	3.45	3.50						
IKSP.11.15.3	Rerata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan		Bulan	24	24	24	24	12	12						
SP.11.16 Meningkatkan kualitas pemanfaatan penelitian															
IKSP.11.16.1	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional		%	10.00	12.50	15.00	17.50	20.00	22.50						
SP.11.17 Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel															
IKSP.11.17.1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan		%	63.45	70.00	75.00	75.00	80.00	85.00						
IKSP.11.17.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Nilai	79.36	80	80.01	80.02	80.03	80.04						
IKSP.11.17.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	79.84	80	80.01	80.03	80.04	80.05						
IKSP.11.17.4	Nilai Maturitas SPIP		Nilai	1.99	1.99	2.00	2.01	2.03	2.04						
IKSP.11.17.5	Indeks Profesionalitas ASN		Nilai	NA	NA	71	74	76	80						
2142-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu										62,479	91,355	93,777	100,934	103,771	Direktorat Pendidikan Hindu
SK.11.2142.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama															
IKSK.11.2142.1.1	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.11.2142.1.2	Persentase guru Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dibina dalam moderasi beragama		%	80.00	80.00	80.00	90.00	90.00	100.00						
IKSK.11.2142.1.3	Persentase pengawas Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	NA	20.00	30.00	40.00	50.00						
IKSK.11.2142.1.4	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	80.00	80.00	80.00	90.00	90.00	100.00						
IKSK.11.2142.1.5	Persentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	80.00	80.00	80.00	90.00	90.00	100.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.11.2142.1.6	Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	1	1	2	2	3	3							
IKSK.11.2142.1.7	Persentase siswa beragama Hindu di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	10,00	15,00	30,00	50,00	70,00	90,00							
SK.11.2142.2		Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir														
IKSK.11.2142.2.1	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00							
SK.11.2142.3		Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif														
IKSK.11.2142.3.1	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	NA	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00							
SK.11.2142.4		Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.11.2142.4.1	Persentase guru Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	NA	0,00	20,00	25,00	30,00	40,00							
IKSK.11.2142.4.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman		Orang	NA	NA	2	4	6	8							
IKSK.11.2142.4.3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa		Kegiatan	NA	NA	1	2	2	3							
IKSK.11.2142.4.4	Jumlah siswa yang mengikuti asesmen kompetensi		Orang	NA	NA	5	10	12	15							
SK.11.2142.5		Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran														
IKSK.11.2142.5.1	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	NA	NA	10,00	20,00	30,00	40,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.11.2142.5.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	NA	NA	10,00	20,00	30,00	40,00						
SK.11.2142.6 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.11.2142.6.1	Persentase Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00						
IKSK.11.2142.6.2	Persentase Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	45.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00						
IKSK.11.2142.6.3	Persentase Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	70.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00						
IKSK.11.2142.6.4	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	30.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00						
SK.11.2142.7 Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat															
IKSK.11.2142.7.1	Jumlah siswa Adhi Widya Pasraman penerima BOS		Orang	140	233	250	275	300	350						
IKSK.11.2142.7.2	Jumlah siswa Madyama Widya Pasraman penerima BOS		Orang	26	90	100	120	130	150						
IKSK.11.2142.7.3	Jumlah siswa Utama Widya Pasraman penerima BOS		Orang	10	76	90	100	110	120						
IKSK.11.2142.7.4	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman penerima PIP		%	48.00	90.00	95.00	95.00	95.00	100.00						
IKSK.11.2142.7.5	Persentase siswa Madyama Widya Pasraman penerima PIP		%	28.00	80.00	90.00	95.00	95.00	100.00						
IKSK.11.2142.7.6	Persentase siswa Utama Widya Pasraman penerima PIP		%	13.00	30.00	50.00	70.00	90.00	100.00						
IKSK.11.2142.7.7	Jumlah Adhi/Madyama/Utama Widya Pasraman yang didirikan di daerah afirmasi		Lembaga	3	3	4	4	5	5						
SK.11.2142.8 Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah															
IKSK.11.2142.8.1	Jumlah siswa Pratama Widya Pasraman yang tingkatan mutunya melalui BOP		Orang	958	975	990	1,000	1,025	1,050						
SK.11.2142.9 Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal															
IKSK.11.2142.9.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	65.00	70.00	75.00	80.00	86.00	90.00						
IKSK.11.2142.9.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	50.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.11.2142.10 Meningkatkan kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan															
IKSK.11.2142.10.1	Persentase Guru Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang mengikuti PPG		%	NA	NA	5,00	10,00	15,00	20,00						
IKSK.11.2142.10.2	Persentase Guru Pendidikan Agama Hindu yang mengikuti PPG		%	58,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00						
IKSK.11.2142.10.3	Persentase Calon Pengawas dan Kepala Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang menerima beasiswa S2		%	NA	NA	5,00	10,00	15,00	20,00						
SK.11.2142.11 Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan															
IKSK.11.2142.11.1	Jumlah Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	1	2	3	4	5	6						
SK.11.2142.12 Meningkatkan budaya mutu pendidikan															
IKSK.11.2142.12.1	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang menerapkan budaya mutu		%	2,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00						
IKSK.11.2142.12.2	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	2,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00						
SK.11.2142.13 Meningkatkan jumlah pendidikan keagamaan yang melaksanakan program pendidikan karakter															
IKSK.11.2142.13.1	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan program pendidikan karakter		%	50,00	50,00	75,00	80,00	90,00	100,00						
SK.11.2142.14 Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan															
IKSK.11.2142.14.1	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	50,00	50,00	75,00	80,00	90,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.11.2142.14.2	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang Ramah Anak		%	50,00	50,00	75,00	80,00	90,00	100,00							
SK.11.2142.15 Meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan																
IKSK.11.2142.15.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Organisasi	1	2	3	4	5	6							
IKSK.11.2142.15.2	Jumlah gugus pramuka pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dibina		Unit	1	2	3	4	5	6							
2143-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu										52,493	132,583	158,589	172,606	189,610	Direktorat Urusan Agama Hindu	
SK.11.2143.1 Meningkatkan kualitas penyuluhan agama Hindu																
IKSK.11.2143.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	70,00	70,00	75,00	77,00	79,00	85,00							
IKSK.11.2143.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
IKSK.11.2143.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	NA	1,500	1,500	1,600	1,700	1,700							
IKSK.11.2143.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	63	33	66	100	150	200							
SK.11.2143.2 Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Hindu																
IKSK.11.2143.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Hindu		%	75,00	75,00	85,00	90,00	95,00	100,00							
IKSK.11.2143.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Hindu yang diselenggarakan		Lokasi	30	30	40	50	60	80							
SK.11.2143.3 Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama																
IKSK.11.2143.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
SK.11.2143.4 Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran																
IKSK.11.2143.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00							
IKSK.11.2143.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	NA	0,01	1,00	10,00	20,00	50,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.11.2143.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik		Lokasi	30	40	60	70	80	90						
IKSK.11.2143.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	30	40	60	70	80	90						
SK.11.2143.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														
IKSK.11.2143.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Dharmagita, dll)		Kegiatan	1	NA	1	NA	1	NA						
SK.11.2143.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama														
IKSK.11.2143.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	NA	NA	5	10	15	20						
IKSK.11.2143.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	NA	NA	5	10	15	20						
SK.11.2143.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat														
IKSK.11.2143.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	NA	NA	2	4	6	8						
SK.11.2143.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi														
IKSK.11.2143.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkan sikap toleran (hari besar keagamaan, sekaten, dll)		Kegiatan	6	13	39	47	50	60						
SK.11.2143.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.11.2143.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	310	224	250	300	350	400						
IKSK.11.2143.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	36,400	NA	35,000	40,000	45,000	50,000						
IKSK.11.2143.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	74.00	60.00	70.00	75.00	80.00	85.00						
SK.11.2143.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga														
IKSK.11.2143.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sukinah		Pasangan	2.889	1.275	1.500	1.700	2.000	2.500						
SK.11.2143.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga darma dana														
IKSK.11.2143.12.1	Jumlah lembaga darma dan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	NA	NA	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2144-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu									48,098	54,828	56,407	58,033	59,708	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu	
SK.11.2144.1 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.11.2144.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	63.45	70,00	75,00	75,00	80,00	85,00						
SK.11.2144.2 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.11.2144.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
IKSK.11.2144.2.2	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	100,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00						
SK.11.2144.3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.11.2144.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	60,00	60,00	70,00	80,00	85,00	85,00						
IKSK.11.2144.3.3	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00						
IKSK.11.2144.3.4	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	60,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00						
SK.11.2144.4 Meningkatnya kematangan pengendalian intern															
IKSK.11.2144.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	NA	10,00	10,00	10,00	10,00						
IKSK.11.2144.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00						
SK.11.2144.5 Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.11.2144.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	NA	70,00	75,00	80,00	85,00						
IKSK.11.2144.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	45,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00						
5103-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu									483,326	512,361	538,513	566,060	595,082	Direktorat Pendidikan Hindu	
SK.11.5103.1 Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan															
IKSK.11.5103.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	12	12	12	12	12	12						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.11.5103.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	150	145	175	200	250	300							
IKSK.11.5103.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan		Unit	675	696	731	766	801	836							
IKSK.11.5103.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00							
IKSK.11.5103.1.5	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional		Orang	6,185	6,185	6,250	6,350	6,450	6,550							
5104-Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu										114,402	261,367	265,138	231,404	197,721	Direktorat Pendidikan Hindu	
SK.11.5104.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama																
IKSK.11.5104.1.1	Persentase mahasiswa PTK yang dibina dalam moderasi beragama		%	80.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00							
IKSK.11.5104.1.2	Persentase dosen PTK yang dibina dalam moderasi beragama		%	80.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00							
IKSK.11.5104.1.3	Persentase mahasiswa beragama Hindu di PTU yang memperoleh pendidikan agama Hindu bermuatan moderasi beragama		%	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00							
IKSK.11.5104.1.4	Persentase dosen pendidikan agama Hindu di PTU yang dibina dalam moderasi beragama		%	25.00	40.00	55.00	70.00	85.00	100.00							
SK.11.5104.2 Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif																
IKSK.11.5104.2.1	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring		%	NA	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00							
SK.11.5104.3 Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan																
IKSK.11.5104.3.1	Persentase dosen PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	30.00	32.00	35.00	40.00	45.00	50.00							
IKSK.11.5104.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	20.00	22.00	25.00	30.00	35.00	40.00							
SK.11.5104.4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan																
IKSK.11.5104.4.1	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi		%	50.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00							
SK.11.5104.5 Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat																
IKSK.11.5104.5.1	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/ Bidikmisi pada PTK		%	10.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.11.5104.5.2	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA pada PTK		%	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00						
IKSK.11.5104.5.3	Persentase mahasiswa PTK berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3		%	NA	NA	3.00	5.00	7.00	10.00						
SK.11.5104.6		Meningkatnya kualitas LPTK													
IKSK.11.5104.6.1	Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG		%	7.00	10.00	20.00	25.00	30.00	40.00						
IKSK.11.5104.6.2	Persentase LPTK yang terrevitalisasi		%	7.00	10.00	20.00	25.00	30.00	40.00						
SK.11.5104.7		Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan													
IKSK.11.5104.7.1	Jumlah PTK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	13	13	13	13	13	13						
SK.11.5104.8		Meningkatnya budaya mutu pendidikan													
IKSK.11.5104.8.1	Persentase PTK yang menerapkan budaya mutu		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.11.5104.8.2	Persentase mahasiswa PTK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	60.00						
SK.11.5104.9		Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pada satuan pendidikan													
IKSK.11.5104.9.1	Persentase PTK yang memperoleh pembinaan dalam SPMI		%	30.00	30.00	50.00	70.00	80.00	100.00						
SK.11.5104.10		Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan													
IKSK.11.5104.10.1	Persentase anggaran PNPB dan PNPB-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan		%	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70						
IKSK.11.5104.10.2	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN		%	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
SK.11.5104.11		Meningkatnya Program Studi PTK Berstandar Internasional													
IKSK.11.5104.11.1	Persentase Program Studi PTK yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional		%	NA	NA	NA	NA	0.08	0.08						
IKSK.11.5104.11.2	Persentase PTK yang melakukan kolaborasi internasional		%	NA	NA	5.00	8.00	10.00	10.00						
IKSK.11.5104.11.3	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran		%	NA	NA	8.00	10.00	12.00	14.00						
IKSK.11.5104.11.4	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi		%	NA	NA	8.00	10.00	12.00	14.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.11.5104.11.5	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat		%	NA	NA	NA	8.00	10.00	12.00							
SK.11.5104.12	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian															
IKSK.11.5104.12.1	Persentase hasil penelitian PTK yang memperoleh HAKI		5.00	10.00	12.00	15.00	17.00	20.00	20.00							
IKSK.11.5104.12.2	Persentase hasil penelitian PTK yang menghasilkan Hak Paten		NA	5.00	7.00	10.00	12.00	15.00	15.00							
SK.11.5104.13	Meningkatnya kualitas lulusan PTK															
IKSK.11.5104.13.1	Persentase lulusan yang tepat waktu		%	70.00	70.00	80.00	90.00	95.00	100.00							
IKSK.11.5104.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa		Tahun	4	4	4	4	4	4							
025.12-PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA		PUSAT - DAERAH								269,782	461,948	501,438	544,541	591,603	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	
SP.12.1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Buddha															
IKSP.12.1.1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Buddha		Nilai	1:2	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4							
IKSP.12.1.2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal		%	45,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00							
SP.12.2	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Buddha melalui pendekatan moderasi beragama															
IKSP.12.2.1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan		%	NA	NA	12,50	28,57	60,00	100,00							
SP.12.3	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama															
IKSP.12.3.1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran		Nilai	80,00	86,00	86,50	87,50	88,50	89,50							
SP.12.4	Menurunkan aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama															
IKSP.12.4.1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan		%	NA	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00							
SP.12.5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan															
IKSP.12.5.1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
IKSP.12.5.2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP12.6 Meningkatkan kualitas jumlah penerimaan dana sosial keagamaan															
IKSP:12.6.1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana paramitha		%	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00						
SP12.7 Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat															
IKSP:12.7.1	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKB/PTU yang bermuatan moderasi beragama		Nilai	NA	NA	79,95	80,55	81,55	82,55						
SP12.8 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan															
IKSP:12.8.1	Persentase guru bersertifikat pendidik		%	54,00	55,00	57,00	60,00	65,00	70,00						
IKSP:12.8.2	Persentase dosen bersertifikat pendidik		%	60,00	62,00	65,00	67,00	69,00	70,00						
IKSP:12.8.3	Persentase dosen berkualifikasi S3		%	12,00	15,00	20,00	25,00	30,00	25,00						
SP12.9 Meningkatkan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan															
IKSP:12.9.1	Persentase peningkatan siswa pada Nava Dhammasekha		%	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
IKSP:12.9.2	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKB		%	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00						
SP12.10 Meningkatkan jumlah guru yang memenuhi SNP															
IKSP:12.10.1	Persentase Provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SP12.11 Meningkatkan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan															
IKSP:12.11.1	Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul		%	70,00	70,00	75,00	83,00	92,00	100,00						
IKSP:12.11.2	Persentase PTK yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan		%	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SP12.12 Meningkatkan kualitas PTKB yang bereputasi internasional															
IKSP:12.12.1	Persentase PTKB yang memperoleh peringkat reputasi internasional		%	NA	NA	NA	NA	NA	50,00						
IKSP:12.12.2	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK		%	NA	NA	0,11	0,10	0,43	0,75						
SP12.13 Meningkatkan kualitas lulusan PTKB yang diterima di dunia kerja															
IKSP:12.13.1	Persentase PTKB yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan		%	NA	NA	NA	83,33	83,33	91,67						
IKSP:12.13.2	Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK														
	a. S1		Nilai	NA	3,39	3,39	3,40	3,40	3,40						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. S2		Nilai	NA	3.54	3.54	3.55	3.55	3.55						
	c. S3		Nilai	NA	NA	3.40	3.45	3.45	3.50						
IKSP:12.13.3	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan		Bulan	4	3	3	2	2	2						
SP:12.14 Meningkatkan kualitas pemanfaatan penelitian															
IKSP:12.14.1	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional		%	NA	NA	10,00	15,00	20,00	25,00						
SP:12.15 Meningkatkan tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha yang efektif dan akuntabel															
IKSP:12.15.1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan		%	69.70	72.00	75.00	77.00	80.00	82.00						
IKSP:12.15.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Nilai	79.67	80.00	81.00	83.00	84.00	85.00						
IKSP:12.15.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	75.15	78.00	80.00	83.00	85.00	87.00						
IKSP:12.15.4	Nilai Maturitas SPIP		Nilai	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00						
IKSP:12.15.5	Indeks Profesionalitas ASN		Nilai	NA	65.00	70.00	75.00	77.00	80.00						
2145-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha										29,060	111,393	122,533	134,786	148,264	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
SK.12.2145.1 Meningkatkan kualitas penyuluhan agama Buddha															
IKSK.12.2415.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	70.00	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00						
IKSK.12.2415.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.12.2415.1.3	Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi		Orang	50	50	60	70	80	100						
IKSK.12.2415.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	4,288	4,288	4,288	4,288	4,288	4,288						
SK.12.2145.2 Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Buddha															
IKSK.12.2415.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Buddha		%	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						
IKSK.12.2415.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Buddha yang diselenggarakan		Lokasi	36.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00						
SK.12.2145.3 Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama															
IKSK.12.2145.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00						
SK.12.2145.4 Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran															
IKSK.12.2145.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.12.2145.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	12.00	15.00	20.00	25.00	35.00	40.00							
SK.12.2145.5		Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik														
IKSK.12.2145.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	12	12	12	12	12	12							
SK.12.2145.6		Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														
IKSK.12.2145.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Swayamwara Tripitaka Gatha (STG), Sippa Dhamma Samajja dll)		Kegiatan	NA	1	NA	NA	1	NA							
SK.12.2145.7		Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama														
IKSK.12.2145.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	NA	NA	5	7	9	11							
IKSK.12.2145.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	NA	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00							
SK.12.2145.7		Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat														
IKSK.12.2145.7.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	NA	1	2	3	4	5							
SK.12.2145.8		Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi														
IKSK.12.2145.8.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	1	2	2	2	2	2							
SK.12.2145.9		Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.12.2145.9.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	3,125	3,000	20,000	20,000	20,000	20,000							
IKSK.12.2145.9.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	20,000	5,000	20,000	25,000	30,000	35,000							
IKSK.12.2145.9.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							
SK.12.2145.10		Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga														
IKSK.12.2145.10.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya		Pasangan	1,200	500	1,000	1,500	2,000	2,500							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.12.2145.11 Meningkatkan pemberdayaan lembaga dana paramitha															
IKSK.12.2145.11.1	Jumlah lembaga dana paramitha yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	4	5	5	5	5	5						
2146-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha										25,193	44,212	48,634	53,497	58,847	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
SK.12.2146.1 Meningkatkan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.12.2146.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
SK.12.2146.2 Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.12.2146.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00						
IKSK.12.2146.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
SK.12.2146.3 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.12.2146.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
IKSK.12.2146.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	80,00	80,00	82,00	85,00	87,00	90,00						
IKSK.12.2146.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						
SK.12.2146.4 Meningkatkan kematangan pengendalian intern															
IKSK.12.2146.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	60,00	70,00	75,00	75,00	80,00						
IKSK.12.2146.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00						
SK.12.2146.5 Meningkatkan ASN yang profesional															
IKSK.12.2146.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.12.2146.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensinya		%	60.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00							
4012-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha										63,870	110,246	121,271	133,398	146,738	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	
SK.11.4012.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama																
IKSK.11.4012.1.1	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	55.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00							
IKSK.11.4012.1.2	Persentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
IKSK.114012.1.3	Persentase siswa beragama Buddha di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Buddha yang bermuatan moderasi beragama		%	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00							
SK.12.4012.2 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan																
IKSK.12.4012.2.1	Persentase Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	5.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00							
IKSK.12.4012.2.2	Persentase Nava Dhammasekha di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00							
IKSK.12.4012.2.3	Persentase Sekolah Minggu Buddha/ Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	6.00	25.00	26.00	27.00	28.00	30.00							
SK.12.4012.3 Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah																
IKSK.12.4012.3.1	Jumlah Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Lembaga	NA	NA	2	3	4	5							
SK.12.4012.4 Terpenuhi jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal																
IKSK.12.4012.4.1	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	10.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00							
IKSK.12.4012.4.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.12.4012.5 Meningkatkan kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan															
IKSK.12.4012.5.1	Persentase Guru Pendidikan Agama Buddha yang mengikuti PPG		%	NA	0.07	8.00	9.00	10.00	11.00						
5105-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha										124,784	134,100	140,805	147,845	155,238	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
SK.12.5105.1 Meningkatkan kualitas administrasi pendidikan keagamaan															
IKSK.12.5105.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	3	3	3	3	3	3						
IKSK.12.5105.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	NA	NA	1	NA	1	NA						
IKSK.12.5105.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan		Unit	1	1	1	1	1	1						
IKSK.12.5105.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen	6	6	6	6	6	6						
5106-Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha										26,875	61,996	68,196	75,015	82,517	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
SK.12.5106.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama															
IKSK.12.5106.1.1	Persentase mahasiswa PTK yang dibina dalam moderasi beragama		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.12.5106.1.2	Persentase dosen PTK yang dibina dalam moderasi beragama		%	10.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00						
IKSK.11.5104.1.3	Persentase mahasiswa beragama Buddha di PTU yang memperoleh pendidikan agama Buddha bermuatan moderasi beragama		%	20.00	20.00	25.00	30.00	40.00	50.00						
IKSK.11.5104.1.4	Persentase dosen pendidikan agama Buddha di PTU yang dibina dalam moderasi beragama		%	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
SK.12.5106.2 Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif															
IKSK.12.5106.2.1	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring		%	NA	7.41	12.50	16.67	15.91	23.40						
SK.12.5106.3 Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan															
IKSK.12.5106.3.1	Persentase Dosen PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	45.00	45.00	55.00	55.00	55.00	60.00						
IKSK.12.5106.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	10.00	10.00	15.00	25.00	25.00	25.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.12.5106.4 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.12.5106.4.1	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi		%	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00						
SK.12.5106.5 Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat															
IKSK.12.5106.5.1	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi pada PTK		%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	30,00						
IKSK.12.5106.5.2	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA pada PTK		%	10,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00						
IKSK.12.5106.5.3	Persentase mahasiswa PTK berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3		%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
IKSK.12.5106.5.4	Jumlah PTK yang diafirmasi dalam peningkatan status		Lembaga	NA	NA	2	1	NA	NA						
SK.12.5106.6 Meningkatkan kualitas LPTK															
IKSK.12.5106.6.1	Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.12.5106.6.2	Persentase LPTK yang direvitalisasi		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.12.5106.7 Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan															
IKSK.12.5106.7.1	Jumlah PTK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	2	4	4	2	3	5						
IKSK.12.5106.7.2	Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka		%	NA	NA	NA	44,00	47,00	55,00						
SK.12.5106.8 Meningkatkan budaya mutu pendidikan															
IKSK.12.5106.8.1	Persentase PTK yang menerapkan budaya mutu		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.12.5106.8.2	Persentase mahasiswa PTK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	10,00	16,51	17,62	19,18	19,21	19,37						
SK.12.5106.9 Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pada satuan pendidikan															
IKSK.12.5106.9.1	Persentase PTK yang memperoleh pembinaan dalam SPMI		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.12.5106.10 Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan															
IKSK.12.5106.10.1	Persentase anggaran PNBPN dan PNBPN-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan		%	0,20	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24						
IKSK.12.5106.10.2	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.12.5106.11		Meningkatnya Program Studi PTK Berstandar Internasional													
IKSK.12.5106.11.1	Persentase PTK yang melakukan kolaborasi internasional		NA	17,00	20,00	25,00	30,00	40,00	40,00						
IKSK.12.5106.11.2	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran		NA	NA	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
IKSK.12.5106.11.3	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi		NA	NA	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
IKSK.12.5106.11.4	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat		NA	NA	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
SK.12.5106.12		Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian													
IKSK.12.5106.12.1	Persentase hasil penelitian PTK yang memperoleh HAKI		%	NA	5,67	8,38	10,75	11,00	13,74						
IKSK.12.5106.12.2	Persentase hasil penelitian PTK yang menghasilkan Hak Paten		%	NA	1,42	2,40	3,76	5,00	6,16						
SK.12.5106.13		Meningkatnya kualitas lulusan PTK													
IKSK.12.5106.13.1	Persentase lulusan PTK yang tepat waktu		%	80,00	83,41	84,42	98,88	98,70	98,70						
IKSK.12.5106.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa		Tahun	4	4	4	4	4	4						
025.13-PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA		PUSAT - DAERAH								53,340	180,146	182,015	182,972	184,537	Sekretariat Jenderal
SP.13.1		Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama													
IKSP.13.1.1	Persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama		%	97,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSP.13.1.2	Persentase konflik antarumat beragama yang diselesaikan		%	80,00	81,00	87,00	88,00	90,00	95,00						
SP.13.2		Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Khonghucu													
IKSP.13.2.1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Khonghucu		Nilai	1:9	1:9	1:9	1:9	1:9	1:9						
IKSP.13.2.2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Khonghucu		%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP13.3 Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Khonghucu melalui pendekatan moderasi beragama															
IKSP.2.3.1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan		%	NA	75,00	85,00	95,00	95,00	95,00						
SP13.4 Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama															
IKSP.13.4.1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran		Nilai	NA	70,00	77,00	80,00	85,00	85,77						
SP13.5 Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama															
IKSP.13.5.1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan		%	NA	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00						
SP13.6 Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan															
IKSP.13.6.1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital		%	NA	60,00	60,00	70,00	80,00	90,00						
IKSP.13.6.2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SP13.7 Meningkatnya jumlah penerimaan dana sosial keagamaan															
IKSP.13.7.1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana kebajikan		%	NA	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00						
SP13.8 Meningkatnya kualitas pendidikan agama Khonghucu															
IKSP.13.8.1	Persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat pendidik		%	NA	60,00	70,00	60,00	70,00	60,00						
2130-Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu										3.020	4.725	4.884	4.968	5.102	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
SK.13.2130.1 Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Khonghucu															
IKSK.13.2130.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	NA	70	72	73	74	75						
IKSK.13.2130.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.13.2130.1.3	Jumlah penyiari agama yang dibina kompetensi		Orang	170	171	171	171	171	171						
IKSK.13.2130.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	NA	20	20	25	25	25						
SK.13.2130.2 Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Khonghucu															
IKSK.13.2130.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Khonghucu		%	NA	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.13.2130.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Khonghucu yang diselenggarakan		Kegiatan	NA	NA	20	20	20	20						
SK.13.2130.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama														
IKSK.13.2130.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.13.2130.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran														
IKSK.13.2130.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50						
IKSK.13.2130.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	NA	NA	10,00	20,00	30,00	40,00						
SK.13.2130.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik														
IKSK.13.2130.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	NA	1	1	2	2	3						
SK.13.2130.6	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat														
IKSK.13.2130.6.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	NA	5	5	7	7	8						
SK.13.2130.7	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi														
IKSK.13.2130.7.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan, sekaten, dll)		Kegiatan	NA	1	1	1	1	1						
SK.13.2130.8	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.13.2130.8.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	26	26	28	28	28	28						
IKSK.13.2130.8.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	1150	2090	2299	2529	2782	3060						
IKSK.13.2130.8.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	NA	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
SK.13.2130.9	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana kebajikan														
IKSK.13.2130.9.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan dana kebajikan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	NA	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
5620-Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama									43,953	167,280	168,899	169,724	171,078	Pusat Kerukunan Umat Beragama	
SK.13.5620.1 Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama															
IKSK.13.5620.1.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.13.5620.1.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina		Orang	8,586	8,863	9,254	9,339	9,424	9,543						
IKSK.13.5620.1.3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina		Lokasi	3,400	78	112	112	112	112						
SK.13.5620.2 Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa															
IKSK.13.5620.2.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi		Lembaga	191	191	191	191	191	204						
IKSK.13.5620.2.2	Jumlah forum dialog antarumat beragama yang diselenggarakan		Kegiatan	82	82	82	82	164	164						
SK.13.5620.3 Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)															
IKSK.13.5620.3.1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP		%	96,00	96,00	97,00	100,00	100,00	100,00						
SK.13.5620.4 Menguatnya dialog lintas agama dan budaya															
IKSK.13.5620.4.1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya		Kegiatan	668	668	707	1219	1253	1258						
5621-Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu									6,367	8,141	8232	8280	8,357	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	
SK.13.5621.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama															
IKSK.13.5621.1.1	Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.13.5621.1.2	Persentase mahasiswa beragama Khonghucu di PTU yang memperoleh pendidikan agama Khonghucu bermuatan moderasi beragama		%	NA	NA	82.00	84.00	86.00	88.00						
IKSK.13.5621.1.3	Persentase dosen pendidikan agama Khonghucu di PTU yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	NA	85.00	90.00	95.00	100.00						
SK.13.5621.2 Meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama Khonghucu															
IKSK.13.5621.2.1	Persentase Guru Pendidikan Agama Khonghucu yang mengikuti pembinaan kompetensi		%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
025.14-PROGRAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL		PUSAT									124,105	163,285	161,683	161,346	162,635	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
SP.14.1 Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal																
IKSP.14.1.1	Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan		%	NA	59.00	60.00	63.00	66.00	72.00							
IKSP.14.1.2	Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan		%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
SP.14.2 Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal																
IKSP.14.2.1	Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM		%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
IKSP.14.2.2	Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM		%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
SP.14.3 Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel																
IKSP.14.3.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan		%	65.00	70.00	80.00	90.00	95.00	100.00							
IKSP.14.3.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Nilai	72.00	75.00	78.00	79.00	80.00	81.00							
IKSP.14.3.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	65.00	67.00	70.00	74.00	78.00	80.00							
IKSP.14.3.4	Nilai Maturitas SPIP		Nilai	NA	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00							
IKSP.14.3.5	Indeks Profesionalitas ASN		Nilai	72.00	74.00	76.00	81.00	82.00	83.00							
2105-Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal											3,000	4,315	5,175	5,950	6,545	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal
SK.14.2105.1 Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal																
IKSK.14.2105.1.1	Persentase produk yang tersertifikasi		%	NA	59.00	60.00	63.00	66.00	72.00							
IKSK.14.2105.1.2	Persentase produk luar negeri yang teregistrasi		%	NA	85.00	90.00	90.00	95.00	100.00							
IKSK.14.2105.1.3	Persentase produk yang terverifikasi		%	NA	59.00	60.00	63.00	66.00	72.00							
IKSK.14.2105.1.4	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi		%	NA	43.00	46.00	49.00	52.00	55.00							
IKSK.14.2105.1.5	Persentase auditor halal yang teregistrasi		%	NA	28.00	31.00	34.00	37.00	41.00							
2108-Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal											3,030	4,215	4,415	5,888	9,094	Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
SK.14.2108.1 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal																
IKSK.14.2108.1.1	Persentase pelaku usaha yang terbina		%	NA	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.14.2108.1.2	Persentase auditor halal yang terbina		%	NA	38.15	41.00	44.00	46.50	49.43						
IKSK.14.2108.1.3	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terbina		%	NA	43.00	46.00	49.00	52.00	55.00						
IKSK.14.2108.1.4	Persentase penyelia halal yang terbina		%	NA	43.00	46.00	49.00	52.00	55.00						
IKSK.14.2108.1.5	Persentase Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang terbina		%	NA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00						
IKSK.14.2108.1.6	Persentase sertifikat halal yang terawasi		%	NA	43.00	46.00	49.00	52.00	55.00						
IKSK.14.2108.1.7	Persentase label halal yang terawasi		%	NA	43.00	46.00	49.00	52.00	55.00						
IKSK.14.2108.1.8	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terawasi		%	NA	43.00	46.00	49.00	52.00	55.00						
IKSK.14.2108.1.9	Persentase Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang terawasi		%	NA	14.00	16.00	17.00	18.00	18.00						
2110-Kerja Sama dan Standardisasi Halal										2,950	6,195	6,504	6,831	7,173	Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal
SK.14.2110.1 Meningkatkan kualitas kerja sama dan standardisasi halal															
IKSK.14.2110.1.1	Persentase naskah kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang tersusun		%	NA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						
IKSK.14.2110.1.2	Persentase standardisasi dan penilaian kesesuaian penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang tersusun		%	NA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						
IKSK.14.2110.1.3	Persentase kesepakatan kerja sama Lembaga Halal Luar Negeri		%	NA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						
2111-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRJPH										115,125	148,560	145,589	142,677	139,823	Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
SK.1.2111.1 Meningkatkan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.1.2111.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.2111.2 Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.1.2111.2.1	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP		%	60.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00						
IKSK.1.2111.2.2	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00						
SK.1.2111.3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.1.2111.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.1.2111.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	86.00	90.00	92.00	93.00	94.00	95.00						
IKSK.1.2111.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
SK.1.2111.4 Meningkatnya kematangan pengendalian intern															
IKSK.1.2111.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00						
IKSK.1.2111.4.2	Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel		%	60.00	65.00	70.00	80.00	90.00	100.00						
SK.1.2111.5 Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.1.2111.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	60.00	70.00	100.00	100.00	100.00						
IKSK.1.2111.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	NA	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00						

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FACHRUL RAZI

Lampiran

Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

1. Oman Faturrahman
2. Hadi Rahman
3. M. Nur Kholis Setiawan
4. Nizar
5. Ali Rokhmad
6. Amich Alhumami
7. Sularsono
8. Vivi Andriani
9. Suprpto Budi Nugroho
10. Endang Sulastri
11. Canggih Hangga Wicaksono
12. Malul Azzam
13. Ida Nor Qosim
14. Muhamad Iqbal
15. Najiburrohman AM
16. Brain Tawazan
17. Risnaliati Bona
18. Yudi Okriansyah
19. Supriyadi
20. Agus Sunaryo
21. Muh. Nanang Qodri
22. Retni Rahmi
23. Syamsudin
24. Arief Fadillah
25. Muamar Haikal
26. Rianti Grahadiani
27. Sri Yuyu Ningsih
28. Imam Syaukani
29. Lukman Hakim
30. Ridho Fitrah Hyzkia
31. Rosidin
32. Ridwan
33. Slamet
34. Ihsan Bayu Merdeka
35. Tetra Adi Siswanto
36. Yohanes Dwimbo K
37. Ida Bagus Ketut Drana Arimbawa
38. Albert Kumala
39. Andewi Susetyo
40. Ade Sugianto
41. Hefson Aras
42. Sofyan Yamin
43. Anik Farida
44. Muhammad Adlin Sila
45. Haris Burhani
46. Muhammad Murtadlo
47. Chuzaemi Abidin
48. Aliefosra Nur
49. Emma Nurmawati Hadian





